

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 -2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

29. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
31. Kabupaten/kota sekitar adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
 - a. Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. RTRW;
 - c. KLHS;
 - d. Pengembangan Wilayah Terpadu; dan
 - e. RPJMD kabupaten/kota Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD yang memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
 - k. BAB XI : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;

- b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunandaerah ;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SLAMET PRIHANTONO



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (4 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain “menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.”

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan enam misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas; dan
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqulkarimah.

Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga RPJMD Kota Pekalongan 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016 – 2021 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2016-2021 dan pendekatan *bottom-up* dalam Musrenbang RPJMD.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016 – 2021 ini telah mendasari pemikiran bahwa RPJM-D yang akan disusun ini merupakan periode ketiga dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJP-D Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini berpedoman pada dokumen RPJPD tersebut.

Secara umum, RPJMD Kota Pekalongan 2016 – 2021 ini disusun dalam 11 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, Bab IV membahas Analisis Isu Strategis, Bab V membahas Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan, Bab VI membahas Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VII akan membahas Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII akan membahas Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, Bab IX membahas Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Bab X membahas Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, dan Bab XI Penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 16 Agustus 2016

Walikota Pekalongan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.2.1. Landasan Idiil	I-3
1.2.2. Landasan Konstitusional	I-3
1.2.3. Landasan Operasional	I-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015 - 2019	I-7
1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018	I-8
1.3.3. Amanat RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025	I-12
1.3.4. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029	I-16
1.3.5. Hubungan Antar Dokumen	I-18
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-23
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	I-24
1.5.1. Maksud	I-24
1.5.2. Tujuan	I-24
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-1
2.1.2 Topografi dan Jenis Tanah	II-4
2.1.3 Geologi	II-5
2.1.4 Hidrologi	II-6
2.1.5 Klimatologi	II-7
2.1.6 Penggunaan Lahan	II-8
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.9 Aspek Demografi	II-18
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-21
2.2.1. Pertumbuhan PDRB	II-21
2.2.2. Inflasi	II-24
2.2.3. PDRB per Kapita	II-25
2.2.4. Indeks Gini	II-29
2.2.5. Penduduk Diatas Kemiskinan	II-30
2.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja	II-31
2.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani	II-31
2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia	II-32
2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-33

2.2.10.	Harapan lama Sekolah	II-34
2.2.11.	Angka Usia Harapan Hidup	II-34
2.2.12.	Pengeluaran Per Kapita	II-35
2.2.13.	Angka Partisipasi Kasar	II-36
2.2.14.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-36
2.2.15.	Angka Partisipasi Murni (APM)	II-37
2.2.16.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	II-38
2.2.17.	Angka Kematian Balita (AKABA)	II-39
2.2.18.	Persentase Balita Gizi Buruk	II-39
2.2.19.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-40
2.2.20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-40
2.2.21.	Kebudayaan	II-41
2.2.22.	Pemuda dan Olahraga	II-42
2.3.	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-43
2.3.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-43
2.3.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-68
2.3.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-91
2.3.4.	Penunjang Urusan Pemerintahan	II-100
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-105
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-105
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah	II-105
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	II-109
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-112
2.4.5.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	II-113
2.5.	ANALISIS GAMBARAN UMUM	II-132
2.5.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-134
2.5.2.	Aspek Pelayanan Umum	II-136
2.5.3.	Aspek Daya Saing	II-138
BAB III.	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1.	KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010-2015	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah	III-21
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2010-2015	III-25
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-28
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-29
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	III-31
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-32
3.3.2.	Proyeksi Data Masa Lalu	III-32
3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-36
3.3.4.	Kebijakan Alokasi Anggaran	III-37
BAB IV.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2.	ISU STRATEGIS	IV-6
4.2.1.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	IV-6
4.2.2.	Tata Kelola Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	IV-9
4.2.3.	Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah	IV-10

4.2.4.	Peningkatan Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan	IV-12
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	VISI	V-1
5.1.1	Kota Pekalongan	V-1
5.1.2	Sejahtera	V-2
5.1.3	Mandiri	V-3
5.1.4	Berbudaya	V-3
5.1.5	Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas	V-4
5.2	MISI	V-5
5.2.1	Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan	V-5
5.2.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	V-5
5.2.3	Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan	V-5
5.2.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan	V-6
5.2.5	Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas	V-6
5.2.6	Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah	V-6
5.3	FALSAFAH “BRAYAN URIP”	V-11
5.3.1	Nilai	V-12
5.3.2	Asas	V-12
5.3.3	Semangat	V-13
5.3.4	Indikator Pelaksanaan Brayana Urip	V-14
5.4	TUJUAN DAN SASARAN	V-14
5.4.1	Misi 1 : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	V-14
5.4.2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	V-15
5.4.3	Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan	V-16
5.4.4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan	V-16
5.4.5	Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas	V-17
5.4.6	Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah	V-17
BAB VI.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1	SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN	VI-1
6.1.1	RPJPD Kota Pekalongan	VI-1
6.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019	VI-5
6.1.3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Sekitar	VI-8
6.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-10
6.2.1	Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan	VI-10
6.2.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat	VI-11
6.2.3	Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan	VI-15
6.2.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan	VI-17
6.2.5	Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis Komunitas	VI-19

6.2.6	Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah	VI-20
6.2.7	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan	VI-21
6.3	PENGEMBANGAN WILAYAH	VI-33
6.3.1	Kondisi Pengembangan Wilayah	VI-33
6.3.2	Arah Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan	VI-40
6.3.3	Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kecamatan	VI-44
BAB VII.	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
7.1	KEBIJAKAN UMUM	VII-1
7.2	PROGRAM PEMBANGUNAN	VII-3
BAB VIII.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
8.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	VIII-1
8.2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	VIII-7
8.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	VIII-14
8.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	VIII-18
BAB IX.	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X.	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSAAAN	X-1
10.1	PEDOMAN TRANSISI	X-1
10.2.	KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
BAB XI.	PENUTUP	XI-1
DAFTAR PUSTAKA		1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan -----	I-20
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan -----	II-3
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2009-2015 -----	II-8
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2009-2015 -----	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 -----	II-18
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-18
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-19
Tabel 2.7	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2010-2015 -----	II-19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) -----	II-20
Tabel 2.9	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010—2014 -----	II-22
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011—2014 -----	II-23
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), Kota Pekalongan tahun 2010—2014 -----	II-25
Tabel 2.12	Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-31
Tabel 2.13	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-31
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2010-2015 -----	II-33
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 -----	II-36
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2014 -----	II-36
Tabel 2.17	Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 -----	II-37
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 -----	II-38
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 -----	II-38
Tabel 2.20	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 -----	II-38
Tabel 2.21	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-41
Tabel 2.22	Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-42
Tabel 2.23	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-42
Tabel 2.24	Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-43
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-43

Tabel 2.26	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-44
Tabel 2.27	Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2015-----	II-44
Tabel 2.28	Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-45
Tabel 2.29	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-45
Tabel 2.30	Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2015-----	II-46
Tabel 2.31	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2015-----	II-46
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 Per 1.000 Penduduk -----	II-47
Tabel 2.33	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-47
Tabel 2.34	Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-48
Tabel 2.35	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-48
Tabel 2.36	Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015--	II-49
Tabel 2.37	Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik -----	II-49
Tabel 2.38	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2010-2014-----	II-50
Tabel 2.39	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan-----	II-50
Tabel 2.40	Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan-----	II-50
Tabel 2.41	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014 -----	II-51
Tabel 2.42	Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-51
Tabel 2.43	Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 -----	II-51
Tabel 2.44	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014-----	II-52
Tabel 2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014-----	II-52
Tabel 2.46	Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-52
Tabel 2.47	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 -----	II-53
Tabel 2.48	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 (Persen)-----	II-53
Tabel 2.49	Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-54
Tabel 2.50	Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-54
Tabel 2.51	Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-55
Tabel 2.52	Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 -----	II-55
Tabel 2.53	Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014-----	II-56

Tabel 2.54	Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 -----	II-56
Tabel 2.55	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 -----	II-56
Tabel 2.56	Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan -----	II-57
Tabel 2.57	Persentase Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-59
Tabel 2.58	Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015-----	II-59
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-61
Tabel 2.60	Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-61
Tabel 2.61	Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-61
Tabel 2.62	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-62
Tabel 2.63	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014----	II-62
Tabel 2.64	Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-63
Tabel 2.65	Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2010-2015 -----	II-63
Tabel 2.66	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-63
Tabel 2.67	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2010-2014 -----	II-64
Tabel 2.68	Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2010-2014-----	II-64
Tabel 2.69	Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan -----	II-64
Tabel 2.70	Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-65
Tabel 2.71	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan -----	II-65
Tabel 2.72	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan -----	II-66
Tabel 2.73	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-66
Tabel 2.74	Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-66
Tabel 2.75	Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 -----	II-67
Tabel 2.76	Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015-----	II-68
Tabel 2.77	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2015--	II-68
Tabel 2.78	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-69
Tabel 2.79	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan -----	II-69
Tabel 2.80	Persentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-70
Tabel 2.81	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-71
Tabel 2.82	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-73
Tabel 2.83	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-73

Tabel 2.84	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-74
Tabel 2.85	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-74
Tabel 2.86	Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 -----	II-75
Tabel 2.87	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-76
Tabel 2.88	Penanganan Sampah di Kota Pekalongan -----	II-77
Tabel 2.89	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-79
Tabel 2.90	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-80
Tabel 2.91	Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-80
Tabel 2.92	Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-80
Tabel 2.93	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-81
Tabel 2.94	VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura -----	II-82
Tabel 2.95	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-82
Tabel 2.96	Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-82
Tabel 2.97	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-83
Tabel 2.98	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-83
Tabel 2.99	Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-83
Tabel 2.100	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2014 -----	II-84
Tabel 2.101	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-84
Tabel 2.102	Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-84
Tabel 2.103	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014 -----	II-85
Tabel 2.104	Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-85
Tabel 2.105	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2014 -----	II-85
Tabel 2.106	Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-86
Tabel 2.107	Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2010-2014 -----	II-86
Tabel 2.108	Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 -----	II-86
Tabel 2.109	Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015 -----	II-87
Tabel 2.110	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-87
Tabel 2.111	Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-88
Tabel 2.112	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-88
Tabel 2.113	Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-88
Tabel 2.114	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-89

Tabel 2.115	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-90
Tabel 2.116	Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-90
Tabel 2.117	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 --	II-90
Tabel 2.118	Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (kg) -----	II-92
Tabel 2.119	Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg)-----	II-92
Tabel 2.120	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-92
Tabel 2.121	Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (ton) -----	II-93
Tabel 2.122	Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-93
Tabel 2.123	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-94
Tabel 2.124	Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014-----	II-94
Tabel 2.125	Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-95
Tabel 2.126	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ----	II-95
Tabel 2.127	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 -----	II-95
Tabel 2.128	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-96
Tabel 2.129	Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010-2011 -----	II-97
Tabel 2.130	Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010-2011 -----	II-97
Tabel 2.131	Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015-----	II-98
Tabel 2.132	Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 -----	II-98
Tabel 2.133	Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-98
Tabel 2.134	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-99
Tabel 2.135	Alokasi dan Lokasi Transmigran Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 --	II-100
Tabel 2.136	Jumlah Survei Kepuasan Terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan-----	II-103
Tabel 2.137	Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan -----	II-103
Tabel 2.138	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 -----	II-106
Tabel 2.139	Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 -----	II-109
Tabel 2.140	Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2014-----	II-109
Tabel 2.141	Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012 -----	II-110
Tabel 2.142	Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-114
Tabel 2.143	Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-114
Tabel 2.144	Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-115
Tabel 2.145	Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-116

Tabel 2.146	Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-117
Tabel 2.147	Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ----	II-118
Tabel 2.148	Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-118
Tabel 2.149	Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-119
Tabel 2.150	Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis untuk Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-120
Tabel 2.151	Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-121
Tabel 2.152	Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-122
Tabel 2.153	Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-122
Tabel 2.154	Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-124
Tabel 2.155	Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-124
Tabel 2.156	Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-125
Tabel 2.157	Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-125
Tabel 2.158	Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-126
Tabel 2.159	Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-126
Tabel 2.160	Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014 --	II-127
Tabel 2.161	Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-128
Tabel 2.162	Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-128
Tabel 2.163	Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-129
Tabel 2.164	Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Teknopreneur, di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-129
Tabel 2.165	Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-130
Tabel 2.166	Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-130

Tabel 2.167	Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 -----	II-131
Tabel 2.168	Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014----	II-131
Tabel 2.169	Perkembangan Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-131
Tabel 2.170	Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014-----	II-132
Tabel 3.1	Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 – 2015-----	III-2
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-4
Tabel 3.3	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-4
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-5
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-5
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-6
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-6
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-7
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010- 2015-----	III-7
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-7
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-8
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-8
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-9
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-9
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015-----	III-9
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010- 2015 -----	III-10
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-10
Tabel 3.18	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010– 2015 -----	III-12
Tabel 3.19	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015 -----	III-13
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015 -----	III-13
Tabel 3.21	Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015 -----	III-14
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawaipada Belanja Tidak Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015 -----	III-14

Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Belanja Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015-----	III-14
Tabel 3.24	Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015 -----	III-15
Tabel 3.25	Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-15
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-16
Tabel 3.27	Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-16
Tabel 3.28	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-16
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-17
Tabel 3.30	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-17
Tabel 3.31	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010– 2015 -----	III-18
Tabel 3.32	Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-18
Tabel 3.33	Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015-----	III-19
Tabel 3.34	Rincian Estimasi dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-19
Tabel 3.35	Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan kembali investasi Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-19
Tabel 3.36	Rincian Estimasi dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-20
Tabel 3.37	Rincian Estimasi dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-20
Tabel 3.38	Rincian Estimasi dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-20
Tabel 3.39	Estimasi dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015 -----	III-21
Tabel 3.40	Neraca Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam milyar) -----	III-21
Tabel 3.41	Analisis Rasio Keuangan Kota Pekalongan -----	III-24
Tabel 3.42	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan-----	III-28
Tabel 3.43	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur-----	III-28
Tabel 3.44	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 s/d 2015 -----	III-29
Tabel 3.45	Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan (milyar Rp) -----	III-29
Tabel 3.46	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan (Milyar Rp)---	III-30
Tabel 3.47	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan (Rp. Milyar)-----	III-30
Tabel 3.48	Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2010-2015-----	III-31
Tabel 3.49	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pekalongan -----	III-32
Tabel 3.50	Proyeksi Pendapatan Daerah (milyar Rp) dan Rata-rata Pertumbuhan --	III-33
Tabel 3.51	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta prioritas utama (juta Rp) -----	III-35

Tabel 3.52	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Milyar Rp) -----	III-36
Tabel 3.53	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam miliar rupiah) -----	III-38
Tabel 3.54	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Milyar Rp) -----	III-38
Tabel 5.1	Target Pencapaian Indikator Visi Kota Pekalongan Tahun 2021 -----	V-10
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021 Visi : “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas” -----	V-18
Tabel 6.1	Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 -----	VI-23
Tabel 6.2	Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2014 -----	VI-37
Tabel 6.3	Sebaran Sarana Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2014 -----	VI-37
Tabel 6.4	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 -----	VI-39
Tabel 6.5	Konsep, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan -----	VI-43
Tabel 6.6	Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kecamatan -----	VI-45
Tabel 7.1	Kebijakan Umum, Program Pembangunan dan Program Prioritas Kota Pekalongan -----	VII-8
Tabel 7.2	Program Prioritas Menunjang Visi Misi -----	VII-36
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan -----	VIII-22
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan -----	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
Gambar 1.2	Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	I-17
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	II-2
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan	II-3
Gambar 2.3.	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan	II-4
Gambar 2.4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan.....	II-5
Gambar 2.5	Wilayah Sungai Pemali-Comal	II-6
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan	II-10
Gambar 2.7	Peta Rencana Pola Ruang.....	II-11
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan	II-17
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	II-20
Gambar 2.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014.....	II-21
Gambar 2.11	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014(%)	II-25
Gambar 2.12	Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	II-29
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014.....	II-30
Gambar 2.14	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2015 (%)	II-32
Gambar 2.15	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun).....	II-33
Gambar 2.16	Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	II-34
Gambar 2.17	Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015	II-35
Gambar 2.18	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014.....	II-35
Gambar 2.19	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-37
Gambar 2.20	Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	II-39
Gambar 2.21	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (%)	II-40
Gambar 2.22	Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013.....	II-40
Gambar 2.23	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	II-41
Gambar 2.24	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	II-68
Gambar 2.25	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014	II-70

Gambar 2.26	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2010-2015	II-71
Gambar 2.27	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-72
Gambar 2.28	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014	II-72
Gambar 2.29	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015.....	II-75
Gambar 2.30	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2010-2014.....	II-76
Gambar 2.31	Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	II-77
Gambar 2.32	Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	II-77
Gambar 2.33	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014	II-78
Gambar 2.34	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-78
Gambar 2.35	Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014	II-81
Gambar 2.36	Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	II-91
Gambar 2.37	Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014.....	II-96
Gambar 2.38	Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014.....	II-105
Gambar 2.39	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-106
Gambar 2.40	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-107
Gambar 2.41	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-107
Gambar 2.42	Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014	II-108
Gambar 2.43	Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-110
Gambar 2.44	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013.....	II-112
Gambar 2.45	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	II-113
Gambar 3.1	Proyeksi Pendapatan Daerah (milyar Rp)	III-34
Gambar 3.2	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (Milyar Rp).....	III-36
Gambar 3.3	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Milyar Rp)	III-37
Gambar 5.1	Ilustrasi Visi dan Misi.....	V-7
Gambar 5.2	Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021	V-11
Gambar 6.1	Keterkaitan Visi Misi Kota Pekalongan dengan Visi Misi Gubernur Jawa Tengah dan Presiden Republik Indonesia.....	VI-7
Gambar 6.2	Perkembangan Indkes Gini Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	VI-34
Gambar 6.3	Angka Kemiskinan Tahun 2010-2014	VI-35
Gambar 6.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2014	VI-35
Gambar 6.5	Rencana Pola Ruang dan Penggunaan Lahan Kawasan Petanglong.....	VI-40

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2016, Kota Pekalongan memulai tonggak baru dalam kerangka pembangunan lima tahunan setelah terpilihnya Walikota Bapak **Achmad Alf Arslan Djunaid, SE** dan Wakil Walikota, Bapak **Mochammad Saelani Machfudz** pada tanggal 9 Desember 2015, yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dalam kerangka RPJPD, RPJMD ini merupakan pentahapan pembangunan lima tahunan ketiga. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus tetap mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD. Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD.

Selain itu, RPJMD sesuai dengan periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, pada dasarnya juga merupakan kelanjutan atas tahapan RPJMD Tahun 2010-2015. Dengan demikian, selain mencermati berbagai kondisi makro yang berasal dari data-data primer dan sekunder, juga menjadi hal pokok untuk melakukan evaluasi atas capaian RPJMD Tahun 2010-2015 khususnya terkait dengan rencana pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Hal ini penting agar lebih dapat menjamin keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD.

Pada saat ini, Pemerintah telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, substansi atas prinsip sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya tidak mengalami perubahan, dimana Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 harus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan juga RPJMN Tahun 2015-2019. Dilihat dari rentang waktu *periodisasi* masa berlakunya RPJMN, maka RPJMD Kota Pekalongan ini telah berupaya untuk memperhatikan sekaligus didorong untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang mengalami perubahan relatif besar tetapi belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD ini meskipun pengelompokan urusan sudah mengikuti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun nomenklatur Program masih menggunakan paradigma peraturan perundangan yang lama, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan cakupan *hinterland* Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Perkembangan ketiga Kabupaten/Kota ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus dilakukan upaya-upaya yang bersifat sinergi, terpadu dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sekarang ini telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah baru seperti halnya Kota Pekalongan. Sementara Kabupaten Batang baru akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2017. Dalam kondisi yang berbeda ini, tentu akan mengalami perbedaan periode dalam melakukan sinergi penyusunan RPJMD.

Selain upaya sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar, perencanaan pembangunan juga harus merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Beberapa gambaran isu yang sekarang ini sedang disikapi antara lain adalah terkait pasar bebas ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Aspek-aspek yang terus harus disiapkan antara lain terkait dengan masuknya tenaga kerja profesional dengan kompetensi yang sangat bersaing dan bahkan akan mengurangi pasar tenaga kerja yang sekarang ataupun akan tersedia di waktu-waktu yang akan datang. Selain itu, muncul juga persaingan yang tinggi dalam pemasaran produk yang tentu saja menuntut penyiapan peningkatan kualitas produk dari produsen-produsen yang sekarang ini secara aktif memasok barang ke pasar. Sertifikasi atas barang dan kompetensi tenaga kerja menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan harus disikapi bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

Isu lain yang juga diperkirakan akan menguat di waktu-waktu yang akan datang adalah isu atas jati diri bangsa dengan berbagai dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban. Kesiapan antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam satu kesatuan harus benar-benar disiapkan secara baik, sehingga akan tetap mampu bertahan ataupun bahkan lebih pada posisi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pembangunan bidang sosial akan dilaksanakan dalam kerangka percepatan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Pembangunan Bidang budaya dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk pembangunan bidang infrastruktur, isu yang telah ada dan akan terus berkembang adalah perkembangan kota yang tidak didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, apalagi Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai PKW. Tantangannya akan semakin berat dengan adanya fenomena pemanasan global, yang salah satunya berimplikasi terhadap kecenderungan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut sehingga hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikembangkan sesuai dengan fungsi kota serta memperhatikan lingkungan strategis yang ada karena ketersediaan infrastruktur ini akan sangat menentukan kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) suatu kota.

Aspek lainnya adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia yang berhasil akan mampu memberikan daya saing daerah yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Sesuai tahapan dan prioritas, RPJMD Kota Pekalongan memasuki RPJMD tahap III. Skala prioritas pada tahap III ini sesuai RPJPD yaitu : mewujudkan kondisi Peri kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang agamis, berbudaya, tertib dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen, partisipatif dan teknologi informasi; mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergisitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; serta mewujudkan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreatifitas.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

1.2.DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.2.1. Landasan Idiil

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

1.2.2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

1.2.3. Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

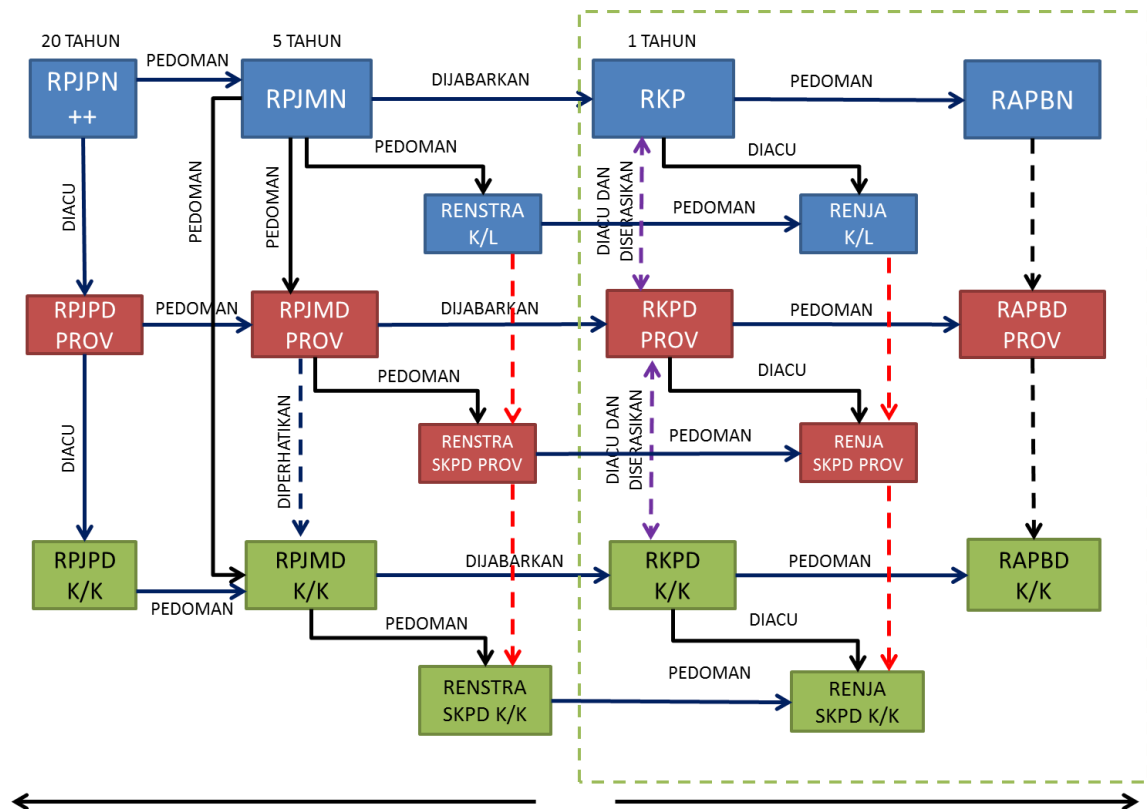
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
38. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD merupakan lanjutan dari pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2010-2015. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disesuaikan dengan berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Selain itu penyusunan **RPJMD** juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015. Pedoman lain yang digunakan sebagai penunjang antara lain : (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2011-2015; (2) RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029; (3) RAD Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2011-2015; (4) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2010-2020; (5) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);

1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “*Nawa Cita*”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
- b. Laju inflasi sebesar 3,5%;
- c. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;
- d. Indeks Gini sebesar 0,36;
- e. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebesar 76,3;
- g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “*Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan :

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran :

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”:

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan :

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak :

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat :

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan :

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Penjabaran lebih rinci dari misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur

- 1). Pemerintah daerah diharapkan bisa mengurangi beban belanja rutin (belanja pegawai dan barang) untuk membuka ruang fiskal dalam APBD. Ruang fiskal tersebut diperlukan untuk menambah alokasi belanja modal pembangunan infrastruktur daerah.
- 2). Pemerintah daerah bisa mengundang swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur terutama yang memiliki nilai komersial melalui pola kerjasama pemerintah-swasta (*Public Private Partnership*).
- 3). Rencana menarik swasta harus disertai oleh perbaikan iklim bisnis dan investasi, yang dapat dilakukan melalui perubahan regulasi dan kebijakan yang bisa menarik minat calon investor.
- 4). Mulai dipersiapkan kemungkinan penerbitan obligasi daerah (*municipal bond*) untuk pembiayaan infrastruktur.
- 5). Pemerintah Daerah harus memberi kemudahan pembebasan lahan agar kerja sama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak terhambat.
- 6). Agar diperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan infrastruktur nasional, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota yang dihubungkan dengan infrastruktur nasional.
- 7). Mempercepat pembangunan infrastruktur lokal/perdesaan terutama untuk membuka akses pasar hasil produksi pertanian.

b) Peningkatan Pelayanan Pendidikan

- 1). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- 2). Percepatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan menengah untuk mendorong peningkatan APK pendidikan menengah.
- 3). Pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan daerah.
- 4). Pencegahan Siswa Putus Sekolah dan Peningkatan Angka Keberlanjutan Siswa. Diharapkan Pemerintah Daerah:
 - (a). Mengidentifikasi lulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
 - (b). Menghitung daya tampung SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
 - (c). Mengidentifikasi siswa yang memiliki resiko putus sekolah (seperti siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu).
 - (d). Memastikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan pendidikan.
 - (e). Membuka Posko penerimaan siswa baru untuk memastikan semua anak usia sekolah bersekolah.
 - (f). Percepatan pemerataan akses dan layanan pendidikan serta peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk semua.

c) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- 1). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

- 2). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat.
- 3). Perhatian khusus pada penduduk rentan (ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula) dan keluarga miskin).
- 4). Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan.
- 5). Pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan kerjasama lintas sektor dan kemitraan.
- 6). Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.
- 7). Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.
- 8). Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor (produksi pangan, pengolahan, distribusi, konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya).

d) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Perbaikan iklim investasi, yang dititikberatkan pada:

- 1). Penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha, serta
- 2). Peningkatan efisiensi logistik di Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang dilakukan secara bertahap di Kabupaten/Kota.
- 4). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi.
- 5). Meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi.
- 6). Pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 7). Upayakan adanya pertimbangan antara kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait penetapan UMP dengan upaya menarik minat investor (iklim usaha).

e) Percepatan Pembangunan Industri Pengolahan

- 1). Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Kendal. Dalam pengembangannya, kawasan industri ini akan diarahkan menjadi pusat kegiatan baru di sebelah utara Kendal. Oleh karenanya dibutuhkan semacam Central Business District (CBD) di kawasan tersebut.
- 2). Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Boyolali; Pengembangan kawasan industri ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang besar yang tentunya akan dapat mengangkat

pendapatan masyarakat Boyolali dan dampak berantainya pada perekonomian wilayah juga akan meningkat.

f) Percepatan Ketahanan Pangan

- 1). Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas.
- 2). Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi melalui pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 3). Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan serta intensifikasi peningkatan produksi pangan berbasis korporasi GP3K kerjasama dengan BUMN.
- 4). Pengawasan produksi - penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.
- 5). Putihkan KUT - agar akses kredit meningkat.
- 6). Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.
- 7). Mensinergikan produksi dan pengolahan:
- 8). Pengembangan supply chain -hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah)
- 9). Pengembangan entrepreneurship - pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen.
- 10). Perubahan pola konsumsi:
 - (a). Kepraktisan - bentuk olahan
 - (b). Kualitas: jenis dan kualitas tertentu
 - (c). Brand: jaminan konsistensi kualitas
 - (d). Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
- 11). Normalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Irigasi (Peningkatan Indeks Pertanaman).

g) Percepatan Reformasi Birokrasi

- 1). Mempercepat penciptaan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- 2). Mempercepat penciptaan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- 3). Membuat regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- 4). Menciptakan SDM aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- 5). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 6). Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- 7). Menciptakan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
- 8). Mempercepat penciptaan birokrasi dengan integrasi dan kinerja yang tinggi.

1.3.3. Amanat RPJPD Kota Pekalongan 2005 - 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025, dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “**Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera**” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap III dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, melalui:

- a) Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama;
- b) Pengembangan pola toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka peningkatan harmonisasi kehidupan beragama bermasyarakat;
- c) Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional;
- d) Penguatan peran kelembagaan seni dan budaya lokal serta penerapannya di masyarakat guna memperkuat identitas karakter masyarakat dan menjaga kelestarian kebudayaan khas Pekalongan;
- e) Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri;
- f) Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan hukum daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum di daerah;
- g) Pengembangan pemasyarakatan dan pendidikan HAM serta kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM;
- h) Pengembangan peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait;
- i) Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan baik dan benar melalui pendidikan politik dalam rangka memberikan kontribusi bagi terciptanya proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum dengan memberdayakan lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi, melalui:

- a) Pengembangan upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan latihan sehingga aparatur pemerintah dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah;
- c) Pengembangan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa didukung penguasaan teknologi dengan memperbaiki *software, hardware* dan *brainware*;

- d) Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung penanganan permasalahan publik;
- f) Pengembangan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa didukung pengembangan SIM Pengawasan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data umum hasil pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pengawasan pembangunan.

3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, melalui:

- a) Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi didukung peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar internasional;
- b) Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui pengembangan kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan yang lebih baik dan sehat;
- c) Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta pengembangan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan;
- d) Pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada yang mampu mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi;
- e) Pengembangan aplikasi teknologi telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi publik;
- f) Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP;
- g) Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat;
- h) Pengembangan pola upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana;
- i) Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam;
- j) Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan kualitas pelayanan listrik bagi seluruh masyarakat;

- k) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan;
- l) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas;
- m) Pengembangan masyarakat *biofuel* (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.

4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:

- a) Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang lebih luas serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja;
- b) Pengembangan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran masyarakat;
- c) Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- d) Pengembangan kuantitas dan kualitas *surveillance epidemiologi* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
- e) Pengembangan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui pengembangan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat;
- f) Pengembangan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin;
- g) Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;
- h) Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan partisipasi peserta KB Mandiri dalam penggunaan kontrasepsi;
- i) Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan peningkatan perlindungan anak sebagai aset penentu masa depan bangsa;
- j) Pengembangan kepribadian dan kreatifitas pemuda melalui penguatan kelembagaan kepemudaan yang ada;
- k) Pengembangan kemandirian dan tanggung jawab pemuda dan olah raga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, melalui:

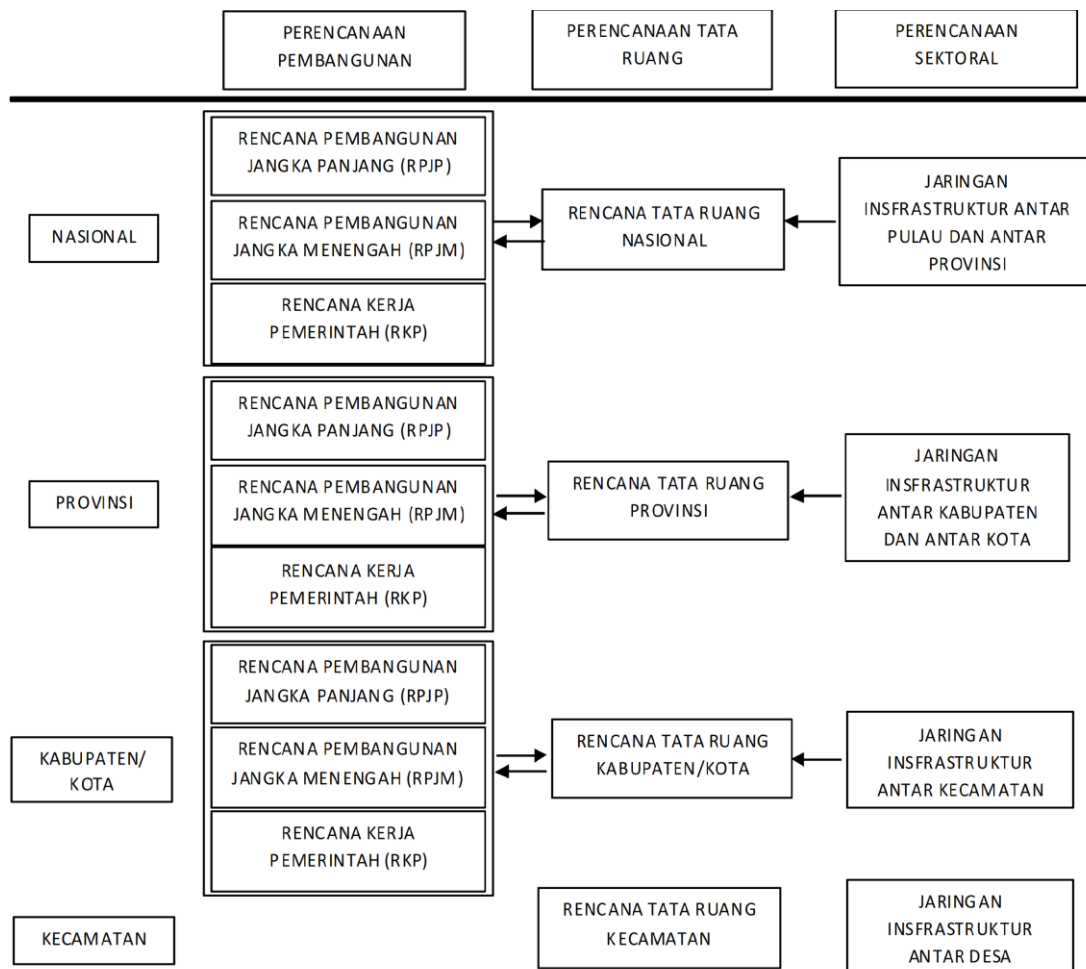
- a) Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan

yang makin berkualitas;

- b) Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam skala nasional maupun internasional;
- c) Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional;
- d) Pengembangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan;
- e) Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi;
- f) Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar;
- g) Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
- h) Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat;
- i) Pengembangan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor baik PMA maupun PMDN;
- j) Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah;
- k) Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan.

1.3.4. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang kewilayahan, baik dari sisi pola dan struktur ruangnya maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna lahan Kota Pekalongan.



Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Kota Pekalongan merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** Kawasan Perkotaan PETANGLONG, sehingga dengan demikian fasilitas sarana prasarana kota harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Pekalongan saat ini telah menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang RTRW tersebut dengan Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di empat kecamatan serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab. Pada tahun-tahun mendatang, penyusunan dokumen perencanaan kawasan akan merambah ke KSK Kota dari sudut kepentingan ekonomi dan KSK sudut kepentingan lingkungan sesuai arahan RTRW pasal 53 tentang penetapan kawasan strategis kota.

Namun demikian, pada saat ini berbagai dinamika perencanaan pembangunan menghendaki adanya tindak lanjut sebagai akibat berubahnya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, seperti rencana Pembangunan Jalan Tol Pulau Jawa serta

pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG, yang keduanya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN Tahun 2015 – 2019).

1.3.5. Hubungan Antar Dokumen

Dari gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kota, Provinsi, ataupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa *“Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”*, akan sejalan dengan upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan.

Upaya membangun kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan agamis melalui Peningkatan Pelayanan pendidikan ini diharapkan akan ikut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang secara nasional ditargetkan mencapai 76,3 pada tahun 2019, adapun target yang lain sebagai berikut :

- Laju inflasi sebesar 3,5%;
 - PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;
 - Indeks Gini sebesar 0,36;
 - Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
 - Indeks Pembangunan Manusia(IPM) sebesar 76,3;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.
2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa *“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi”*, akan sejalan dengan upaya Percepatan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga diharapkan akan ikut memberikan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan investasi yang pada akhirnya, upaya ini akan mendorong mewujudkan Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,0% pada akhir tahun 2019.
 3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa *“Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam”*, akan sejalan dengan upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa *“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”*, akan sejalan dengan upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin dengan jumlah yang sangat terbatas diharapkan akan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas SDM yang ditopang oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada. Sehingga akan berdampak pada penurunan kesenjangan dalam hal penerimaan pendapatan atau dengan kata lain ikut mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam menurunkan Indeks Gini Ratio hingga mencapai 0,36 pada akhir tahun 2019. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan akan ikut menurunkan tingkat Kemiskinan hingga

7 - 8% serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,3 pada tahun 2019.

5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa *“Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas”*, akan sejalan dengan upaya Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Percepatan Pembangunan Industri, serta Pengolahan Percepatan Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik beserta turunannya dan industri perikanan. Dalam perkembangannya, industri kerajinan batik telah memiliki 12 rantai nilai, mulai dari hulu berupa suplai bahan baku, permodalan, sampai dengan sisi hilir berupa pemasaran. Sementara itu, dari sisi industri perikanan, Kota Pekalongan memiliki sejarah panjang berupa kemajuan kegiatan industri perikanan nusantara. Dalam catatan statistik, struktur ekonomi Kota Pekalongan juga terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan.

Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator pembangunan nasional pada tahun 2019, berupa Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 8,0%, penurunan Laju inflasi sebesar 3,5%, PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Secara jelas, hubungan antara dokumen sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

NO	RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025	VISI DAN MISI Walikota- Wakil Walikota Pekalongan 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa TengahTahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019		
				NAWA CITA	MISI RPJMN	INDIKATOR
<i>VISI</i>	<i>Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera</i>	<i>Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.</i>	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>	<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.</i>		
1	Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.	Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah	1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 2. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Melakukan revolusi karakter bangsa;	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang secara nasional ditargetkan mencapai 76,3 pada tahun 2019.
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi	1. Meningkatkan kualitas layanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Mengembangkan IT berbasis komunitas	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara	Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,0% pada akhir tahun 2019.

NO	RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025	VISI DAN MISI Walikota- Wakil Walikota Pekalongan 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa TengahTahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019		
				NAWA CITA	MISI RPJMN	INDIKATOR
			<i>Korupsi, Mboten Ngapusi"</i>	efektif, demokratis, dan terpercaya;	kepulauan	
3	Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%; 2. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu; 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.
4	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas layanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran 2. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;	1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	1. Indeks Gini Ratio hingga mencapai 0,36 2. Tingkat Kemiskinan hingga 7 – 8 % 3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,3
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang	1. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang	Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi , dan	1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	1. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,0%, 2. Penurunan Laju inflasi sebesar

NO	RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025	VISI DAN MISI Walikota- Wakil Walikota Pekalongan 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	RPJMN Tahun 2015-2019		
				NAWA CITA	MISI RPJMN	INDIKATOR
	Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas	berkelanjutan. 2. Mengembangkan IT berbasis komunitas.	Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;		3,5% 3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Sumber : RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Pekalongan, diolah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis RPJMD disusun sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
- Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.
- BAB II** : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kota Pekalongan yang selaras dan mendukung analisis dan penggambaran isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi dan kebijakan, meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.
- BAB III** : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yaitu kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.
- BAB IV** : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap III dan analisis lingkungan strategis.
- Bab V** : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.
- Bab VI** : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Selain itu juga memuat arah pengembangan wilayah yang mencakup konsep, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah.
- Bab VII** : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.
- Bab VIII** : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, disertai kebutuhan pendanaannya.

Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri.

Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan kepala daerah periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

Bab XI : Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

RPJMD disusun untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Disusunnya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota masa bakti 2016-2021. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan;
- 2) Menjadi tolak ukur kinerja Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dan instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

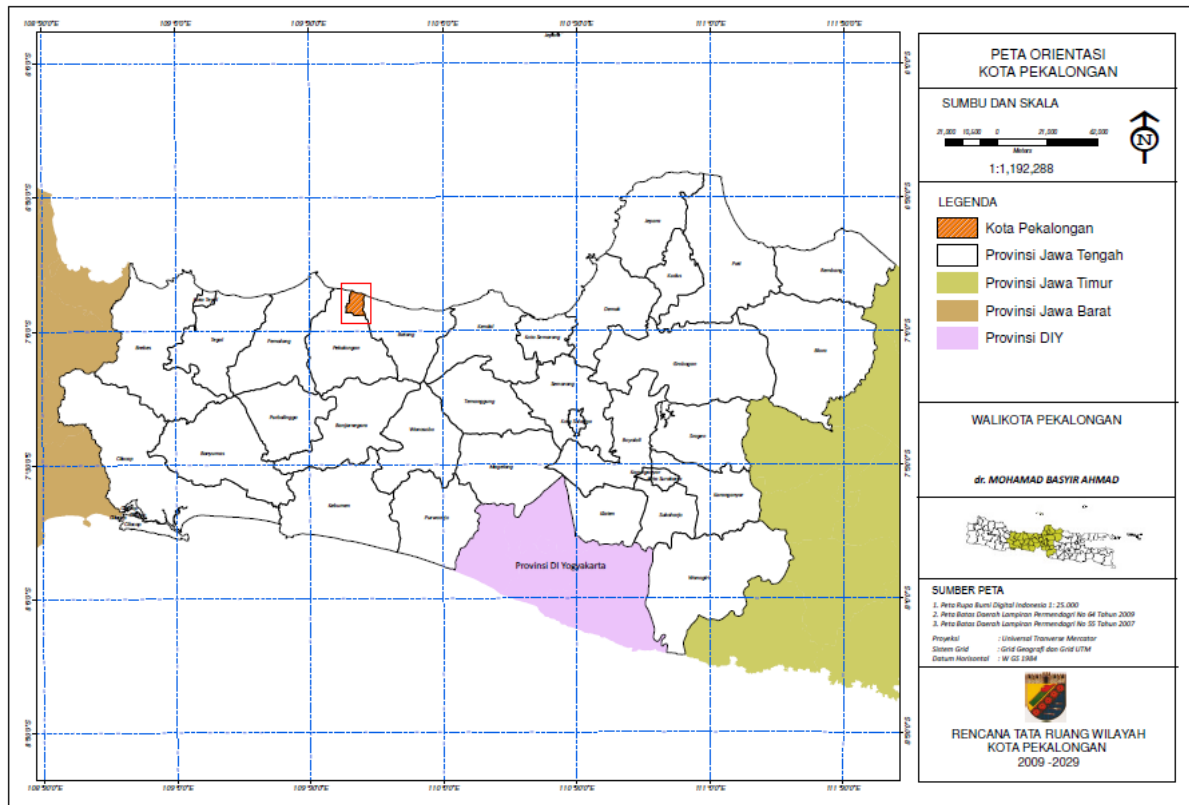
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 6° 50' 42" - 6° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), Industri Pengolahan (21,67%), dan Konstruksi (14,91%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya

Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



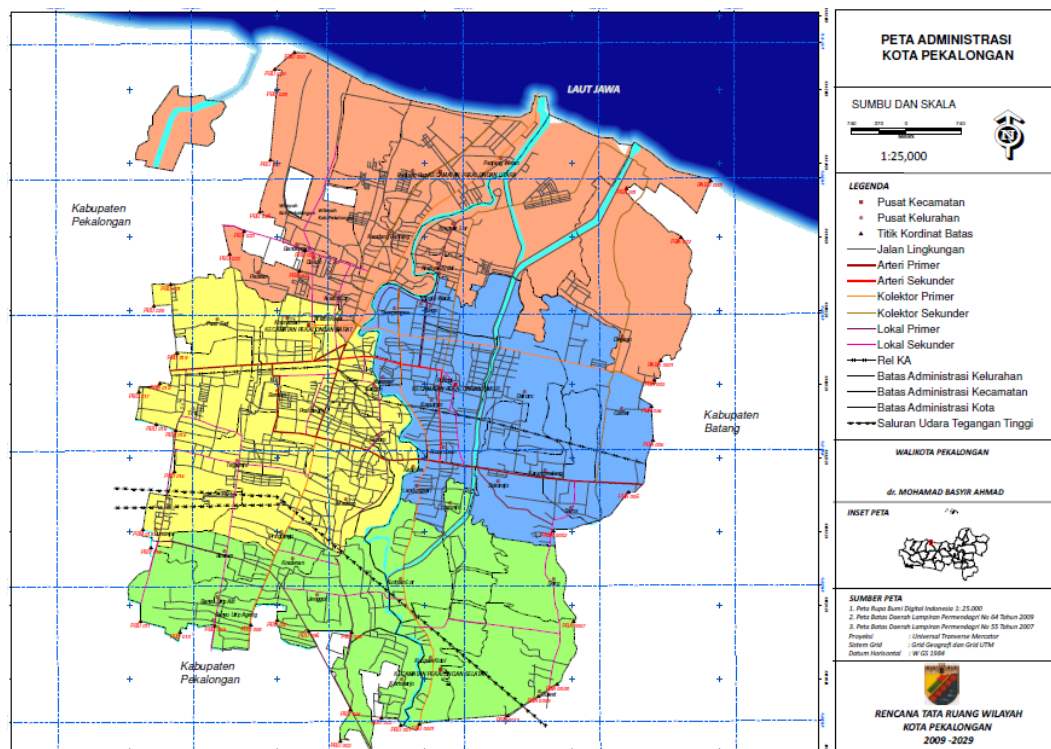
Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan $\pm$ 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur $\pm$ 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

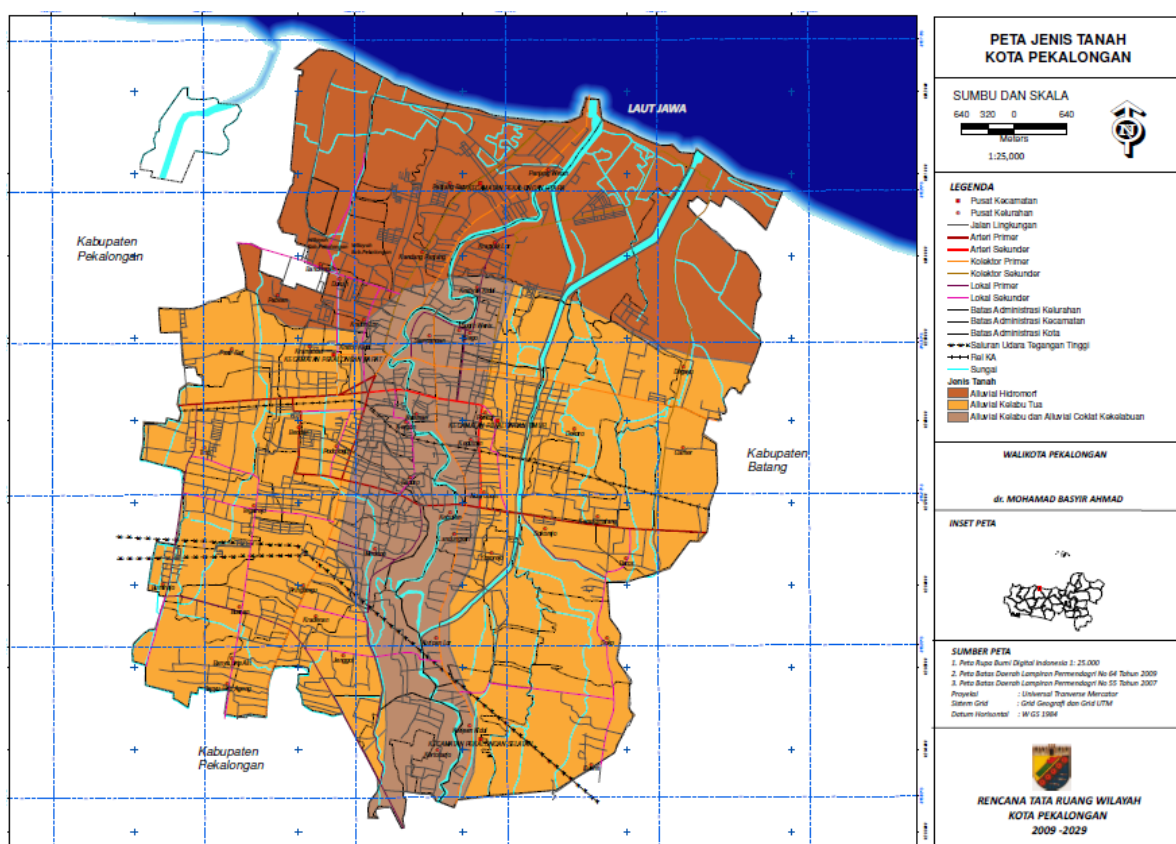
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,5	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,52	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Kecamatan Pekalongan Utara	14,88	33
	TOTAL	45,25	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015

2.1.2 Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter *dpl*. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 %. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean) Kecamatan Pekalongan Utara.

Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu *alluvial hidromorf*, *alluvial* kelabu tua serta *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan. Sebaran tanah *alluvial hidromorf* yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran *alluvial* kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

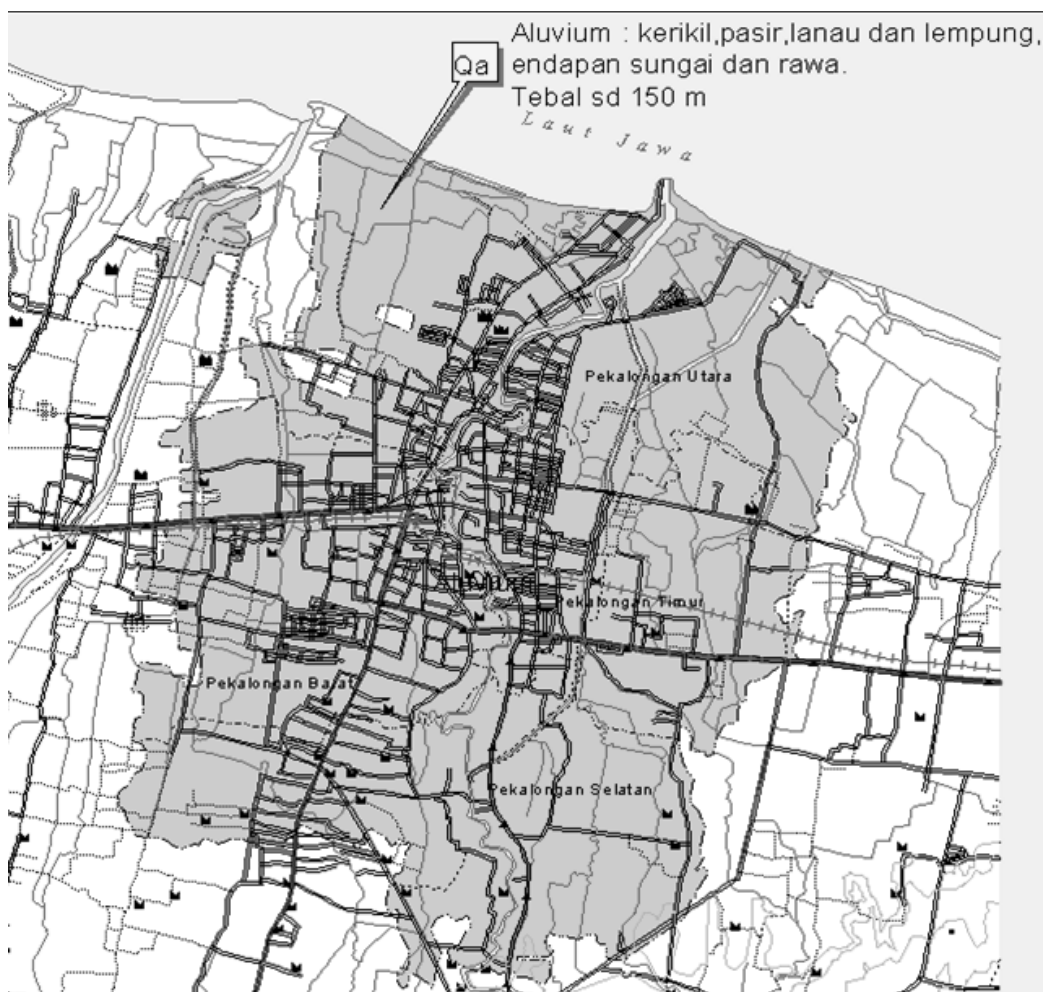
Jenis tanah *alluvial hidromorf* mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan daerah relatif datar. Jenis tanah *alluvial hidromorf* cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial hidromorf*, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah *alluvial* kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah *alluvial* kelabu dan *alluvial* coklat kekelabuan

memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah *alluvial hidromorf* dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai serta jenis tanahnya, dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut.

Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

2.1.3 Geologi



Sumber : Marfai dkk, 2011

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1 :1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen *alluvium*, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan

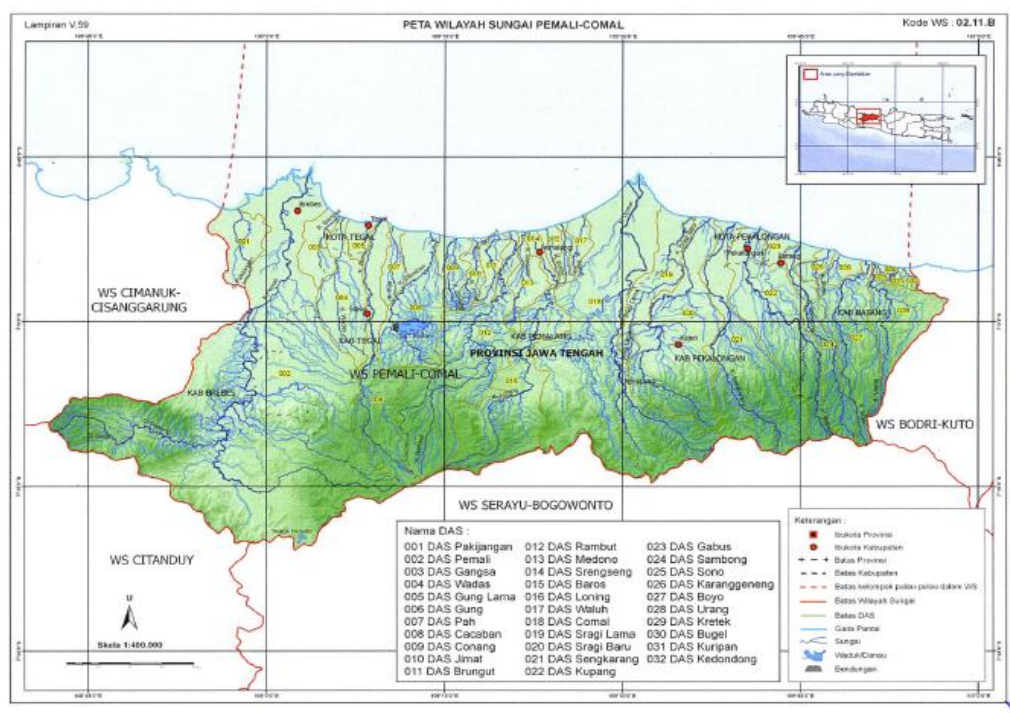
alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit *hornblend* dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan *alluvium* pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran *alluvial* dan dataran *alluvial* pantai. Dataran *alluvial* merupakan hasil proses *fluvial* dan sedangkan dataran *alluvial* pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran *alluvial* semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

2.1.4 Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, diapit beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremsi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran dari buangan limbah kegiatan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih.

Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air).

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

2.1.5 Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2010, dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama tahun

2015, jumlah hari hujan sebanyak 100 hari dan curah hujan sebanyak 2.139 mm. Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 17 hari dengan curah hujan sebanyak 509 mm.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2009-2015

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	346
2	Februari	17	509
3	Maret	15	319
4	April	10	224
5	Mei	10	111
6	Juni	2	32
7	Juli	3	8
8	Agustus	3	121
9	September	0	0
10	Oktober	1	1
11	November	7	56
12	Desember	15	412
TOTAL		100	2.139
Tahun 2014		127	3.462
Tahun 2013		95	1.554
Tahun 2012		95	1.554
Tahun 2011		102	2.381
Tahun 2010		153	2.396
Tahun 2009		96	1.756

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2016

Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%.

Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 23⁰C-32⁰C. Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar 0-45 knot.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2014, luas tanah sawah adalah 1.188 Ha, hal ini berkurang sekitar 0,6% dari luas 1.196 Ha pada tahun 2013. Tanah kering seluas 3.357 Ha, ada penambahan sekitar 0,83% dari luas 3.329 Ha pada tahun 2013.

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2015 adalah seluas 997 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 329 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 435 Ha dan Kecamatan

Pekalongan Utara seluas 147 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011 seluas 1.046 Ha dan tahun 2012-2013 sama yaitu seluas 1.039 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi teknis pada tahun 2015 seluas 997 ha.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2009-2015

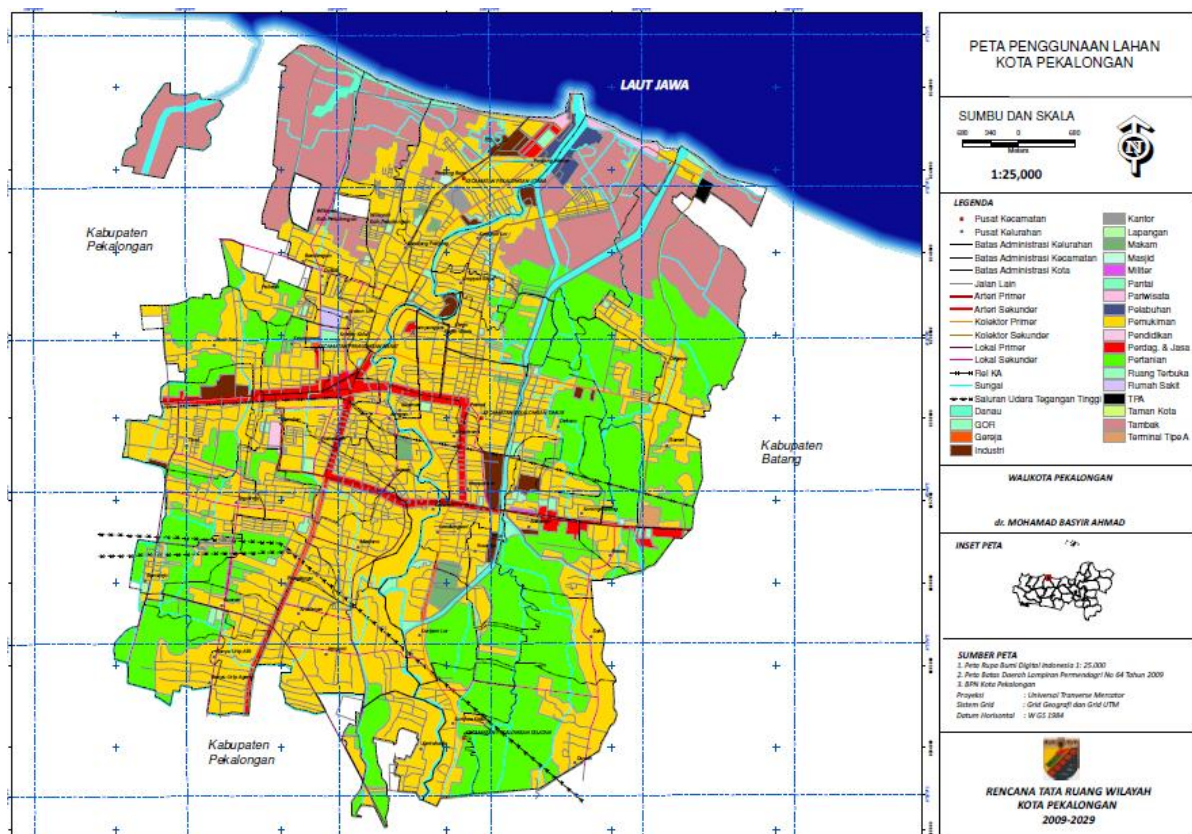
No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	151	854	1.005
2	Pekalongan Timur	329	623	952
3	Pekalongan Selatan	435	645	1.080
4	Pekalongan Utara	247	1.241	1.488
TOTAL		1.162	3.363	4.525
Tahun 2014		1.188	3.337	4.525
Tahun 2013		1.196	3.329	4.525
Tahun 2012		1.238	3.287	4.525
Tahun 2011		1.248	3.277	4.525
Tahun 2010		1.260	3.265	4.525
Tahun 2009		1.266	3.259	4.525

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015, 2016

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle*, terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan tidak ke penggunaan tambak karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

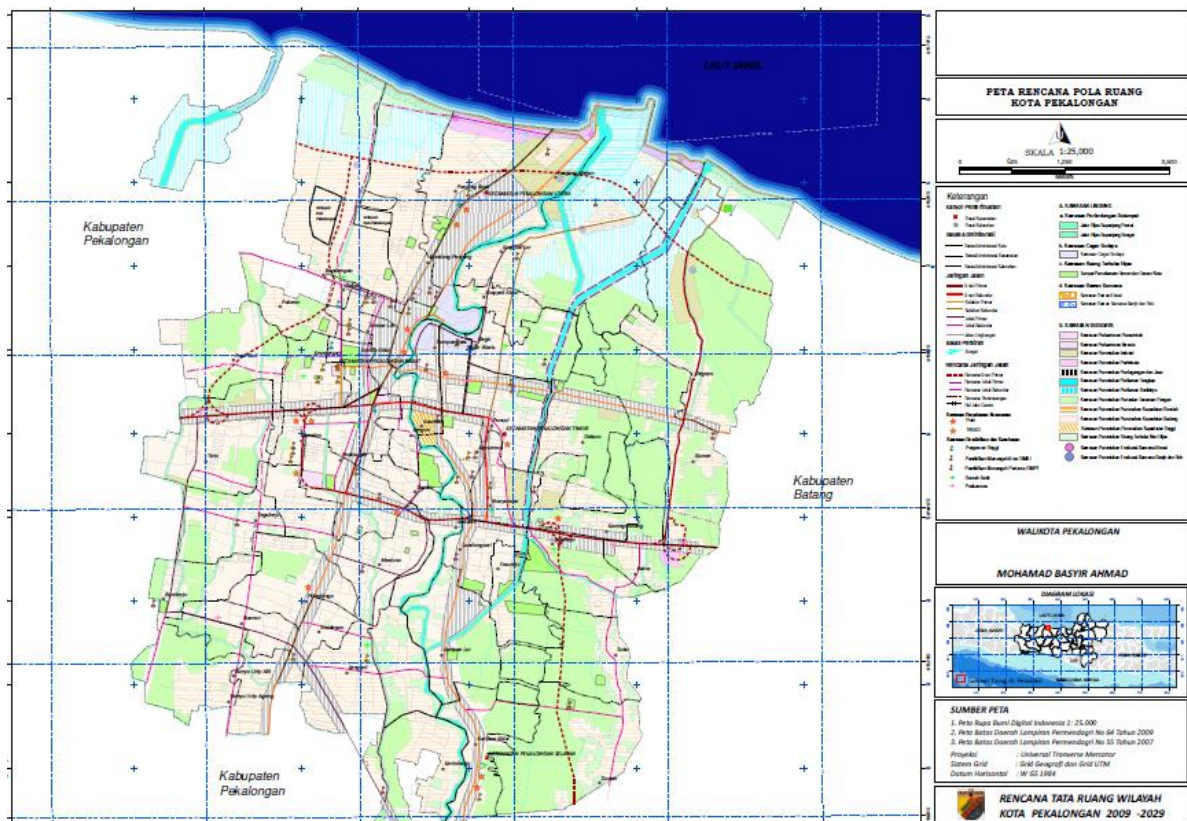
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah *“Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah *“Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayahpun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

1. Kawasan lindung

a). Kawasan perlindungan setempat

Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggung dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremit. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak dan Degayu.

b). Kawasan cagar budaya

Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

c). Ruang terbuka hijau (RTH) kota

Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

d). Kawasan rawan bencana alam

Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

e). Pengelolaan kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah (CAT) Pemalang-Pekalongan.

2. Kawasan budidaya

a). Kawasan peruntukan pertanian

Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirta, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.

b). Kawasan peruntukan perikanan

Terdiri atas kawasan-kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.

c). Kawasan peruntukan perumahan

Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi; perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.

d). Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirta, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr.

Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar.

e). Kawasan peruntukan perkantoran

Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

f). Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

g). Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak.

Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.

h). Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alun-alun; kawasan Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen; kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto; kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini; kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan Jalan dr. Soetomo.

i). Ruang evakuasi bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

j). Ruang terbuka non hijau

Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.

k). Kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

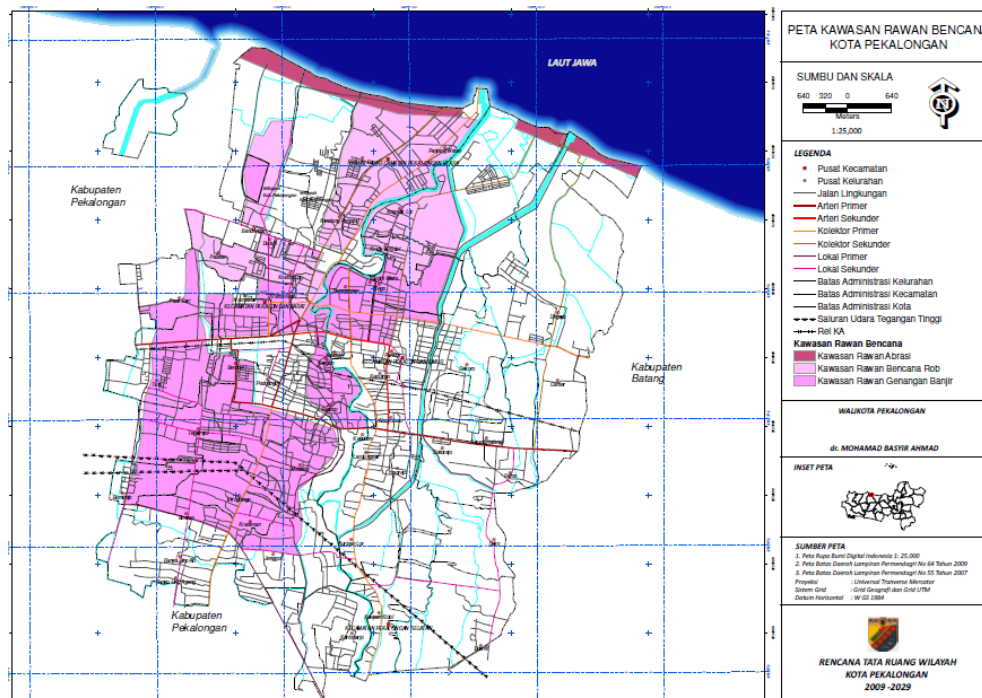
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.



Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini. Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

2.1.9 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2015 berdasarkan data BPS Kota Pekalongan sebanyak 296.533 jiwa, terdiri dari 148.295 jiwa laki-laki dan 148.238 jiwa perempuan. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan angka sex ratio sebesar 100,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,04 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2010	142.503	142.507	285.010
2011	143.821	145.373	289.194
2012	145.130	145.217	290.347
2013	145.450	145.420	290.870
2014	146.863	146.841	293.704
2015	148.295	148.238	296.533

Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2016

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan relatif terus meningkat dalam kisaran 0,79% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2010-2015 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2010-2015 terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,79%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2015 rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010	0,80
2011	0,79
2012	0,92
2013	1,00
2014	0,97
2015	0,96

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 6.151,78 jiwa/km² dan tertinggi tahun 2015 sebesar 6.553,22 jiwa/km². Berikut disajikan dalam Tabel 2.6 kepadatan penduduk dari tahun 2010-2015.

**Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015**

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2010	6.151,78
2011	6.300,51
2012	6.416,51
2013	6.428,07
2014	6.490,70
2015	6.553,22

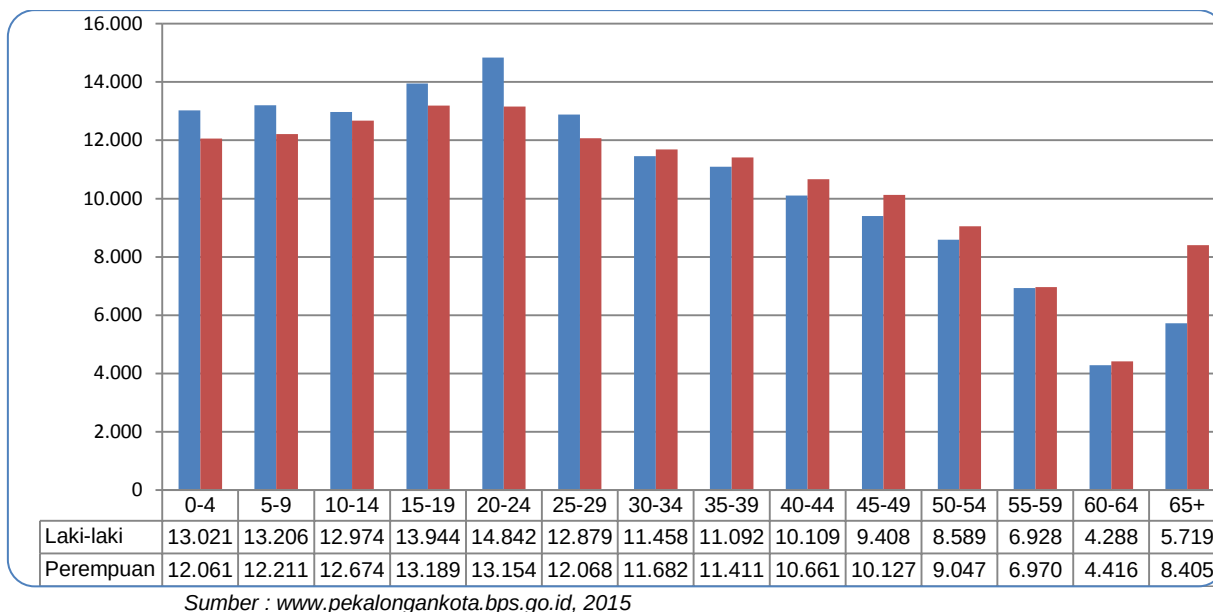
Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2016

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2010, pendidikan SD ke bawah sebanyak 63.372 jiwa (46,95%), diikuti SMP sebanyak 30.107 (22,30%) dan Sekolah Menengah (SM) sebanyak 41.505 jiwa (30,75%). Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2010 berjumlah 134.984 jiwa. Secara bertahap selama enam tahun, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah semakin berkurang baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP selama enam tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami penurunan. Sedangkan pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat trendnya selama enam tahun berturut-turut. Apabila pada tahun 2010 berjumlah 41.505 jiwa dan setara 37,61% dari jumlah pekerja maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 53.922 jiwa atau setara 37,61%. Secara garis besar selama enam tahun jumlah pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 143.376 jiwa. Secara lengkap penduduk Kota Pekalongan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
	SD		SLTP		SM		Jumlah
	orang	%	orang	%	orang	%	
2010	63.372	46,95%	30.107	22,30%	41.505	30,75%	134.984
2011	62.283	47,49%	26.166	19,95%	42.709	32,56%	131.158
2012	58.748	44,56%	28.316	21,48%	44.762	33,96%	131.826
2013	55.796	42,40%	27.817	21,14%	47.975	36,46%	131.588
2014	65.861	45,95%	30.516	21,29%	46.966	32,76%	143.343
2015	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	143.376

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015 dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016



Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Gambar 2.9 mampu menjelaskan bahwa dilihat dari struktur penduduk Kota Pekalongan, penduduk kelompok 20-24 tahun sebanyak 27.996 jiwa (9,44%), penduduk kelompok 15-19 tahun sebanyak 27.133 jiwa (9,15%) dan penduduk kelompok 10-14 tahun sebanyak 25.648 jiwa (8,65%) adalah tiga kelompok tertinggi kelompok usia muda yang cukup produktif. Pada tiga besar tersebut merupakan kelompok usia produktif yang masih bersekolah dan dalam tahap usia sekolah.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	13.021	12.061	25.082
5-9	13.206	12.211	25.417
10-14	12.974	12.674	25.648
15-19	13.944	13.189	27.133
20-24	14.842	13.154	27.996
25-29	12.879	12.068	24.947
30-34	11.458	11.682	23.140
35-39	11.092	11.411	22.503
40-44	10.109	10.661	20.770
45-49	9.408	10.127	19.535
50-54	8.589	9.047	17.636
55-59	6.928	6.970	13.898
60-64	4.288	4.416	8.704
65+	5.719	8.405	14.124

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2016

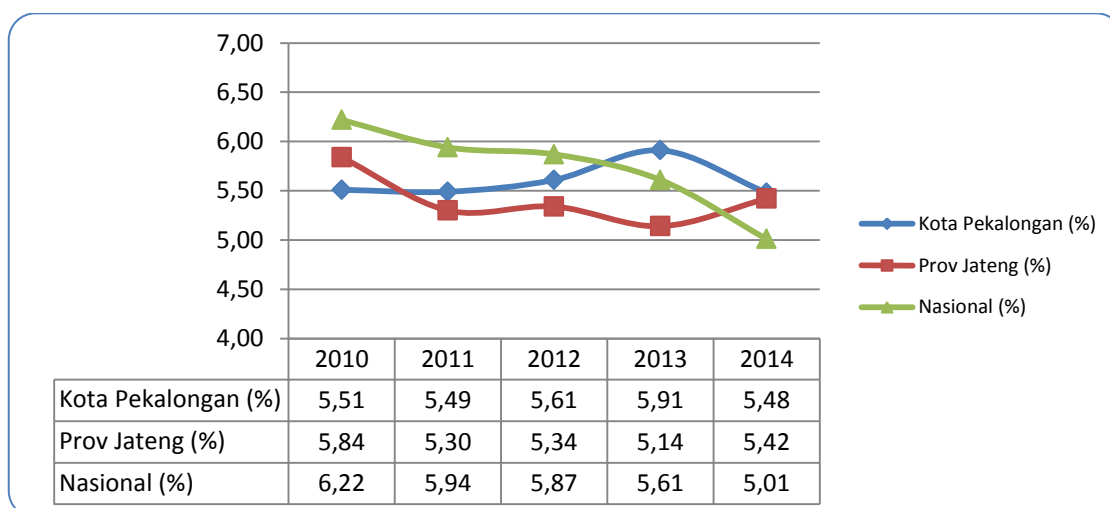
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2010-2014.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah Persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka 5,51%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi 5,49%. Hal ini disebabkan sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi 5,30% dan 5,94%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014

Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk tahun 2010 – 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada

tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Struktur Ekonomi

Peranan PDRB menurut lapangan usaha Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2021 ditunjukkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010–2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012*	2013**	2014***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,15	6,07	5,86	5,60	5,27
B	Pertambangan dan Penggalan	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan	19,30	19,89	20,82	21,53	21,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,19	0,19	0,17	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
F	Konstruksi	14,26	13,93	14,08	14,37	14,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,02	24,61	23,55	22,98	22,14
H	Transportasi dan Pergudangan	7,24	6,79	6,41	6,10	6,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,66	4,59	4,56	4,52	4,67

Lapangan Usaha		2010	2011	2012*	2013**	2014***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi	4,02	3,95	3,96	3,93	3,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,59	5,50	5,71	5,78	5,84
L	Real Estat	2,70	2,62	2,55	2,52	2,59
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,34	0,36	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,11	4,93	5,01	4,87	4,73
P	Jasa Pendidikan	3,28	3,51	3,98	4,26	4,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,07	1,14	1,14	1,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,98	1,89	1,72	1,76	1,84
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2014 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan (21,67%) dan lapangan usaha Konstruksi (14,91%). Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku.

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,98 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011–2014

	Lapangan Usaha	2011	2012*	2013**	2014***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,81	2,29	1,09	-2,06
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan	7,39	11,26	10,48	6,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,40	10,47	7,31	1,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	1,88	0,25	2,50
F	Konstruksi	2,58	5,89	6,33	6,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	1,49	2,85	4,27
H	Transportasi dan Pergudangan	4,14	3,56	3,17	4,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	5,05	5,47	6,19	7,33

	Lapangan Usaha	2011	2012*	2013**	2014***
	Minum				
J	Informasi dan Komunikasi	8,21	10,36	9,02	10,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,32	5,73	6,15	6,50
L	Real Estat	5,07	6,56	7,09	7,22
M,N	Jasa Perusahaan	6,65	8,77	4,49	11,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,24	0,53	2,75	0,96
P	Jasa Pendidikan	9,54	13,55	8,71	10,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,58	9,95	5,29	10,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,53	0,30	8,93	8,59
Produk Domestik Regional Bruto		5,49	5,61	5,91	5,48

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

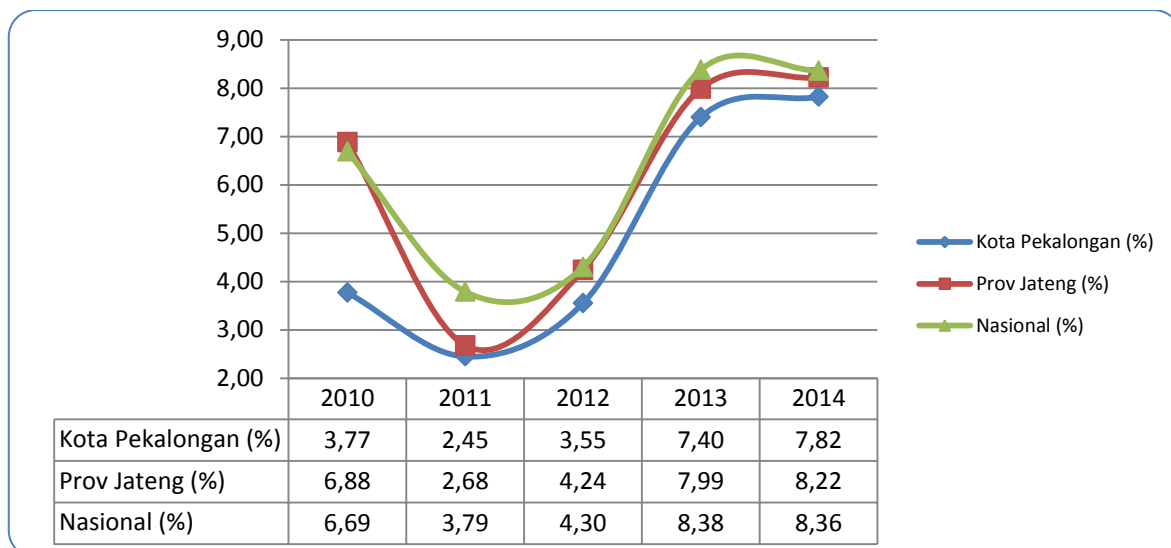
Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen.

2.2.2. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,77 persen di tahun 2010 hingga 7,82 persen di tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tingginya inflasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah (*Administered Price*) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya, menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya. Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014(%)

2.2.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita yang terus meningkat menunjukkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), Kota Pekalongan tahun 2010—2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012*	2013**	2014***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	1,04	1,05	1,05	1,02
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,16	3,36	3,70	4,05	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,34	2,37	2,49	2,62	2,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,94	4,14	4,16	4,24	4,38
H	Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,22	1,25	1,28	1,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,79	0,83	0,87	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	0,66	0,71	0,77	0,83	0,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,95	0,99	1,04	1,10
L	Real Estat	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07

Lapangan Usaha		2010	2011	2012*	2013**	2014***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,84	0,86	0,86	0,88	0,88
P	Jasa Pendidikan	0,54	0,58	0,65	0,70	0,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,18	0,20	0,20	0,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,32	0,33	0,33	0,35	0,38
PDRB per Kapita Kota Pekalongan		16,40	17,12	17,89	18,76	19,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp. 19.595.519 dengan pertumbuhan sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2011 sebesar 4,39 persen, pada tahun 2012 sebesar 4,50 persen, dan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 4,86 persen.

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2014, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,27 persen. Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar 6,15 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 6,07 persen, tahun 2012 sebesar 5,86 persen, dan tahun 2013 sebesar 5,60 persen.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,67 persen pada tahun 2014.

Peningkatan peran pada kategori ini terus terlihat, yang pada tahun 2010 sebesar 19,30 persen, hingga pada tahun 2013 menjadi 21,53 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2014.

Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar 0,20 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 0,19 persen, tahun 2012 sebesar 0,19 persen, dan tahun 2013 sebesar 0,17 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Pekalongan selama tahun 2010-2014, yaitu tahun 2010 sebesar 0,15 persen, tahun 2011 sebesar 0,14 persen, tahun 2012 sebesar 0,13 persen, tahun 2013 sebesar 0,12 persen, dan tahun 2014 sebesar 0,11 persen.

Konstruksi

Pada tahun 2014 kategori konstruksi mempunyai peran sebesar 14,91 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 14,26 persen, tahun 2011 sebesar 13,93 persen, tahun 2012 sebesar 14,08 persen, tahun 2013 sebesar 14,37 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan mengalami perlambatan dari 6,33 persen pada tahun 2013 menjadi 6,01 persen pada tahun 2014.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2014, peranan kategori ini sebesar 22,14 persen lebih kecil dibanding peranan di tahun 2013 yang sudah mencapai 22,98 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 6,14 persen. Sejak tahun 2010, peranan kategori ini terus menurun, namun tahun 2014 kembali ada peningkatan walau sedikit. Tahun 2010 sebesar 7,24 persen, tahun 2011 sebesar 6,79 persen, tahun 2012 sebesar 6,41 persen, tahun 2013 sebesar 6,10 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2014, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berperan terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 4,67 persen. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,33 persen pada tahun 2014, dan laju pertumbuhan tahun ini merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

yaitu tahun 2011 sebesar 5,05 persen, tahun 2012 sebesar 5,47 persen dan tahun 2013 sebesar 6,19 persen.

Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 4,02 persen, tahun 2011 sebesar 3,95 persen, tahun 2012 sebesar 3,96 persen, tahun 2013 sebesar 3,93 persen, dan tahun 2014 sebesar 3,91 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2011 sebesar 8,21 persen, tahun 2012 sebesar 10,36 persen, tahun 2013 sebesar 9,02 persen, dan tahun 2014 sebesar 10,98 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2014, perannya sebesar 5,84 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 5,59 persen, tahun 2011 sebesar 5,50 persen, tahun 2012 sebesar 5,71 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen.

Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,5 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2010-2014 sebesar 2,70 persen, 2,62 persen, 2,55 persen, 2,52 persen, dan 2,59 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 4 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2010-2014 adalah tahun 2011 sebesar 5,07 persen, tahun 2012 sebesar 6,56 persen, tahun 2013 sebesar 7,09 persen dan pada tahun 2014 sebesar 7,22 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar menjadi 0,33 persen, tahun 2012 sebesar 0,34 persen, tahun 2013 sebesar 0,36 persen dan tahun 2014 sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 8,77 persen semakin melambat pertumbuhannya di tahun 2013 sebesar 4,49 persen. Tahun 2014 kategori ini mengalami pertumbuhannya melesat menjadi 11,98 persen.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2010 sebesar 5,11 persen, tahun 2011 sebesar 4,93 persen, tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 4,87 persen, dan tahun 2014 sebesar 4,73 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat, yaitu dari sebesar 4,24 persen di tahun 2011 menjadi 0,96 persen di tahun 2014.

Jasa Pendidikan

Pada tahun 2014 jasa pendidikan mempunyai peranan sebesar 4,43 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 4,26 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada setiap tahun yaitu tahun 2010 sebesar 3,28 persen, tahun 2011 sebesar 3,51 persen, tahun 2012 sebesar 3,98 persen, tahun 2013 sebesar 4,26 persen dan tahun 2014 sebesar 4,43 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. Tahun 2010 kategori ini tumbuh sebesar 7,71 persen, tahun 2011 terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 9,54 persen. Tahun 2014 kategori jasa pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, lebih cepat daripada pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 8,71 persen.

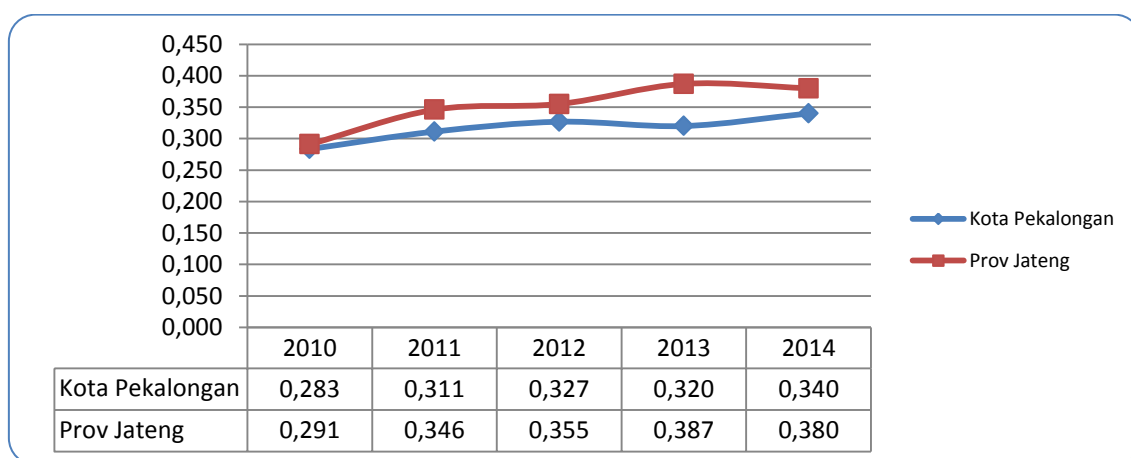
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2010 sebesar 1,02 persen, tahun 2011 sebesar 1,07 persen, tahun 2012 sebesar 1,14 persen, tahun 2013 sebesar 1,14 persen dan tahun 2014 sebesar 1,20 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi percepatan pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 10,08 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh 5,29 persen.

Jasa lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2010 sebesar 1,98 persen, tahun 2011 sebesar 1,89 persen, tahun 2012 sebesar 1,72 persen, tahun 2013 sebesar 1,76 persen, dan tahun 2014 sebesar 1,84 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sebesar 5,85 persen, tahun 2011 sebesar 2,53 persen, tahun 2012 melemah pertumbuhannya menjadi sebesar 0,30 persen, pada tahun 2013 pertumbuhannya menguat menjadi sebesar 8,93 persen dan tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 8,59 persen.

2.2.4. Indeks Gini



Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2016

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

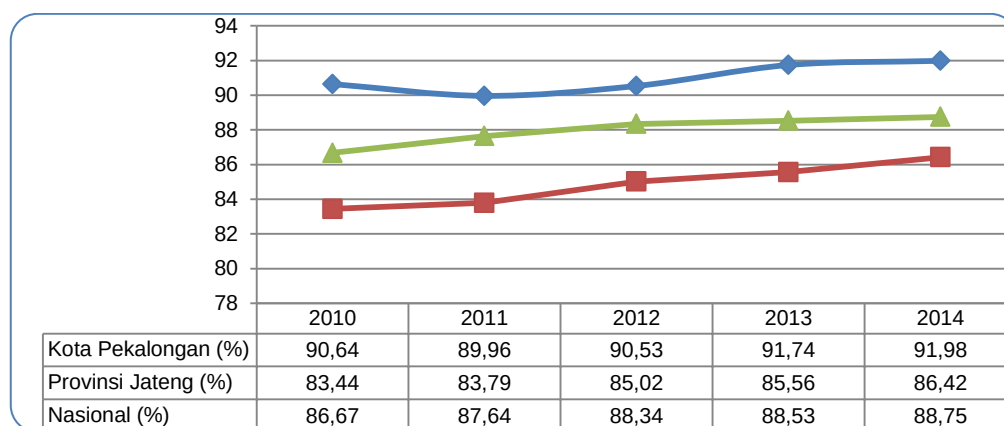
Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28. Kemudian pada tahun 2011, indeks gini naik menjadi 0,31. Kenaikan indeks gini ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 sebesar 5,51% turun menjadi 5,45%. Pada tahun 2012, Indeks gini kembali naik menjadi 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,61%. Pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 5,91% menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,32. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 menjadi 5,42% meningkatkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang naik dari 5,14% tahun 2013 menjadi 5,42% menurunkan indeks gini dari 0,39 tahun 2013 menjadi 0,38% tahun 2014.

2.2.5. Penduduk Diatas Kemiskinan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 berjumlah 285.010 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 90,64 % hidup di atas garis kemiskinan. Ini setara dengan 258.333 jiwa. Pada tahun 2011, terjadi penurunan penduduk diatas garis kemiskinan menjadi 89,96%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011, sebesar 260.159 penduduk.

Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Dalam persentase, pada tahun 2012 meningkat menjadi 90,53% dan pada tahun 2013 menjadi 91,74%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 262.851 jiwa dan tahun 2013 sebesar 266.844. Pada tahun 2014, kondisi penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 91,98% dengan jumlah penduduk seluruhnya berdasarkan survei yang dilakukan BPS Kota Pekalongan adalah 293.704 jiwa. Secara keseluruhan, kondisi di Kota Pekalongan ini lebih baik dari penduduk di atas garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.13.



Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.13 Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014

2.2.6. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun tersebut sebesar 131.153 jiwa.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 kembali naik menjadi 142.422 dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja kembali naik pada tahun 2014 menjadi 151.553 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 143.343. Pada tahun 2015, angkatan kerja di Kota Pekalongan kembali mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang relatif stagnan. Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	Jumlah Pekerja
2010	145.149	93,00%	134.989
2011	141.466	92,71%	131.153
2012	142.422	92,56%	131.826
2013	138.916	94,72%	131.581
2014	151.553	94,58%	143.343
2015	149.507	95,90%	143.376

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2011-2015, diolah dan Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016

Rasio penduduk yang bekerja dari angkatan kerja di atas umur 15 tahun di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada dua tahun berikutnya menurun menjadi 92,71% dan 92,56%. Di tahun 2013 sampai 2015 rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat.

2.2.7. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai 2015 relatif menurun. Bila pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun 2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas kembali turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka kriminalitas pada akhir tahun 2014 kembali turun menjadi 7,83 kejadian kriminal per 10.000 penduduk. Penurunan angka kriminalitas pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan sebesar 7,59 kriminalitas per 10.000 penduduk Kota Pekalongan

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun	AK
2010	8.25
2011	13.24
2012	10.71
2013	9.97
2014	7.83
2015	7.59

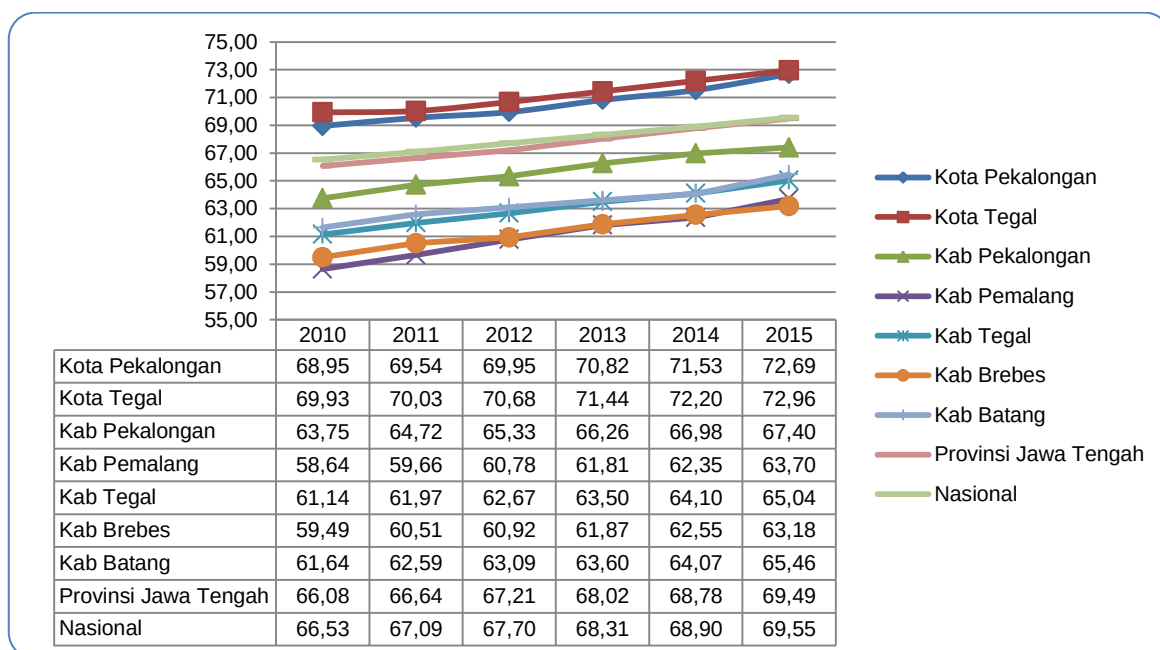
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar 68,95 menjadi 72,69 di tahun 2015. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2010 sampai 2015, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Pertanyaan dalam IPM yang terkait dengan “harapan lama sekolah” meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih jauh dari harapan. Hanya 12,59 % masyarakat yang menjawab memiliki harapan sekolah tinggi. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.



Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2016

Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2015 (%)

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1 atau semester 2. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, IPM Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat dari Tabel 2.14.

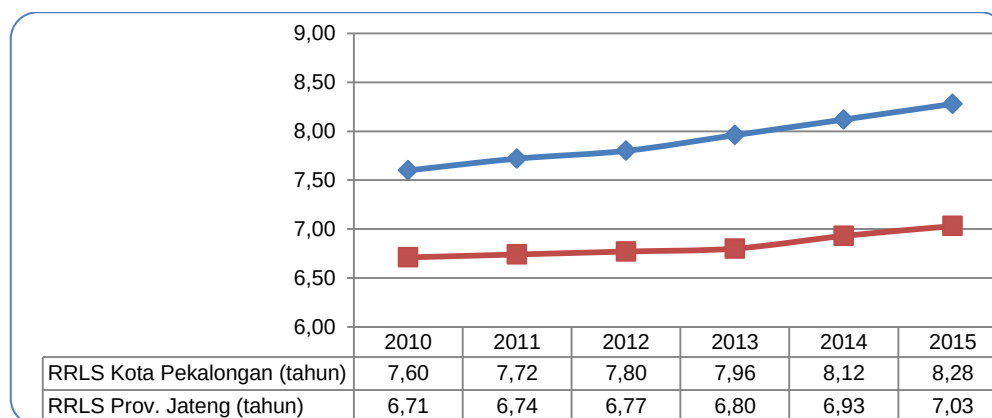
**Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia
Kota Pekalongan tahun 2010-2015**

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Angka Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (000 Rp)	IPM	Peringkat Provinsi
2010	7,60	10,96	73,91	10.224	68,95	11
2011	7,72	11,05	73,96	10.560	69,54	11
2012	7,80	11,13	74,01	10.756	69,95	11
2013	7,96	11,56	74,06	10.922	70,82	11
2014	8,12	11,93	74,09	11.006	71,53	11
2015	8,28	12,59	74,11	11.748	72,69	10

Sumber : bps, 2015

2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah hanya 7,6 tahun, pada tahun berikutnya, 2011, menjadi 7,72 tahun. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah menjadi 7,80 tahun, tahun 2013 sebesar 7,96 tahun dan tahun 2014 menjadi 8,12 tahun. Sedangkan pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah menjadi 8,28 . Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2015 berada pada angka 7,03.



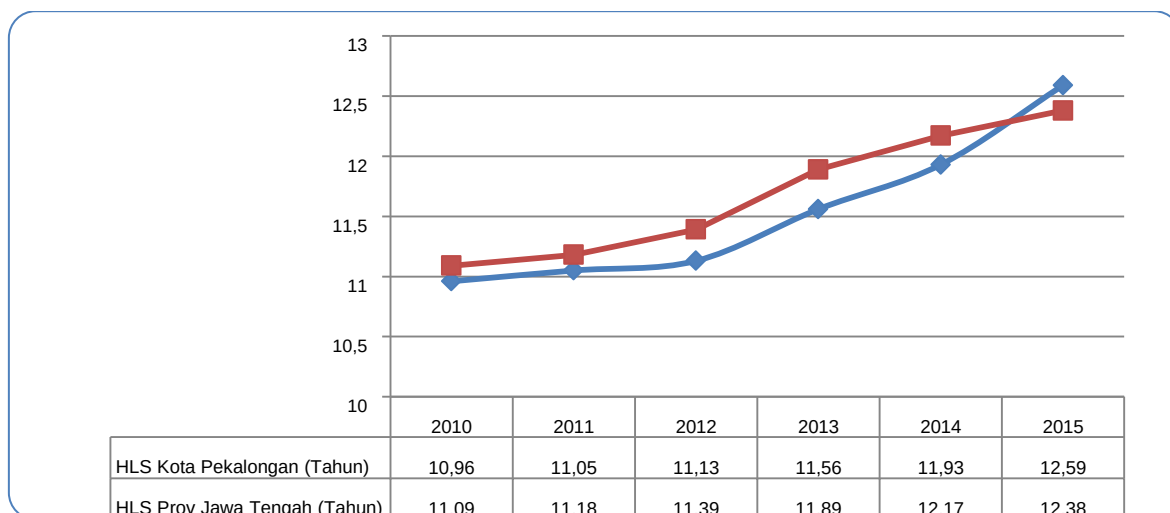
Sumber : BPS, 2015

**Gambar 2.15 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota
Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2015 (Tahun)**

2.2.10. Harapan lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

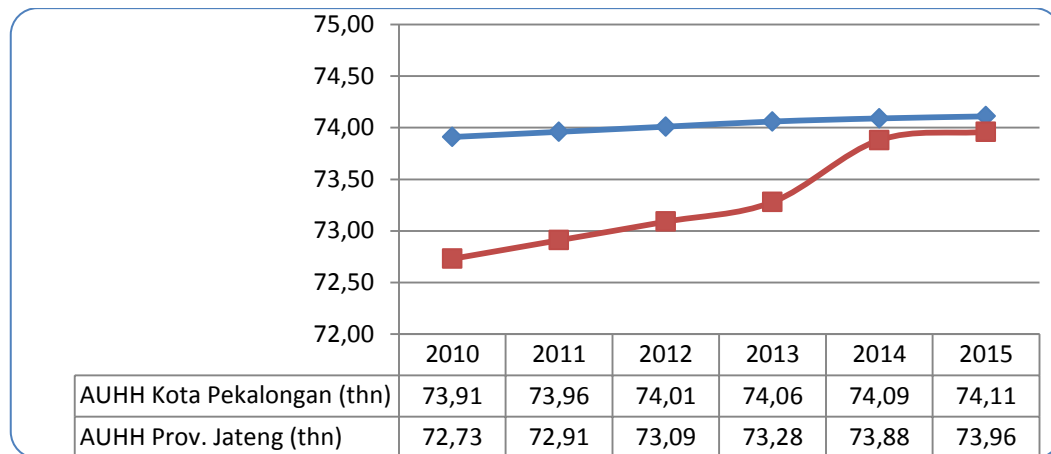
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2010 – 2015 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,87 persen. Pada tahun 2010, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 10,96 tahun, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,59 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2010 – 2015 meningkat 2,83 persen/tahun.

Pada tahun 2015, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan mencapai 12,59 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan pada tahun 2015 ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah yang besarnya 12,38 tahun.

2.2.11. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2010-2014, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,91 pada tahun 2010 menjadi 74,09 di tahun 2014.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, usia angka harapan hidup (UAHH) Kota Pekalongan lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.17. Dari tahun 2010-2014, UAHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.



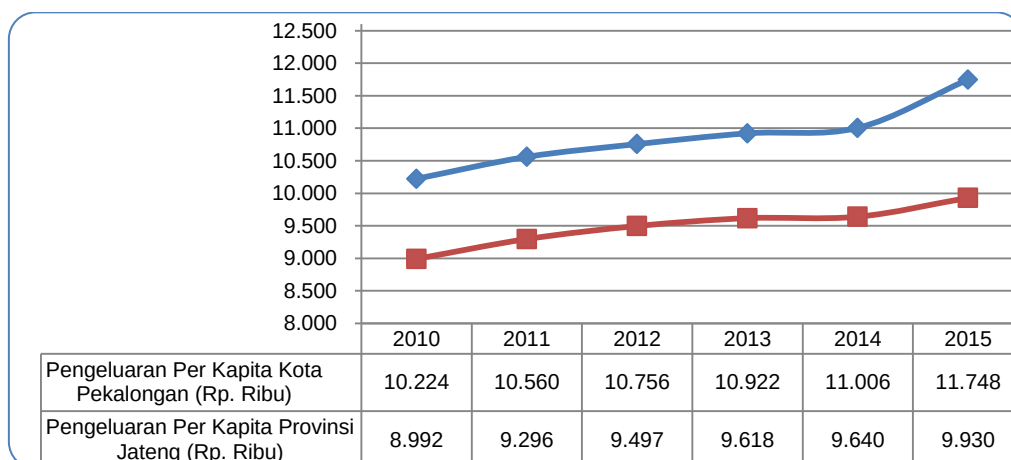
Sumber : BPS, 2016

Gambar 2.17 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

2.2.12. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2010-2014. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran riil per Kapita perbulan (d disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 10,224 juta, maka pada tahun 2011 meningkat secara riil menjadi Rp. 10,56 juta. Tahun 2012, pengeluaran riil per kapita menjadi Rp. 10,76 juta. Setahun kemudian, tahun 2013 menjadi Rp. 10,92 juta dan kembali naik di tahun 2014 menjadi Rp. 11 Juta. Di akhir tahun 2015, berdasarkan tahun dasar 2010, pengeluaran riil per kapita di Kota Pekalongan menjadi Rp. 11,75 juta.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2010 sampai 2014, pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan Kota Pekalongan menurut pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan gambar 2.18 menunjukkan perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2.18 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014

2.2.13. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTs/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2010	102,15	113,19	77,53	80,6	47,00	64,62
2011	107,97	102,67	94,15	92,8	52,58	64,93
2012	104,93	104,92	91,18	91,51	54,02	67,00
2013	107,6	108,95	85,48	87,42	44,11	70,00
2014	103,39	110,18	92,07	89,4	62,44	73,05

Sumber: www.bps.go.id, 2015

APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2014 mengalami parang surut. Bila pada tahun 2010 APK SD/MI hanya sebesar 102,15%, maka pada tahun 2011 dan 2013 nilainya naik yakni 107,97% dan 107,60%. Namun pada tahun 2012 dan 2014 mengalami penurunan menjadi 104,93% dan 103,39%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kota Pekalongan relatif lebih rendah.

APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 77,53%. Meningkat pesat pada tahun 2011 menjadi 94,15%. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 85,48%. Namun pada tahun 2014 naik menjadi 92,07%. Apabila disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SMP/MTs Kota Pekalongan masih relatif lebih rendah.

APK SMA/MA Kota Pekalongan mengalami peningkatan sampai tahun 2012. Penurunan terjadi pada tahun 2013 menurun menjadi 44,11 dari 54,02 pada tahun 2012. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2014 menjadi 62,44. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, secara rata-rata berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2014

Ratio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-Laki	Perempuan	
Angka Partisipasi Kasar (%)	SD/Setara	100,88	106,33	103,39
	SMP/Setara	100,72	85,44	92,07
	SMA/Setara	64,51	60,70	62,44
	PT	29,01	21,01	25,52

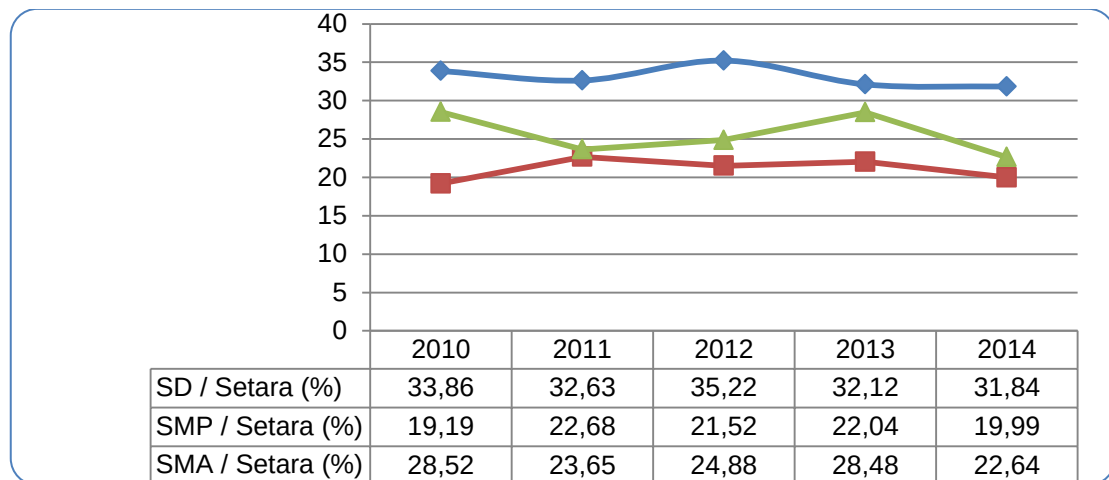
Sumber: www.bps.go.id, 2015

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih didominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang lebih tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar laki-laki lebih dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01.

2.2.14. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, Persentase lulusan SD/setara SD relatif lebih

tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2014 cenderung menurun. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2014, Persentase pendidikan yang ditamatkan menjadi 31,84%. Di tingkat SMP/setara, Persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014. Apabila pada tahun 2010 Persentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2014 turun menjadi 19,99%.



Gambar 2.19 Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Di tingkat SMA/setara, kecenderungan persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung menurun. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 28,52% maka pada tahun 2014 menjadi 22,64%.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014

Keterangan	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-Laki	Perempuan	
Ijazah Yang Dimiliki	Tidak Berijazah	11,45	13,70	12,58
	SD/Setara	33,49	32,45	32,97
	SMP/Setara	20,99	20,01	20,50
	SMA/Setara	26,53	24,05	25,28
	PT	7,53	9,79	8,67

Sumber : www.bps.go.id, 2015

Dari persentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian juga pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah SD. Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar 7,53 dan pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi lebih didominasi perempuan daripada laki-laki.

2.2.15. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM Kota Pekalongan

dari tahun 2010-2014 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan SMP/MTs dan SM/MA masih rendah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SM/MA	
	Kota	Prov	Kota	Prov	Kota	Prov
2010	87,33	95,93	68,55	69,72	36,29	45,00
2011	93,63	90,20	71,68	69,72	39,22	47,17
2012	91,22	92,05	69,01	72,52	42,30	51,11
2013	90,93	95,68	70,00	74,94	40,25	51,81
2014	94,06	96,45	76,84	78,57	45,87	58,11

Sumber : www.bps.go.id, 2015

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan selama tahun 2014 cukup menggembirakan. Hal ini tampak antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM berdasarkan gender adalah APM berdasarkan gender yang paling tinggi. Pada perguruan tinggi, APM berdasarkan gender memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak setiap orang mampu masuk perguruan tinggi karena kursi untuk PT lebih sedikit dibandingkan tingkat SD/ setara

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014

Ratio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	90,73	97,97	94,06
	SMP/Setara	75,95	79,82	76,84
	SMA/Setara	41,59	49,44	45,87
	PT	26,54	19,57	23,50

Sumber : www.bps.go.id, 2015

2.2.16. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2010 sampai 2014 semakin menurun per 1.000 kelahiran bayi. Penyebab semakin menurunnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini. Namun pada tahun 2014 AKHB naik menjadi 989,86 per 1.000 kelahiran bayi.

Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

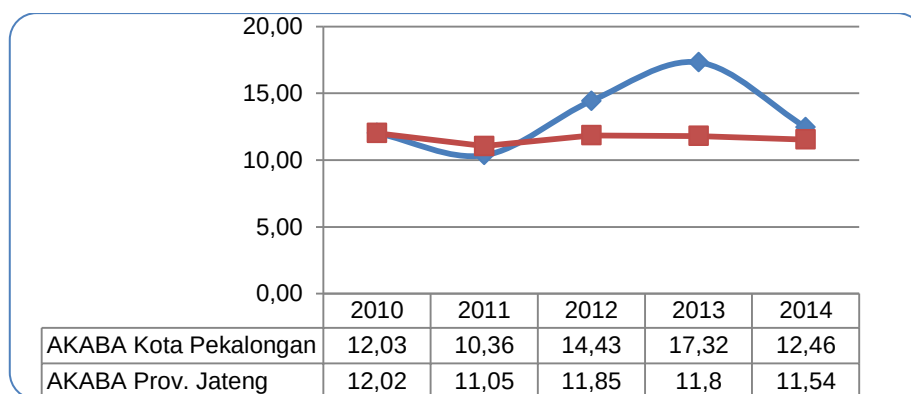
Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2010	9,30	990,70
2011	9,23	990,77
2012	11,80	988,20

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2013	14,19	985,81
2014	10,14	989,86

Sumber : *Pekalongan Dalam Angka, 2015*

Apabila dibandingkan dengan target dalam *MDGs (Milenium Development Goals)* tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan masih sesuai target. Namun demikian fluktuasi AKB dan AKHB ini perlu diwaspadai seharusnya semakin tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

2.2.17. Angka Kematian Balita (AKABA)



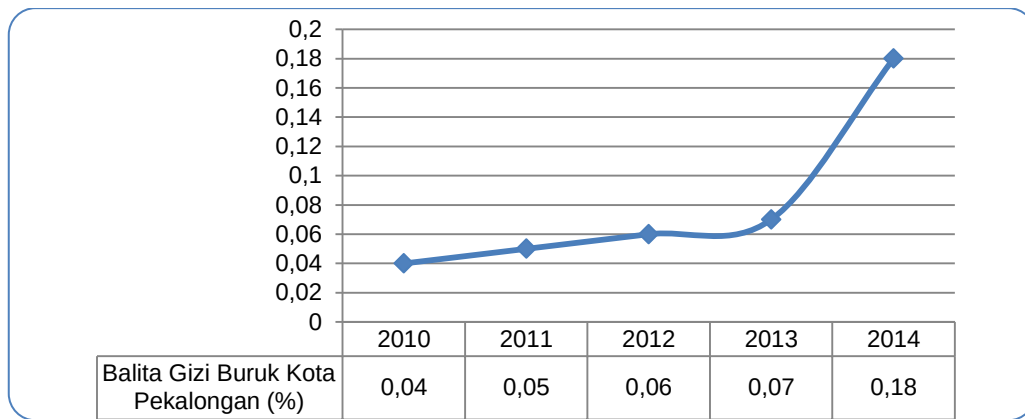
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2015, RKPD Prov. Jawa Tengah 2016, 2015

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2014 kurang baik, dikarenakan angkanya cenderung meningkat dari 10,36 per 1.000 KH (Tahun 2011) menjadi 17,32 per 1.000 KH (Tahun 2013) dan pada tahun 2013 di atas AKABA Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2014 AKABA Kota Pekalongan turun menjadi 12,46 meskipun masih di atas Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena penyakit.

2.2.18. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 balita gizi buruk sebesar 0,04%, namun pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 terus mengalami peningkatan. Gambar 2.21 menunjukkan persentase balita gizi buruk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.



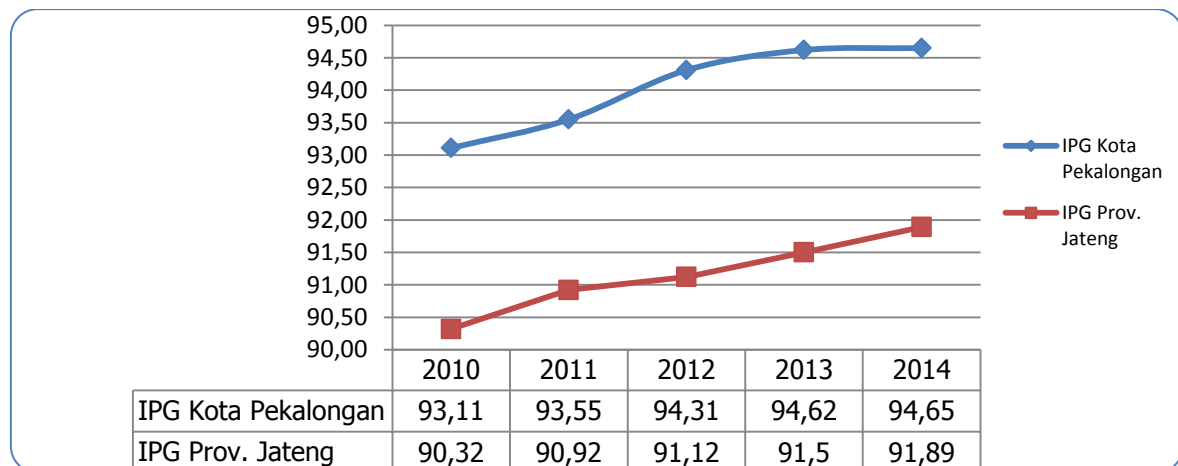
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2014, diolah

Gambar 2.21 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (%)

2.2.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 93,11 pada tahun 2010 menjadi sebesar 94,65 pada tahun 2014. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPG Kota Pekalongan jauh lebih baik secara rata-rata selama lima tahun terakhir.



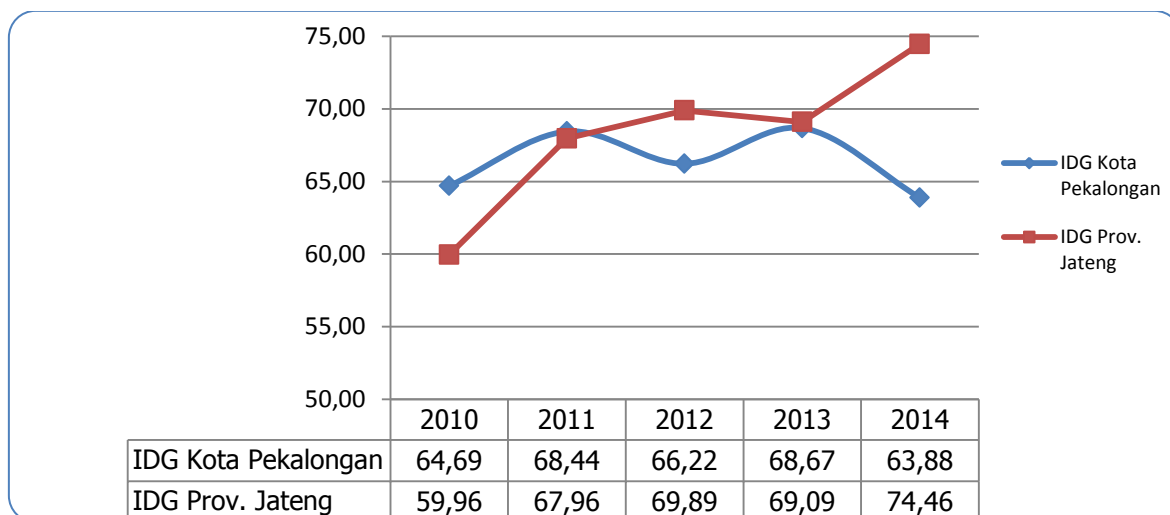
Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

2.2.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan berfluktuasi dari sebesar 64,69 pada tahun 2010 menjadi 63,88 di tahun 2014. Pada tahun 2012, IDG

Kota Pekalongan lebih baik dan menjadi 68,44. Namun pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya. Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada di bawah rata-rata provinsi. Ini dapat terlihat pada Gambar 2.23.



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

2.2.21. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di Kota Pekalongan.

Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Kelompok Kesenian	105	105	105	186	186
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok		3,8%	3,8%	3,8%	2,1%	2,1%

Sumber : *Dihubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015*

Tabel 2.21 menunjukkan perkembangan kelompok kesenian dan gedung kesenian di Kota Pekalongan. Berkaitan dengan aktifitas seni budaya di Kota Pekalongan, terlihat dalam kurun waktu 2010 sampai 2012 relatif stagnan. Namun pada tahun 2013 jumlah kelompok kesenian meningkat. Adapun gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013, relatif stagnan yakni berjumlah 4 gedung.

2.2.22. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20 organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisasi kepemudaan bertambah satu sehingga pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 21 organisasi.

Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu selama tahun 2010 sampai tahun 2014, kegiatan kepemudaan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Organisasi Pemuda	20	20	20	20	33
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	6	6	6	6

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2011-2015

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 terus berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Namun pada tahun 2014 jumlah organisasi kepemudaan berkurang menjadi 17. Sementara itu, fasilitas gedung olahraga Kota Pekalongan, sejak 2010 sampai 2014, jumlahnya tetap yaitu 2 gedung dan keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada sajian Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Klub Olahraga	18	18	20	20	17
2	Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013, jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Sedangkan mulai tahun 2014 naik menjadi 30 organisasi. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun 2010 sampai 2015 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan olahraga yang

tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2015 sebanyak 12 lapangan dengan kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olah raga Wilayah Dulongmas, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov).

Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	28	28	30	30
2	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3	3
3	Lapangan olahraga	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah kegiatan olahraga	6	7	6	7	6	7

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Pendidikan Dasar

1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2010-2015 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 98,98 pada tahun 2010 menjadi 102,64 di tahun 2016. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 83,23 pada tahun 2010 menjadi 102,55 di tahun 2016. Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2010 s.d. 2015 ditunjukkan dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ^{*)}
APS SD/MI	98,11	105,3	102,93	104,09	102,23	102,64
APS SMP/MTs	83,23	93,68	92,09	90	99,89	102,55
APS SM/MA	53,54	44,85	48,84	49,45	50,64	64,95

^{*)} Angka sementara

Sumber: dindikpora 2011-2016

Angka partisipasi Sekolah SM/MA sederajat secara rata-rata sepanjang enam tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hanya sebesar 53,54 maka pada tahun 2011 mengalami penurunan. Namun tahun 2012 sampai 2015 mengalami kenaikan secara simultan.

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2010-2015, ketersediaan jumlah SD/MI dari tahun 2010-2011 mengalami kenaikan. Tahun 2012 tidak ada penambahan SD/MI. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi pengurangan jumlah sekolah dasar karena adanya kebijakan penggabungan beberapa sekolah dasar(*regrouping*). Jumlah SD/MI dan SMP/MTs terjadi penurunan jumlah menjadi 27 dan 27 sekolah

Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014, bertambah 3 (tiga) sekolah dari 33 menjadi 36 sekolah. Adapun jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung mengalami penurunan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah SD/MI	168	170	170	146	145
Jumlah SMP/MTs	33	35	35	36	36
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	32.785	30.356	31.144	30.021	30.609
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	17.690	15.550	15.948	16.138	15.695

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua usia sekolah.

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2010-2015 rata-rata berfluktuasi cenderung mengalami penurunan sehingga pada tahun 2015 menjadi 37,36. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan ketersediaan sekolah setiap 10.000 usia sekolah pendidikan dasar.

Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun
2010	39,82
2011	44,66
2012	43,53
2013	39,43
2014	39,31
2015	37,36

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan , 2011-2015, diolah

3). Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2015, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar 594,56 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun 2011 meningkat menjadi 610,06 per 10.000 usia anak sekolah.

Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 616,98. Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah menjadi 596,76, meskipun kembali naik pada tahun 2014 menjadi 598,11 per 10.000 usia anak sekolah. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2015 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.28.

**Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
	Jumlah Guru	1.984	2.002	1.994	1.934	1.913	1.762
	Jumlah Murid	34.019	33.822	33.560	33.030	32.631	32.390
2	SMP/MTs						
	Jumlah Guru	913	959	1.002	970	991	954
	Jumlah Murid	14.706	14.714	15.151	15.633	15.922	15.913
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.897	2.961	2.996	2.904	2.904	2.716
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.725	48.536	45.559	48.663	48.432	48.303
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		594,56	610,06	616,98	596,76	598,11	562,28

Sumber : dindikpora, 2011-2015, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

**Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015**

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2010	2.897	1.549	1,87	48.725	0,384
2011	2.961	1.584	1,87	48.536	0,385
2012	2.996	1.605	1,87	48.559	0,384
2013	2.904	1.611	1,80	48.663	0,370
2014	2.904	1.642	1,77	48.553	0,364
2015	2.716	1.656	1,64	48.303	0,340

*) data pertengahan tahun ajaran

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.29, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami pasang surut dari tahun 2010-2015 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.29.

Pendidikan dasar terbagi atas dua jenjang yakni Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Menengah Pertama/ Setara. Dalam Tabel 2.30, digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2010-2014. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung stabil sampai 2013. Pada tahun 2014 rasionya mengalami penurunan menjadi 0,51 dikarenakan adanya guru yang memasuki usia pensiun dan pemerintah melakukan moratorium terhadap penerimaan aparatur sipil negara dari semua jenjang yang dibutuhkan baik aparatur sipil negara pendidikan maupun non pendidikan. Pada tahun 2014-2015, terjadi penurunan selama berturut-turut dikarenakan umalah guru dan jumlah kelas mengalami penurunan. Berikut data rasio guru dan murid jenjang SD/Sederajat Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.

**Tabel 2.30 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015**

Karakteristik	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Guru SD/MI*)	1.984	2.002	1.994	1.934	1.913	1.762
Rombongan Kelas*)	1.124	1.144	1.147	1.132	1.153	1.161
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,77	1,75	1,74	1,71	1,66	1,52
Murid SD/MI*)	34.019	33.822	33.408	33.030	32.631	32.390
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,47

*) data pertengahan tahun ajaran

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

Pada Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2010-2015. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung turun sampai 2014. Pada tahun 2010 rasionya 1,46. Namun sepanjang tahun sampai tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,21. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan rombongan belajar dan siswa SMP/Sederajat sedangkan guru cenderung turun dari tahun 2010-2015.

**Tabel 2.31 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MI
Kota Pekalongan Tahun 2010-2015**

Karakteristik	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
Guru SMP/MTs*)	913	959	1.002	970	991	954
Rombongan Kelas*)	425	440	458	479	489	408
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	2,15	2,18	2,19	2,03	2,03	2,34
Murid SMP/MTs*)	14.738	14.714	15.151	15.633	15.922	15.913

Karakteristik	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,46	1,48	1,44	1,30	1,27	1,21

*) data pertengahan tahun ajaran

**) Angka sementara

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

b. Pendidikan Menengah

1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 481,58 berpartisipasi untuk sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun 2015 naik menjadi 649,50 per 1.000 penduduk yang berpartisipasi bersekolah di sekolah menengah. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan.

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 Per 1.000 Penduduk

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
APS 16-18 tahun	481,6	616,3	634,2	594,4	641,1	649,5

Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan 2015 diolah

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2010-2014, ketersediaan SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan cenderung meningkat. Jumlah penduduk berusia 16-19 tahun pun bervariasi dari tahun 2010-2014, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.33.

Berdasarkan data pada tabel 2.33 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Apabila pada tahun 2010, per 10.000 penduduk hanya 13,67 maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 18,13 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Penduduk usia 16-19 tahun	Jumlah Sekolah Menengah	Rasio per 10.000 penduduk
2010	19.758	27	13,67
2011	15.720	27	17,18
2012	16.116	29	17,99
2013	17.087	29	16,97
2014	15.995	29	18,13

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015, diolah

3). Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga

pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran.

Selama kurun waktu tahun 2010-2014 rasio ketersediaan guru terhadap murid per 10.000 penduduk cenderung membaik. Bila pada tahun 2010 rasio tersebut sebesar 778,53 maka di akhir 2014 menjadi 764,29.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Karakteristik	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Guru SMA/SMK/MA	1.011	1.013	1.037	1.040	1.012
Siswa SMA/SMK/MA	12.986	13.029	12.998	13.015	13.241
Rasio guru terhadap murid(sekolah menengah) per 10.000 penduduk	778,53	777,50	797,82	799,08	764,29

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.35 perkembangannya.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Karakteristik	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Guru SMA/SMK/MA	1.011	1.013	1.037	1.040	1.012
Rombongan Kelas	399	416	428	441	451
Jumlah Guru Sekolah SM per Kelas	3	2	2	2	2
Murid SM	12.986	13.029	12.998	13.015	13.241
Rasio guru terhadap murid (SM) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,951	1,869	1,864	1,812	1,695

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

Rasio guru terhadap murid di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 1,951, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga pada tahun 2014 turun menjadi 1,695.

c. PAUD

PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,03%, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2014-2015 partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 49,32% dan 50,47%. Data selengkapnya, tersaji pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014**

Tahun	Jumlah siswaTK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2010	6.042	18.293	33,03
2011	6.648	14.782	44,97
2012	7.039	15.168	46,41
2013	7.222	14.731	49,03
2014	7.452	15.110	49,32
2015**)	7.669	15.195	50,47

**) Data Sementara

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

d. Fasilitas Pendidikan

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selama kurun waktu 2010-2013, Persentase rombongan belajar (rombel) sekolah SD/MI dalam kondisi baik cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Demikian pula dengan kondisi baik rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi fisik rombel dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan namun turun pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

**Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota
Pekalongan Dalam Kondisi Baik**

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	82,90	77,84	74,57	74,57	68,95
2	SMP/MTs	92,56	93,30	87,12	87,12	70,87
3	SMA/MA/SMK	93,40	87,20	93,56	93,56	88,18

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2010-2015

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan tetapi naik di tahun 2014. Pada tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,15%. Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013 menjadi 0,22%. Pada akhir 2014 naik menjadi 0,35%. Untuk SMA/SMK/MA, apabila pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi 1,18%. Namun pada akhir tahun 2014 menjadi 2,63%.

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2010-2014

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	0,17	0,13	0,09	0,07	0,15
2	SMP/MTs	0,72	0,41	0,28	0,22	0,35
3	SMA/SMK/MA	1,89	1,18	1,13	1,18	2,63

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

f. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan capaian 100%.

Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs selama kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi di tahun 2014 sudah mencapai 100%. Angka kelulusan SMA/SMK/MA dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 99,68% maka di tahun 2014 menjadi 99,93%.

Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTs	99,47	98,89	99,13	99,93	100,00
3	SMA/SMK/MA	99,68	99,90	99,95	99,93	99,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat trendnya. Untuk jenjang SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Penurunan terjadi sepanjang 2010-2014 terutama di lembaga pendidikan MI. Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kecenderungannya semakin membaik terutama di lembaga pendidikan MA dan SMK. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD	6,82	7,3	6,94	7,3	6,85
	MI	6,22	7,23	6,74	7,32	6,55
2	SMP	7,16	7,11	7,17	6,83	7,12
	MTs	6,88	6,96	6,79	6,73	6,89
3	SMA	7,81	8,2	8,32	8,04	7,80
	MA	7	8,08	7,74	7,34	7,56
	SMK	6,98	7,67	7,58	7,31	7,31

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

g. Angka Melanjutkan

Persentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 100,12% maka pada tahun 2014 menjadi sebesar 102,13%. Demikian pula

Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010 hanya sebesar 92,78% menjadi 98,47% di tahun 2014.

Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,12	101,98	102,19	103,53	102,13
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	92,78	98,27	102,05	97,61	98,47

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik ditunjukkan salah satunya dengan indikator kualifikasi jenjang pendidikan pendidik. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Secara rata-rata, Persentase guru yang kualifikasi S1/DIV semakin meningkat dari tahun 2010-2014, sebagaimana tertera pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	46,27	59,59	68,71	75,08	82,23
2	Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	86,09	87,90	88,92	90,62	91,02
3	Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi S1/DIV	92,78	93,68	94,89	96,06	95,16

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 15,45 per 1.000 penduduk menjadi 17,37 per 1.000 penduduk. Ini memberi manfaat atas pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu.

Tabel 2.43 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2010	390	25.235	15,45
2011	397	28.306	14,03
2012	399	25.295	15,77
2013	401	25.248	15,88
2014	403	23.201	17,37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 berdasarkan data pada Tabel 2.44, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.44 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

Tahun	Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2010	12	0,04	28	0,10	25	0,09	6	0,02
2011	12	0,04	27	0,09	21	0,07	7	0,02
2012	12	0,04	27	0,09	22	0,08	8	0,03
2013	12	0,04	29	0,10	22	0,08	8	0,03
2014	14	0,05	27	0,09	22	0,07	8	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Kurun waktu 2010-2014 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter spesialis berdasarkan data yang diolah telah mengikuti standar Indonesia Sehat 2010 yaitu 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,6 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. Ini setara 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,11 dokter gigi per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Standar nasional dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dokter Spesialis	0,11	0,16	0,15	0,25	0,26
Dokter Umum	0,36	0,32	0,37	0,29	0,34
Dokter Gigi	0,06	0,05	0,07	0,08	0,07
Rasio Dokter per satuan penduduk	0,53	0,54	0,60	0,62	0,67

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Perawat	1,36	1,80	1,76	1,66	2,13
Rasio Bidan	0,37	0,48	0,54	0,70	0,85

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Farmasi	0,66	0,76	0,79	0,79	0,83
Perawat	387	520	511	483	625
Bidan	106	140	157	203	249
Tenaga Farmasi	187	220	229	229	243

Sumber: Profil Kesehatan, 2011- 2015

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.47.

**Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	2010	2011	2012	2013	2014
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani **	100,00	80,03	96,62	98,81	89.95
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**	93,54	99,84	99,90	100,00	99.97
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**	100,00	100,00	100,00	97,72	100,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**	96,10	118,24	111,66	114,41	110.80
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**	100,00	214,39	202,00	149,00	166.05
Cakupan kunjungan bayi **	96,89	95,48	97,13	93,93	95.08

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015

**Standar Pelayanan Minimal

Data dalam satuan persen

**Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 (Persen)**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2010	2011	2012	2013	2014
Cakupan puskesmas	300	300	300	300	300
Cakupan pembantu puskesmas	59,57	57,45	57,45	61,70	57,45

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

Data dalam satuan persen

d. Persentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

ASI Eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya; menyelamatkan nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit, memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak, mengurangi kemungkinan obesitas, dan sebagainya.

Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 24,94%, maka pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2014 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif adalah 77,05% sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Persentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (%)
2010	2.478	618	24,94
2011	2.351	1.001	42,96
2012	2.499	1.375	55,02
2013	2.201	1.452	65,97
2014	2.227	1.716	77,05

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CFR TB per 100.000 penduduk	CR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2010	22,40	6,35	1,42	116,84	0	12
2011	7,50	4,17	2,46	195,72	1	8
2012	5,17	0,00	2,76	173,24	4	9
2013	21,00	3,28	3,44	230,00	3	21
2014	15,74	6,38	1,67	182,52	12	19

Sumber: Profil Kesehatan 2011- 2015

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Dari tahun 2010-2014 berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Penduduk miskin di Kota Pekalongan berdasarkan PPLS hanya sebesar 24.100 orang pada tahun 2014, berbeda dengan tahun 2010 yang berjumlah 26.400 orang. Namun pada kenyataannya, penerima BPJS kesehatan di Kota Pekalongan melebihi jumlah penduduk miskin. Kondisi ini menggambarkan masih belum adanya keakuratan data. Berikut disajikan data penduduk miskin di Kota Pekalongan serta jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Pekalongan tahun 2010-2014. Adapun data pada tahun 2012 dan 2013 diambil berdasarkan backcasting dengan pertimbangan hasil proyeksi SP 2010 oleh BPS yang dikeluarkan pada setiap bulan September.

Tabel 2.51 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (PPLS)	Jumlah Penerima Jamkesmas	% Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	% Penerima Jamkesda
2010	26.400	100.073	35,49	11.488	4,07
2011	28.300	100.073	35,11	14.488	5,08
2012	27.300	100.073	34,75	14.488	5,03
2013	24.100	75.916	26,10	39.321	13,52
2014	24.100	75.916	25,85	39.321	13,39

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2014 dan www.bps.go.id

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Dalam bidang Pekerjaan Umum, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, drainase dan irigasi, air minum, air limbah dan persampahan.

a. Jalan

Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2014. Panjang jalan negara adalah 10,73 km secara umum dari tahun 2010-2014 dalam kondisi yang semakin membaik. Jalan provinsi selama lima tahun mengalami peningkatan kondisi dengan kondisi 2014 100% baik kondisi jalannya. Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami perbaikan secara signifikan namun pada tahun 2014 jalan dengan kondisi baik berkurang dari 106,91 km menjadi 105,77 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kota	
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan Provinsi (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km) **
2010	10,73	8,30	4,22	0,28	131,32	62,87
2011	10,73	9,61	4,22	0,84	131,33	85,37
2012	10,73	10,73	4,22	0,84	131,33	99,57
2013	10,73	10,73	4,22	0,84	131,13	106,91
2014	10,73	10,73	4,22	4,22	133,13	105,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2011-2015

**Standar Pelayanan Minimal

b. Irigasi dan Drainase

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka pada tahun 2014 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.53.

**Tabel 2.53 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Jaringan Irigasi	26,58 %	26,58 %	26,58 %	26,58 %	26,58 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Kota Pekalongan memiliki 4 sungai utama. Sungai utama tersebut yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Banger, Sungai Meduri dan Sungai Breml. Sebagai tujuan utama aliran air dari sungai-sungai kecil di Kota Pekalongan, keempat sempadan sungai-sungai tersebut tidak seluruhnya bebas dari hunian liar maupun bangunan-bangunan baik keperluan bisnis maupun rumah. Dari tahun 2010-2013, rasio sempadan yang terbangun hunian liar semakin meningkat. Pada tahun 2014 menurun menjadi 40% karena adanya pembongkaran saluran air di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Berikut rasio sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar.

**Tabel 2.54 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014**

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	40%	42%	45%	50%	40 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

**Tabel 2.55 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014**

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
Luas irigasi kota dalam kondisi baik	62,81%	71,21%	71,95%	77,38%	75,16%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

Panjang keseluruhan Sistem Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Breml, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
- Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
- Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Breml, Sub sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur, Saluran Sekunder Podo Timur.

Kota Pekalongan merupakan daerah rawan genangan banjir dan rob. Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan

lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5%
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Tabel 2.56 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan

No	Nama Jalan	Kelurahan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Jenis	Kondisi	Fungsi
1	Jl. Pasar Ratu	Bendan	115	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
2	Jl. Pemuda	Bendan	210	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Rusak	Sekunder
3	Jl. KHM masyur	Bendan	930	0.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
4	Jl. Gajahmada	Bendan	475	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
5	Jl. Slamet	Bendan	470	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
6	Jl. Kerinci	Bendan	100	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
7	Jl. Bengawan	Dukuh	830	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
8	Jl. Sekrading	Dukuh	770	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Primer
9	Jl. Garuda	Kandang Panjang	300	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
10	Jl. Cendrawasih	Kandang panjang	235	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Sekunder
11	Jl. Cendrawasih	Kandang panjang	235	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Baik	Sekunder
12	Jl. Kapuas	Kandang panjang	245	0.5	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
13	Jl. Jend Sudirman	Kebulen	1400	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
14	Jl. Wahid Hasyim	Keputren	259	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
15	Jl. Dr Cipto	Keputren	560	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
16	Jl. Sulawesi	kergon	417	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Sekunder
17	Jl. Bengawan	Kraton lor	830	0.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Baik	Sekunder
18	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	460	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
19	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	460	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
20	Jl. Bahagia	Kraton Kidul	300	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
21	Jl. Sejahtera	Kraton Kidul	295	0.6	Ps Batu Belah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
22	Jl. Kemakmuran	Kraton Lor	290	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
23	Jl. Progo	Kraton Lor	300	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Sekunder
24	Jl. Imam Bonjol	Kraton Lor	225	0.8	Ps Batu Belah	Tertutup	Sebagian Rusak	Sekunder
25	Jl. Hayam Wuruk	Kraton lor	880	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
26	Jl. Progo	Kraton lor	750	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
27	Jl. Dharma	Medono	780	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder

No	Nama Jalan	Kelurahan	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Jenis	Kondisi	Fungsi
	bakti							
28	Jl. RA Kartini	Noyontaan	780	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
29	Jl. Tondano	Noyontaan	775	0.5	sal. Tanah	Terbuka	Rusak	Sekunder
30	Jl. Dr. sutomo	Noyontaan	440	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
31	Jl. Ahmad Yani	Noyontaan	530	0.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Primer
32	Jl. Wahidin	Noyontaan	1250	1.2	Ps Batu Belah	Tertutup	Sebagian Rusak	Primer
33	Jl. Seta Budi	Noyontaan	176	1		Terbuka	Rusak	Primer
34	Jl. Dr Sutomo	Noyontaan	300	1.6	Ps Batu Belah	Tertutup	Rusak	Sekunder
35	Jl. WR Supratman	panjang wetan	290	0.6	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
36	Jl. Kutilang	panjang wetan	450	1.5	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
37	Jl. Wilis	podo sugih	145	0.5	Ps Batu Belah	Tertutup	Baik	Sekunder
38	Jl. Urip Sumoharjo	podo sugih	178	0.6	sal. Tanah	Gorong - gorong	Baik	Primer
39	Jl. Kerinci	podo sugih	750	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Rusak	Primer
40	Jl. Cempaka	poncol	830	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Primer
41	Jl. Dr. Wahidin	poncol	700	1.2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
42	Jl. Teratai	poncol	4360	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
43	Jl. Seruni	poncol	980	2	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
44	Jl. Melati	poncol	172	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
45	Jl. Manggis	sampangan	560	0.5	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
46	Jl. Hasanudin	sampangan	1200	0.8	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
47	Jl. S. Agung	sampangan	1000	0.8	sal. Tanah	Gorong - gorong	Sebagian Rusak	Sekunder
48	Jl. Surabaya	sugihwaras	525	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
49	Jl. Surabaya	sugihwaras	535	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
50	Jl. Bandung	sugihwaras	313	0.5	sal. Tanah	Gorong - gorong	Rusak	Sekunder
51	Jl. Semarang	sugihwaras	365	0.7	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Sekunder
52	Jl. KH Agus salim	sugihwaras	830	0.8	Ps Batu Belah	Terbuka	Sebagian Rusak	Sekunder
53	Jl. Bandung	sugihwaras	160	1	Ps Batu Belah	Terbuka	Baik	Primer
	TOTAL PANJANG		31.715	M				

Sumber : DPUPTK Kota Pekalongan, 2011

c. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum pada tahun 2008 baru 70,78%, yang memiliki fasilitas air minum bersama 12,25%, yang kebutuhan air minum dari fasilitas umum 3,67% dan yang tidak memiliki fasilitas air minum rumah tangga 13,3%

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 46,32% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Persentase ini semakin meningkat dan di tahun 2014 mencapai 76,14% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Angka ini sudah memenuhi *Millenium Development Goals* yaitu sebesar 75% pada tahun 2015.

Cakupan sanitasi dasar pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 35% dari jumlah penduduk kota Pekalongan. Dari tahun 2010-2014 semakin meningkat cakupannya dan di tahun 2014 telah mencapai 90,57% dari total penduduk Kota

Pekalongan. Capaian sanitasi ini telah memenuhi target capaian *Millenium Development Goals* yaitu sebesar 72% pada tahun 2015.

Persentase layanan persampahan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 persentase layanan persampahan mencapai 75% dari seluruh wilayah Kota Pekalongan maka pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 80%. Dan pada tahun 2014 mencapai 80,40%.

Tabel 2.57 Persentase Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Air minum yang aman	46,32	62,50	65,64	71,45	76,14
Sanitasi	35,00	40,00	52,00	89,84	90,57
Persampahan	75,00	75,00	80,00	80,00	80,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015

d. Pengendalian Banjir

Sebagai daerah dengan ketinggian 0-6 meter di atas permukaan air laut, Kota Pekalongan rawan terhadap bencana banjir dan rob. Peningkatan ketinggian permukaan air laut telah mengancam wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai. Jalan dan juga permukiman dengan berbagai fasilitasnya di sepanjang Jalan Samudra adalah wilayah yang paling besar potensi kerusakannya. Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.58

Tabel 2.58 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Revetment (meter)	3.021	3.478	4.826	5.563	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Persentase Revetment terbangun	49,12%	56,55%	78,47%	90,46%	100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016

Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan

batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

- a. peningkatan peran kota sebagai PKW;
- b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
- d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
- f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
- g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
- h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,4% dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan kecenderungan peningkatan sehingga pada tahun 2014 sebesar 0,130. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi, terutama terkait penurunan ketaatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 70%. Ketaatan terhadap RTRW yang menurun drastis pada tahun 2014 ini harus segera ditemukan penyebab dan pemecahannya. Secara rinci kinerja sub urusan penataan ruang di Kota Pekalongan tahun 2010-2014 tergambarkan pada Tabel 2.59.

**Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014**

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik	-	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	-	0,092	0,103	0,114	0,124	0,130
3.	Ketaatan terhadap RTRW	%	79	80	80	81	70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015, diolah

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Layak Huni

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 11,42%. Ini setara dengan 6.937 unit rumah. Tahun 2010-2014 rasio rumah tidak layak huni semakin membaik. Rumah layak huni pada tahun 2010 sebesar 88,58% menjadi 89,87% pada tahun 2014. Perkembangan jumlah rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 dapat dilihat di Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (%)	Jumlah (unit)	Rasio (%)
2010	60.744	6.937	11,42%	53.807	88,58%
2011	68.209	7.237	10,61%	60.972	89,39%
2012	69.215	7.745	11,19%	61.470	88,81%
2013	69.829	8.353	11,96%	61.470	88,03%
2014	73.162	7.413	10,13%	65.749	89,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2015

b. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah pembagi antara jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Rasio rumah layak huni dari tahun 2010-2014 terus mengalami perbaikan. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,1888 maka pada tahun 2014 menjadi 0,2239 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.61. Berikut perkembangannya selama lima tahun.

Tabel 2.61 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Penduduk	Rasio
2010	60.744	53.807	285.010	0,1888
2011	68.209	60.972	289.194	0,2108

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Penduduk	Rasio
,2012	69.215	61.470	290.347	0,2117
2013	69.829	61.470	290.870	0,2113
2014	73.162	65.749	293.704	0,2239

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2015

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pengguna air bersih di Kota Pekalongan semakin meningkat seiring dengan adanya Pamsimas dan replikasinya.

**Tabel 2.62 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Rumah Tangga (Air Bersih)	32.078	43.803	47.494	52.254	56.328
Jumlah Rumah Tangga	69.253	70.084	72.356	73.267	73.980
Rasio Rumah Tangga (Air Bersih)	46,32%	62,50%	65,64%	71,32%	76,14%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda, 2011-2015, diolah

Apabila pada tahun 2010 jumlah rumah tangga pengguna air bersih hanya sebanyak 32.078 maka pada tahun 2014 sebanyak 56.328. Adapun rasio rumah tangga pengguna air bersih meningkat dari 46,32% di tahun 2010 menjadi 76,14% di tahun 2014. Cakupan pelayanan air bersih telah memenuhi target capaian *Millenium Development Goals* tahun 2015 sebesar 75% untuk air bersih perkotaan.

d. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebanyak 58.937 rumah tangga dari 65.253 rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan, maka pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan jumlah pelanggan rumah tangga. Adapun persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 rumah tangga pengguna listrik 90,32%. Pada tahun 2011 persentase pelanggan rumah tangga turun ke 87,98% dan kembali naik sampai puncaknya berdasarkan data 2014 sebesar 96,77% dengan 71.051 pelanggan rumah tangga.

**Tabel 2.63 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Tahun	Pelanggan RT	Jumlah RT	Persentase RT Pengguna Listrik
2010	58.937	65.253	90,32%
2011	61.663	70.084	87,98%
2012	65.000	72.356	89,83%
2013	68.362	73.267	93,31%
2014	71.051	73.426	96,77%

Sumber: BPS, 2011- 2014, diolah

e. Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor

lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002).

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2010, cakupan pelayanan sebesar 35% maka pada tahun 2013 mencakup 89,84%. Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015 dengan target 72%.

Tabel 2.64 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	22.839	28.034	37.625	65.823	71.552
Jumlah Rumah Tangga	65.253	70.084	72.356	73.267	106.552
Rasio Rumah Tangga Bersanitasi	35%	40%	52%	89.84%	90,57 %

Sumber: AMPL dan Analisa Pokja AMPL, 2015

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010 - 2014 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkoba, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.65.

Tabel 2.65 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2010-2015

No	Tindak Kejahatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembunuhan	0	0	0	1	0	0
2	Pemerkosaan	2	1	0	2	0	2
3	Penganiayaan	1	4	29	29	9	17
4	Pencurian	5	139	195	199	187	33
5	Penipuan	25	29	45	41	31	13
6	Penadahan	0	0	5	8	4	0
7	Narkoba dan Psikotropika	19	10	10	11	10	18

Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka, 2011-2016

b. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan. Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Kegiatan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kegiatan pembinaan Politik Daerah	2	2	6	6	32

Sumber : Kesbangpol, 2011-2015.

c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2010 - 2014 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 1 kali. Selanjutnya kegiatan terinci tersaji sebagaimana Tabel 2.67

Tabel 2.67 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2010-2014

No	Kegiatan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	0	0	0

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2011-2015.

d. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong raja. Selama kurun waktu 2010-2013 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan meningkat dari 0,71 menjadi 0,79, namun pada tahun 2014 turun menjadi 0,75. Dengan adanya Banpol (Non PNS) maka rasio Satpol+Banpol meningkat dari 2,98 (tahun 2010) menjadi 3,85 (tahun 2014).

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung turun. Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2010-2014.

Tabel 2.68 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Persentase
1	2010	20	281.991	0,71
2	2011	22	285.026	0,77
3	2012	23	287.978	0,79
4	2013	23	290.870	0,79
5	2014	22	293.704	0,75

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 2,98 per 10.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 3,85 per 10.000 penduduk pada tahun 2014. Peningkatan rasio ini terlihat sangat signifikan pada tahun 2013 dengan perekrutan tambahan sebesar 15 Polisi PP dan ditambahkan kemudian pada tahun 2014 sebanyak 11 Polisi PP

Tabel 2.69 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kota Pekalongan

No	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Persentase
1	2010	84	281.991	2,98
2	2011	86	285.026	3,02

No	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Persentase
3	2012	87	287.978	3,02
4	2013	102	290.870	3,51
5	2014	113	293.704	3,85

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pelanggaran sebanyak 327 pelanggaran. Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah meningkat pada tahun 2011 menjadi 520 kasus dengan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku sebesar 100%. Sampai pada tahun 2013, penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100%. Pada 2014, penyelesaian hanya sebesar 72,48%. Adapun penyelesaian ini hanya terkait dengan pelanggaran K3.

Tabel 2.70 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2010	327	327	100,00
2	2011	520	520	100,00
3	2012	210	210	100,00
4	2013	277	277	100,00
5	2014	149	108	72,48

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.71 dan Tabel 2.72.

Tabel 2.71 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2010	30	281.991	1,06
2	2011	30	285.026	1,05
3	2012	30	287.978	1,04
4	2013	30	290.870	1,03
5	2014	30	293.704	1,02

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2014

Apabila Linmas inti digabung dengan Linmas yang ada di kecamatan dan kelurahan yang melibatkan peran serta masyarakat luas maka rasio ini menjadi lebih baik. Apabila pada tahun 2010 per 10.000 penduduk dilindungi 55,32 satuan Linmas maka pada sampai tahun 2013 rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.71 dan Tabel 2.72. Rasio ini mencapai puncaknya menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Rasio ini menurun pada tahun 2014 menjadi 59,65 per 10.000 penduduk karena adanya pengurangan jumlah anggota Linmas sebesar 12 personel sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah.

Tabel 2.72 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2010	1.560	281.991	55,32
2	2011	1.665	285.026	58,34
3	2012	1.720	287.978	59,72
4	2013	1.764	290.870	60,65
5	2014	1.752	293.704	59,65

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Tabel 2.73 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
1	2010	1.680	47	35,74
2	2011	1.970	47	41,91
3	2012	2.115	47	45,00
4	2013	2.350	47	50,00
5	2014	510	27	18,90

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2015, panti yang ada di Kota Pekalongan tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun tidak berubah. 1 panti milik pemerintah dan 7 panti milik swasta. Jumlah anak yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan jumlah anak asuh menjadi 390 anak pada 2014 dan menjadi 217 pada tahun 2015. Secara detail kondisi ini terlihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
1	2010	8	337
2	2011	8	274
3	2012	8	827
4	2013	8	827
5	2014	8	390
6	2015	8	217

Sumber : Dinsosnakertrans. 2011-2015

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah 75.916 jiwa yaitu pada tahun 2015. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

**Tabel 2.75 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2015**

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GenerasiMudaPenyandangMasalahKesra	-	201	-	-	-	-
KeluargaPenyandangSosialPsikologi	2	-	-	-	-	-
AnakTerlantar/Gelandangan	565	201	236	236	254	254
UsiaLanjut/Jompo/Terlantar	6.355	2.310	2.323	2.323	942	942
WanitaRawanSosial	804	1.011	670	670	880	865
Keluarga yang Kondisi/Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	4.931	-	4.865	4.865	4.545	4.545
AnakNakal	53	48	58	58	51	51
KorbanPenyalahgunaanNarkoba	12	77	74	74	74	74
PenyandangCacat	1.109	288	460	460	998	966
-Tubuh	335	118	123	123	307	297
-Netra	200	40	43	43	170	170
-Mental	352	25	35	35	341	328
-Ganda	41	27	85	85	31	30
-Wicara	181	78	174	174	149	141
BekasPenyandangPenyakitKronis	312	58	21	21	-	-
Gelandangan	7	19	153	153	6	6
TunaSusila	18	20	22	22	4	4
Waria	-	3	-	-	-	-
BekasNarapidana	228	144	151	151	135	22
Bencana Alam	15	7	-	-	-	-
Fakir Miskin	31.274	28.380	29.765	29.765	29.765	75.916
JUMLAH	6.794	3.055	39.258	39.258	38.652	84.611

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2011-2015

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah 37 unit, karang taruna berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 333 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No	Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perintis / Pejuang Kemerdekaan	2	2	2	2	2	0
2	Kader Kepemimpinan Sosial Wanita	90	90	90	90	90	90
3	Pekerja Sosial Masyarakat	288	333	288	288	288	288
4	Karang Taruna	36	47	47	47	51	51
5	Organisasi Sosial	14	37	7	7	7	0

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015

Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah panti asuhan sampai dengan tahun 2015 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak asuh mencapai 217 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah dan sisanya yaitu 7 panti milik swasta.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

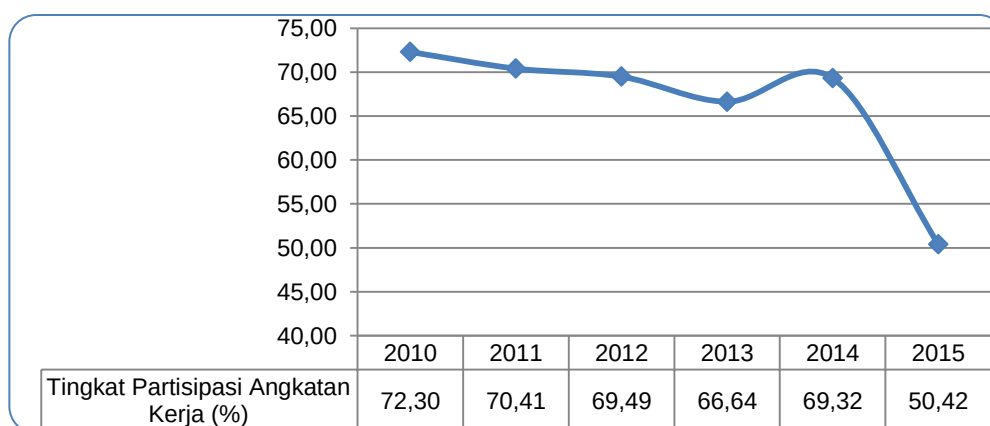
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.77 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
1	2010	145.149	72,30
2	2011	141.466	70,41
3	2012	142.422	69,49
4	2013	138.916	66,64
5	2014	151.553	69,32
6	2015	149.507	50,42

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2010 sampai 2015 mengalami penurunan.



Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015.

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jika pada tahun 2010 angka partisipasi angkatan kerja adalah 72,3% maka pada tahun 2014 turun menjadi 69,32%. TPAK terus menurun pada tahun 2010-2015 terjadi karena menurunnya kesempatan kerja tetapi juga dapat diakibatkan sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011-2015 meningkat sehingga dapat berimplikasi terhadap menurunnya TPAK.

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut disajikan angka sengketa pengusaha-pekerja atau yang dikenal perselisihan hubungan industrial selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 2.78 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
1	2010	11	315	3,49
2	2011	24	315	7,62
3	2012	18	315	5,71
4	2013	33	315	10,48
5	2014	18	320	5,63

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015.

Tabel 2.78 menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Walaupun demikian masih diperlukan perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan agar kegiatan investasi berjalan lancar.

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan persentase pencari kerja yang sudah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar di Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 56,27%. Data pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam Tabel 2.79.

Tabel 2.79 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

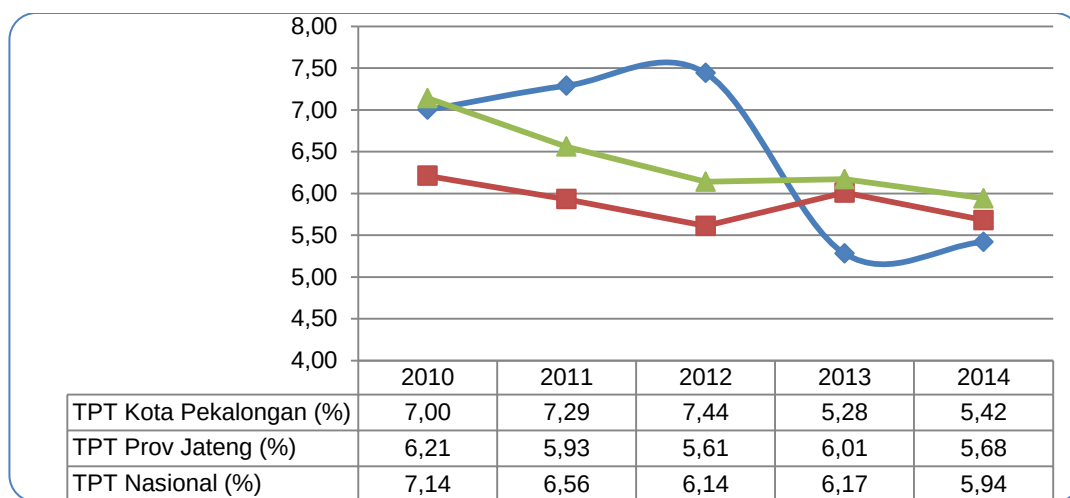
No	Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan			Persentase
		AKL	AKAD	AKAN	
1	2010	305	39	253	17,28
2	2011	23	71	100	9,14
3	2012	1.09	0	55	37,48

No	Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan			Persentase
		AKL	AKAD	AKAN	
4	2013	679	217	90	33,53
5	2014	854	83	86	56,27

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan sampai 2014 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun agak sedikit meningkat kembali di tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber : www.bps.go.id, 2015

Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPT Kota Pekalongan pada tahun 2011 dan 2012 masih di atas TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi pada tahun 2013 dan 2014 TPT Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

f. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan. Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 keselamatan dan perlindungan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dalam penerapannya. Jumlah atau persentase perusahaan yang menerapkan K3 berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun kondisi tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2010. Berikut persentase perusahaan yang menerapkan K3 seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Persentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
1	2010	260	310	83,87%
2	2011	270	312	86,54%

No	Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
3	2012	290	315	92,06%
4	2013	300	320	93,75%
5	2014	280	320	87,50%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.81.

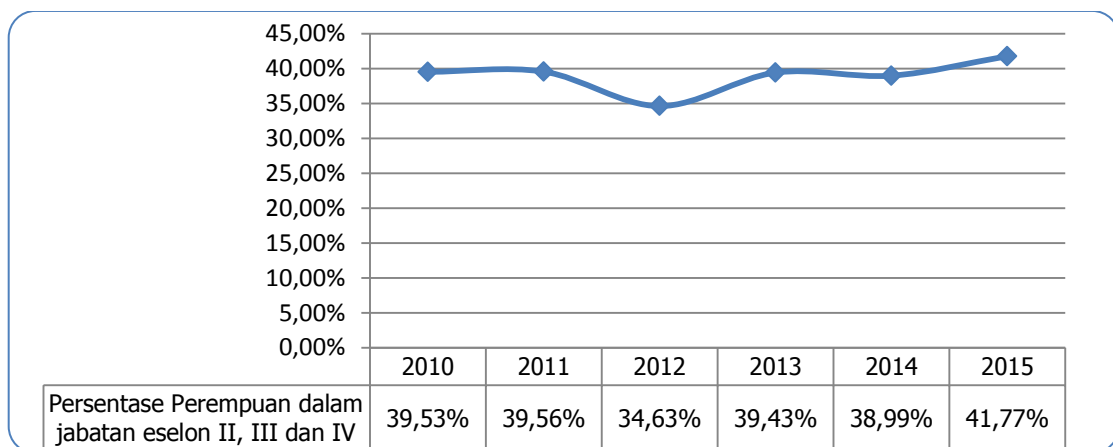
Tabel 2.81 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.128	2.115	2.046	2.007	2.007
Jumlah pekerja perempuan (org)	6.789	6.776	55.548	56.536	56.536
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	31,34	31,21	3,68	3,55	3,55

Sumber : BPMP2AKB, 2014, diolah

b. Pesentase Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010-2015 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 39,53%. Pada tahun 2015 partisipasi perempuan dalam jabatan ASN meningkat menjadi 41,77%.

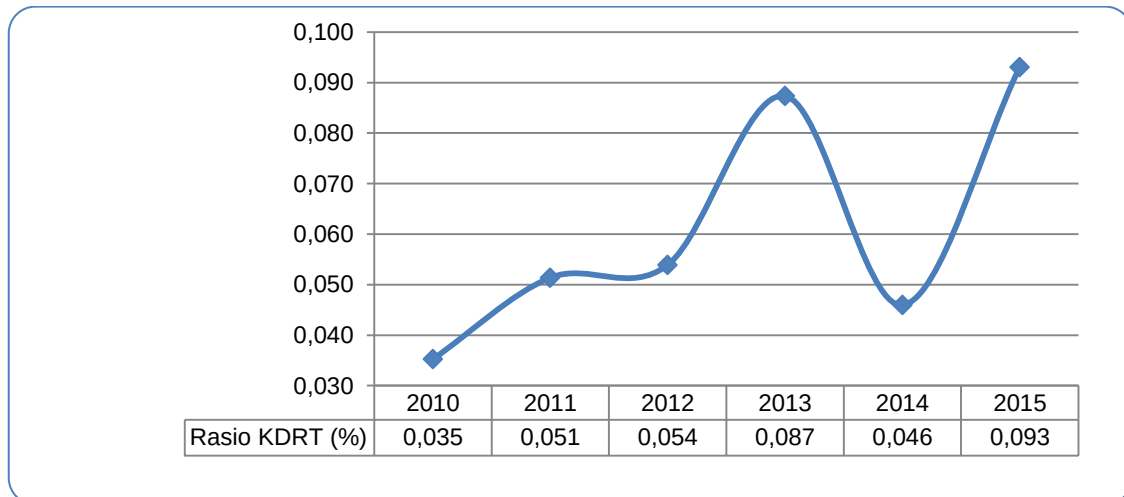


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah. 2016

Gambar 2.26 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan ASN Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2010-2015 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka rasio 0,035%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093% sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.27.

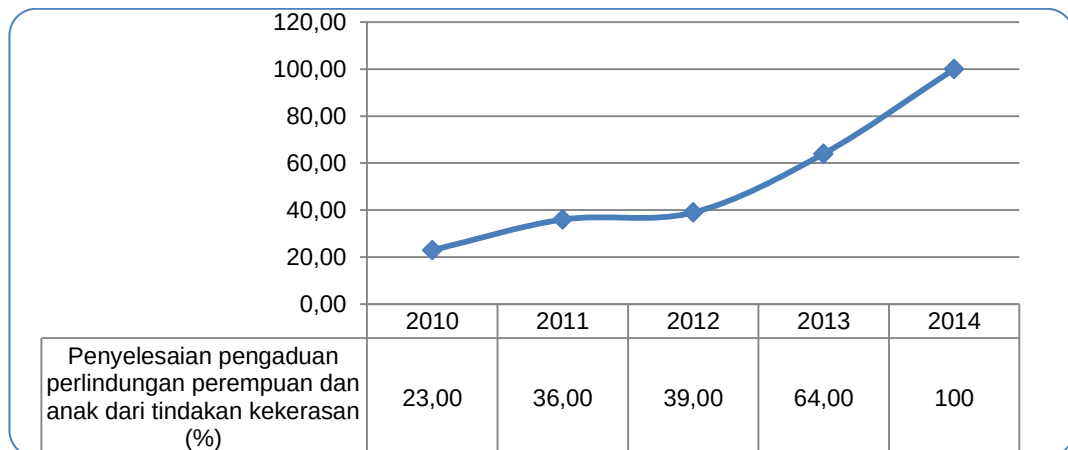


Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.27 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

c. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.28 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Gambar 2.28 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hanya 23% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama

dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada tahun 2014 terjadi penurunan ketersediaan pangan yang disebabkan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Pekalongan. Hal seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.82.

Tabel 2.82 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
1	2010	9.531.236	281.991	33,80
2	2011	9.437.434	285.026	33,11
3	2012	7.092.511	287.978	24,63
4	2013	6.136.302	290.870	21,10
5	2014	4.674.618	293.704	15,92

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi. Skor PPH selama lima tahun terus meningkat. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
1	2010	82,6
2	2011	83,6
3	2012	85,4
4	2013	87,1
5	2014	87,8

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani menunjukkan penurunan, namun ada kecenderungan peningkatan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.84.

**Tabel 2.84 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014**

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Padi-padian	Kg/Kap/th	89,68	92,01	92,27	90,97	94,00
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	14,38	15,44	17,4	17,23	18,20
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	123,57	115,67	110,93	74,93	78,50
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	6,33	6,42	5,70	8,72	8,70
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	6,92	6,97	7,35	14,21	13,80
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	43,18	43,68	35,39	23,68	24,60
Gula	Kg/Kap/th	12,78	12,91	11,78	7,65	8,00
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	95,76	96,88	102,69	98,74	99,50
lain-lain	Kg/Kap/th	0,99	1,02	1,16	3,38	3,60

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Konsumsi utama masyarakat Kota Pekalongan masih didominasi oleh jenis padi-padian, kacang-kacangan, dan hewani. Seperti kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya padi-padian menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi asupan konsumsi berenergi. Berikut perkembangannya tercakup pada Tabel 2.85.

**Tabel 2.85 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun
2010-2014**

Konsumsi Energi per kapita/hari	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Padi-padian	Kg/Kapita/hr	885,52	908,50	911,44	897,70	992,50
Umbi-umbian	Kg/Kapita/hr	42,33	45,31	50,66	49,00	119,10
Pangan Hewani	Kg/Kapita/hr	349,13	327,77	316,21	241,30	238,20
Minyak dan Lemak	Kg/Kapita/hr	150,78	152,94	136,22	214,10	198,50
Buah/biji berminyak	Kg/Kapita/hr	28,47	28,71	32,94	76,90	59,50
Kacang-kacangan	Kg/Kapita/hr	392,43	397,02	321,87	215,10	99,20
Gula	Kg/Kapita/hr	128,05	129,41	118,10	76,50	99,20
Sayur & Buah	Kg/Kapita/hr	78,23	79,10	86,03	86,90	119,10
lain-lain	Kg/Kapita/hr	8,17	8,40	9,73	24,00	59,50

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan

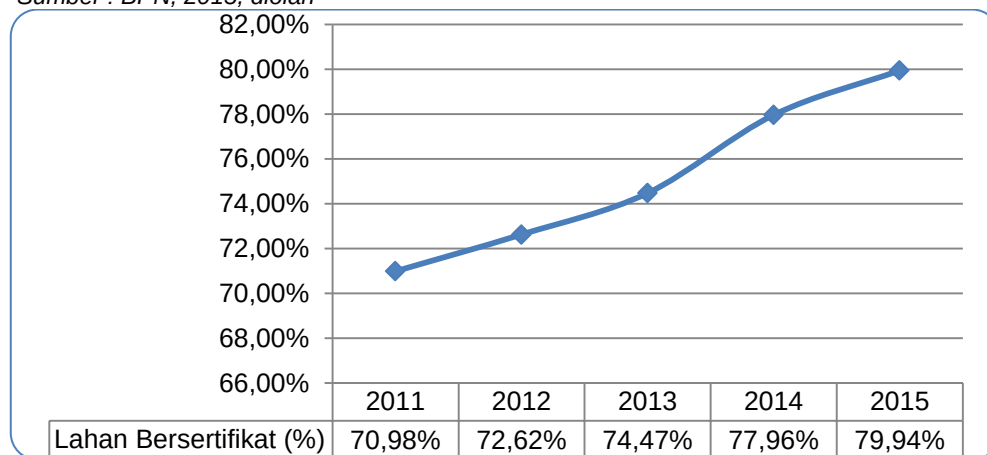
antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
Luas tanah bersertifikat	3.211,95	3.286,15	3.369,75	3.527,49	3.617,23
– Hak Milik	2.647,07	2.716,38	2.790,15	2.838,12	2.880,99
– HGB	256,89	260,55	266,39	278,63	286,96
– Hak Guna Usaha	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
– Hak Pakai	245,04	246,02	248,81	344,68	382,56
– Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
– Hak Wakaf	53,18	53,45	54,63	56,31	56,96
Lahan Bersertifikat (%)	70,98%	72,62%	74,47%	77,96%	79,94%

Sumber : BPN, 2015, diolah



Sumber : BPN, 2015, diolah

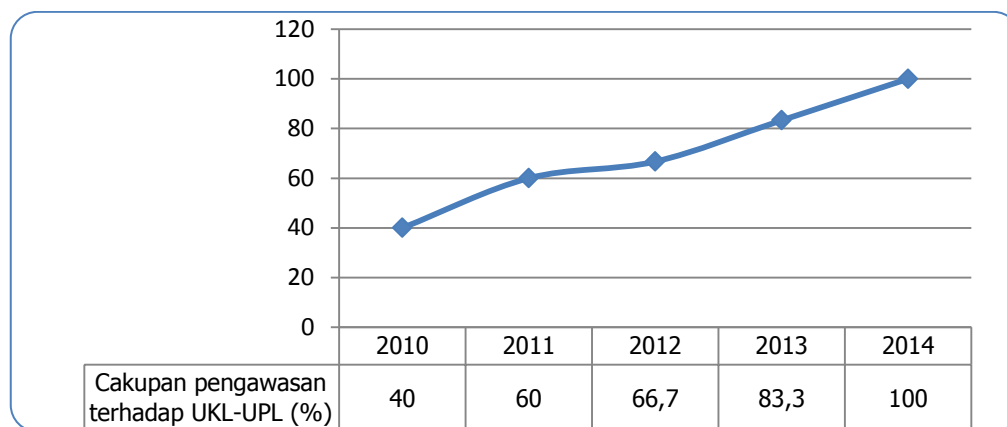
Gambar 2.29 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

Gambar 2.29 menunjukkan kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 luas lahan bersertifikat adalah 70,98% maka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2015 sebanyak 79,94% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.30.



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.30 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2010-2014

Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat kasus lingkungan masing-masing 7 kasus, tahun 2012 dengan 5 kasus dan tahun 2013 dengan 6 kasus dapat diselesaikan dengan baik.

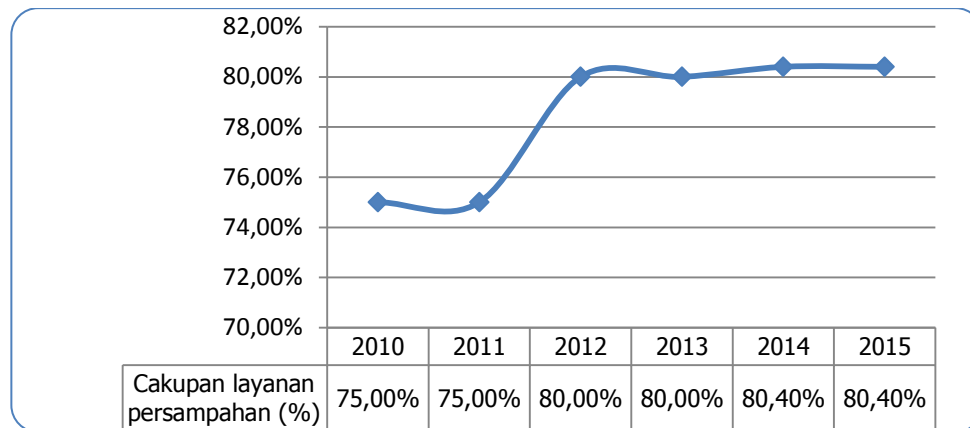
Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 201-2015 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.87 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

IPAL	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Jml Industri	Limbah (m3)	Jml Industri	Limbah (m3)	Jml Industri	Limbah (m3)	Jml Industri	Limbah (m3)	Jml Industri	Limbah (m3)	Jml Industri	Limbah (m3)
Kauman	26	70	26	70	26	70	26	70	26	70	26	70
Jenggot	75	400	75	400	75	400	75	400	75	400	75	400
Industri Kecil	1		3		5		22		43		73	378
IPAL Bersama	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450
Industri Besar	5	150	5	150	5	150	5	150	5	150	5	450
IPAL Biogas Duwet	20	20	45	40	60	60	80	80	93	100	118	120
IPAL Biogas Ternak	2	10	3	40	4	80	5	120	5	180	7	210
Jumlah	132	1.100	160	1.150	178	1.210	216	1.270	250	1.350	307	2.078

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan seperti ditunjukkan dalam gambar 2.31.



Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016

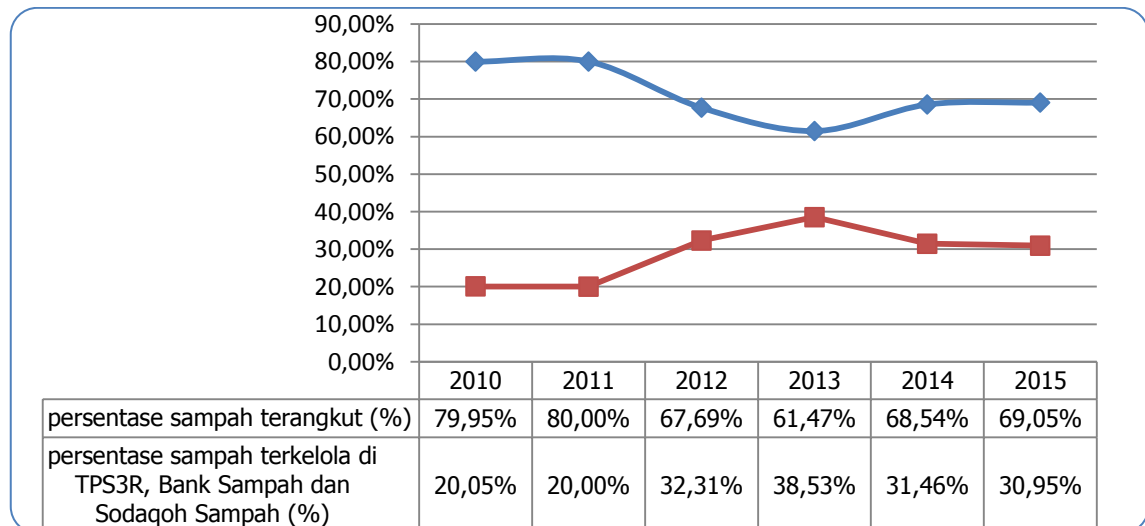
Gambar 2.31 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2010-2015 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2010-2015. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sdaqoh sampah selama tahun 2010-2016 pengelolaannya setiap hari semakin membaik. Puncaknya, pada tahun 2013 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir mencapai 341 m³ per hari.

Tabel 2.88 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan

Data Sampah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sampah terangkut (m ³)	614,00	580,00	572,00	544,00	610,00	618,00
Sampah terkelola di TPS3R, bank Sampah dan Sdaqoh Sampah (m ³)	154,00	145,00	273,00	341,00	280,00	277,00
Jml Sampah tertangani (m ³)	768,00	725,00	845,00	885,00	890,00	895,00

Sumber : BLH Kota Pekalongan, 2016



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

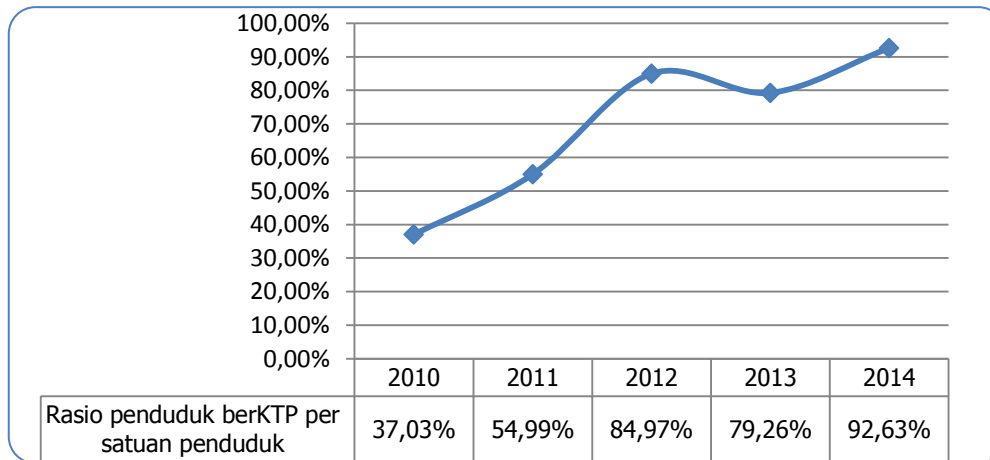
Gambar 2.32 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Adapun saat ini umur TPA diperpanjang sampai 2018. Pengoperasian TPA Degayu tersebut adalah *control landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah

0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP



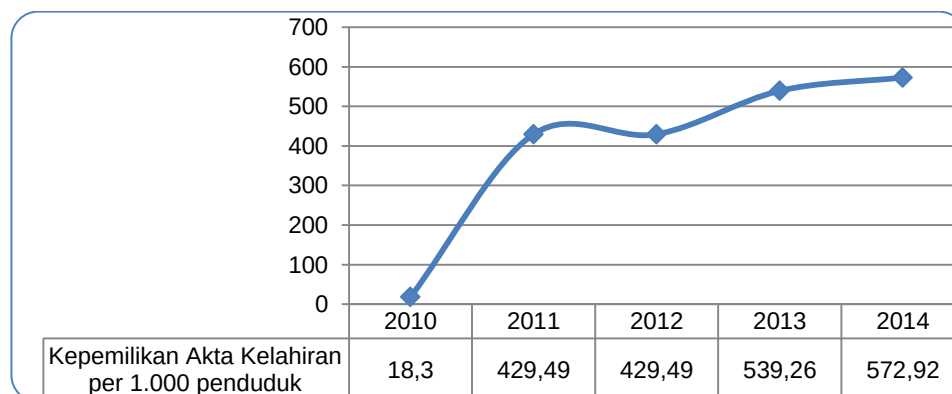
Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.33 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah. Rasio Kepemilikan KTP bagi penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2010-2014 kondisinya bervariasi. Penerapan e-KTP dan pendaftaran ulang bagi pemilik KTP lama yang dimulai pada tahun 2012 membawa konsekuensi pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio karena jumlah penduduk yang mendaftar ulang KTPnya lebih besar dari kebutuhan e-KTP yang tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk ber-KTP semakin meningkat dan pada tahun 2014 penduduk yang ber-KTP meningkat menjadi 92,63%. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.33.

b. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka pemerintah daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya.



Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.34 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2010 sampai dengan 2014 ditunjukkan dalam gambar 2.34.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah LPM
1	2010	47
2	2011	47
3	2012	47
4	2013	47
5	2014	27

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015.

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.90. Jumlah pada akhir 2014 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan

Tabel 2.90 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1	2010	52
2	2011	52
3	2012	52
4	2013	52
5	2014	32

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu Posyandu berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa pensiun. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
1	2010	394
2	2011	397
3	2012	399
4	2013	401
5	2014	403

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 cukup stabil meskipun sedikit berfluktuasi. Apabila pada tahun 2010 sebesar 79,50 maka di tahun 2014 sebesar 79,45. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2010-2014 tersaji pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

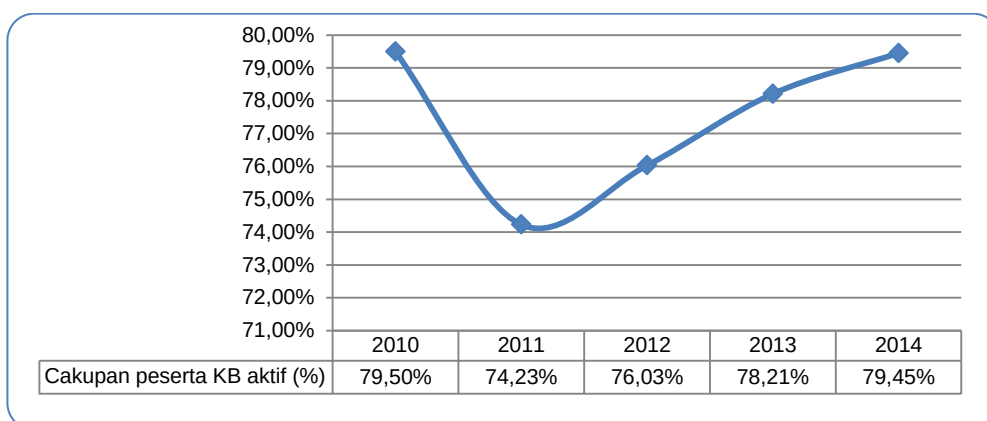
No	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
1	2010	44.264	35.191	79,50
2	2011	45.649	33.883	74,23
3	2012	46.391	36.902	76,03
4	2013	47.755	37.350	78,21
5	2014	46.409	36.872	79,45

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 cakupan peserta aktif KB cukup stabil meskipun sedikit

berfluktuasi. Cakupan peserta aktif KB tertinggi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan gambar 2.35.



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.35 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 sebesar 37,05% dari total 84.341 KK, maka pada akhir 2014 menjadi 34,63% dari total 77.061 KK di Kota Pekalongan.

Tabel 2.93 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2010	84.341	31.246	37,05
2	2011	89.485	30.023	33,55
3	2012	89.488	20.254	33,81
4	2013	92.776	29.270	31,55
5	2014	77.041	26.683	34,63

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. 2015

9. Perhubungan

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat.

Salah satu permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan adalah belum adanya jalan lingkar / jalan tol sehingga seringkali mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan karena kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat melintasi Kota Pekalongan melintasi jalur pantura. Kemacetan dihitung dengan ukuran *VC Ratio* yang didapat dari kondisi eksisting pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.94. Meskipun secara rata-rata *VC Ratio* masih di bawah 1, namun beberapa ruas jalan seperti Jalan Merdeka dan Jalan Pemuda sudah melebihi 1, artinya pada ruas jalan tersebut sudah mengalami kemacetan yang akan mempengaruhi ruas jalan lain.

Tabel 2.94 VC Ratio Beberapa Ruas Jalan di Pantura

NO	NAMA JALAN	KAPASITAS JALAN	VC RATIO	
			2013	2014
1	Dr. Sutomo	5.702	0,82	0,83
2	Gajah Mada	5.588	0,64	0,77
3	Merdeka	2.720	0,94	1,01
4	Pemuda	3.925	0,95	1,02
5	Jend Sudirman	4.463	0,89	0,94
6	Dr. Setiabudi	3.347	0,86	0,99
7	Wilis - Sriwijaya	2.143	0,57	0,66
8	KH. Mansur	3.981	0,70	0,74
RATA-RATA			0,80	0,87

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2016

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Hal ini memiliki makna 2,56 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi 0,000252 atau 2,52 per 10.000 penduduk. Dan tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun kembali menjadi 0,000251 dan kembali turun di tahun 2014 sehingga menjadi 0,000249. Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun 2010-2014 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin menurunnya persentase tersebut menunjukkan tidak adanya perkembangan trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat.

Tabel 2.95 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Persen
2010	73	285.010	0,0256%
2011	73	289.194	0,0252%
2012	73	290.347	0,0251%
2013	73	290.870	0,0251%
2014	73	293.704	0,0249%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi serta angkutan regional Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang. Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014.

Tabel 2.96 Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Terminal Tipe A	1	1	1	1	1

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan Persentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2014. Meskipun jumlah penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2014 turun namun jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.97.

**Tabel 2.97 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Otobis AKAP AKDP	227	337	574	574	574
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	189.345	180.204	180.484	180.276	180.255
Persentase Angkutan Darat	0,12%	0,19%	0,32%	0,32%	0,32%

Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2015, diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 519 kendaraan. Tahun 2011 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 499 kendaraan, tahun 2012 meningkat 497 kendaraan, tahun 2013 sebanyak 504 kendaraan dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 509 kendaraan.

**Tabel 2.98 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	519	499	497	504	509

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendara ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (*Smoke Tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (*Co-Hc*) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan *Pit Lift* dan *Play Detector*, uji lampu utama; uji *side slip*; uji *axle load*; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapannya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada Tabel 2.99.

**Tabel 2.99 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Lama Pengujian (Menit)	20	20	20	20	20

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2010-2014, terlampir pada Tabel 2.100.

**Tabel 2.100 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Kota Pekalongan 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Perkembangan pemasangan rambu-rambu sebagai fasilitas perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.101.

**Tabel 2.101 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun n	46	61	285	342	364
Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia	130	155	480	480	480
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	35,38%	39,35%	59,38%	71,25%	75,83%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana pada Tabel 2.102 berfluktuasi dari tahun 2010-2013. Pada tahun 2014 merupakan puncak terbanyak jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan. Perkembangan jumlah ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Perkembangan selengkapny dapat dilihat pada Tabel 2.102.

**Tabel 2.102 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui
Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2010	182.597
2011	210.633
2012	179.768
2013	195.528
2014	317.899

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam memajukan pemerintahan yang terintegrasi informasi, Pemerintah Kota Pekalongan

telah membangun sistem informasi manajemen. Jumlah SIM yang telah dibangun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan karena SIM merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah memiliki web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.103.

Tabel 2.103 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah SIM	2	7	12	36	35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terminal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah.

Tabel 2.104 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jaringan telepon genggam	10	10	10	10	10
Stasioner	55	55	55	55	55
Jumlah jaringan komunikasi	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Surat Kabar	10	10	10	10	10

Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penyiaran Radio	9	9	9	9	10
Jumlah Penyiaran TV	13	13	14	14	14

Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan periode 2010-2014

Tabel 2.107 Persentase Rumah Tangga Pengguna *Fix Wireline* di Kota Pekalongan 2010-2014

Tahun	SST	Jumlah RT	Persentase Pengguna Fix Wireline
2010	16,151	65,253	24,75%
2011	16,096	70,084	22,97%
2012	16,348	72,356	22,59%
2013	15,998	73,267	21,84%
2014	15,653	73,981	21,16%

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase koperasi aktif

Koperasi aktif binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Jika pada tahun 2010 koperasi aktif adalah 83,12%, maka pada tahun 2014 koperasi aktif meningkat menjadi 86,08%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam Tabel 2.108.

Tabel 2.108 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
1	2010	197	237	83,12
2	2011	202	241	83,82
3	2012	216	254	85,04
4	2013	230	268	85,82
5	2014	232	270	86,08

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010 jumlah UMKM adalah 16.620, maka pada tahun 2015 jumlah UMKM meningkat menjadi 22.934.

**Tabel 2.109 Jumlah UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2010 - 2015**

No.	TAHUN	KOMPONEN UMKM				JUMLAH
		PERDAGANGAN (SIUP)	INDUSTRI KECIL MENENGAH	PEDAGANG PASAR	PEDAGANG KAKI LIMA	
1	2010	7.128	2.956	5.775	761	16.620
2	2011	7.558	2.982	6.055	793	17.388
3	2012	7.809	3.020	6.056	835	17.720
4	2013	8.327	3.942	6.114	910	19.293
5	2014	8.778	4.367	6.225	1.003	20.373
6	2015	9.243	6.319	6.311	1.061	22.934

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2016.

12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang menanamkan modalnya pada Tahun 2010-2014 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2010, sebanyak 547 investor. Perkembangan jumlah investor di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Investor (PMA/PMDN)	547	476	460	477	417
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	1.112	383	291	612	1.117
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	5.014	5.304	4.210	2.444	2.154
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	9,17	11,14	9,15	5,12	5,17

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2011-2015.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun berfluktuasi. Tenaga kerja yang terserap paling tinggi pada tahun 2012 dengan rasio daya serap 11,14. Namun pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan sehingga rasio tenaga kerja yang terserap pada tahun 2014 menjadi 5,17, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.110.

Nilai realisasi PMDN Tahun 2010 sebesar Rp. 226,2 milyar, meningkat 122,99% dari Tahun 2009. Tahun 2011 nilai PMDN sebesar Rp. 354,5 milyar, meningkat 56,72% dari Tahun 2010. Tahun 2012 nilai PMDN sebesar Rp. 395,3 milyar, meningkat 11,51% dari Tahun 2011. Tahun 2013 nilai PMDN sebesar Rp. 721,2 milyar, meningkat 82,45% dari Tahun 2012. Dan tahun 2014 nilai PMDN sebesar 1,117 Triliun meningkat 54,9% dari tahun 2013. Kondisi semakin meningkatnya nilai PMDN ini dapat diterjemahkan bahwa semakin menariknya Kota Pekalongan sebagai daerah tujuan investasi, salah satunya ditentukan oleh kemudahan perizinan investasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	226,205	354,506	395,326	721,263	1,117,834
Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi (Rp. Milyar)	101,442	226,205	354,506	395,326	721,263

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2011-2015.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2010-2014 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 6 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada Tahun 2010 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaan. Pada tahun 2014 terjadi penambahan organisasi kepemudaan menjadi 21 organisasi kepemudaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	20	20	20	20	21
2	Jumlah kegiatan Kepemudaan	6	6	6	6	6
3	Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Namun pada tahun 2014, jumlah organisasi olahraga menurun menjadi 25 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah kegiatan olahraga dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	28	28	25
2	Jumlah kegiatan Olahraga	5	5	5	5	5
3	Jumlah Lapangan Olahraga	12	12	12	12	12

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2011-2015.

14. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 antara lain Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2014, IPM 2010-2014, Indeks Harga Konsumen 2010-2014, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2014 dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2014. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.

15. Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi meng-claim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, persandian sebagai alat mengamankan informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pengamanan LPSE, DIPA, e-audit BPK dan penerimaan e-CPNS.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 16 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.

Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.114.

**Tabel 2.114 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	19	18	20	23	16
2	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
3	Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	27	206	206	206	206

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015.

17. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2010-2014, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 69.482 orang Tahun 2010 menjadi 96.922 orang Tahun 2014.

Di sisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, dimana peningkatan tersebut cukup optimal jika dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
1	2010	69.482	281.991	0,25
2	2011	79.556	285.026	0,28
3	2012	91.626	287.503	0,32
4	2013	95.897	290.870	0,33
5	2014	96.922	293.704	0,33
6	2015	86.127	293.704	0,29

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015

Tabel 2.116 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Uraian Data	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah Perpustakaan					
1	Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	3
3	Perpustakaan RW	-	100	188	245	328
4	Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
5	Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
6	Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
7	Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015.

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan PD Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2010 - 2014 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan pengelolaan arsip di Kota Pekalongan. Pengelolaan arsip pada PD di Kota Pekalongan ditunjukkan Tabel 2.117.

Tabel 2.117 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

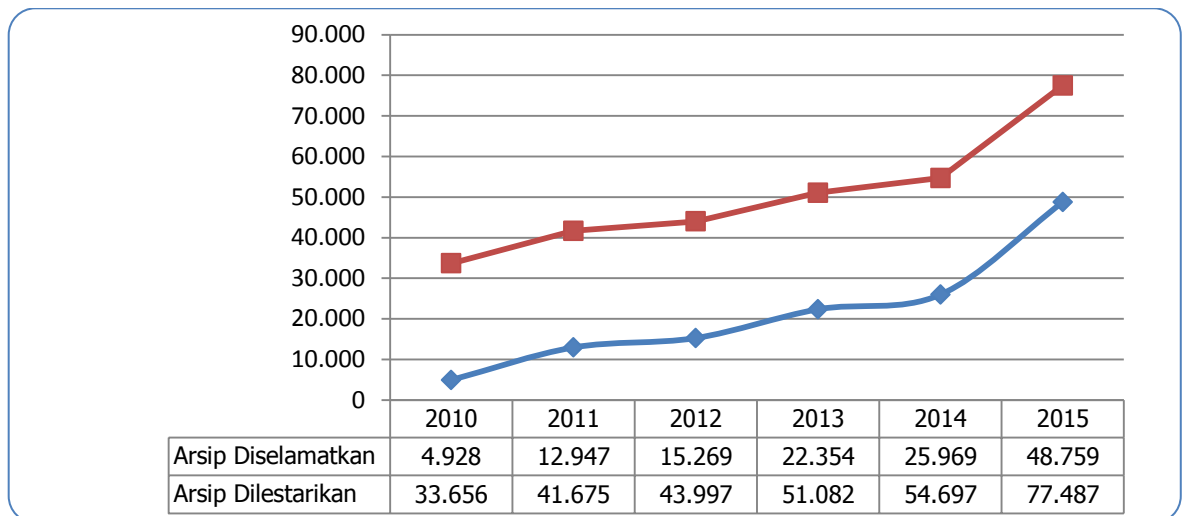
No	Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
1	2010	34	19	55.88%
2	2011	34	20	58.82%
3	2012	34	20	58.82%

No	Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
4	2013	34	21	61.76%
5	2014	34	22	64.71%

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015

Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik.



Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015

Gambar 2.36 Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan Di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Gambar 2.36 menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Meskipun pada kurun waktu 2010-2013 jumlah ikan tangkap turun dari 18.363 menjadi 17.602, tetapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 20.624, namun secara umum dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan produksi.

Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2014 melebihi target. Ini terlihat dari persentase yang dicapai 134,89% dari target. Kondisi ini diakibatkan kenaikan produksi ikan payau dari tahun 2010 ke tahun 2014 sebesar 68,91%.

Produksi dari budidaya ikan tawar, secara umum juga menunjukkan kenaikan produksi. Pada tahun 2014 persentasenya melebihi target yakni mencapai 134,46% dari yang ditargetkan. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya dilihat pada Tabel 2.118.

**Tabel 2.118 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014 (kg)**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Ikan Tangkap					
	a. Jumlah Produksi Ikan	18.363	18.680	19.459	17.602	20.624
	b. Target Daerah	25.680	25.680	21.405	20.033	20.033
	Persentase Produksi	71,51	72,74	90,91	87,87	102,95
2	Ikan Budidaya Air Payau					
	a. Jumlah Produksi Ikan	595	759	741	799	1.005
	b. Target Daerah	745	745	745	745	745
	Persentase Produksi	79,97	101,96	99,49	107,25	134,89
3	Ikan Budidaya Air Tawar					
	a. Jumlah Produksi Ikan	80,40	90,30	90,70	173,30	111,6
	b. Target Daerah	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	Persentase Produksi	96,87	108,80	109,28	208,80	134,46

Sumber : DPPK, 2015

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi ikan per kapita hanya 18,50 kg, pada tahun 2014 naik menjadi 19,60. Diharapkan konsumsi ikan perkapita akan semakin meningkat, terutama jika didukung dengan ketersediaan ikan yang cukup memadai sehingga akses masyarakat untuk memperoleh ikan akan semakin mudah. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan tersaji pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg)

No	Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
1	2010	18,50	20,00	92,50
2	2011	19,00	23,00	82,61
3	2012	19,30	25,00	77,20
4	2013	19,60	30,00	65,33
5	2014	19,60	20,00	98,00

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2015,

Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di Kota Pekalongan tahun 2011-2013 hanya 1 (satu) kelompok nelayan, tetapi pada tahun 2014 ada 3 (tiga) kelompok nelayan yang mendapat pembinaan. Berikut disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada Tabel 2.120.

**Tabel 2.120 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan
Tahun 2010-2013**

No	Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
1	2010	0	18	0,00
2	2011	1	22	4,55
3	2012	1	39	2,56
4	2013	1	39	2,56
5	2014	3	33	9,09

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.

Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2010-2014 terhadap jumlah produksi ikan di daerah semakin meningkat. Apabila pada tahun

2010 sebesar 0,07% maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,49%. Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat. Perkembangan produksi terlihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (ton)

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
1	2010	12,00	18.360	0,07
2	2011	61,80	18.680	0,33
3	2012	215,52	19.460	1,11
4	2013	451,31	17.600	2,56
5	2014	452,34	18.200	2,49

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2015.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22 hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel. Adapun kelas hotel yang ada di Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika pada tahun 2010 hanya terdapat 70 restoran maka pada tahun 2014 jumlah restoran menjadi 120 restoran atau meningkat 71,43%. Jumlah hotel, restoran dan kunjungan wisata di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.122.

Tabel 2.122 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2010	22	70	215.568
2011	22	85	231.018
2012	25	90	237.946
2013	28	110	235.908
2014	31	120	442.153

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota

Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya tersaji pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penyelenggaraan	19	18	20	23	16

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Objek wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana, Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah kunjungan dari tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 215.568 orang maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 442.153 orang. Uraian data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Objek Wisata	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	140.425	163.015	171.962	155.858	166.515
	B. Pendapatan (Rp.)	319.203.900	387.278.800	601.7660	524.0330	605.2430
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	16,242	11,083	9,102	8,524	6,998
	B. Pendapatan (Rp.)	21.965.700	16.919.600	31.295.000	28.293.500	25.738.500
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	50	127	158	238	256
	2). Wisnus	8.936	12.181	14.482	17.585	17.815
	B. Pendapatan (Rp.)	0	0	0	0	46.1960
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	47.958	44.959	42.242	42.787	42.775
	B. Pendapatan (Rp.)	303.969.000	352.316.000	269.181.000	235.328.500	272.112.500

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2011-2015

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2013 menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena adanya musibah banjir di awal tahun 2014. Meskipun luas areal tanaman padi pada tahun 2014 meningkat namun produksi tanaman padi secara total justru menurun. Produktifitas padi di Kota Pekalongan terlihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Produksi tanaman padi (ton)	14.908,32	14.991,44	13.023,93	13.947,50	8.319,69
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.107,00	1.046,00	1.085,00	1.023,00	1.587,00
Produktifitas padi per hektar	13,47	14,33	12,00	13,63	5,54

Sumber : DPPK, 2015.

Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2010-2014 secara persentase berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Hal lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah ketersediaan tenaga PPL yang terbatas.

Tabel 2.126 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kelompok tani mendapatkan bantuan pemda	11	15	14	7	4
Jumlah kelompok tani	62	62	66	66	66
Cakupan bina kelompok petani	17,74%	24,19%	21,21%	10,61%	6,06 %

Sumber : DPPK, 2015.

4. Perdagangan

Geliat aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

Jenis Pasar / Toko	2011	2012	2013	2014	2015
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
Pasar tradisional	10	10	10	10	11
Toko	247	247	247	247	247
Kios	1.524	1.524	1.524	1.524	1600
Toko Modern					
- Minimarket	26	26	26	26	28
- Supermarket	1	1	2	2	2
- Department Store	3	3	4	4	4
- Hypermarket	2	2	2	2	2
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber: Disperindagkop-UMKM Kota Pekalongan, 2011-2015

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan

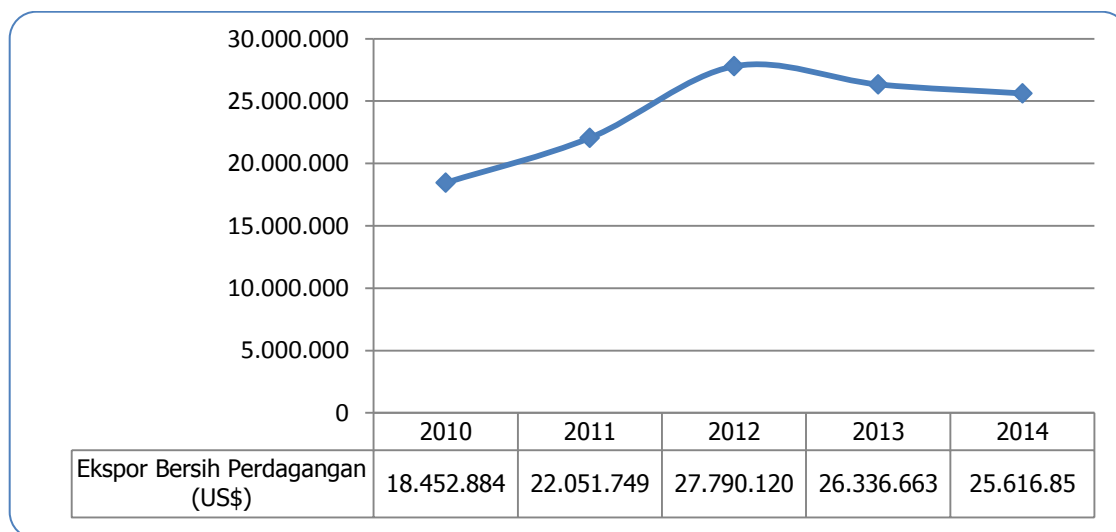
perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2010 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,110 Triliun, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1,351 Triliun, dan pada tahun 2014 sebesar 1,570 Triliun. Namun demikian, kenaikan nilai tersebut tidak diikuti dengan kenaikan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan justru terjadi sedikit penurunan kontribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.128. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.128 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

No	Keterangan		2010	2011	2012	2013	2014
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	4.624.260,10	5.183.065,50	5.741.728,10	6.396.422	7.092.776,60
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.110.871,60	1.275.587,80	1.351.945,50	1.469.896,60	1.570.212,90
		Kontribusi	24,02%	24,61%	23,55%	22,98%	22,14%
2	ADHK 2010	PDRB Total	4.624.260,10	4.878.332,20	5.151.813,50	5.456.187,10	5.755.282,30
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.110.871,60	1.181.029,90	1.198.596,10	1.232.706,50	1.285.313
		Kontribusi	24,02%	24,21%	23,27%	22,59%	22,33%

Sumber : www.bps.go.id, 2014

Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 18,452 Juta US\$ pada Tahun 2010 menjadi sebesar 25,616 Juta US\$ pada Tahun 2014. Perkembangan ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada Gambar 2.37.



Sumber : www.bps.go.id, 2015

Gambar 2.37 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami perkembangan. Jumlah industri besar, menengah dan kecil ditunjukkan dalam Tabel 2.129

Tabel 2.129 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010-2011

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INDUSTRI LOGAM MESIN & KIMIA (ILMK)						
A. BESAR	0	0	0	0	0	0
B. MENENGAH	11	10	14	16	17	19
C. KECIL	325	331	342	460	535	581
INDUSTRI ANEKA (IA)						
A. BESAR	3	3	3	3	3	3
B. MENENGAH	32	32	32	88	88	89
C. KECIL	1.332	1.342	1.354	1.794	1.934	2.497
INDUSTRI HASIL PERTANIAN (IHP)						
A. BESAR	1	1	1	2	2	2
B. MENENGAH	16	17	19	35	45	46
C. KECIL	1.240	1.250	1.259	1.549	1.748	3.087
JUMLAH	2.960	2.986	3.024	3.947	4.372	6.324

Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, diolah

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.130

Tabel 2.130 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2010-2011

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INDUSTRI LOGAM MESIN & KIMIA (ILMK)						
A. BESAR						
B. MENENGAH	8.306,72	7.397,74	11.582,57	14.081,80	14.081,81	14.982,81
C. KECIL	4.398,74	4.956,21	5.086,71	8.830,09	9.105,05	13.263,20
INDUSTRI ANEKA (IA)						
A. BESAR	66.655,53	66.655,53	66.655,53	66.655,53	66.655,53	66.655,53
B. MENENGAH	41.331,64	54.779,39	41.803,89	67.981,24	68.620,26	69.885,27
C. KECIL	50.091,70	54.779,39	56.259,98	52.071,21	53.096,54	62.598,40
INDUSTRI HASIL PERTANIAN (IHP)						
A. BESAR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
B. MENENGAH	36.456,90	36.908,50	39.458,50	65.159,51	82.672,14	101.013,92
C. KECIL	46.395,21	48.518,12	48.334,35	25.633,19	26.262,22	34.620,63
JUMLAH	260.636,45	280.994,89	276.181,52	318.912,58	338.993,56	381.519,76

Sumber : Disperindagkop dan UMKM, BPS, 2016, diolah

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.131 Jumlah IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jenis industri	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Batik	631	632	634	860	861	861
Pakaian jadi dari tekstil	363	369	375	594	595	595
Pembekuan ikan	6	6	6	6	6	6
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	5	5	5	53	53	53
Penggaraman/Pengeringan Ikan	23	23	23	25	25	25
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	21	21	21	26	26	26
Pengolahan Teh dan Kopi	37	37	37	40	40	40
Pertenunan	128	131	133	148	149	149

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.

Tabel 2.132 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

Jenis industri	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Batik	9.841	9.994	9.992	11.811	12.004	12.004
Pakaian jadi dari tekstil	3.539	3.665	3.712	5.675	5.726	5.726
Pembekuan ikan	50	50	50	50	50	50
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	396	396	396	396	396
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10	10	10	175	175	175
Penggaraman/Pengeringan Ikan	664	664	664	681	681	681
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	620	620	620	638	639	639
Pengolahan Teh dan Kopi	1.733	1.736	1.448	1.616	1.515	1.485
Pertenunan	3.949	3.980	4.057	4.009	4.040	4.040

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.

Tabel 2.133 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Jenis industri	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Batik	24.230	27.964	28.575	38.297	38.316	38.344
Pakaian jadi dari tekstil	13.070	13.569	14.398	26.829	27.604	27.604
Pembekuan ikan	406	406	406	406	406	406
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	13	13	13	278	278	278
Penggaraman/Pengeringan Ikan	1.051	1.051	1.051	1.218	1.218	1.218
Pengolahan dan Pengawetan	7.279	7.279	7.279	7.448	7.542	7.542

Jenis industri	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ikan dan Biota Perairan Lainnya						
Pengolahan Teh dan Kopi	10.156	10.259	12.697	13.693	28.165	44.295
Pertununan	31.095	31.551	31.789	32.845	33.040	33.040

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2010-2014 cukup tinggi dan naik secara signifikan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perindustrian atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 892,329 Milyar (19,3% dari total PDRB), dan pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 1,536 Triliun (21,74% dari total PDRB). Sehingga sektor industri ini memiliki kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun serta juga memiliki kecenderungan kenaikan kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekalongan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perindustrian dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	4.624.260,10	5.183.065,50	5.741.728,10	6.396.422,00
		PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	892.329,00	1.030.719,30	1.195.283,30	1.376.888,20
		Kontribusi	19,30%	19,89%	20,82%	21,53%
2	ADHK 2010	PDRB Total	4.624.260,10	4.878.332,20	5.151.813,50	5.456.187
		PDRB Perindustrian	892.329,00	958.304,80	1.066.172,70	1.177.871,50
		Kontribusi	19,30%	19,64%	20,70%	21,59%

Sumber : www.bps.go.id, 2015

6. Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang

mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.

Program transmigrasi dinilai efektif dan strategis untuk menjawab persoalan bangsa, seperti kemiskinan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan wilayah, pengangguran, dan pertahanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:

- 1). Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- 2). Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
- 3). Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
- 4). Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- 5). Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi dan lokasi.

Selama tahun 2010-2014 pelaksanaan urusan Transmigrasi di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.135 Alokasi dan Lokasi Transmigran
Kota Pekalongan Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Lokasi	KK
1	2011	Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	10
2	2012	Nihil	Nihil
3	2013	Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	10 KK
4	2014	Nihil	Nihil
5	2015	Nihil	Nihil

Sumber : Dinsosnakertrans, 2011-2015

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja urusan perencanaan Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2010 - 2014 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pantura, yaitu : Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal

dan Kab. Brebes. Capaian lainnya adalah terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pada 82 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk kelurahan. Terhitung 1 Januari 2015, terdapat penggabungan kelurahan, dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan sehingga jumlah PD tahun 2015 menjadi 62 PD. Capaian selanjutnya adalah pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), dalam bentuk Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan (jangka panjang) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (jangka menengah) ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2010 – 2015 telah berakhir pada tahun 2015. RPJMD ini disusun sebagai perencanaan tahun 2016-2021 yang merupakan periode ke-3 RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Walikota. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global, nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Profil Emisi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD

serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2015 dimana Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014* oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata- ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- (1). Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD. Termasuk di sini yaitu telah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan, dari semula 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan TMT 1 Januari 2015.
- (2). Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- (3). Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- (4). Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- (5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
- (7). Penataan peraturan perundang-undangan.

- (8). Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; serta 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Pada tahun 2012 telah dilaksanakan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya pada Tabel 2.136 disajikan jumlah survei kepuasan terhadap UPP yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.136 Jumlah Survei Kepuasan Terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan

Tahun	Jumlah Survei
2011	4
2012	15
2013	5
2014	6

Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan

No	Diklat	2011	2012	2013	2014
1	Teknis	246	265	287	271
2	Fungsional	334	406	482	746
3	Kepemimpinan	44	58	53	27
4	Prajabatan	156	127	0	54

Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015

Di samping berbagai diklat yang telah diikuti/dilaksanakan, upaya peningkatan kompetensi aparatur dilaksanakan juga dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar kepada aparatur. Jumlah tugas belajar yang diberikan tahun 2011 sebanyak 12 orang, tahun 2012 sebanyak 11 orang, tahun 2013 sebanyak 11 orang dan tahun 2014 sebanyak 19 orang. Sehingga terjadi kecenderungan peningkatan jumlah tugas belajar. Jumlah ijin belajar yang telah diberikan dari tahun 2011-2014 adalah 347 orang, dengan jenjang pendidikan mulai Kejar Paket B s.d. Pendidikan Pasca Sarjana/Strata II.

Sesuai dengan ketentuan maka pada tahun 2011 dan 2012 tidak diadakan pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat CPNS dari honorer kategori I

sebanyak 54 orang. Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat tenaga honorer kategori II sebanyak 93 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Sehubungan strategisnya penelitian dan pengembangan tersebut maka di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah dibentuk Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Selama ini urusan litbang dijadikan satu dengan urusan perencanaan pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan dan penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.

5. Fungsi Lain

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

b. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

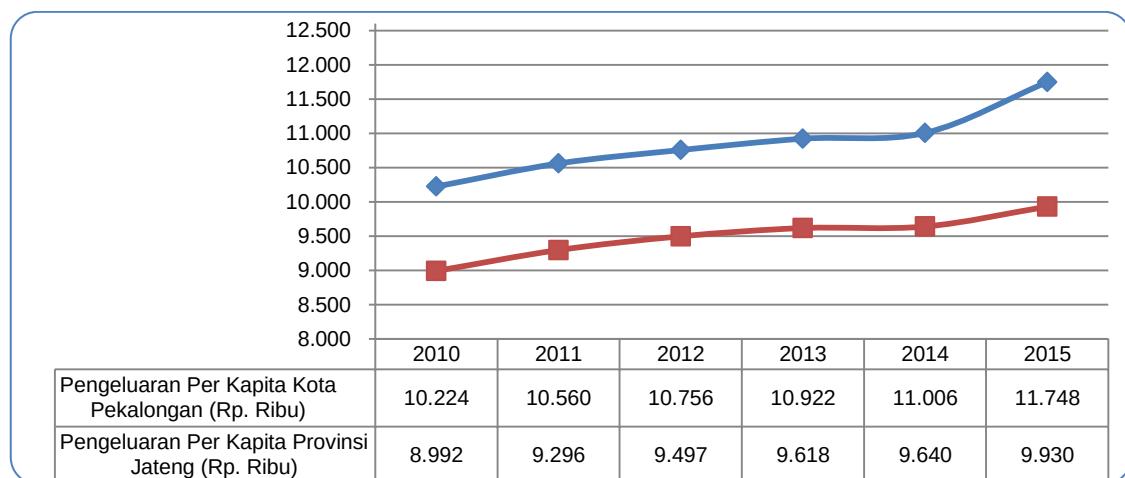
- (1). mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2). meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3). mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan non reguler dan pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2.38 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar Rp 10,22 jutarupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2011-2015. Bila pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 10,56 juta rupiah maka tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 11,75 juta rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.38 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk Kota Pekalongan baik roda dua maupun roda empat semakin meningkat. Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,00169 maka pada tahun 2013 rasionya semakin mengecil menjadi 0,00075. Namun jumlah kendaraan pada tahun 2014 berkurang menjadi 170.900 kendaraan dengan rasio menjadi 0,00087. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 2.138.

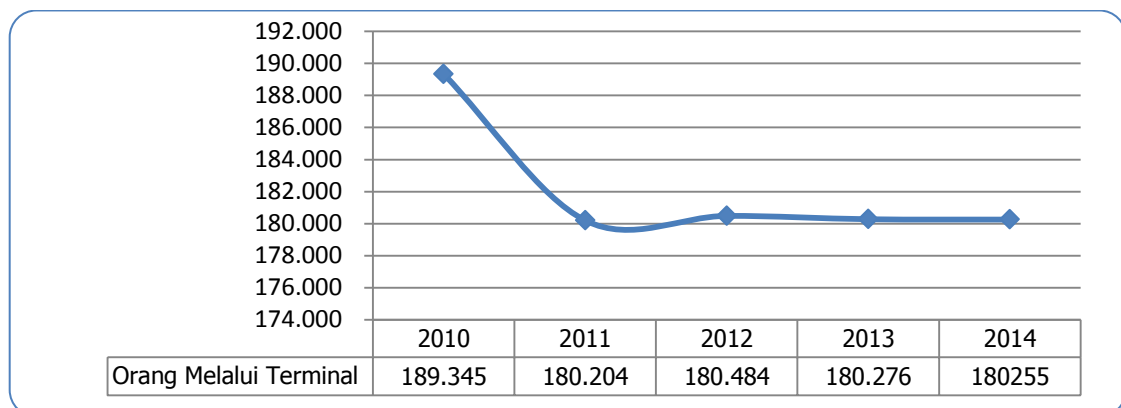
**Tabel 2.138 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014**

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2010	146,27	86.333	0,00169
2011	146,28	90.635	0,00161
2012	146,28	100.208	0,00145
2013	148,28	197.890	0,00075
2014	148,28	170.900	0,00087

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan drastis menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan pada tahun 2014 menjadi 180.255 orang. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.39.

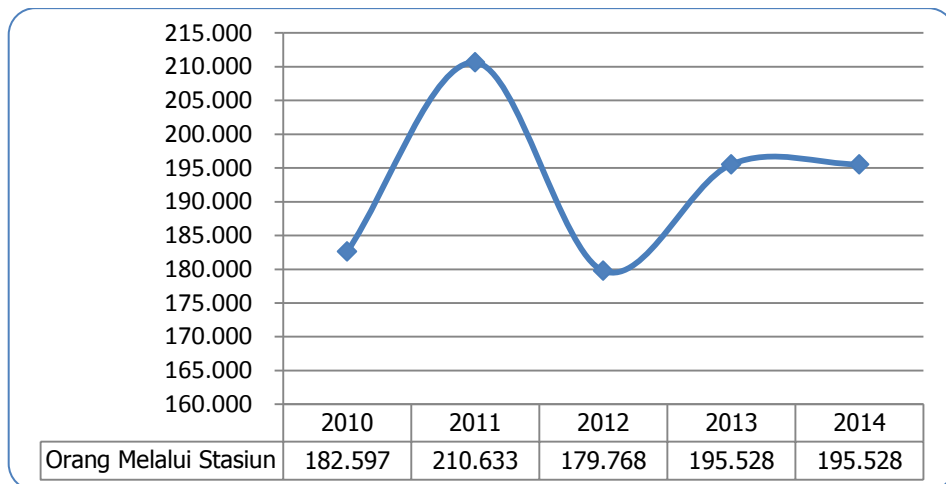


Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2015

**Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Pekalongan
Tahun 2010-2014**

4. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015

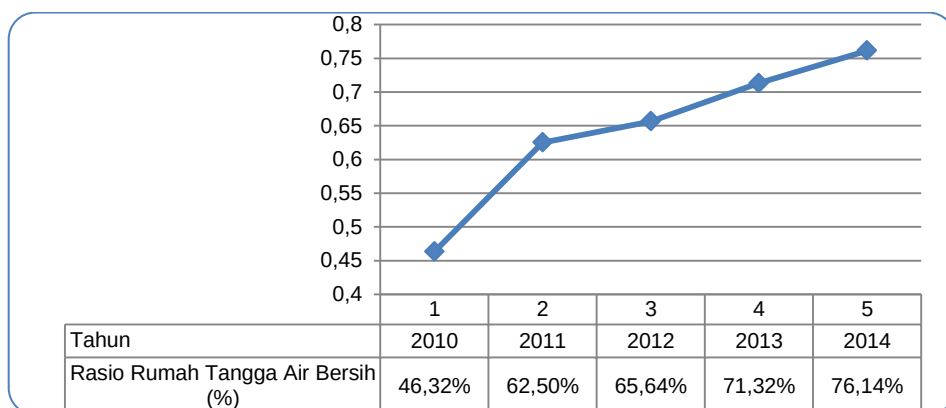
Gambar 2.40 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan Tahun 2010-2014

Jumlah penumpang yang melalui stasiun Pekalongan berfluktuatif setiap tahunnya. Ini terlihat pada Gambar 2.40. Tahun 2010, jumlah orang yang melalui stasiun Pekalongan sebanyak 182.597 orang, maka pada tahun 2011 melonjak menjadi 210.633 orang. Namun pada tahun 2012 kembali turun drastis menjadi 179.768 orang. Di tahun 2013 dan 2014 kembali naik menjadi 195.528 orang dan 195.528 orang.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bis. Pengembangan moda transportasi bis agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bis, apalagi Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A.

5. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan kebutuhan air bersih bertambah. Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 281.991 jiwa (69.698 RT) , baru 46,32% penduduk yang terpenuhi air bersihnya .

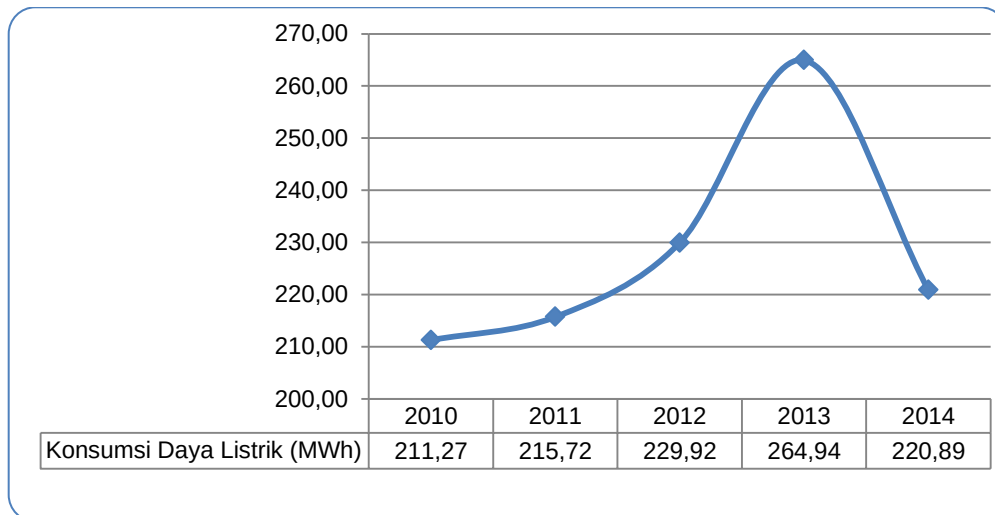


Gambar 2.41 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Pada tahun 2011 meningkat drastis menjadi 62,50% dari total jumlah penduduk 285.026 jiwa (73.874 RT). Sebanyak 65,64% dari 287.978 jiwa (72.687 RT) penduduk Kota Pekalongan terlayani air bersih pada tahun 2012 dan sebesar 71,32% dari 290.870 jiwa (73.267 RT) terlayani air bersih pada tahun 2013. Pada tahun 2014 persentase yang tercukupi untuk air bersih sebesar 76,14% dari 293.704 jiwa (73.980 RT). Kondisi ini menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin membaik. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.41

6. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun-ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dari rumah tangga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun terutama dari tahun 2010-2014. Apabila output listrik pada tahun 2010 hanya 211,27 ribu MWh maka pada tahun berikutnya naik menjadi 215,72 ribu MWh. Pada tahun 2012-2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Bila pada tahun 2012 sebesar 229,92 MWh maka pada tahun 2013 menjadi 264,94 MWh. Namun pada tahun 2014 kebutuhan listrik hanya sebesar 220,89 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014.



Sumber : www.pekalongankota.go.id

Gambar 2.42 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014

7. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari tahun 2010-2014 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga berdasarkan data BPS selama lima tahun menunjukkan bertambahnya jumlah rumah tangga sebagai pelanggan PLN. Pelanggan PLN di Kota Pekalongan terdiri rumah tangga, perusahaan swasta dan pelanggan sosial. Persentase rumah tangga sebagai pelanggan PLN pada tahun 2010 sebesar 85,10%. Jumlah pelanggan terus mengalami peningkatan secara bertahap sehingga capaian persentase pelanggan rumah tangga pada tahun 2014 sebesar 96,04% dengan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar 71.051 pelanggan. Adapun Persentase rumah tangga pengguna listrik secara lengkap tersaji pada Tabel 2.139.

**Tabel 2.139 Persentase RT yang menggunakan Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2010-2013**

Tahun	Pelanggan RT	Jumlah RT	Persentase RT Pengguna Listrik
2010	58.937	65.253	90,32%
2011	61.663	70.084	87,98%
2012	65.000	72.356	89,83%
2013	68.362	73.267	93,31%
2014	71.051	73.980	96,04%

8. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Perkembangan jumlah hotel di Kota Pekalongan cukup menggembirakan bagi dunia investasi. Tabel 2.140 menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 telah dibangun 9 hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3. Sedangkan hotel non bintang hanya menambah 2 (dua) hotel. Penambahan hotel berbintang ini dikarenakan adanya pembangunan PLTU Batang yang rencananya akan dibangun oleh PT. BPI pada tahun 2016. Sehingga para pekerja dari luar negeri terutama Jepang membutuhkan tempat tinggal selama pengerjaan proyek tersebut. Di samping itu, dengan tersedianya berbagai pilihan hotel maka dapat berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang representatif.

**Tabel 2.140 Jumlah dan Tipe Akomodasi
Kota Pekalongan Tahun 2011-2014**

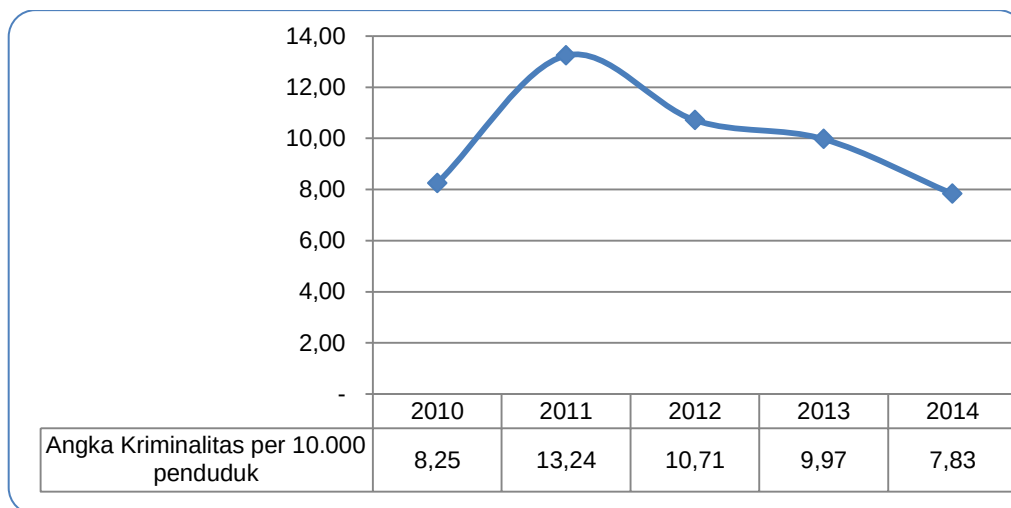
Akomodasi	2010	2011	2012	2013	2014
Hotel Berbintang	4	4	5	6	9
Hotel Non Berbintang	18	18	20	22	22

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka kriminalitas. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi karena didukung oleh situasi yang kondusif. Pada tahun 2010 jumlah angka kriminalitas adalah 8,25 kasus tiap 10.000 penduduk. Kondisi ini semakin menaik pada tahun 2011 menjadi 13,24 kasus tiap 10.000 penduduk. Kemudian semakin menurun terus pada tahun 2012 – 2014 yakni 10,71 dan 9,97 dan pada tahun 2014 turun menjadi 7,83 per 10.000 penduduk. Selengkapny dapat dilihat pada Gambar 2.43.



Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.43 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

2. Lama Proses Perijinan

Proses perizinan di Kota Pekalongan juga telah diatur standar operasi prosedur (SOP) pelayanan untuk pemberian izin. Lama proses permohonan izin berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya, namun demikian waktu yang dibutuhkan lebih singkat dibandingkan sebelum terbentuknya instansi khusus yang menangani perizinan. Tabel 2,141 menyajikan SOP mengenai lama proses perijinan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.141 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012

NO	JENIS IZIN	SOP IZIN (hari)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Izin Prinsip	12	12	12	12	12			
2	Izin Usaha Angkutan	10	10	10	10	10	5	5	5
3	Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek	10	10	10	10	10	5	5	5
4	Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri	5	5	5	5	5	3	3	3
5	Izin Usaha Perdagangan	5	5	5	5	5	3	3	3
6	Tanda Daftar Perusahaan	5	5	5	5	5	3	3	3
7	Izin Reklame	7	7	7	7	7	5	5	5
8	Izin Sarang Walet	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Izin Gangguan (HO)	12	12	12	12	12	10	10	10
10	Izin Mendirikan Bangunan	15	15	15	15	15	12	12	12
11	Sertifikasi Tanda Terdaftar	6	6	6	6	6	5	5	5
12	Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga	6	6	6	6	6	5	5	5
13	Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan	6	6	6	6	6	5	5	5
14	Sertifikasi Laik Hygine Sanitasi	6	6	6	6	6	5	5	5
15	Izin Rumah Bersalin		10	10	10	10	5	5	5
16	Izin Klinik / Balai Pengobatan		10	10	10	10	5	5	5
17	Izin Klinik Kecantikan		10	10	10	10	5	5	5
18	Izin Optik		10	10	10	10	5	5	5

NO	JENIS IZIN	SOP IZIN (hari)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19	Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop		7	7	7	7	5	5	5
20	Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata		15	15	15	15	10	10	10
21	Izin Usaha Boga / Catering		7	7	7	7	6	6	6
22	Izin Ketel Uap		10	10	10	10	7	7	7
23	Izin Bejana Tekan		10	10	10	10	7	7	7
24	Izin Gedung Pertemuan / Pameran		7	7	7	7	5	5	5
25	Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran		7	7	7	7	6	6	6
26	Izin Usaha Jasa Konstruksi		14	14	14	14	7	7	7
27	Izin Tenaga Kerja Indonesia		3	3	3	3			
28	Izin Kerja Malam Wanita		6	6	6	6			
29	Izin Pariwisata					5	5	5	5
30	Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan					6	6	6	6
31	Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan					6	6	6	6
32	Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)					6	6	6	6
33	Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota						10	10	10
34	Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional						5	5	5
35	Tanda Daftar Gudang						3	3	3
36	Pendaftaran Penanaman Modal							1	1
37	Izin Prinsip Penanaman Modal							3	3
38	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal							3	3
39	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal							5	5
40	Izin Usaha							7	7
41	Izin Usaha Perluasan							7	7
42	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)							7	7
43	Izin Usaha Perubahan							7	7

Sumber: BPMP2T, 2012

3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 11 perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut. Berikut peraturan daerah dimaksud:

- (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan.
- (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri.
- (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan.
- (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu.
- (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang

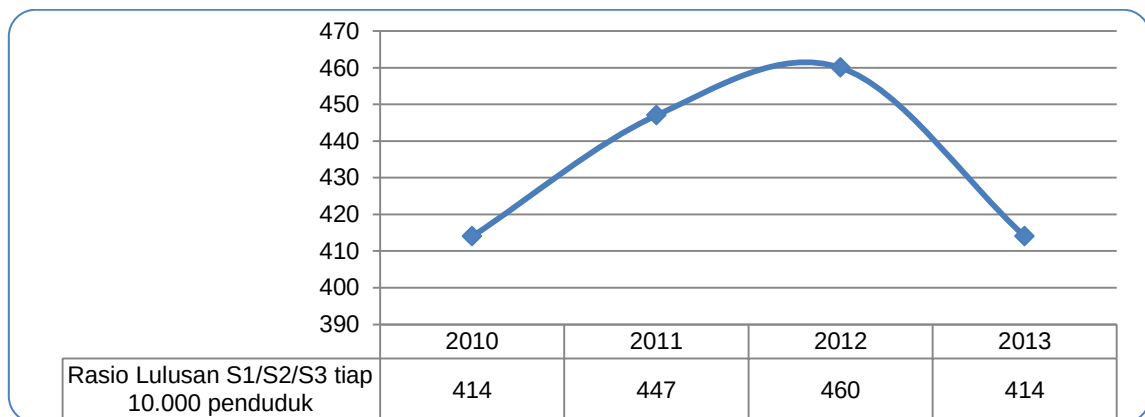
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan.

- (6) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan.
- (7) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (8) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.
- (10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.44.



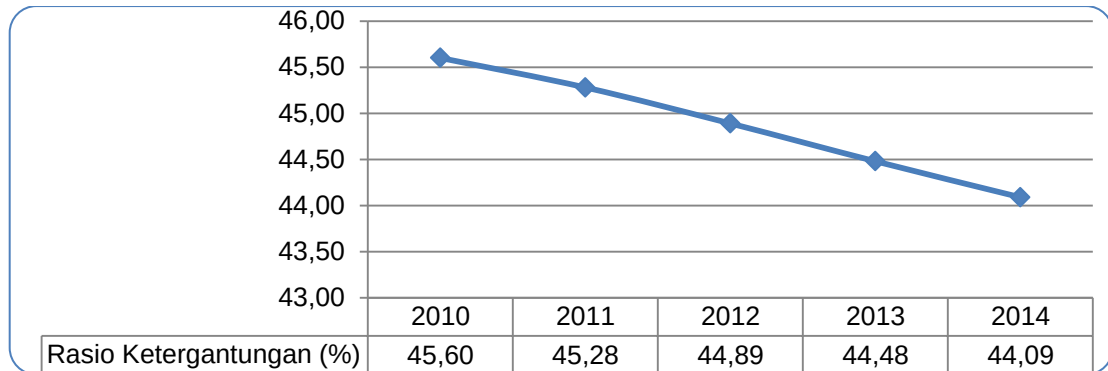
Sumber : BPS, 2014 diolah

Gambar 2.44 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2010 – 2014 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun, dimana pada tahun 2010 sebesar 45,36%, sedangkan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 44,48 dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 44,09%. Dengan kecenderungan

angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.45 berikut.



Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.45 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Untuk menggambarkan kondisi penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan saat ini, maka telah dilakukan survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi daerah di berbagai institusi di Kota Pekalongan pada bulan Oktober 2014. Survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi tersebut menggunakan instrumen wawancara dan penelusuran dokumen. Ruang lingkup survei pemetaan berdasarkan pilar-pilar penguatan sistem inovasi dan kerangka kebijakan inovasi.

Pilar-pilar penguatan sistem inovasi terdiri dari (1) Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah, (2) Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi, (3) Pilar Pengembangan Klaster Industri, (4) Pilar Pengembangan Teknopreneur dan (5) Pilar Penguatan Pilar-Pilar Tematik Sistem Inovasi. Sedangkan kerangka kebijakan inovasi meliputi (a) kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, (b) keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa, (c) interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, (d) budaya inovasi, (e) kerangka kebijakan pemokusan dan keterpaduan pembangunan, serta (f) kerangka kebijakan internalisasi dinamika global.

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Kondisi saat ini kerangka umum kebijakan pembangunan daerah dapat dikatakan sudah kondusif bagi inovasi dan bisnis. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa elemen. Pertama, basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi secara umum sudah cukup baik dalam hal penyediaan maupun pelayanan data. Meskipun ketersediaan data masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual, namun dalam hal urusan perizinan sudah menggunakan sistem online. Kedua, regulasi yang mendukung berkembangnya inovasi dan bisnis juga terus bertambah, sementara jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh BPMP2T cenderung meningkat selama 2012-2013. Ketiga, anggaran untuk insentif bisnis dan inovasi juga sudah dialokasikan, dimana pada tahun 2013 mencapai Rp477,3 juta untuk fasilitasi iptekin. Keempat, dokumen RPJPD Kota Pekalongan

2005-2025 dan RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 sudah memuat penguatan sistem inovasi daerah dan sudah dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, walaupun belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat. Untuk prasarana dasar, Kota Pekalongan memiliki beberapa ruang terbuka hijau yang berpotensi untuk pengembangan ruang publik kreatif sebagai salah satu prasarana penguatan sistem inovasi daerah.

Tabel 2.142 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Basis data inovasi dan bisnis					
- Penyediaan data	Kondisi	Tersebar	Tersebar	Tersebar	Tersebar
- Pelayanan data	Sistem	Manual	Manual	Manual	Manual
Regulasi iptekin dan bisnis					
- Peraturan	Jumlah	6	4	1	-
- Jumlah perizinan dan nonperizinan	Jumlah	5.427	3.981	4.775	-
Insentif					
- Insentif (fasilitasi) untuk iptekin	Rp juta	-	-	477,3	-
Infrastruktur					
- Adopsi PSID ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	-	RPJMD, RPJPD	-
- Pembentukan Kelembagaan PSID	Unit	-	Tim Koordinasi	-	Kantor Ristekin
- Prasarana dasar Ruang Publik Kreatif	Buah	-	-	-	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam pengembangan inovasi dan bisnis juga sudah cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini, sebagaimana tampak pada Tabel 2.143. Pertama, kelembagaan iptekin/litbangyasa di Kota Pekalongan tidak hanya berasal dari instansi pemerintah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi; Dewan Riset Daerah), tetapi juga ada di perguruan tinggi dan SMK (Unit Produksi Bersama SMK *Incorporate*). Kedua, daya dukung kelembagaan iptekin/litbangyasa tadi relatif meningkat dan mampu mendorong penguatan daya saing Kota Pekalongan. Namun begitu, jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas. Sedangkan alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada tahun 2013 masih relatif kecil, yaitu sebesar Rp 23.721.350. Ketiga, daya absorpsi iptekin/hasil litbangyasa oleh kalangan industri dan masyarakat di Kota Pekalongan makin meningkat, baik melalui *broadband learning center* (BLC), *telecenter*, *technocamp*, pelatihan maupun pemagangan.

Tabel 2.143 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa					
- Pemerintah	PD	Bappeda, Dinkominfo, dan DRD	Bappeda, Dinkominfo, dan DRD	Kantor Ristekin dan DRD	Kantor Ristekin dan DRD
- Perguruan tinggi	Jumlah	5	5	5	5
- Swasta	Jumlah	-	-	-	-
- Masyarakat	Jumlah	Posyantek	Posyantek	Posyantek	Posyantek
Daya dukung iptekin/litbangyasa					

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa					
- Anggaran PSID	Rp juta	-	-	23,7	-
- SDM Fungsional					
– Perencana					3
– Dosen STAIN	Orang	127	175	219	219
– Dosen STIE Muhammadiyah	Orang	32	32	28	28
– Dosen STMIK Widya Pratama	Orang	63	166	199	199
– Dosen Politeknik Pusmanu	Orang	28	32	35	35
o Telecenter *	Unit	56	56	56	56
Daya absorpsi iptekin					
- Pelatihan dan pemagangan	Kali	-	-	-	-
- <i>Broadband learning center</i>	Unit	1	1	1	1
- <i>Technocamp</i>	Kali	1	1	1	1

Keterangan : * Terdiri dari telecenter kecamatan, kelurahan dan pusat bisnis.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Di dalam kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi Kota Pekalongan. Pertama, di Kota Pekalongan telah ada beberapa bentuk kemitraan strategis dan kolablatif untuk inovasi dan bisnis, yaitu Forum PTSP se-Bakorwil III Jawa Tengah, SAMPAN (7 kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan), JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia), Jaringan Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI), kerja sama pemasaran dengan pengelola Thamrin City serta berbagai macam kerja sama daerah (baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga). Kedua, peningkatan difusi inovasi melalui pendirian telecenter berbasis TIK (teknologi informatika dan komunikasi) sudah mencapai level semua kelurahan, seluruh kecamatan dan beberapa pusat bisnis. Ketiga, wahana interaksi pelaku bisnis sudah berlangsung dalam bentuk penyelenggaraan pameran bisnis dan iptekin yang berlangsung rutin setiap tahun (Pameran Kreativitas dan Inovasi dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna) serta pemanfaatan ruang publik di Kawasan Jetayu untuk aktivitas olahraga, bisnis dan penguatan kohesi sosial di antara berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 2.144 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kemitraan strategis					
o Kerja sama antardaerah	MOU/PKS	-	-	-	SAMPAN, PTSP
o Dengan Kementerian/Lembaga	MOU/PKS	BPPT, LIPI	BPPT, LIPI	BPPT, LIPI	LIPI, BPPT, Kemenkominfo, Kemendiknas, Kemenpora, BPOM
o Dengan Swasta	MOU/PKS	-	-	-	PT Prima Lestari Investindo, Pengelola Tamrin City
o Dengan Asosiasi	MOU/PKS	-	-	-	JKPI, JKPS
o Dengan Perguruan Tinggi	MOU/PKS	-	-	-	UI, Unikal, Politeknik Pusmanu, Politeknik Negeri Semarang
Peningkatan difusi inovasi					
o Telecenter Kecamatan	Unit	4	4	4	4
o Telecenter Kelurahan	Unit	47	47	47	47

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
o Telecenter Pusat Bisnis	Unit	5	5	5	5
Wahana interaksi pelaku bisnis					
- Pameran bisnis dan iptekin	kali	3	3	3	3
- Aktivitas di kawasan RPK	Jenis	Olahraga, bisnis, kohesi sosial	Olahraga, bisnis, kohesi sosial	Olahraga, bisnis, kohesi sosial	Olahraga, bisnis, kohesi sosial

Keterangan : * Tidak termasuk telecenter LPPAR, telecenter PKK dan telecenter RW (RW-net).

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Penguatan budaya inovasi di Kota Pekalongan telah dikembangkan melalui beberapa cara (lihat Tabel 2.143). Pertama, melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi telah dilakukan dengan membuat bahan ajar kewirausahaan untuk pelajar SMK dan Perguruan Tinggi (Politeknik Pusmanu). Kedua, melalui pengelolaan teknologi masyarakat dan program *reverse brain drain* dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik yang berpusat di Museum Batik. Ketiga, penumbuhan usaha baru inovatif ditempuh melalui penyelenggaraan *technocamp*, fasilitasi permodalan, bantuan alat/mesin produksi, pendampingan HKI dan lain-lain. Keempat, melalui apresiasi dan kampanye inovasi dalam bentuk agenda Kreanova, anugerah inovasi Bhakti Pembangunan dan pendirian televisi lokal (Batik TV). Di samping itu, juga telah dibentuk Relawan Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan.

Tabel 2.145 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi					
- Pembuatan Bahan Ajar Kewirausahaan Tingkat SMK	Jumlah	-	-	1	1
- Pelatihan Kewirausahaan Tingkat SMK	Kali	-	1	1	1
Pengelolaan teknologi masyarakat dan program <i>reverse brain drain</i>					
- Inventarisasi teknologi masyarakat	Jumlah event pertahun	1	1	1	1
- Pelestarian Teknologi Batik	Jumlah event pertahun	-	-	-	1
Apresiasi dan kampanye inovasi					
- Kreanova	Jumlah event per tahun	1	1	1	1
- Anugrah Inovasi Bhakti Pembangunan	Jumlah event per tahun	-	-	-	1
- Kampanye Inovasi		TV Batik	TV Batik	TV Batik	TV Batik
Penumbuhan usaha baru inovatif					
- Fasilitasi permodalan	Unit usaha	-	-	-	10*
- Bantuan alat dan mesin produksi	Unit	-	-	-	200*
- Pelatihan pengembangan kewirausahaan	Kali	-	-	-	2*
- Fasilitasi keikutsertaan pameran	Event	-	-	-	13*
- Fasilitasi pengembangan kemitraan antardaerah	Kemitraan	-	-	-	2*
- Fasilitasi informasi pasar	Radio Komunikasi	-	-	-	2*
- Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan UKM inovatif	Orang	-	-	-	20*
- Pendampingan (Sosialisasi) HKI	Kali	-	-	-	2*
- Pelatihan ISO (Manajemen	Kali	-	-	-	2*

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Pengetahuan dan Tingkat Kesiapan Teknologi)					

Keterangan : * Target 2014.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Perkembangan kondisi fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan dapat dilihat dari dua elemen berikut. Pertama, prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah, yaitu batik dan perikanan, telah dilakukan melalui penyelenggaraan beberapa event pendukung klaster industri, di antaranya Pekalongan Batik Week International, Pekan Batik Nusantara, pembuatan branding Kota Pekalongan dan lain-lain. Kedua, keterpaduan kebijakan pusat-daerah dan antardaerah telah dilaksanakan melalui beberapa paket kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. Di antaranya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di lahan eks terminal bus Kota Pekalongan, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan PT Prima Lestari Investindo. Pengembangan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan model klaster di Kota Pekalongan, yang merupakan kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan serta pendampingan Pengembangan Teknologi Terapan yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Politeknik Negeri Semarang.

Tabel 2.146 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah					
- Industri Batik	Jumlah	-	-	-	4
- Industri Perikanan	Jumlah	-	-	-	1
- Lainnya	Jumlah	-	-	-	3
Keterpaduan kebijakan					
- Kerja sama dengan pihak ketiga	Jumlah	1	3	31	7
- Kerja sama Antardaerah	Jumlah	2	1	2	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Dalam mengantisipasi isu dinamika global dan pengaruhnya terhadap pengembangan inovasi dan bisnis, Kota Pekalongan juga sudah menempuh berbagai upaya. Pertama, dalam aspek lingkungan, pengembangan inovasi dan bisnis dilakukan antara lain melalui pengembangan “Kota Pekalongan sebagai *Green Economy*” dan pembuatan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di kelurahan-kelurahan. Selain itu, Kota Pekalongan juga berhasil menerima Anugrah Adipura selama empat tahun berturut-turut (2010-2013) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, dalam aspek standarisasi, Kota Pekalongan telah menerapkan ISO 9001:2008 dari SAI Global untuk 13 unit layanan publik (di antaranya BPMP2T, 4 buah SMK dan 7 unit Puskesmas) dan 10 unit lainnya sedang dalam proses pengajuan ISO. Di samping itu, pada saat ini juga sedang dikembangkan MSTQ (measurement, standardization, testing and quality) dan penerapan Sistem Manajemen Mutu di semua PD. Ketiga, dalam mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di Kota Pekalongan telah dibentuk Intellectual Property Corner (*IP Corner*). Keempat, dalam hal ketenagakerjaan, di Kota Pekalongan juga telah dikembangkan standarisasi upah.

Tabel 2.147 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Lingkungan					
- Pembuatan TPST di kelurahan-kelurahan	Jumlah				47
- Apresiasi lingkungan (Adipura)	Jumlah	1	1	1	1
Standardisasi					
- Penerapan ISO 9000 2008	-	-	-	-	23 (10 sedang proses)
- Penerapan sistem manajemen mutu	Unit				Semua PD
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
- Pembentukan Intellectual Property Corner	Unit	-	-	-	1
Ketenagakerjaan					
- Standardisasi upah tenaga kerja	Paket kebijakan	1	1	1	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2. Pilar Pengembangan Klaster Industri

Hingga saat ini, klaster industri di Kota Pekalongan baru ada dalam pengertian kawasan sentra produksi (KSP) dan kumpulan usaha bersama (KUB). Beberapa bidang usaha yang berpotensi dikembangkan menjadi klaster industri adalah industri perbatikan, industri perikanan serta industri makanan. Sedangkan klaster industri dalam pengertian yang lazim masih dalam tahap pengkajian. Namun demikian, kerangka umum kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan tetap masih konsisten dan berkomitmen untuk mengembangkan KSP dan KUB tadi menjadi klaster industri dalam makna yang lazim dikenal secara luas. Karena masih dalam tataran kajian, maka basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini belum dikembangkan.

Dalam kerangka menuju pengembangan klaster industri, beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah Kota Pekalongan, terutama dalam hal ini oleh Disperindagkop UKM. Di antaranya memfasilitasi pelatihan pembuatan dan pengelolaan website untuk masing-masing IKM (rumah produksi) batik, pemberian insentif bagi pelaku bisnis yang tergabung dalam KSP dan KUB maupun di luar KSP dan KUB, yakni berupa pembebasan biaya/retribusi bagi IKM, bantuan alat produksi sesuai bidang usaha (seperti mesin jahit berkecepatan tinggi untuk usaha garmen), fasilitasi keikutsertaan IKM dalam expo, pameran atau sejenisnya, fasilitasi kemasan produk makanan IKM, fasilitasi penciptaan branding batik.

Kerangka umum pengembangan klaster industri yang sudah ada hingga saat ini baru berkaitan dengan elemen infrastruktur dasar, yaitu berupa dokumen kajian Rencana Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah. Sedangkan infrastruktur dasar lainnya yang juga sudah tersedia adalah pasar grosir dan outlet untuk klaster industri batik, TPI di kawasan minapolitan untuk klaster industri perikanan.

Tabel 2.148 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Basis data klaster industri					
- Penyediaan data	Kondisi	Tersebar	Tersebar	Tersebar	Collecting
- Pelayanan data	Sistem	Manual	Manual	Manual	Pembuatan

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
					Website
Regulasi klaster industri					
- Peraturan	Jumlah	-	-	-	-
- Jumlah perizinan dan nonperizinan klaster industri	Jumlah	-	-	-	-
Insentif klaster industri					
- Pembebasan biaya/retribusi bagi IKM batik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
- Bantuan alat produksi batik (mesin jahit)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
- Fasilitas keikutsertaan expo, pameran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
- Fasilitas penciptaan <i>branding</i> batik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Infrastruktur dasar klaster industri					
- Dokumen kajian rencana pengembangan klaster industri unggulan daerah	Dokumen	-	-	-	1
- Pembentukan kelembagaan klaster industri	Unit	-	-	-	-
- Prasarana dasar		-	-	-	
- Pasar grosir	Unit	-	-	-	Beberapa
- Outlet batik	Unit	-	-	-	Banyak
- TPI	Unit	-	-	-	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Kelembagaan iptekin/litbangyasa yang telah membantu pengembangan klaster industri (sentra produksi/keompok usaha bersama batik, perikanan dan makanan) di Kota Pekalongan terdiri dari lembaga pendidikan (Universitas Indonesia, Politeknik Pusmanu, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Pekalongan, STIMIK Widya Pratama, SMK Muhammadiyah), lembaga penelitian dan pengembangan (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Balai Besar Tekstil Bandung dan LP POM Jawa Tengah).

Daya dukung iptekin/litbangyasa juga telah diberikan oleh beberapa lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian dan pengembangan tadi. Di antaranya SMK Muhammadiyah yang telah menghasilkan beberapa produk inovasi berupa mesin cap batik semi otomatis, wajan batik dan plorot malam batik. Terkait HKI, Universitas Indonesia membantu memfasilitasi pendaftaran HKI. Sedangkan untuk penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Label didukung oleh perguruan tinggi setempat.

Manfaat dari bantuan lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian dan pengembangan di atas telah meningkatkan daya absorpsi iptekin/hasil litbangyasa oleh para pelaku industri batik. Di antaranya diindikasikan oleh semakin cepatnya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan batik, dimana pada awalnya memakai cara manual sekarang sudah menggunakan alat mesin cap batik semi otomatis sehingga hasilnya menjadi lebih cepat dan lebih baik.

Tabel 2.149 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa					
- Pemerintah Kota Pekalongan	Lembaga	Bappeda, Dis perin-dagkop UKM	Bappeda, Dis perin-dagkop UKM	Bappeda, Dis perin-dagkop UKM	Bappeda, Dis perin-dagkop UKM

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
o Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Lembaga	LPOM Jateng	LPOM Jateng	LPOM Jateng	LPOM Jateng
o Kementerian/Lembaga	Lembaga	BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung	BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung	BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung	BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung
- Perguruan Tinggi	Jumlah	6	6	6	6
- Swasta	Lembaga	-	-	-	-
- Masyarakat	Lembaga	Posyantek	Posyantek	Posyantek	Posyantek
Daya dukung iptekin/litbangyasa					
o Pemanfaatan produk inovasi bagi produksi batik	Jenis		Wajan batik	Plorot malam batik	Mesin cap batik semi otomatis
o Pendampingan HKI	Paket	-	-	-	1
o Narasumber dari perguruan tinggi	Kali	-	-	-	1
Daya absorpsi iptekin					
- Pelatihan dan pemagangan	Kali	1	1	1	1
- Sosialisasi HKI	Kali	1	1	1	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis bagi pengembangan klaster industri (sentra produksi/kelompok usaha bersama) ditandai dengan adanya kemitraan strategis dan kolaboratif dalam hal pematenan hasil inovasi serta pendampingan IKM dalam mengembangkan jejaring dan kemitraan produk unggulan daerah (terutama lewat mekanisme CSR). Selain itu, ada juga kerja sama dengan Forum Tempe Indonesia, UNES dan IPB tentang pengembangan produk tempe higienis.

Sementara itu peningkatan difusi inovasi dan bisnis ditandai dengan penerapan hasil inovasi berupa wajan batik, plorot malam batik dan mesin cap batik semi otomatis, sehingga industri batik mampu menghasilkan produk batik dengan lebih cepat dan lebih baik. Difusi inovasi dan bisnis lainnya adalah dalam bentuk pelatihan teknologi dan produk tempe, pelatihan teknologi desain batik dan tenun, diversifikasi pengolahan ikan serta pelatihan dan fasilitasi kemasan produk, serta menyediakan wahana interaksi bagi pelaku bisnis berupa agenda tahunan yang diberi tajuk “Curhat Bisnis”, juga ada wadah telecenter dan Forum Tempe Indonesia.

Tabel 2.150 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis untuk Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kemitraan strategis pengembangan klaster industri					
o Dengan Dinperindagkop UKM Provinsi Jawa Tengah	Jenis	-	-	-	Pelatihan pembuatan <i>website</i> IKM
o Dengan Kementerian/Lembaga	Lembaga	BPPT, LIPI	BPPT, LIPI	BPPT, LIPI	LIPI, BPPT, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenpora, BPOM
o Dengan Swasta	-	-	-	-	-
o Dengan Asosiasi	Forum Tempe Indonesia	-	-	-	Pengembangan tempe higienis
o Dengan Perguruan Tinggi	UI	-	-	-	Pendampingan paten plorot malam

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
	IPB, UNES	-	-	-	Pengembangan tempe higienis
Peningkatan difusi inovasi					
- Penerapan produk inovasi	Jenis produk	-	Wajan batik	Plorot malam batik	Mesin cap batik semi otomatis Zat pewarna alami
- Pelatihan	Jenis pelatihan	-	-	-	Disain batik dan tenun
Wahana interaksi pelaku bisnis					
- Sosialisasi pemanfaatan teknologi batik	Kali	1	1	1	1
- Curhat Bisnis	Kali	1	1	1	1
- Telecenter	Kali	1	1	1	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Dalam rangka penguatan budaya inovasi dan bisnis di lingkup klaster industri, khususnya di bidang usaha perikanan, pada tahun 2011 telah ditetapkan “Kota Pekalongan sebagai Kawasan Minapolitan” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan klaster industri dilakukan melalui pendekatan OVOP, yang meliputi Pembentukan Kampung Batik Kauman dan Pesindon, Pembentukan Kampung Canting Lindungsari, Pembentukan Kampung Tempe Kuripan Kidul, Pembentukan Kampung Kerupuk Sukorejo, Pembentukan Kampung Tenun Medono, Pembentukan LIK Perbengkelan dan Otomotif Kuripan Lor, Pembentukan Sentra Terasi Bandengan, Pembentukan Sentra Tahu Duwet, Banyu Alit dan Banyu Agung, Pengembangan industri batik diarahkan pada penggunaan zat pewarna alami yang saat ini sedang dirintis pengembangannya oleh Politeknik Pusmanu.

Tabel 2.151 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah					
o KSP Perbatikan	Jumlah	-	-	-	4
o KSP Perikanan	Jumlah	-	-	-	1
o LIK Otomotif	Jumlah	-	-	-	1
o KSP Makanan	Jumlah	-	-	-	6
o Rintisan Penggunaan Zat Pewarna Alami Batik	Jumlah	-	-	-	Politeknik Pusmanu
Koordinasi kebijakan antardaerah					

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Untuk internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan klaster industri, dalam aspek lingkungan pelaku industri batik telah (1) membuat IPAL Terpadu di Jenggot, Kauman, Duwet dan Kradenan, (2) menerapkan konsep produksi bersih dalam proses produksi batik dan tahu-tempe, serta (3) mengembangkan pemakaian zat pewarna alami dalam memproduksi batik. Dalam aspek standarisasi telah dilakukan standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan higienis. Di samping itu, dilakukan pula standarisasi produk halal serta pada setiap tahun dilaksanakan pelatihan sertifikasi proses dan produk industri makanan. Sedangkan dalam aspek

HKI, setiap tahun Kota Pekalongan menargetkan pendaftaran paten, merek dan label batik bagi 20 IKM batik.

Tabel 2.152 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Lingkungan Klaster Industri					
- Pembuatan IPAL Terpadu	Lokasi				4
- Aplikasi produksi bersih	Jenis produk	Batik, tahu tempe	Batik, tahu tempe	Batik, tahu tempe	Batik, tahu tempe
Standardisasi					
- Standarisasi produk	Jenis produk	Garmen, Makanan	Garmen, Makanan	Garmen, Makanan	Garmen, Makanan
- Sertifikasi produk	Jenis produk	Makanan	Makanan	Makanan	Makanan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
- Pendaftaran paten, merek, label batik	Jumlah IKM	Jumlah	Jumlah	Jumlah	20*
Ketenagakerjaan					
- Standardisasi upah	Paket kebijakan	1	1	1	1

Catatan : * Target.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

3. Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi

Kerangka umum kebijakan pembangunan daerah yang kondusif bagi pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan dilakukan melalui penerapan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan pengembangan kawasan teknopolitan batik (Pusat Inovasi dan Budaya Batik/PIBB). Beberapa perkembangan yang dapat dicatat dalam pengembangan jaringan TIK dan PIBB ini adalah, pertama, penyediaan dan pelayanan basis data TIK sebagian sudah terintegrasi (seperti di DPPKAD, Bappeda, KPAD) dan sebagian masih tersebar. Sedangkan sistem penyediaan dan pelayanan basis data tentang PIBB belum tersedia. Kedua, regulasi yang terkait dengan aplikasi TIK sudah ada, tetapi regulasi tentang PIBB sedang dipersiapkan landasan legalnya.

Ketiga, pemberian insentif bagi penerapan TIK di antaranya dalam bentuk penyediaan *broadband learning center* yang terbuka setiap hari bagi masyarakat umum. Keempat, untuk infrastruktur dasar, pada saat ini rencana pengembangan dan penerapan TIK baru tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kominfo, sedangkan dokumen master plan Kawasan Teknopolitan Batik masih dalam tahap penyusunan.

Tabel 2.153 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Basis jaringan inovasi					
- Penyediaan data	Kondisi	Tersebar	Tersebar	Di DPPKAD, Bappeda dan KPAD sudah terintegrasi	Di DPPKAD, Bappeda dan KPAD sudah terintegrasi
- Pelayanan data	Sistem	Berbasis TIK	Berbasis TIK	Berbasis TIK	Berbasis TIK

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Regulasi					
- Peraturan	Paket kebijakan	6	4	1	-
Insentif					
- Penyediaan <i>broadband learning center</i> bagi masyarakat umum	Unit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Infrastruktur					
- Dokumen perencanaan TIK daerah	Dokumen	Renstra dan Renja Dinas Kominfo	Renstra dan Renja Dinas Kominfo	Renstra dan Renja Dinas Kominfo	Renstra dan Renja Dinas Kominfo
- Dokumen perencanaan PIBB	Dokumen	-	-	-	Masterplan PIBB
- Pembentukan kelembagaan TIK	Lembaga	-	-	-	DPTIK
- Pembentukan kelembagaan PIBB	Lembaga	-	-	-	-
- Prasarana dasar TIK - Jaringan LAN menggunakan pita lebar - Jaringan online - Server data center (data base) - DRC lokal dan pusat data cadangan - Integrasi dan interoperabilitas data base dan aplikasi - Website dan TI perizinan dan penanaman modal	Paket	Ada	Ada	Ada	Ada
- Prasarana dasar PIBB - Fasilitas perkantoran - Fasilitas workshop dan promosi - Fasilitas pengembangan bisnis - Fasilitas pengembangan inovasi	Paket	-	-	-	Tahap desain

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/hasil litbangyasa dalam pengembangan jaringan inovasi dan bisnis adalah berupa lembaga penyiaran publik lokal (radio dan televisi, yakni Batik TV) dan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK). Untuk meningkatkan daya dukung iptekin/litbangyasa, maka pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp56.626.000 dan untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik sebesar Rp96.403.000 dan Rp104.552.500. Sementara itu daya absorpsi hasil iptekin/litbangyasa oleh masyarakat dan industri antara lain melalui *broadband learning center* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan melalui Kawasan Teknopolitan Batik belum berjalan karena masih dalam proses pembentukan.

Tabel 2.154 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa					
- Pemerintah	Lembaga	DPTIK	DPTIK	DPTIK	DPTIK
- Perguruan Tinggi	Lembaga	6	6	6	6
- Swasta	Lembaga	Radio	Radio	Radio, TV Batik	Radio, TV Batik
- Masyarakat	Lembaga	ORARI	ORARI	ORARI	ORARI
Daya dukung iptekin/litbangyasa					
- Anggaran pengembangan TIK	Rp juta	-	-	56,5	-
- Anggaran perencanaan PIBB	Rp juta	-	-	2001,1	-
Daya absorpsi iptekin					
- Broadband learning center	-	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Hasil pemetaan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan jaringan inovasi ditandai dengan dibangunnya kemitraan strategis dan kolaboratif untuk teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan BUMN (PT Telkom), komunitas (KPLI dan Komunitas Open Source), serta dengan lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan SMK). Sedangkan untuk Kawasan Teknopolitan Batik dilakukan dengan perguruan tinggi dan pengusaha.

Sementara itu upaya peningkatan difusi inovasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi berupa :Telecenter berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*internet base*), Penerapan berbagai jenis aplikasi SIM, seperti perpustakaan digital online dan SIM monitoring jaringan batik-net, Aplikasi LPSE, Aplikasi *e-learning* dan program buku sekolah elektronik (BSE) (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud), pengembangan mengembangkan beberapa telecenter bisnis, yakni di Pasar Batik Setono, Museum Batik, Kampung Batik Kauman dan Kampung Wisata Batik Pesindon).

Wahana interaksi pelaku bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi di antaranya dalam bentuk (1) penerapan *e-dev*, (2) pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat sepanjang tahun di Diskominfo, termasuk bagi pelaku bisnis, serta (3) pendirian broadband learning center yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis berbasis akses internet pita lebar. Sedangkan wahana interaksi pelaku bisnis melalui Kawasan Teknopolitan Batik dikembangkan dalam bentuk PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik).

Tabel 2.155 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kemitraan strategis dan kolaboratif					
Forum kemitraan					
o Dengan Pemda Lain di Provinsi Jawa Tengah	Forum	-	-	-	SAMPAN, PTSP
o Dengan Kementerian/Lembaga	Lembaga	BPPT, PT. Telkom	BPPT, PT Telkom	BPPT, PT. Telkom	BPPT, PT Telkom
o Dengan Swasta	Lembaga	KPLI dan Komunitas Open source	KPLI dan Komunitas Open Source	KPLI dan Komunitas Open Source	KPLI dan Komunitas Open Source
o Dengan Asosiasi	Lembaga				
o Dengan Lembaga Pendidikan		SMK dan PT	SMK dan PT	SMK dan PT	SMK dan PT

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Peningkatan difusi inovasi					
- Perpustakaan digital	Rp juta	-	-	-	172,8
o Aplikasi LPSE	Paket	-	-	-	1
o E-Learning dan BSE (kerja sama dengan Pustekom)	Paket	-	-	-	1
o Telecenter Pusat Bisnis	Unit	5	5	5	5
Wahana interaksi pelaku bisnis					
- TIK (pelatihan, BLC, lainnya)	Paket	Ada	Ada	Ada	Ada
- PIBB (perkantoran, RPK, lainnya)					Tahap desain

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Budaya kreatif-inovatif dalam pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu melalui pusat informasi dan konseling remaja di 28 (dari 59) sekolah setingkat SMP, MTs, SMU dan SMK. Bahkan Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan Ki Hajar Award (Kota Terbaik Implementasi TIK Bidang Pendidikan) dari Kemendikbud pada tahun 2013 dan 2014 serta beberapa penghargaan lainnya dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta.

Tabel 2.156 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan					
- Pusat informasi dan konseling remaja (SMP, MTs, SMU)	Jumlah	-	-	-	28
- Pelatihan Kewirausahaan Tingkat SMK	Paket	-	1	1	1
Pengelolaan teknologi masyarakat dan program <i>reverse brain drain</i>					
Apresiasi dan kampanye inovasi					
Apresiasi TIK :					
o Penerapan e-gov	Penghargaan	-	-	-	-
o Rekor Dunia MURI Aplikasi OSS		-	-	-	-
o Juara I IOSA		-	-	1	-
o Tokoh OS Nasional		-	1	1	-
o Juara I E-Gov se Jawa Tengah		1	1	-	-
o ICT Pura		-	2	-	-
o Juara 3 BLC dari PT. Telkom		1	-	-	-
o Inovativ Regional Award		1	-	-	-
o Innovative Leadership Award		1	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Kondisi saat ini untuk fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan jaringan inovasi dilakukan dengan mendukung penggunaan bahan baku zat pewarna alami yang berasal dari tetumbuhan alam.

Tabel 2.157 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Prakarsa pengembangan jaringan inovasi					
- Pengembangan jaringan inovasi berbasis TIK	-	-	-	-	-
- Pengembangan PIBB	paket	-	-	-	1
Koordinasi kebijakan jaringan inovasi					
- Kerja sama dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
- Kerja sama antardaerah	-	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Hasil pemetaan internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan jaringan inovasi ternyata di Kota Pekalongan belum ada upaya pelestarian lingkungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam mengelola limbah produksi batik. Tetapi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengikuti standarisasi global walaupun kesadaran UKM dan masyarakat terhadap HKI memang masih rendah, namun saat ini mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui seluk beluk HKI.

Tabel 2.158 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Lingkungan					
Lingkungan Berbasis TIK		Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Standardisasi					
Pengembangan TIK		Telah ber-standarisasi global	Telah ber-standarisasi global	Telah ber-standarisasi global	Telah ber-standarisasi global
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
TIK untuk HKI		Pemanfaatan TIK untuk HKI	Pemanfaatan TIK untuk HKI	Pemanfaatan TIK untuk HKI	Pemanfaatan TIK untuk HKI
Ketenagakerjaan					

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

4. Pilar Pengembangan Teknopreneur

Kerangka umum kebijakan pembangunan daerah yang kondusif bagi pengembangan tekopreneur terlihat dari belum tersedia secara online sistem penyediaan data dan pelayanan inovasi dan bisnis terkait dengan tekopreneur atau PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi). Tetapi pada tahun 2014 telah dibentuk Balai Inkubator oleh Politeknik Pusmanu sebagai upaya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Sementara itu, pada tahun yang sama juga telah didirikan Unit Produksi Bersama SMK *Incorporate* melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 420/C/2146 Tahun 2014.

Sementara itu, insentif inovasi dan bisnis telah diberikan dalam bentuk (1) bantuan modal kepada UKM berstatus wirausahaan baru melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, (2) fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi, serta (3) penyediaan sarana dan prasarana usaha untuk Unit Produksi Bersama SMK *Incorporate*.

Tabel 2.159 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Basis data tekopreneur					
- Penyediaan data tekopreneur	Kondisi	-	-	-	Collecting data
- Penyajian data tekopreneur	Sistem	-	-	-	Belum online
Regulasi pengembangan tekopreneur					

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
- Peraturan	Paket kebijakan	-	-	1	1
- Jumlah perizinan dan nonperizinan PPBT	Jumlah	-	-	-	-
Insentif pengembangan teknopreneur					
- Insentif (fasilitasi) untuk teknopreneur	Jenis insentif	-	-	-	- Bantuan modal, - Fasilitas pengembangan unit inkubator, - Penyediaan sarana prasarana pengembangan teknopreneur
Infrastruktur teknopreneur					
- Dokumen kajian pengembangan teknopreneur	Dokumen	-	-	-	1
- Pembentukan Kelembagaan inkubator	Unit	-	-	-	Lembaga inkubator wirausaha
- Prasarana dasar	Paket	-	-	-	Gedung workshop kewirausahaan

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam pengembangan teknopreneur telah dilakukan oleh Politeknik Pusmanu, SMK Muhammadiyah, UPB SMK *Incorporate* dan telah menyelenggarakan kegiatan *teknocamp* bagi calon wirausahawan baru. Sementara itu untuk daya absorpsi Iptekin dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian pelaku bisnis dalam pengembangan desain batik melalui program pengembangan teknopreneur.

Tabel 2.160 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa teknopreneur					
- Pemerintah	PD	-	-	-	-
- Perguruan Tinggi/ SMK	Jumlah	-	-	-	3
- Swasta	-	-	-	-	-
- Masyarakat	-	-	-	-	-
Daya dukung iptekin/litbangyasa bagi teknopreneur					
- Technocamp					1
Daya absorpsi iptekin					
- Pelatihan dan pemagangan :					
- Technocamp	Paket	-	-	-	1
- Pengembangan disain batik	Paket	-	-	-	1
- Pelatihan ISO	Paket	-	-	-	2
- Pelatihan manajemen pengetahuan tingkat kesiapan teknologi	Paket	-	-	-	2
- Pelatihan peningkatan pengetahuan teknologi industri	Paket	-	-	-	1
- Fasilitas pengusaha berbasis teknologi dan UKM inovatif	Orang	-	-	-	20

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Untuk interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan teknopreneur dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi dilakukan dengan berbagai lembaga, yaitu kerja sama dengan BIT BPPT (Hibah Bersaing untuk kewirausahaan baru dan penguatan UMKM), PPKPDS BPPT (pengembangan kewirausahaan di SMK, perluasan kurikulum TIK menjadi Teknologi dan Kewirausahaan). Kerja sama dengan

Kemenpora (*Technopreneurship* untuk Pemuda) dan kerja sama dengan IIPA, Dirjen HKI, FHUI (pembentukan *IP Corner*). Sedangkan upaya memperkuat interaksi antarpelaku bisnis dilakukan melalui wahana penyelenggaraan workshop kewirausahaan (inkubator wirausaha).

Tabel 2.161 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan teknopreneur					
o Dengan Pemda Lain	Lembaga	-	-	-	
o Dengan Kementerian/Lembaga	Lembaga	-	-	-	BPPT, Kemenpora, Dirjen HKI-Kemenkumham
o Dengan Swasta	Lembaga	-	-	-	-
o Dengan Asosiasi	Lembaga	-	-	-	-
o Dengan Perguruan Tinggi	Lembaga	-	-	-	FHUI
Wahana interaksi pelaku bisnis					
- Workshop Kewirausahaan	kali	-	-	-	1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Penguatan budaya inovasi dan bisnis melalui jalur pendidikan dan pelatihan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk pelatihan aplikasi teknologi pemasaran secara online bagi siswa SMK. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan pelatihan *technopreneurship* bagi pemuda.

Tabel 2.162 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi					
- Pelatihan Pengembangan Pemasaran	Kali	-	-	-	1
- Pelatihan Teknopreneurship untuk pemula	Kali	-	-	-	1
Pengelolaan teknologi masyarakat dan program <i>reverse brain drain</i>					
Apresiasi dan kampanye inovasi					
Penumbuhan usaha baru inovatif					
- Fasilitasi Permodalan	Program	-	-	-	Program hibah bersaing dan bantuan pengembangan usaha bagi calon wirausaha baru
- Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan UKM Inovatif	Orang	-	-	-	20
- Bantuan Pengembangan Usaha	Unit	-	-	-	

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Fokus pengembangan teknopreneur adalah mencetak pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT), khususnya di sektor industri batik dengan dukungan Museum Batik yang menyediakan sarana dan prasarana perbatikan dan memfasilitasi promosi batik.

Tabel 2.163 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Teknopreneur di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Prakarsa pengembangan teknopreneur dalam klaster industri unggulan daerah					
- Bidang usaha perbatikan	Jumlah	-	-	-	1
- Bidang usaha perikanan	Jumlah	-	-	-	-
- Lainnya	Jumlah	-	-	-	-
Koordinasi kebijakan antardaerah					
- Kerja sama dengan pihak ketiga	Paket	-	-	1	1
- Kerja sama antardaerah	Paket	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Untuk internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan teknopreneur di Kota Pekalongan masih baru berkembang, tetapi dalam pengembangan usahanya mereka sudah dibekali dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap dinamika global, baik yang berkaitan dengan isu lingkungan, isu standarisasi, isu HKI maupun isu ketenagakerjaan.

Tabel 2.164 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Teknopreneur, di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Lingkungan					
- Isu lingkungan	-	-	-	-	Pembekalan Pengetahuan
Standardisasi					
- Produk yang terstandarisasi	-	-	-	-	Pembekalan Pengetahuan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
- Produk baru yang di-HKI-kan	-	-	-	-	Pembekalan Pengetahuan
Ketenagakerjaan					
- Isu Ketenagakerjaan	-	-	-	-	Pembekalan Pengetahuan

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

5. Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Kondisi saat kerangka umum kebijakan pembangunan daerah bagi penguatan tematik sistem inovasi khususnya berkait dengan TIK sudah kondusif terlihat dengan regulasi yang terkait dengan penguatan tematik sistem inovasi di antaranya adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Integrasi-Interoperabilitas Antar-SIM/Database dan Aplikasi. Di samping itu telah dilakukan melalui pengembangan *e-development* yang terdiri dari : *e-health* : SIM RSUD dan sistem rujukan *online* antara RS dan Puskesmas dengan nama SERUNI (sejak tahun 2013), *e-government* : Profil Kelurahan *Online* (sejak tahun 2013). SIM Pegawai, SIM Keuangan dan SIM Penggajian, *e-rekapitulasi*, *e-learning* : buku sekolah elektronik (BSE) dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*, *e-office* : *digital office*, *mobile office* dan *paperless office* (sejak 31 Oktober 2014). Sedangkan infrastruktur dasar yang telah ada untuk pengembangan *e-development* di antaranya ialah (a) *access* dan *online office*, (b) FOSS, (c) perluasan jaringan *online/access point*, mulai dari PD, kecamatan, kelurahan hingga RT-RW (RW-net, sampai tahun 2013 sudah 120 RW, serta juga Posyandu dan SD).

Tabel 2.165 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Kerangka Umum	Satuan	2011	2012	2013	2014
Basis data Penguatan Tematik					
- Penyediaan Data	Kondisi	Tersebar	Tersebar	Tersebar	Tersebar
- Pelayanan Data	Sistem	Online	Online	Online	Online
Regulasi Tematik					
- Peraturan	Paket kebijakan	-	-	-	1
- Jumlah perizinan dan nonperizinan	Jumlah	-	-	-	-
Infrastruktur					
- Access dan online office					
- FOSS					
- Perluasan jaringan online/access point	RW-Net			120 RW	

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah terlihat dari lembaga iptekin/litbangyasa yang terlibat dalam pengembangan *e-development* di Kota Pekalongan antara lain Pustekom Kemendikbud dan BPPT yang bekerja sama dengan PD terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (*e-learning*) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (*e-government*). Sedangkan daya dukung iptekin dalam pengembangan *e-development* dilakukan melalui pengembangan software, content dan panduan.

Tabel 2.166 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kelembagaan iptekin/litbangyasa penguatan tematik					
- Pemerintah	K / L	Pustekom Kemendikbud, BPPT	Pustekom Kemendikbud BPPT	Pustekom Kemendikbud, BPPT	Pustekom Kemendikbud, BPPT
	PD	Diskominfo, Disdikpora	Diskominfo, Disdikpora	Diskominfo, Disdikpora	Diskominfo, Disdikpora
- Perguruan Tinggi	Jumlah	-	-	-	-
- Swasta	-	-	-	-	-
- Masyarakat	-	-	-	-	-
Daya dukung iptekin/litbangyasa penguatan tematik					
- Anggaran pengembangan TIK	Rp juta	-	-	-	567,4
- SDM Pengelola TIK	Orang	-	-	-	18
Absorpsi iptekin/litbangyasa penguatan tematik					

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan *e-development* dilakukan melalui program kerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga, di antaranya Kemenkominfo, Pustekom Kemendikbud, BPPT, LIPI dan LKPP. Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka *e-development* dilakukan melalui alih teknologi dalam beberapa jenis aplikasi, seperti SIM (SIM Keuangan Daerah Berbasis FOSS/Webbase online, SIM Perencanaan, SIM Monitoring dan Evaluasi Program, SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, SIM Monitoring Menara

Telekomunikasi, SIM Monitoring Program Raskin, SIM Rujukan Online antara RS dan Puskesmas, lainnya), aplikasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) secara online (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud), aplikasi buku sekolah elektronik (BSE), serta beberapa aplikasi lainnya. Sedangkan wahana interaksi pelaku bisnis dilaksanakan melalui Forum *e-Government* Nasional.

Tabel 2.167 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Kemitraan Strategis dan kolaboratif untuk <i>e-development</i>					
o Dengan Pemda Lain	Lembaga	-	-	-	-
o Dengan Kementerian/Lembaga	Lembaga	-	-	-	Kemenkoimfo, Pustekom Kemendikbud, BPPT, LIPI, LKPP
o Dengan Swasta	Lembaga	-	-	-	-
o Dengan Asosiasi	Lembaga	-	-	-	-
o Dengan Perguruan Tinggi	Lembaga	-	-	-	-
Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka <i>e-development</i>					
- Alih teknologi dalam beberapa jenis aplikasi	Jenis	-	-	-	SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS, SIM Perencanaan, SIM RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, BSE
Wahana interaksi pelaku bisnis					
- Forum Iptekin	Forum	-	-	-	Forum e-Government Nasional

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Budaya kreatif-inovatif dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui penerapan *e-government* dan dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan sejak tahun 2008. Apresiasi perkembangan IT ditandai dengan diperolehnya penghargaan ICT Pura yang merupakan penghargaan kepada kepala daerah yang telah memberikan perhatian intens IT di daerahnya, Indonesia *Opensource Award* serta masih banyak penghargaan lainnya.

Tabel 2.168 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi TIK					
- Pelatihan penerapan e-gov	Paket	1	1	1	1
Apresiasi perkembangan IT					
- Apresiasi pengembangan IT	-	-	-	-	ICT Pura, Indonesia Open Source, dsb

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Fokus dan keterpaduan kebijakan dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui pengelolaan *e-government* dilakukan oleh 18 orang yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Tabel 2.169 Perkembangan Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Prakarsa dalam penguatan tematik sistem inovasi					
- Pengembangan TIK	-	-	-	-	Pengelolaan e -gov
Koordinasi kebijakan antardaerah dalam penguatan tematik system inovasi					

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
- Kerja sama dengan pihak ketiga	Jumlah	-	-	-	1
- Kerja sama antardaerah	Jumlah	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Internalisasi dinamika global ke dalam penguatan tematik sistem inovasi dilakukan melalui pengalihan (hijrah) dari perangkat IT ilegal/bajakan menjadi perangkat IT legal/resmi.

Tabel 2.170 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014

Elemen Keterkaitan	Satuan	2011	2012	2013	2014
Lingkungan					
	-	-	-	-	-
Standardisasi					
o Perangkat IT	Unit	-	-	Penggunaan Perangkat IT legal	Penggunaan Perangkat IT legal
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
	-	-	-	-	-
Ketenagakerjaan					
	-	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber

2.5. ANALISIS GAMBARAN UMUM

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 %. Di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean) Kecamatan Pekalongan Utara. Permasalahan yang muncul dari kondisi alam semacam ini antara lain : 1) Besarnya sedimentasi, baik pada saluran primer, sekunder, ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman; 2) terjadinya genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif lama; dan 3) rendahnya kualitas lingkungan permukiman seperti air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan lain-lain.

Di wilayah dataran rendah pantai semacam ini, Kota Pekalongan tidak dapat mengeksploitasi air tanah dalam yang berlebihan karena dapat memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu, sumber air baku harus berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pemanfaatan sumur dalam, baik oleh PDAM maupun oleh PAMSIMAS dan swasta seperti hotel ataupun perusahaan harus dikendalikan pemanfaatannya, disesuaikan dengan kapasitas pengisian air tanah dari prose salami karena semakin menyempitnya kawasan terbuka sebagai kawasan resapan air. Kondisi ini menempatkan Kota Pekalongan pada posisi ketergantungan yang relatif tinggi terhadap Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung Program Pemerintah dalam memenuhi target akses aman air bersih hingga 100 % pada tahun 2019. Oleh karena itu, kondisi ini perlu disikapi sebagai persoalan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan berbagai prasarana dan sarana dasar perkotaan, termasuk di dalamnya penyediaan air minum, paling tepat menggunakan pendekatan kewilayahan yaitu menempatkan Kota Pekalongan sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Petanglong, yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten

Pekalongan. Kondisi ini sejalan dengan kedudukan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Prasarana dan sarana yang dapat dikembangkan yaitu pengelolaan SPAM regional, TPA regional, jalan lingkar Petanglong maupun infrastruktur lainnya.

Sementara itu, kesadaran masyarakat, selain akan mendorong terjadinya penghematan dalam penggunaan air bersih, juga akan mendorong upaya bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan melestarikan sumber daya air bersih seperti penghijauan, dan juga mengurangi atau bahkan menghilangkan pencemaran/perusakan lingkungan. Di samping itu, masyarakat juga akan berupaya untuk ikut secara aktif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sekarang ini terus meningkat dalam kisaran 0,79 % sampai dengan 1%. Harapannya, dengan penurunan jumlah penduduk atau minimal tidak terjadi pertumbuhan maka akan mengurangi kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan air bersih.

Laju pertumbuhan penduduk yang pada dasarnya relatif wajar sebagai sebuah wilayah kota yang terus tumbuh. Namun demikian, pertumbuhan penduduk ini juga diikuti dengan kenaikan kebutuhan seperti perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ini telah menggeser rasio pemanfaatan lahan. Luas lahan di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Lahan sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Konversi lahan tersebut ditujukan untuk pengembangan lahan terbangun di wilayah Kota Pekalongan.

Di wilayah dataran rendah pantai, Kota Pekalongan juga menghadapi bahaya lain. Berdasarkan potensi ancaman bencana, Kota Pekalongan memiliki 4 (empat) potensi bencana, yaitu bencana rob, banjir, abrasi, dan pada periode akhir ini juga terjadi angin puting beliung. Bencana rob (air laut pasang) sekarang ini semakin menunjukkan peningkatan, baik frekuensi maupun luasan. Luasan area tergenang menunjukkan adanya peningkatan. Wilayah Pasirsari dan Kramatsari yang tadinya belum tergenang, pada akhir-akhir ini terlihat munculnya spot genangan baru di wilayah-wilayah tersebut. Selain rob, Kota Pekalongan juga rawan terjadi banjir karena air hujan. Setidaknya terdapat 4 sungai yang melintasi Kota Pekalongan, yaitu Kali Pekalongan, Kali Banger, Kali Bremi, dan Kali Meduri. Secara aliran, Kota Pekalongan berada di wilayah hilir dari keempat sungai tersebut. Sehingga pada saat terjadi hujan deras di wilayah hulu maka akan terbuka kemungkinan untuk terjadinya banjir di wilayah Kota Pekalongan.

Bahaya bencana lainnya adalah abrasi air laut. Peningkatan ketinggian permukaan air laut telah mengancam wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai. Jalan dan juga permukiman dengan berbagai fasilitasnya di sepanjang Jalan Samudra adalah wilayah yang paling besar potensi kerusakannya. Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai, pembangunan geotube dengan *Mega Sand Bag* di sepanjang pantai Kota Pekalongan, serta penguatan kualitas jalan Samudra melalui anggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Bahaya bencana keempat adalah puting beliung. Peristiwanya sering terjadi pada saat musim penghujan. Korban yang ditimbulkan antara lain berupa robohnya rumah penduduk ataupun tumbang pohon di pinggir jalan. Potensi bencana keempat ini sulit

diprediksikan terjadi. Namun beberapa upaya dilakukan antara lain berupa perampangan pohon di pinggir jalan secara berkala sehingga tidak terlalu berat diterpa angin. Sementara untuk rumah-rumah penduduk, Pemerintah Kota Pekalongan hanya berupaya mencadangkan bantuan sosial dalam APBD setiap tahunnya. Harapannya akan dapat meringankan beban korban bencana angin puting beliung tersebut.

Kota Pekalongan sebagai wilayah perkotaan selain mengalami permasalahan pengurangan lahan sawah sebagai akibat perkembangan pembangunan gedung dan fasilitas infrastruktur kota lainnya, peningkatan produksi pertanian juga terkendala dengan upaya optimalisasi saluran irigasi. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota hanya daerah irigasi tambak. Sedangkan untuk irigasi persawahan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2.5.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan ditopang oleh Industri Pengolahan (21,67%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14 %); dan Konstruksi (14,92 %). Namun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhannya, maka secara berurutan dari yang tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi (10,98 %), Jasa Perusahaan (11,98 %), Jasa Pendidikan (10,20 %), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,08 %).

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki kontribusi paling besar, yaitu 22,14 %, diprediksikan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dalam terus memacu pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah serta karakteristik perkotaan, munculnya pasar-pasar modern berskala besar serta dealer dan agen distributor mobil dan motor diprediksikan belum tergantikan oleh Kabupaten Pekalongan dan Batang.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait dengan Industri Pengolahan Kota Pekalongan yang ditopang oleh industri batik dan perikanan dimana keduanya memiliki ketergantungan dengan beberapa hal yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksikan. Permasalahan industri batik yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga kain mori serta bahan baku pewarnaan yang tidak stabil menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin. Permasalahan kedua, yang kemungkinan besar akan muncul adalah terkait dengan pemasaran. Persaingan dengan kota lain yang juga memiliki produk kerajinan batik serta rencana pembangunan jalan tol dan jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang (JALING PETANGLONG), akan sangat mempengaruhi pemasaran batik Kota Pekalongan.

2. Kemiskinan dan pemerataan pendapatan per kapita penduduk.

Angka kemiskinan Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan menurun. Angka terakhir per tahun 2014 sudah menjadi 8,02 %. Sementara itu, indeks gini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat karena pada tahun 2014 mempunyai nilai 0,34. Kondisi semakin meningkatnya indeks gini harus diwaspadai bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilakukan justru menambah dampak kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan maka akan semakin sulit melakukan penurunan karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Secara riil, kendala tersebut adalah terkait dengan data penduduk miskin yang memiliki pandangan berbeda, baik dilihat dari kemutlakan dan relativitasnya, ataupun dilihat dari penyebab secara struktural dan secara kulturalnya. Oleh karena itu, data penduduk miskin memerlukan validasi secara rutin dengan melibatkan warga masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data, baik ditinjau dari jenisnya ataupun ditinjau dari penyebabnya. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk.

3. Pengangguran terbuka

Dilihat dari data angka penganggurannya, Kota Pekalongan relatif lebih baik dibandingkan capaian Provinsi ataupun Nasional. Persentase pengangguran terbuka tinggal 5,42%. Pencapaian ini dimungkinkan karena kecenderungan penduduk Kota Pekalongan saat ini lebih banyak bergerak di sektor-sektor informal yang termasuk dalam ekonomi kreatif. Selain kerajinan batik dan perikanan yang banyak bergerak dalam industri rumah tangga, perkembangan kuliner juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, sektor-sektor lain juga menunjukkan perkembangan yang baik. Terkait hal ini, maka kebutuhan yang harus disiapkan dalam rangka menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa yang akan datang, Pemerintah harus mengatasi permasalahan : 1) Perkembangan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja; serta 2) Tidak adanya *link and match* (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja dengan calon tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan mengalami kenaikan, meskipun secara peringkat mengalami penurunan. Hal yang paling mencolok adalah terkait dengan Harapan Melanjutkan Sekolah (*Expected Years of School*) dan Rata-rata Lama Sekolah. Hal ini juga dapat dilihat dari APK dan APM. APK dan APM menunjukkan gejala berbanding terbalik dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin menurun APK dan APMnya, sebagai akibat terjadinya putus sekolah ataupun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa penyebab yang dimungkinkan muncul adalah terkait faktor ekonomi, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan, faktor lingkungan pergaulan, ataupun karena dampak negatif perkembangan Teknologi Informasi.

Sedangkan terkait dengan akses pendidikan tinggi di Kota Pekalongan, kondisi dan permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, masih terbatasnya ketersediaan jumlah Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan, serta masih mahal biaya pendidikan tinggi.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibandingkan dengan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini karena masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga serta masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.

6. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan, meskipun tidak setinggi capaian Nasional dan Tengah (dalam arti masih termasuk kategori rendah), namun angkanya masih sangat fluktuatif. Beberapa penyebab kondisi ini antara lain karena masih munculnya penyebab kesakitan pada Bayi seperti ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi/gizi buruk, kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat serta kesiapan petugas kesehatan.

2.5.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

- a). Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.
- b). Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin tinggi penduduk usia sekolah Masyarakat belum sepenuhnya menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun.
- c). Kurangnya daya tampung bila diasumsikan semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah.
- d). Upaya perluasan akses pendidikan menengah dibatasi oleh kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
- e). Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD sebagai akibat masih kurangnya Satuan Pendidikan PAUD dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya PAUD dalam tumbuh kembangnya anak.
- f). Masih adanya guru dengan Kualifikasi Pendidikan belum mencapai minimal S1/D4, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI (17,77 %).

2. Kesehatan

- a). Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan.
- b). Tren semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit menular dari tahun ke tahun.

3. Pekerjaan Umum.

- a). Belum seluruhnya jalan kota dalam kondisi baik
- b). Belum seluruhnya irigasi dalam kondisi baik
- c). Rawan genangan banjir dan rob
- d). Masih perlu upaya maksimal dalam upaya memenuhi target 100 % layanan air bersih, 0 % kawasan kumuh, serta 100 % akses layanan sanitasi.

4. Permasalahan-permasalahan lain terkait Pelayanan Umum.

- a). Potensi terjadinya kecelakaan masih relatif tinggi sebagai akibat pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru mencapai 75,83%.
- b). Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum optimal sebagai akibat kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk secara aktif memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan.
- c). Belum optimalnya model pelayanan umum yang responsif gender sehingga kelompok marginal masih rawan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Demikian juga ketersediaan prasarana dan sarana harus berbasis gender
- d). Masalah pengangguran terbuka masih memerlukan perhatian, khususnya dalam hal akses informasi lapangan pekerjaan serta akses memperoleh penambahan kompetensi dan ketrampilan sesuai dengan trend kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- e). Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berkembang baik dan masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi
- f). Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan baik dari sisi hulu yaitu berupa penggalian potensi, proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan. Di samping itu, keterbatasan wilayah dan lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk orientasi modal industri besar.
- g). Pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Kondisi Kota Pekalongan yang multi etnis, multi budaya, multi agama pada dasarnya memiliki potensi keunikan tersendiri yang apabila dikemas dan diintegrasikan dengan rutinitas keseharian hidup masyarakat, maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Even-even peribadatan dari berbagai agama, pada sisi ideal memang tidak selayaknya dipertontonkan kepada khalayak ramai. Tetapi, manakala hal ini dikemas dan dipertunjukkan dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Kedatangan wisatawan ke Kota Pekalongan dalam jumlah besar dan berlangsung secara terus menerus pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan moment investasi karena moment inipun terjadi aliran uang ke dan berputar dalam jumlah relatif besar di Kota Pekalongan. Hal ini kemudian akan menarik kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang juga akan memajukan ekonomi Kota Pekalongan.

Permasalahan lain yang juga terkait dengan hal ini adalah belum siapnya masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang akan mampu menerima, mengajak perbincangan secara hangat atas berbagai informasi seputar Kota Pekalongan dan membuat nyaman wisatawan untuk singgah dan datang kembali ke Kota Pekalongan. Di samping itu, penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, Sarana angkutan belum representatif sejalan dengan peningkatan jumlah hotel berbintang, destinasi wisata belum tertata secara sistemik.

- h). Selanjutnya dari sisi keamanan, dapat dilihat masih munculnya kriminalitas di Kota Pekalongan yang dapat menjadi penyebab ketidaknyamanan wisatawan di Kota Pekalongan.
- i). Kecenderungan pangan utama per tahun mengalami penurunan. Hal ini akan terus menjadi permasalahan di masa yang akan datang apabila tidak ada strategi yang tepat dalam upaya menanggulangi masalah keterbatasan lahan pertanian, menurunnya jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, serta masalah lain muncul seperti musim kemarau panjang, gangguan hama dan penyakit tanaman, subsidi pupuk, dan lain-lain.

2.5.3. Aspek Daya Saing

Permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan daya saing adalah terkait dengan penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan perijinan, dan penyiapan sumber daya manusia yang siap memasuki era yang kompetitif.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan terjadinya penurunan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan panjang jalan yang relatif tetap (stagnan) sementara jumlah kendaraan cenderung bertambah setiap tahun. Di samping itu, operasionalisasi jalur ganda (*double track*) kereta api dengan jumlah perlintasan sebidang relatif banyak, semakin meningkatkan intensitas kemacetan di Kota Pekalongan.

Dalam permasalahan lain terkait dengan pembagian arus penumpang sehingga lebih mudah memberikan arah kepada siapapun pengunjung ke Kota Pekalongan, antara lain terjadi di titik terminal Kota Pekalongan. Penumpang lebih memilih menunggu di pinggir jalan daripada menunggu di terminal. Kendaraan luar kota lebih memilih menurunkan penumpang di pinggir jalan daripada di dalam terminal. Dengan kata lain terminal tidak berfungsi sebagai pembagi arus, baik arus kendaraan maupun arus penumpang.

Di sisi lain, stasiun Kereta Api mempunyai kecenderungan meningkat arus penumpangnya. Sebagai kota yang akan mengorientasikan pada pengembangan wisata budaya, kota jasa dan perdagangan, maka arus pengumpan masih belum terintegrasi secara maksimal. Ditambah lagi posisi pintu stasiun yang langsung terhubung dengan arus cepat jalur pantura semakin menambah peningkatan kemacetan di titik pintu masuk keluar stasiun. Dengan kata lain perlu strategi penanganan jalur masuk keluar baik orang maupun barang yang terpisah dengan jalur cepat pantura.

Untuk mendukung peningkatan daya saing, infrastruktur lain yang masih menjadi permasalahan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih. Peningkatan kebutuhan pemenuhan air bersih tidak sejalan dengan kemampuan pemilikan Sumber Daya Air yang sebagian berada di wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat menargetkan 100 % pemenuhan akses air bersih pada akhir tahun 2019. Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Selain itu, permasalahan berkurangnya daya dukung lingkungan juga dimungkinkan muncul di waktu yang akan datang sebagai akibat pemanfaatan sumur dalam, baik oleh PDAM ataupun oleh PAMSIMAS dan Swasta dengan jumlah yang relatif banyak dan diperkirakan akan berkembang di waktu yang akan datang.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1. Basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual.
2. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat.
3. Jumlah SDM yang memegang jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas.
4. Alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada masih relatif kecil.
5. Munculnya permasalahan kelembagaan dari organisasi bersama antar Daerah, khususnya dalam hal sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan.
6. Basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini belum dikembangkan.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2010-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010-2015

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses mengkonversi berbagai macam ide gagasan dan pemikiran yang diperlukan dalam rangka menjawab kebutuhan yang muncul dalam suatu tatanan masyarakat tertentu menjadi satu kesatuan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam lingkup cakupan yang relatif besar, ketepatan sebuah dokumen perencanaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai data dan informasi yang diolah disertai dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Besaran data dan informasi yang dibutuhkan sangat bergantung dengan jangka waktu atau periodisasi sebuah dokumen perencanaan. Demikian juga dalam kerangka analisis kondisi keuangan yang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks pemikiran seperti ini, maka kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan RPJMD akan diambil dari kondisi kinerja selama 6 (enam) tahun ke belakang yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Data kinerja keuangan dalam bab ini merupakan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010-2015. Kinerja keuangan terbagi dalam sub pokok bahasan, yaitu tentang Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kota Pekalongan terdiri dari Komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Secara rinci, masing-masing komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan

Pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- b) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

2. Komponen Belanja:

Belanja berasal dari 2 (dua) komponen yaitu :

- a) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

3. Komponen Pembiayaan:

Pembiayaan berasal dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a). Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b). Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Dari uraian di atas, pada dasarnya APBD terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian Penerimaan dan Pengeluaran. Bagian Penerimaan terdiri dari Komponen Pendapatan dan Penerimaan pembiayaan, sedangkan Bagian Pengeluaran terdiri dari Komponen Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya disajikan data ringkasan Perubahan APBD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010 – 2015**

URAIAN	TARGET PERUBAHAN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN	413.703.289.374	493.860.254.838	583.105.910.000	651.193.332.000	751.087.541.000	818.541.441.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.395.561.052	56.990.829.790	68.845.149.000	93.855.722.000	115.235.462.000	155.549.952.000
Pendapatan Pajak Daerah	11.495.000.000	16.115.245.000	20.095.000.000	30.520.000.000	35.537.000.000	41.690.000.000
Hasil Retribusi Daerah	13.114.480.300	14.288.651.725	16.664.581.000	18.478.463.000	14.608.068.000	14.947.160.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.441.427.052	1.834.436.365	2.563.571.000	4.045.509.000	3.380.939.000	3.870.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.344.653.700	24.752.496.700	29.521.997.000	40.811.750.000	61.709.455.000	95.042.792.000
DANA PERIMBANGAN	316.244.963.942	343.561.517.638	407.825.360.000	450.752.505.000	475.427.714.000	498.056.908.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.663.894.942	25.356.787.638	33.308.284.000	27.713.487.000	28.382.910.000	31.372.261.000

URAIAN	TARGET PERUBAHAN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dana Alokasi Umum	266.792.669.000	293.530.030.000	347.390.356.000	384.489.368.000	412.871.094.000	421.276.527.000
Dana Alokasi Khusus	20.788.400.000	24.674.700.000	27.126.720.000	38.549.650.000	34.173.710.000	45.408.120.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.062.764.380	93.307.907.410	106.435.401.000	106.585.105.000	160.424.365.000	164.934.581.000
Pendapatan Hibah	1.000.000.000	2.170.000.000			5.105.000.000	8.895.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.513.609.880	14.703.376.690	22.116.033.000	29.718.339.000	42.467.877.000	52.778.690.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.456.160.400	58.640.531.720	68.645.794.000	61.131.325.000	91.911.244.000	81.314.598.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.092.994.100	17.793.999.000	15.673.574.000	15.735.441.000	20.940.244.000	21.946.293.000
BELANJA	460.965.358.181	535.334.731.061	618.142.634.000	730.305.312.000	828.529.162.000	918.311.537.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	261.495.582.690	285.649.624.895	324.567.184.000	357.653.221.000	415.917.977.000	431.089.021.000
Belanja Pegawai	218.271.825.750	246.826.808.995	281.414.429.000	306.996.998.000	354.768.395.000	362.582.224.000
Belanja Hibah	25.224.784.000	17.654.200.000	16.362.300.000	15.691.160.000	42.679.160.000	62.878.916.000
Belanja Bantuan Sosial	3.005.000.000	3.400.000.000	1.090.000.000	10.934.260.000	14.015.420.000	1.129.000.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa	12.526.000.000	16.435.000.000	23.200.000.000	21.530.803.000	630.002.000	698.881.000
Belanja Tidak Terduga	2.467.972.940	1.333.615.900	2.500.455.000	2.500.000.000	3.825.000.000	3.800.000.000
BELANJA LANGSUNG	199.469.775.491	249.685.106.166	293.575.450.000	372.652.091.000	412.611.185.000	487.222.516.000
Belanja Pegawai	30.796.856.730	36.447.097.641	37.582.396.500	61.742.429.250	43.220.836.000	17.826.456.000
Belanja Barang dan Jasa	101.630.921.170	124.769.630.182	132.835.265.500	163.031.725.350	197.587.532.000	291.771.455.000
Belanja Modal	67.041.997.591	88.468.378.344	123.157.788.000	147.877.936.400	171.802.817.000	177.624.605.000
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.324.912.234	44.242.135.022	46.069.707.000	94.481.504.000	92.233.899.000	111.870.096.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.324.912.234	44.242.135.022	45.484.707.000	94.481.504.000	90.733.899.000	101.370.096.000
Pencairan Dana Cadangan	3.000.000.000	0	0	0	1.500.000.000	10.500.000.000
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	585.000.000	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.062.843.427	2.767.658.799	11.032.983.000	15.369.524.000	14.792.278.000	12.100.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	1.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.807.000.000	2.767.658.799	3.917.000.000	4.705.374.000	9.750.000.000	12.100.000.000
Pembayaran Pokok Utang	255.843.427	0	6.115.983.000	6.164.150.000	42.278.000	0

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian-uraian berikut ini.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	413.703.289.374	417.191.612.086,51	100,84	3.488.322.712,51
2011	493.860.254.838	509.929.023.924,16	103,25	16.068.769.086,16
2012	583.105.910.000	614.166.700.431,49	105,33	31.060.790.431,49
2013	651.193.332.000	675.375.467.702,00	103,71	24.182.135.702,00
2014	751.087.541.000	762.110.364.355,00	101,47	11.022.823.355,00
2015	818.541.441.000	809.733.612.473,00	98,92	(8.807.828.527,00)
JUMLAH	3.711.491.768.212	3.788.506.780.972,16	102,08	77.015.012.760,16

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Pendapatan Daerah sebesar Rp. **3.711.491.768.212,00** dengan realisasi Rp. **3.788.506.780.972,16** atau tercapai sebesar 102,08 persen. Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kota Pekalongan selama Tahun Anggaran 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan
Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010-2015**

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	11,38	12,44	14,85	16,92	18,91	18,78
Dana Perimbangan	76,12	67,67	66,76	66,66	62,36	60,66
Lain-2 Pendapatan yang Sah	12,49	19,89	18,39	16,42	18,73	20,56
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa proporsi PAD cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio tersebut masih di atas rata-rata proporsi PAD kabupaten/kota secara nasional, karena berdasarkan buku “Deskripsi dan Analisis APBD 2014” yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, rata-rata proporsi PAD kabupaten/kota terhadap pendapatan daerah masih berkisar 12,06%.

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

a). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2014, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp **532.872.675.842,00,00** realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp **612.478.271.555,16** atau 114,94 persen, seperti dijelaskan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	42.395.561.052,00	47.495.707.336,51	112,03	5.100.146.284,51
2011	56.990.829.790,00	63.414.318.840,16	111,27	6.423.489.050,16
2012	68.845.149.000,00	91.205.786.310,49	132,48	22.360.637.310,49
2013	93.855.722.000,00	114.252.438.719,00	121,73	20.396.716.719,00
2014	115.235.462.000,00	144.065.424.017,00	125,02	28.829.962.017,00
2015	155.549.952.000,00	152.044.596.332,00	97,75	(3.505.355.668,00)
JUMLAH	532.872.675.842,00	612.478.271.555,16	114,94	79.605.595.713,16

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran bahwa realisasi Pajak Daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 melampaui dari target yang telah ditentukan, dimana dari total target Pajak Daerah sebesar Rp **155.452.245.000,00** terealisasi sebesar Rp **190.591.265.130,00** atau tercapai **122,60** persen. Realisasi pajak daerah sejak tahun 2011 meningkat cukup signifikan karena implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu pelimpahan BPHTB dan PBB P2 menjadi Pajak Daerah. Target dan realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 3.5 :

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	11.495.000.000,00	12.349.969.739,00	107,44	854.969.739,00
2011	16.115.245.000,00	19.911.975.754,00	123,56	3.796.730.754,00
2012	20.095.000.000,00	30.601.965.489,00	152,29	10.506.965.489,00
2013	30.520.000.000,00	38.018.394.793,00	124,57	7.498.394.793,00
2014	35.537.000.000,00	42.209.839.165,00	118,78	6.672.839.165,00
2015	41.690.000.000,00	47.499.120.190,00	113,93	5.809.120.190,00
JUMLAH	155.452.245.000,00	190.591.265.130,00	122,60	35.139.020.130,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. **92.101.404.025,00** dan realisasinya telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **96.923.802.926,00** atau **105,24** persen, disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	13.114.480.300,00	13.647.054.436,00	104,06	532.574.136,00
2011	14.288.651.725,00	14.947.369.366,00	104,61	658.717.641,00
2012	16.664.581.000,00	17.720.265.651,00	106,33	1.055.684.651,00
2013	18.478.463.000,00	18.873.554.173,00	102,14	395.091.173,00
2014	14.608.068.000,00	15.140.630.188,00	103,65	532.562.188,00
2015	14.947.160.000,00	16.594.929.112,00	111,02	1.647.769.112,00
JUMLAH	92.101.404.025,00	96.923.802.926,00	105,24	4.822.398.901,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp. **17.135.882.417,00** realisasinya mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **17.171.904.835,00** atau **100,21** persen, disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	1.441.427.052,00	1.441.402.521,00	100,00	(24.531,00)
2011	1.834.436.365,00	2.199.436.365,00	119,90	365.000.000,00
2012	2.563.571.000,00	2.840.895.097,00	110,82	277.324.097,00
2013	4.045.509.000,00	4.005.448.033,00	99,01	(40.060.967,00)
2014	3.380.939.000,00	3.503.688.202,00	103,63	122.749.202,00
2015	3.870.000.000,00	3.181.034.617,00	82,20	(688.965.383,00)
JUMLAH	17.135.882.417,00	17.171.904.835,00	100,21	36.022.418,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Penerimaan bunga deposito; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (f) Pendapatan denda retribusi; (g) Pendapatan dari pengembalian; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; (k) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; (l) Penerimaan lain-lain; (m) Pendapatan Badan Layanan Umum daerah (BLUD); (n) Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir dan (o) Pendapatan sewa konstruksi reklame. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. **268.183.144.400,00** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **307.791.298.664,16** atau mengalami pencapaian sebesar **114,77** persen, disajikan pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	16.344.653.700,00	20.057.280.640,51	122,71	3.712.626.940,51
2011	24.752.496.700,00	26.355.537.355,16	106,48	1.603.040.655,16
2012	29.521.997.000,00	40.042.660.073,49	135,64	10.520.663.073,49
2013	40.811.750.000,00	53.355.041.720,00	130,73	12.543.291.720,00
2014	61.709.455.000,00	83.211.266.462,00	134,84	21.501.811.462,00
2015	95.042.792.000,00	84.769.512.413,00	89,19	(10.273.279.587,00)
JUMLAH	268.183.144.400,00	307.791.298.664,16	114,77	39.608.154.264,16

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

b). Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **2.491.868.968.580,00** Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.489.331.612.318,00** atau **99,9** persen dari target, disajikan pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010- 2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	316.244.963.942	317.579.264.300	100,42	1.334.300.358
2011	343.561.517.638	345.084.402.530	100,44	1.522.884.892
2012	407.825.360.000	410.000.288.280	100,53	2.174.928.280
2013	450.752.505.000	450.219.878.779	99,88	(532.626.221)
2014	475.427.714.000	475.269.482.764	99,97	(158.231.236)
2015	498.056.908.000	491.178.295.665	98,62	(6.878.612.335)
JUMLAH	2.491.868.968.580	2.489.331.612.318	99,90	(2.537.356.262)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **174.797.624.580,00** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **176.088.818.318,00** atau **100,74** persen dari target, disajikan pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	28.663.894.942,00	29.998.195.300,00	104,65	1.334.300.358,00
2011	25.356.787.638,00	26.879.672.530,00	106,01	1.522.884.892,00
2012	33.308.284.000,00	35.483.212.280,00	106,53	2.174.928.280,00
2013	27.713.487.000,00	31.009.410.779,00	111,89	3.295.923.779,00

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2014	28.382.910.000,00	28.224.678.764,00	99,44	(158.231.236,00)
2015	31.372.261.000,00	24.493.648.665,00	78,07	(6.878.612.335,00)
JUMLAH	174.797.624.580,00	176.088.818.318,00	100,74	1.291.193.738,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **2.126.350.044.000,00** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **2.126.350.044.000,00** atau **100** persen dari target, disajikan pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	266.792.669.000,00	266.792.669.000,00	100,00	0,00
2011	293.530.030.000,00	293.530.030.000,00	100,00	0,00
2012	347.390.356.000,00	347.390.356.000,00	100,00	0,00
2013	384.489.368.000,00	384.489.368.000,00	100,00	0,00
2014	412.871.094.000,00	412.871.094.000,00	100,00	0,00
2015	421.276.527.000,00	421.276.527.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	2.126.350.044.000,00	2.126.350.044.000,00	100,00	0,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dimulai pada tahun 2010, dengan target dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **190.721.300.000,00** dan realisasinya sebesar Rp. **186.892.750.000,00** atau **97,99** persen. Hal ini karena pada tahun 2013 DAK bidang pendidikan tidak terserap secara keseluruhan disebabkan tidak terlaksananya pekerjaan. Target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	20.788.400.000,00	20.788.400.000,00	100,00	0,00
2011	24.674.700.000,00	24.674.700.000,00	100,00	0,00
2012	27.126.720.000,00	27.126.720.000,00	100,00	0,00
2013	38.549.650.000,00	34.721.100.000,00	90,07	(3.828.550.000,00)
2014	34.173.710.000,00	34.173.710.000,00	100,00	0,00
2015	45.408.120.000,00	45.408.120.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	190.721.300.000,00	186.892.750.000,00	97,99	(3.828.550.000,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

c). Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (d) Bantuan Keuangan dari Provinsi / Kabupaten / Kota / Lainnya. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara akumulasi terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, ditargetkan sebesar Rp.

686.750.123.790,00 dengan realisasi sebesar Rp. **686.696.897.099,00** atau sebesar **99,99** persen.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	55.062.764.380,00	52.116.640.450,00	94,65	(2.946.123.930,00)
2011	93.307.907.410,00	101.430.302.554,00	108,70	8.122.395.144,00
2012	106.435.401.000,00	112.960.625.841,00	106,13	6.525.224.841,00
2013	106.585.105.000,00	110.903.150.204,00	104,05	4.318.045.204,00
2014	160.424.365.000,00	142.775.457.574,00	89,00	(17.648.907.426,00)
2015	164.934.581.000,00	166.510.720.476,00	100,96	1.576.139.476,00
JUMLAH	686.750.123.790,00	686.696.897.099,00	99,99	(53.226.691,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. **17.170.000.000,00** sedangkan realisasinya Rp. **14.922.000.000,00** atau sebesar **86,91** persen. Penerimaan tersebut berasal dari empat tahun anggaran (2010, 2011, 2014 dan 2015), disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	1.000.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
2011	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5.105.000.000,00	5.165.000.000,00	101,18	60.000.000,00
2015	8.895.000.000,00	7.587.000.000,00	85,30	(1.308.000.000,00)
JUMLAH	17.170.000.000,00	14.922.000.000,00	86,91	(2.248.000.000,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. **177.297.925.570,00** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **196.196.592.411,00** atau mencapai sebesar **110,66** persen yang merupakan penerusan hibah PDAM, disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	15.513.609.880,00	16.040.118.960,00	103,39	526.509.080,00
2011	14.703.376.690,00	22.625.771.834,00	153,88	7.922.395.144,00
2012	22.116.033.000,00	28.656.647.841,00	129,57	6.540.614.841,00
2013	29.718.339.000,00	32.302.112.589,00	108,69	2.583.773.589,00
2014	42.467.877.000,00	41.792.156.000,00	98,41	(675.721.000,00)
2015	52.778.690.000,00	54.779.785.187,00	103,79	2.001.095.187,00
JUMLAH	177.297.925.570,00	196.196.592.411,00	110,66	18.898.666.841,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. **382.099.653.120,00** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **357.256.733.620,00** atau mencapai sebesar **93,5** persen, disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010- 2015

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	20.456.160.400,00	20.611.460.400,00	100,76	155.300.000,00
2011	58.640.531.720,00	58.640.531.720,00	100,00	0,00
2012	68.645.794.000,00	68.645.794.000,00	100,00	0,00
2013	61.131.325.000,00	60.786.075.000,00	99,44	(345.250.000,00)
2014	91.911.244.000,00	67.070.237.000,00	72,97	(24.841.007.000,00)
2015	81.314.598.000,00	81.502.635.500,00	100,23	188.037.500,00
JUMLAH	382.099.653.120,00	357.256.733.620,00	93,50	(24.842.919.500,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara akumulasi di periode Tahun Anggaran 2010-2015, targetnya sebesar Rp. **110.182.545.100 ,00** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **118.321.571.068,00** atau tercapai sebesar **107,39** persen.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	18.092.994.100,00	15.465.061.090,00	85,48	(2.627.933.010,00)
2011	17.793.999.000,00	17.993.999.000,00	101,12	200.000.000,00
2012	15.673.574.000,00	15.658.184.000,00	99,90	(15.390.000,00)
2013	15.735.441.000,00	17.814.962.615,00	113,22	2.079.521.615,00
2014	20.940.244.000,00	28.748.064.574,00	137,29	7.807.820.574,00
2015	21.946.293.000,00	22.641.299.789,00	103,17	695.006.789,00
JUMLAH	110.182.545.100,00	118.321.571.068,00	107,39	8.139.025.968,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2010-2015 sebesar 14,18 persen. Dana Perimbangan, walaupun kontribusinya besar, namun rata-rata pertumbuhan per tahun adalah yang paling kecil, yaitu 9,11 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 26,2% yang menduduki urutan kedua setelah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (26,15%). Realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD di Pemerintah Kota Pekalongan mulai tahun 2011 tampak melonjak tinggi. Penyebabnya bukan pola normal pertumbuhan PAD, tetapi adanya pendaerahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 sebesar 15,54%, sedangkan Dana Perimbangan memberikan kontribusi

yang besar terhadap APBD Kota Pekalongan (rata-rata tahun 2010-2015 sebesar 66,71%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 17,75%. Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa kontribusi sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah (APBN) sangat besar, atau secara umum APBD Kota Pekalongan masih belum mandiri. Namun demikian, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, maka kontribusi PAD Kota Pekalongan terhadap APBD di atas rata-rata. Artinya banyak sekali daerah lain yang jauh tidak mandiri dari sisi sumber pendapatan. Salah satu kelemahan dari struktur pembiayaan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran Dana Perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010– 2015

URAIAN	REALISASI						RATA-2 PERTUMBUHAN
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
PENDAPATAN	417.191.612.087	509.929.023.924	614.166.700.431	675.375.467.702	762.110.364.355	809.733.612.473	14,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.495.707.337	63.414.318.840	91.205.786.310	114.252.438.719	144.065.424.017	152.044.596.332	26,20
Pendapatan Pajak Daerah	12.349.969.739	19.911.975.754	30.601.965.489	38.018.394.793	42.209.839.165	47.499.120.190	30,92
Hasil Retribusi Daerah	13.647.054.436	14.947.369.366	17.720.265.651	18.873.554.173	15.140.630.188	16.594.929.112	3,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.441.402.521	2.199.436.365	2.840.895.097	4.005.448.033	3.503.688.202	3.181.034.617	17,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.057.280.641	26.355.537.355	40.042.660.073	53.355.041.720	83.211.266.462	84.769.512.413	33,41
DANA PERIMBANGAN	317.579.264.300	345.084.402.530	410.000.288.280	450.219.878.779	475.269.482.764	491.178.295.665	9,11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.998.195.300	26.879.672.530	35.483.212.280	31.009.410.779	28.224.678.764	24.493.648.665	-3,97
Dana Alokasi Umum	266.792.669.000	293.530.030.000	347.390.356.000	384.489.368.000	412.871.094.000	421.276.527.000	9,57
Dana Alokasi Khusus	20.788.400.000	24.674.700.000	27.126.720.000	34.721.100.000	34.173.710.000	45.408.120.000	16,91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.116.640.450	101.430.302.554	112.960.625.841	110.903.150.204	142.775.457.574	166.510.720.476	26,15
Pendapatan Hibah	0	2.170.000.000	0	0	5.165.000.000	7.587.000.000	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.040.118.960	22.625.771.834	28.656.647.841	32.302.112.589	41.792.156.000	54.779.785.187	27,84
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.611.460.400	58.640.531.720	68.645.794.000	60.786.075.000	67.070.237.000	81.502.635.500	31,65
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.465.061.090	17.993.999.000	15.658.184.000	17.814.962.615	28.748.064.574	22.641.299.789	7,92

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja Daerah tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.19

Tabel 3.19 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

URAIAN	REALISASI (Rp.Juta)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA DAERAH	420.711,87	505.918,79	561.670,05	664.175,35	736.794,86	792.543,22
BELANJA TIDAK LANGSUNG	241.905,60	271.818,06	301.458,10	326.538,72	358.447,30	379.970,85
Belanja Pegawai	203.896,36	234.604,10	261.821,48	278.009,90	303.505,07	324.607,23
Belanja Hibah	22.564,57	17.322,83	15.782,83	15.681,88	39.679,73	54.592,62
Belanja Bantuan Sosial	2.972,57	3.271,66	686,30	10.135,25	13.457,32	350,77
Belanja Bantuan Keuangan	12.147,87	16.301,91	23.106,46	21.162,19	630,00	420,22
Belanja Tidak Terduga	324,23	317,56	61,04	1.549,50	1.175,17	0,00
BELANJA LANGSUNG	178.806,26	234.100,73	260.211,94	337.636,63	378.347,56	412.572,37
Belanja Pegawai	28.290,37	33.816,88	35.031,98	57.067,03	40.362,32	16.702,20
Belanja Barang dan Jasa	93.957,24	117.939,78	121.674,07	149.254,01	178.802,09	238.216,49
Belanja Modal	56.558,65	82.344,07	103.505,88	131.315,59	159.183,16	157.653,68

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari pagu Belanja Daerah sebesar Rp. **4.091.588.734.242,19** terealisasi sebesar Rp. **3.681.814.132.006,00** atau **89,98** persen, yang secara lebih terinci disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	460.965.358.180,84	420.711.865.277,00	91,27	(40.253.492.903,84)
2011	535.334.731.061,35	505.918.792.897,00	94,51	(29.415.938.164,35)
2012	618.142.634.000,00	561.670.045.228,00	90,86	(56.472.588.772,00)
2013	730.305.312.000,00	664.175.351.720,00	90,94	(66.129.960.280,00)
2014	828.529.162.000,00	736.794.861.264,00	88,93	(91.734.300.736,00)
2015	918.311.537.000,00	792.543.215.620,00	86,30	(125.768.321.380,00)
JUMLAH	4.091.588.734.242,19	3.681.814.132.006,00	89,98	(409.774.602.236,19)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Belanja daerah terbagi dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

a). Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Hibah, (c) Belanja Bantuan Sosial, (d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan (e) Belanja Tidak Terduga. Pos Belanja Tidak Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2014 terealisasi sebesar Rp. **1.880.138.627.167,00** atau **90,55** persen dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. **2.076.372.610.584,84** sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	261.495.582.689,84	241.905.602.540,00	92,51	(19.589.980.149,84)
2011	285.649.624.895,00	271.818.060.648,00	95,16	(13.831.564.247,00)
2012	324.567.184.000,00	301.458.104.591,00	92,88	(23.109.079.409,00)
2013	357.653.221.000,00	326.538.717.707,00	91,30	(31.114.503.293,00)
2014	415.917.977.000,00	358.447.296.504,00	86,18	(57.470.680.496,00)
2015	431.089.021.000,00	379.970.845.177,00	88,14	(51.118.175.823,00)
JUMLAH	2.076.372.610.584,84	1.880.138.627.167,00	90,55	(196.233.983.417,84)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Kota Pekalongan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **1.770.860.680.745,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.606.444.142.199,00** atau **90,72** persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	218.271.825.750	203.896.362.281	93,41	(14.375.463.469)
2011	246.826.808.995	234.604.104.038	95,05	(12.222.704.957)
2012	281.414.429.000	261.821.478.091	93,04	(19.592.950.909)
2013	306.996.998.000	278.009.897.833	90,56	(28.987.100.167)
2014	354.768.395.000	303.505.066.004	85,55	(51.263.328.996)
2015	362.582.224.000	324.607.233.952	89,53	(37.974.990.048)
JUMLAH	1.770.860.680.745	1.606.444.142.199	90,72	(164.416.538.546)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **180.490.520.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **165.624.462.302,00** atau **91,76** persen

Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Belanja Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	25.224.784.000,00	22.564.568.541,00	89,45	(2.660.215.459,00)
2011	17.654.200.000,00	17.322.830.236,00	98,12	(331.369.764,00)
2012	16.362.300.000,00	15.782.825.000,00	96,46	(579.475.000,00)

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2013	15.691.160.000,00	15.681.879.800,00	99,94	(9.280.200,00)
2014	42.679.160.000,00	39.679.734.500,00	92,97	(2.999.425.500,00)
2015	62.878.916.000,00	54.592.624.225,00	86,82	(8.286.291.775,00)
JUMLAH	180.490.520.000,00	165.624.462.302,00	91,76	(14.866.057.698,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. **30.873.863.290,00** atau **91,96** persen dari Pagu sebesar Rp. **33.573.680.000,00**. Pada Tahun Anggaran 2012, pagu dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya aturan (Undang-undang nomor 23 tahun 2014) bahwa penerima hibah harus berbadan hukum sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010–2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	3.005.000.000,00	2.972.567.056,00	98,92	(32.432.944,00)
2011	3.400.000.000,00	3.271.660.028,00	96,23	(128.339.972,00)
2012	1.090.000.000,00	686.300.000,00	62,96	(403.700.000,00)
2013	10.934.260.000,00	10.135.246.206,00	92,69	(799.013.794,00)
2014	14.015.420.000,00	13.457.324.000,00	96,02	(558.096.000,00)
2015	1.129.000.000,00	350.766.000,00	31,07	(778.234.000,00)
JUMLAH	33.573.680.000,00	30.873.863.290,00	91,96	(2.699.816.710,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. **75.020.686.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **73.348.437.443,00** atau **98,33** persen, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	12.526.000.000,00	12.147.874.662,00	96,98	(378.125.338,00)
2011	16.435.000.000,00	16.301.905.456,00	99,19	(133.094.544,00)
2012	23.200.000.000,00	23.106.463.500,00	99,60	(93.536.500,00)
2013	21.530.803.000,00	21.162.191.825,00	98,29	(368.611.175,00)
2014	630.002.000,00	630.002.000,00	100,00	0,00
2015	698.881.000,00	420.221.000,00	60,13	(278.660.000,00)
JUMLAH	75.020.686.000,00	73.768.658.443,00	98,33	(1.252.027.557,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **16.427.043.839,84** dengan realisasi sebesar Rp. **3.427.500.933,00** atau **20,86** persen. Kecilnya realisasi BTT disebabkan pencairan dana tersebut

mensyaratkan kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana disajikan pada tabel 3.26.

Tabel 3.26 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	2.467.972.939,84	324.230.000,00	13,14	(2.143.742.939,84)
2011	1.333.615.900,00	317.560.890,00	23,81	(1.016.055.010,00)
2012	2.500.455.000,00	61.038.000,00	2,44	(2.439.417.000,00)
2013	2.500.000.000,00	1.549.502.043,00	61,98	(950.497.957,00)
2014	3.825.000.000,00	1.175.170.000,00	30,72	(2.649.830.000,00)
2015	3.800.000.000,00	0,00	0,00	(3.800.000.000,00)
JUMLAH	16.427.043.839,84	3.427.500.933,00	20,86	(12.999.542.906,84)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

b). Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai yang direncanakan, yaitu sebesar Rp. **1.801.675.504.839,00** dari pagu anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp. **2.015.216.123.657,35** atau **89,40** persen sebagaimana tabel 3.27.

Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	199.469.775.491,00	178.806.262.737,00	89,64	(20.663.512.754,00)
2011	249.685.106.166,35	234.100.732.249,00	93,76	(15.584.373.917,35)
2012	293.575.450.000,00	260.211.940.637,00	88,64	(33.363.509.363,00)
2013	372.652.091.000,00	337.636.634.013,00	90,60	(35.015.456.987,00)
2014	412.611.185.000,00	378.347.564.760,00	91,70	(34.263.620.240,00)
2015	487.222.516.000,00	412.572.370.443,00	84,68	(74.650.145.557,00)
JUMLAH	2.015.216.123.657,35	1.801.675.504.839,00	89,40	(213.540.618.818,35)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **227.616.072.120,85** dengan realisasi sebesar Rp. **211.270.793.779,50** atau **92,82** persen, disajikan pada tabel 3.28.

Tabel 3.28 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	30.796.856.730,00	28.290.372.498,00	91,86	(2.506.484.232,00)
2011	36.447.097.640,85	33.816.882.590,50	92,78	(2.630.215.050,35)
2012	37.582.396.500,00	35.031.984.371,00	93,21	(2.550.412.129,00)
2013	61.742.429.250,00	57.067.032.933,00	92,43	(4.675.396.317,00)
2014	43.220.836.000,00	40.362.322.506,00	93,39	(2.858.513.494,00)

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2015	17.826.456.000,00	16.702.198.881,00	93,69	(1.124.257.119,00)
JUMLAH	227.616.072.120,85	211.270.793.779,50	92,82	(16.345.278.341,35)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **1.011.626.529.202,00** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **899.843.673.921,00** atau 88,95 persen, disajikan pada Tabel 3.29.

**Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	101.630.921.170,00	93.957.237.512,00	92,45	(7.673.683.658,00)
2011	124.769.630.182,00	117.939.780.566,00	94,53	(6.829.849.616,00)
2012	132.835.265.500,00	121.674.071.429,00	91,60	(11.161.194.071,00)
2013	163.031.725.350,00	149.254.009.850,00	91,55	(13.777.715.500,00)
2014	197.587.532.000,00	178.802.086.121,00	90,49	(18.785.445.879,00)
2015	291.771.455.000,00	238.216.488.443,00	81,64	(53.554.966.557,00)
JUMLAH	1.011.626.529.202,00	899.843.673.921,00	88,95	(111.782.855.281,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi Rp. **690.561.037.138,50** atau **88,99** persen dari pagu anggaran sebesar Rp. **775.973.522.334,50** disajikan pada Tabel 3.30.

**Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Belanja Modal
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Pagu Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	67.041.997.591,00	56.558.652.727,00	84,36	(10.483.344.864,00)
2011	88.468.378.343,50	82.344.069.092,50	93,08	(6.124.309.251,00)
2012	123.157.788.000,00	103.505.884.837,00	84,04	(19.651.903.163,00)
2013	147.877.936.400,00	131.315.591.230,00	88,80	(16.562.345.170,00)
2014	171.802.817.000,00	159.183.156.133,00	92,65	(12.619.660.867,00)
2015	177.624.605.000,00	157.653.683.119,00	88,76	(19.970.921.881,00)
JUMLAH	775.973.522.334,50	690.561.037.138,50	88,99	(85.412.485.196,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.31.

Tabel 3.31 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010– 2015

URAIAN	REALISASI (Rp.Juta)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PEMBIAYAAN DAERAH	47.762,39	41.474,48	41.984,85	79.533,78	76.054,59	101.286,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.569,39	44.242,14	46.184,97	94.617,78	90.825,74	112.733,00
SiLPA	49.324,91	44.242,14	45.484,71	94.481,50	90.732,90	101.370,10
Pencairan Dana Cadangan	3.244,48	-	-	-	-	11.277,25
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	-	-	700,26	136,28	92,85	85,66
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.807,00	2.767,66	4.200,12	15.084,00	14.771,15	11.447,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	1.000,00	4.500,00	5.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.807,00	2.767,66	3.200,12	4.705,37	9.729,00	11.447,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	5.878,62	42,15	-

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

a). Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) pencairan Dana Cadangan, (c) penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, penerimaan pembiayaan APBD Kota Pekalongan terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

Estimasi Penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **441.222.253.256,19** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **441.173.017.460,70** atau **99,99** persen, seperti disajikan dalam tabel 3.32.

Tabel 3.32 Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	52.324.912.233,84	52.569.388.212,84	100,47	244.475.979,00
2011	44.242.135.022,35	44.242.135.022,35	100,00	0,00
2012	46.069.707.000,00	46.184.967.189,51	100,25	115.260.189,51
2013	94.481.504.000,00	94.617.780.967,00	100,14	136.276.967,00
2014	92.233.899.000,00	90.825.743.585,00	98,47	(1.408.155.415,00)
2015	111.870.096.000,00	112.733.002.484,00	100,77	862.906.484,00
JUMLAH	441.222.253.256,19	441.173.017.460,70	99,99	(49.235.795,49)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. **425.636.250.850,70** seperti disajikan pada Tabel 3.33.

**Tabel 3.33 Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	49.324.912.233,84	49.324.912.233,84	100,00	0,00
2011	44.242.135.022,35	44.242.135.022,35	100,00	0,00
2012	45.484.707.000,00	45.484.707.250,51	100,00	250,51
2013	94.481.504.000,00	94.481.504.192,00	100,00	192,00
2014	90.733.899.000,00	90.732.895.476,00	100,00	(1.003.524,00)
2015	101.370.096.000,00	101.370.096.676,00	100,00	676,00
JUMLAH	425.637.253.256,19	425.636.250.850,70	100,00	(1.002.405,49)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Pencairan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2010-2015, direncanakan sebesar Rp. **15.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar Rp. **14.521.724.489,00** disajikan pada Tabel 3.34 Rencana pencairan Dana Cadangan tahun 2014 untuk persiapan pelaksanaan Pilkada tidak ada realisasi karena adanya perubahan peraturan tentang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015.

**Tabel 3.34 Rincian Estimasi dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	3.000.000.000,00	3.244.475.979,00	108,15	244.475.979,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1.500.000.000,00	-	0,00	(1.500.000.000,00)
2015	10.500.000.000,00	11.277.248.510,00	107,40	777.248.510,00
JUMLAH	15.000.000.000,00	14.521.724.489,00	96,81	(478.275.511,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Realisasi Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. **1.015.042.121,00** seperti disajikan pada Tabel 3.35.

**Tabel 3.35 Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan kembali
investasi Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	585.000.000,00	700.259.939,00	119,70	115.259.939,00
2013	0,00	136.276.775,00	100,00	136.276.775,00
2014	0,00	92.848.109,00	100,00	92.848.109,00
2015	0,00	85.657.298,00	100,00	85.657.298,00
JUMLAH	585.000.000,00	1.015.042.121,00	173,51	430.042.121,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Pembentukan Dana Cadangan, (b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, (c) Pembayaran Pokok Utang. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, pengeluaran pembiayaan APBD Kota Pekalongan terdiri dari : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang

Estimasi Pengeluaran Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **61.125.287.226,00** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **53.076.924.836,00** atau **86,83** persen, seperti disajikan dalam tabel 3.36.

Tabel 3.36 Rincian Estimasi dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	5.062.843.427,00	4.807.000.000,00	94,95	(255.843.427,00)
2011	2.767.658.799,00	2.767.658.799,00	100,00	0,00
2012	11.032.983.000,00	4.200.118.201,00	38,07	(6.832.864.799,00)
2013	15.369.524.000,00	15.083.997.836,00	98,14	(285.526.164,00)
2014	14.792.278.000,00	14.771.150.000,00	99,86	(21.128.000,00)
2015	12.100.000.000,00	11.447.000.000,00	94,60	(653.000.000,00)
JUMLAH	61.125.287.226,00	53.076.924.836,00	86,83	(8.048.362.390,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **10.500.000.000,00** seperti disajikan pada Tabel 3.37

Tabel 3.37 Rincian Estimasi dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
2013	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
2014	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	0,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **36.656.150.300,00** seperti disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38 Rincian Estimasi dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	4.807.000.000,00	4.807.000.000,00	100,00	0,00
2011	2.767.658.799,00	2.767.658.799,00	100,00	0,00
2012	3.917.000.000,00	3.200.118.201,00	81,70	(716.881.799,00)

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2013	4.705.374.000,00	4.705.373.300,00	100,00	(700,00)
2014	9.750.000.000,00	9.729.000.000,00	99,78	(21.000.000,00)
2015	12.100.000.000,00	11.447.000.000,00	94,60	(653.000.000,00)
JUMLAH	38.047.032.799,00	36.656.150.300,00	96,34	(1.390.882.499,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Realisasi Pembayaran Pokok Utang, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **5.920.774.536,00** seperti disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Estimasi dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi Perubahan APBD	Realisasi	% Rincian	Bertambah/ Berkurang
2010	255.843.427,00	0,00	0,00	(255.843.427,00)
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6.115.983.000,00	0,00	0,00	(6.115.983.000,00)
2013	6.164.150.000,00	5.878.624.536,00	95,37	(285.525.464,00)
2014	42.278.000,00	42.150.000,00	99,70	(128.000,00)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	12.578.254.427,00	5.920.774.536,00	47,07	(6.657.479.891,00)

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2010-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.40.

Tabel 3.40 Neraca Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam milyar)

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	ASET							
1.1.	Aset lancar							
1.1.1.	Kas	44,36	45,55	94,80	90,74	102,49	120,28	22,08
1.1.2.	Investasi jangka pendek	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Piutang	2,28	2,38	3,07	9,97	17,90	13,69	43,12
1.1.4.	Piutang lainnya	5,95	1,26	7,96	5,98	5,72	8,17	6,55
1.1.5.	Persediaan	5,72	7,07	6,96	8,47	10,73	9,29	10,19
1.1.6.	Biaya dibayar dimuka	-	-	-	-	-	0,03	-
	Jumlah aset lancar	58,30	56,27	112,79	115,16	131,22	151,46	21,04

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.2.	Investasi jangka panjang							
1.2.1.	Investasi non permanen	4,92	4,00	3,39	3,33	3,15	3,06	(9,06)
1.2.2.	Investasi permanen	28,37	27,48	33,01	38,74	46,21	63,45	17,47
	Jumlah investasi jangka panjang	33,30	31,48	36,39	42,07	49,36	66,51	14,85
1.3.	Aset tetap							
1.3.1.	Tanah	583,92	571,72	575,38	860,42	870,61	862,98	8,13
1.3.2.	Peralatan dan mesin	274,68	289,62	315,94	195,64	236,62	284,44	0,70
1.3.3.	Gedung dan bangunan	486,66	576,76	507,18	527,74	599,45	657,55	6,20
1.3.4.	Jalan, jaringan dan instalansi	259,45	296,28	328,91	376,25	433,99	479,82	13,08
1.3.5.	Aset tetap lainnya	57,43	59,03	61,66	62,26	24,73	25,81	(14,78)
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	7,01	11,65	16,80	14,14	26,06
1.3.7.	Akumulasi penyusutan	-	-	-	-	-	(680,84)	-
	Jumlah aset tetap	1.662,12	1.793,41	1.796,08	2.033,96	2.182,28	1.643,90	(0,22)
1.4.	Dana cadangan							
1.4.1.	Dana cadangan	-	-	1,01	5,68	11,28	-	121,74
	Jumlah dana cadangan	-	-	1,01	5,68	11,28	-	121,74
1.5.	Aset lainnya							
1.5.1.	Tagihan piutang penjualan angsuran				-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,01	0,01	0,01	0,01		-	-
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	5,55	25,29	12,33	12,33	12,33	12,33	17,31
1.5.4.	Aset tidak berwujud	0,40	7,97	8,46	14,62	14,60	13,75	102,88
1.5.5.	Aset lain-lain	-	-	-	-	5,94	5,88	(0,51)
1.5.6.	Aset rusak berat/proses penghapusan	-	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	Uang Jaminan	-	-	-	-	0,05	0,07	18,32
	Jumlah aset lainnya	5,99	33,27	20,80	26,96	32,92	32,92	40,75
	Jumlah aset	1.759,72	1.914,42	1.966,07	2.218,15	2.401,35	1.894,79	1,49
2	KEWAJIBAN							
2.1.	Kewajiban jangka pendek							
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	0,11	-	0,00	0,00		0,02	(100,00)
2.1.2.	Utang bunga	-	-	-	-			
2.1.3.	Utang pajak	-	-	-	-			
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang	-	-	-	-			
2.1.5.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-		1,30	
2.1.6.	Utang jangka pendek lainnya	-	0,83	12,91	7,51	6,20	3,94	47,61
2.1.7.	Utang Jangka Pendek pada Kemitraan Pihak ketiga	-	6,12	6,12	-			(100,00)

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan (%)
2.1.8	Utang uang jaminan	-	-	-	-			
	Jumlah kewajiban jangka pendek	0,11	6,95	19,03	7,51	6,20	5,26	116,73
2.2.	Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-			
2.2.1.	Utang dalam negeri	-	-	-	-			
2.2.2	Utang luar negeri	-	-	-	-			
	Jumlah kewajiban jangka panjang	-	-	-	-			
	Jumlah kewajiban	0,11	6,95	19,03	7,51	6,20	5,26	116,73
3	EKUITAS DANA							
3.1.	Ekuitas dana lancar							
3.1.1.	Sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA)	44,24	45,48	94,48	90,73	101,37		23,03
3.1.2.	Cadangan untuk piutang	8,22	3,65	11,03	15,95	17,90		21,48
3.1.3.	Cadangan untuk persediaan	5,72	7,07	6,96	8,47	10,73		17,03
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-	(6,94)	(19,03)	(7,57)	(6,24)		(2,62)
3.1.5.	Pendapatan yang ditangguhkan	0,01	0,07	0,32	0,01			(100,00)
3.1.6.	Selisih kasda	-	-	-	-			
3.1.7.	Cadangan untuk biaya dibayar dimuka	-	-	-	-			
	Jumlah ekuitas dana lancar	58,19	49,33	93,76	107,59	123,76		20,76
3.2.	Ekuitas dana investasi							
3.2.1.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	33,30	31,48	36,39	42,07	49,36		10,34
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.662,12	1.793,41	1.796,08	2.033,96	2.264,64		8,04
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	5,99	35,93	22,93	42,10	32,10		52,15
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	-	-	-	-	-		
	Jumlah ekuitas dana investasi	1.701,41	1.860,82	1.855,40	2.118,13	2.346,10		8,36
3.3.	Ekuitas dana cadangan							
3.3.1.	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	1,01	5,68	11,27		82,77
	Jumlah ekuitas dana cadangan	-	-	1,01	5,68	11,27		82,77
	Jumlah ekuitas dana	1.759,60	1.910,15	1.949,16	2.225,72	2.469,86	1.885,73	1,39
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	1.759,71	1.917,10	1.968,19	2.233,23	2.476,06	1.893,81	1,48

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta

dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2015, Kota Pekalongan memiliki aset senilai Rp. 1,89 Triliun, dengan tingkat pertumbuhan 1,49 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2015 mencapai Rp. 1,64 Triliun.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5,26 milyar. Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2010 dan tertinggi tahun 2012.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Pekalongan Tahun 2015 mencapai Rp. 1,40 Triliun, dan mengalami pertumbuhan dari 2010-2015 dengan rata-rata 6,20 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Pekalongan setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.41 Analisis Rasio Keuangan Kota Pekalongan

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
		%	%	%	%	%
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	810,38	592,68	1.522,15	2208	2.879,47
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	708,55	556,11	1.410,18	2.034,03	2.702,85
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,36	0,97	0,34	0,26	0,28

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Pekalongan adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel 3.41. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Pekalongan relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Diantara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Pekalongan termasuk pemerintah daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang cukup besar di Indonesia.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2010-2015

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2010-2015, kebijakan umum pendapatan daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ;
- (2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil ;
- (3) Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah berbeda untuk masing-masing kelompok sesuai dengan sumber perolehannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pendapatan daerah dibedakan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. PAD terdiri dari

pajak daerah, retribusi daerah, Bagian laba BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan PAD antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru
3. Memantapkan kelembagaan di bidang pendapatan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian *reward and punishment*
5. Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi
7. Optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD
8. Optimalisasi pengelolaan aset daerah
9. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito
10. Optimalisasi penerimaan lainnya melalui Intensifikasi penagihan, peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data dan peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Pos penerimaan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/bukan pajak.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan dana perimbangan adalah :

1. Mendukung upaya peningkatan penerimaan PPh 21, cukai dan penerimaan negara lainnya
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang berasal dari hibah, dana bagi hasil pajak dari pemerintahan provinsi, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah :

1. Mendukung upaya peningkatan pajak provinsi
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah provinsi terkait penghitungan potensi pajak provinsi dan bantuan keuangan
3. Mendorong pendapatan dari hibah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari luar negeri (*Ausaid*)

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Kegiatan yang mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana umum serta pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman;
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) yang terukur dan terarah dan pelayanan dasar PD (SPM);
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Pekalongan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - c) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada penghitungan perkiraan SILPA baik berupa pelampauan pendapatan maupun efisiensi belanja
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penanaman modal BUMD
3. Defisit APBD direncanakan dapat diatasi melalui SILPA

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2010, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 60,25 persen, tahun 2011 menurun menjadi 56,22 persen, tahun 2012 naik menjadi 59,20 persen tetapi kembali turun pada tahun 2013 menjadi 55,13 persen. Pada tahun 2014 proporsi belanja aparatur kembali turun menjadi 51,27% dan tahun 2015 menjadi 50,87%. Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota Pekalongan masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Pekalongan digunakan untuk belanja pegawai. Namun perlu dipahami bahwa sebagian besar belanja pegawai digunakan untuk membiayai aparatur bidang pendidikan (termasuk tunjangan sertifikasi guru) dan kesehatan.

Tabel 3.42 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2010	256.385.232.724	425.518.865.277	60,25
2	2011	285.994.763.972	508.686.451.696	56,22
3	2012	334.987.745.782	565.870.163.429	59,20
4	2013	374.508.031.570	679.259.349.556	55,13
5	2014	385.332.314.634	751.566.011.264	51,27
6	2015	408.965.365.810	803.990.896.689	50,87

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut diatas diperoleh dari perhitungan Tabel 3.43. berkaitan Realisasi belanja pemenuhan aparatur

Tabel 3.43 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	203.896.362.281	234.604.104.038	261.821.478.091	278.009.897.833	303.505.066.004	324.607.233.952
1	Gaji dan tunjangan	170.880.497.352	189.394.621.911	202.604.965.683	211.270.834.621	222.278.091.604	239.688.722.012
2	Tambahan Penghasilan	31.063.581.715	41.874.238.057	55.529.931.568	62.457.633.300	77.025.228.500	79.354.262.733
3	Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.141.880.000	1.245.480.000	1.619.280.000	1.911.600.000	1.911.600.000	2.785.100.000
4	Insentif Pemungutan Pajak /Retribusi Daerah	810.403.214	2.089.764.070	2.067.300.840	2.369.829.912	2.290.145.900	2.779.149.207
B.	Belanja Langsung	52.488.870.443	51.390.659.934	73.166.267.691	96.498.133.737	81.827.248.630	84.358.131.858
1	Honorarium PNS	11.114.928.773	9.619.860.141	10.917.442.220	14.199.526.780	11.333.603.383	11.327.256.915
2	Honorarium Non PNS	11.703.085.900	11.172.409.900	14.313.027.200	17.997.612.340	4.306.195.350	5.061.537.956
3	Uang Lembur	578.188.100	639.527.800	376.483.750	330.993.000	194.238.000	313.404.010
4	Beasiswa Pendidikan PNS	565.612.825	622.086.625	147.487.400	128.651.000	22.219.800	214.077.600
5	Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	2.944.145.200	2.490.069.500	4.517.967.600	543.334.800	2.386.010.000	1.116.665.000
6	Pendidikan Non PNS	1.428.480.000	1.579.480.000	0	0	0	0
7	Pengelolaan dana BLUD	0	0	8.043.116.201	22.576.225.813	24.528.285.773	25.119.218.582
8	Makanan dan Minuman	8.097.277.325	8.095.275.090	7.916.874.633	10.628.389.425	11.031.752.143	10.724.835.872
9	Pakaian dinas dll	941.804.950	832.564.000	1.696.821.500	2.276.860.400	1.201.321.500	1.634.715.760

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
10	Perjalanan dinas	9.362.363.570	9.939.880.700	7.114.517.986	15.797.059.861	17.170.297.798	16.410.233.435
11	Belanja modal (alat angkut, peralatan, perlengkapan, komputer, meubleair)	5.752.983.800	6.399.506.178	18.122.529.201	12.019.480.318	9.653.324.883	12.436.186.728
	TOTAL	256.385.232.724	285.994.763.972	334.987.745.782	374.508.031.570	385.332.314.634	408.965.365.810

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.44 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 s/d 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
1	2010	417.191.612.086	420.711.865.277
2	2011	509.929.023.924	505.918.792.897
3	2012	614.165.700.431	561.670.045.228
4	2013	675.375.467.702	664.175.351.720
5	2014	762.110.364.355	736.794.861.264
6	2015	809.733.612.473	792.543.896.689
	JUMLAH	3.788.505.780.971	3.681.814.813.075

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Dari Tabel 3.44 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus meningkat, walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Sebagai catatan pada tahun 2010 realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui lebih lanjut defisit riil Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45 Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan (milyar Rp)

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	417,192	509,929	614,166	675,375	762,110	809,734
	DIKURANGI REALISASI						
2.	Belanja Daerah	420,712	505,919	561,670	664,175	736,795	792,544
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,807	2,767	4,200	15,084	14,77	11,447
	Defisit Riil	-8,327	1,243	48,296	-3,884	10,544	5,743

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel 3.45, selama kurun waktu 2010-2015, APBD Kota Pekalongan mengalami surplus pada tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015, sedangkan pada tahun 2010

dan 2013 mengalami defisit. Surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan mengalami defisit riil anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 3.46 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran KotaPekalongan (Milyar Rp)

No.	Uraian	Proporsi dari defisit riil					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	49,325	44,242	45,485	94,482	90,733	101,370
2.	Pencairan Dana cadangan	3,000	-	-	-	-	11,277
3.	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Investasi Pemda	-	-	0,700	0,136	0,092	0,090
	Penerimaan Pembiayaan	52,234	44,242	46,185	94,618	90,825	112,737

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Tabel 3.47 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan (Rp. Milyar)

No.	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	49,325		44,242		45,485		94,482		90,734		101,37	
a	Pelampauan Penerimaan PAD	4,899	9,93	5,1	11,53	6,354	13,97	22,361	23,67	20,397	22,48	28,83	28,44
b	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,279	0,57	1,334	3,02	1,565	3,44	2,175	2,3	-0,533	0,59	-0,16	-0,16
c	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	5,502	11,15	-2,946	-6,66	8,149	17,92	6,525	6,91	4,318	4,759	-17,65	-17,41
d	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	38,645	78,35	40,754	92,12	29,416	64,67	63,421	67,12	66,552	73,52	91,73	90,49
e	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi												
f	Kegiatan lanjutan												
g	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah											-1,41	-1,39
h	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Daerah											0,02	0,02
i	Kegiatan lanjutan												0,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Tabel 3.48 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	417,192	509,929	614,166	675,375	762,110	809,734
	Dikurangi Realisasi:						
2.	Belanja Daerah	420,712	505,919	561,670	664,175	736,795	792,544
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,807	2,767	4,200	15,084	14,771	11,447
A	Defisit Riil	-8,327	1,243	48,296	-3,884	10,544	5,743
	Ditutup dengan realisasi penerimaan pembiayaan						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	49,325	44,242	45,485	94,482	90,733	101,370
5	Pencairan Dana cadangan	3,000	-	-	-	-	11,277
6	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Pemda	-	-	0,700	0,136	0,092	0,090
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	52,234	44,242	46,185	94,618	90,825	112,737
	SILPA tahun berkenaan	43,907	45,485	94,481	90,734	101,370	118,480

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan.

Dari Tabel 3.48 terlihat bahwa pada tahun 2010-2015 Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif.

Bermakna positif jika Silpa tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Pekalongan sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kota Pekalongan dapat diperkecil.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan

program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.49 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pekalongan

No	Uraian	Data Tahun 2013 (Milyar Rp)	Data Tahun 2014 (Milyar Rp)	Data Tahun 2015 (Milyar Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	227,41	235,93	250,26	
1	Belanja Gaji dan tunjangan	225,49	234,01	247,39	6
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,91	1,91	2,87	0,9
B.	Belanja Langsung	26,86	40,29	43,71	
1	Belanja Honorarium Non PNS (Tenaga Kontrak dengan SK Kepala Daerah)	7,49	4,36	5,19	7
2	Belanja obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	2,55	2,46	3,58	0,5
3	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	0,53	16,4	13,43	5
4	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	16,28	16,41	21,49	7,7
C.	Pembiayaan Pengeluaran	10,66	5,04		
1.	Pembentukan Dana Cadangan	4,5	5		
2.	Pembayaran pokok utang	6,16	0,04		
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	264,93	281,26	293,97	

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Proyeksi pendapatan

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan beberapa metode. Misalnya dengan metode pertumbuhan rata-rata lima tahun sebelumnya atau didasarkan pada potensi yang ada. Dalam hal ini, proyeksi pendapatan 2017 - 2021 diproyeksi berdasarkan

perpaduan kedua metode tersebut. Sedangkan pendapatan 2016 mengacu pada APBD Penetapan 2016.

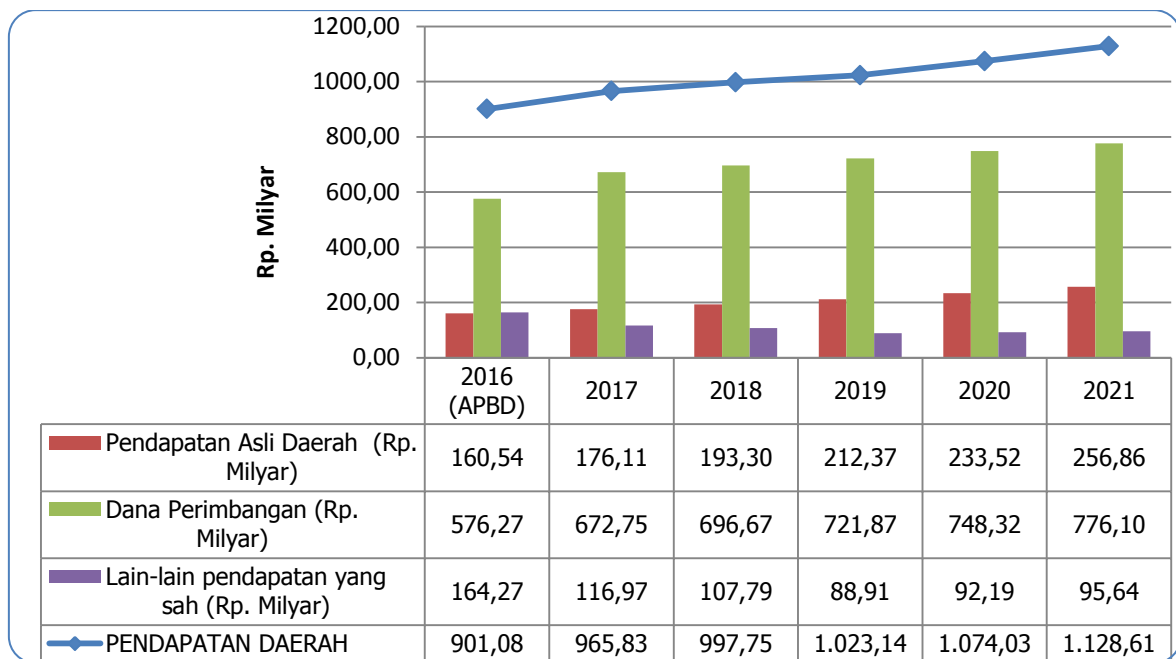
Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 901,08 Miliar. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp. 1,128 Triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel 3.50 Proyeksi Pendapatan Daerah (milyar Rp) dan Rata-rata Pertumbuhan

Uraian	Proyeksi						Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN DAERAH	901,083	965,825	997,753	1.023,143	1.074,029	1.128,605	4,61
Pendapatan Asli Daerah	160,542	176,108	193,297	212,369	233,520	256,861	9,86
Pajak Daerah	43,564	49,596	54,770	60,882	68,230	75,977	11,77
Restribusi Daerah	15,310	15,901	17,693	19,309	20,950	23,042	8,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,740	4,463	4,860	5,380	5,877	6,460	11,55
Lain-lain PAD yang Sah	97,928	106,149	115,975	126,798	138,463	151,383	9,10
Dana Perimbangan	576,271	672,747	696,671	721,869	748,317	776,101	6,13
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32,334	31,385	31,385	31,385	31,385	31,385	(0,59)
Dana Alokasi Umum	457,085	479,939	503,936	529,133	555,590	583,369	5,00
Dana Alokasi Khusus	86,852	161,423	161,350	161,351	161,342	161,347	13,19
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	164,270	116,970	107,785	88,905	92,192	95,643	(10,25)
Pendapatan Hibah	3,000	-	-	-	-	-	(100)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56,779	59,618	62,599	65,728	69,015	72,466	5,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81,315	-	-	-	-	-	(100)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,177	57,352	45,186	23,177	23,177	23,177	(0,00)

Sumber : DPKAD dan Bappeda Kota Pekalongan.



Sumber : DPKAD dan Bappeda Kota Pekalongan.

Gambar 3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah (milyar Rp)

Pada tahun 2021 PAD diproyeksikan sebesar Rp 256,861 Miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,86%. Pada pos PAD tersebut Kontribusi terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah mencapai rata-rata 59,76%, pajak daerah sebesar 28,64%, retribusi daerah sebesar 9,10% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,50%

Proyeksi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan mengacu pada proyeksi transfer ke daerah yang termuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016. Pemerintah Pusat memproyeksikan bahwa pertumbuhan transfer berkisar antara 6,4% sampai dengan 6,5% per tahun. Komposisi pertumbuhan terbesar diperkirakan berasal dari dana desa. Namun mengingat Kota Pekalongan tidak mempunyai wilayah desa dan berdasarkan data historis bahwa dana transfer ke Pemerintah Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata transfer daerah, maka Dana Perimbangan Kota Pekalongan hanya diproyeksi tumbuh 6,13%. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK, diproyeksikan sebesar Rp. 776,101 Miliar pada tahun 2021. Untuk Bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksikan tetap, sedangkan DAU diproyeksikan naik 5% dan DAK diasumsikan meningkat sesuai dengan usulan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional yang pengalokasiannya dilakukan dengan mekanisme *bottom-up*.

Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar Rp 95,643 miliar pada tahun 2021 menurun dibandingkan 2016. Hal ini disebabkan reklasifikasi kode rekening yang semula masuk pada pos dana penyesuaian ke DAK non fisik . Bagi hasil pajak provinsi diperkirakan naik 5% setiap tahun. Sedangkan bantuan keuangan dari Provinsi diasumsikan naik pada tahun 2017 dan 2018 terkait dengan usulan penanggulangan banjir-rob. Selanjutnya pada tahun 2019-2021 diasumsikan sama dengan tahun 2016.

2). Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

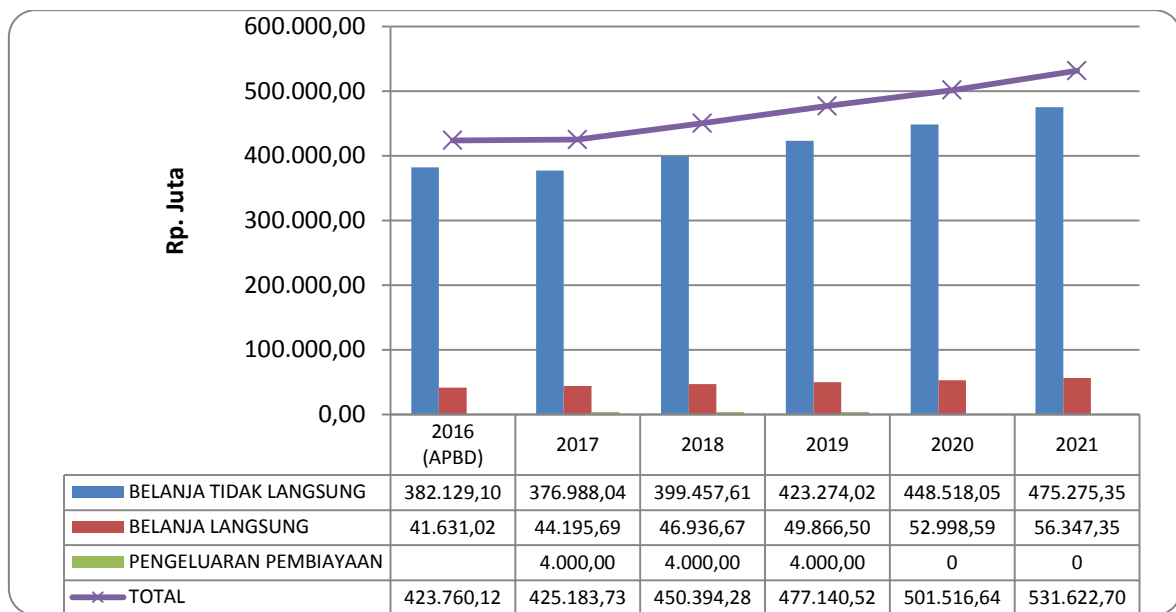
Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.51.

Tabel 3.51 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta prioritas utama (juta Rp)

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2014 (Rp)	PROYEKSI					
			2016 (Rp.Juta)	2017 (Rp.Juta)	2018 (Rp.Juta)	2019 (Rp.Juta)	2020 (Rp.Juta)	2021 (Rp.Juta)
A	BELANJA TDK LANGSUNG	235.927,74	382.129,10	376.988,04	399.457,61	423.274,02	448.518,05	475.275,35
1	Gaji dan Tunjangan	234.015,74	379.219,90	374.052,65	396.495,81	420.285,56	445.502,69	472.232,86
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.912,00	2.909,20	2.935,38	2.961,80	2.988,46	3.015,35	3.042,49
B	BELANJA LANGSUNG	40.287,71	41.631,02	44.195,69	46.936,67	49.866,50	52.998,59	56.347,35
1	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4.366,46	5.542,61	5.930,59	6.345,73	6.789,93	7.265,23	7.773,79
2	Belanja obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	2.464,72	3.598,04	3.616,03	3.634,11	3.652,28	3.670,55	3.688,90
3	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	16.400,00	12.706,00	13.341,30	14.008,37	14.708,78	15.444,22	16.216,43
4	Belanja Jasa Kantor (Listrik Air, Telp dan kawat/faksimili/internet	17.056,53	19.784,37	21.307,77	22.948,46	24.715,50	26.618,59	28.668,22
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.042,28		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0
2	Pembayaran Pokok Utang	42,28						
	TOTAL	281.257,73	423.760,12	425.183,73	450.394,29	477.140,51	501.516,63	531.622,69

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 281,26 milyar di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 531.62 milyar di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Gambar 3.2 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (Milyar Rp)

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

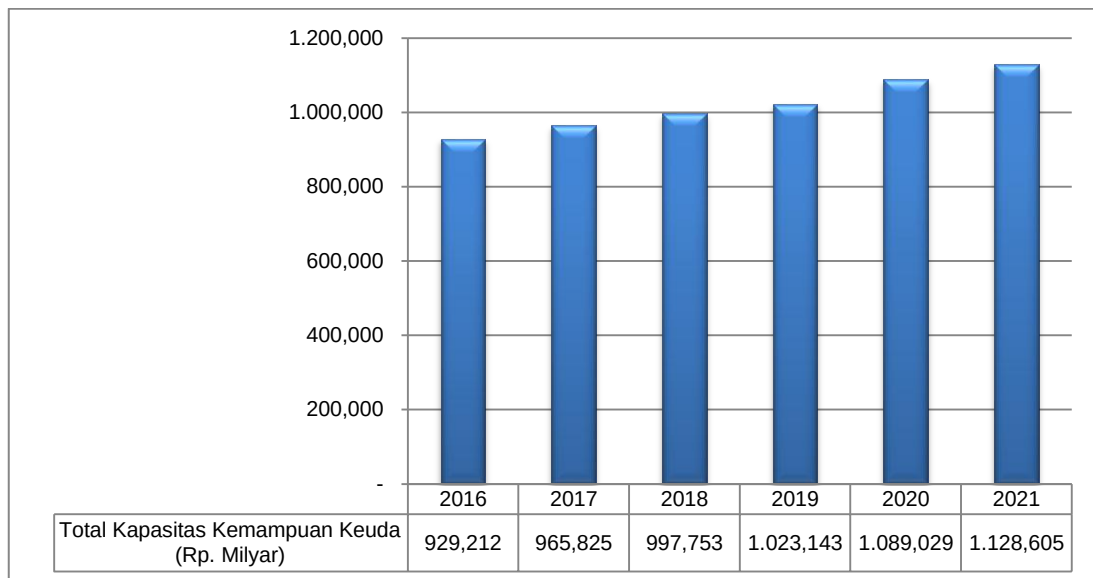
Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2017-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Pekalongan diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada penghitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah Tahun 2016 berdasarkan APBD Kota Pekalongan TA 2016, dimana telah mengestimasi angka SiLPA sebagai salah satu sumber pendanaan APBD. Sedangkan untuk asumsi penghitungan kemampuan keuangan daerah 5 tahun mendatang (2017-2021), angka SiLPA tidak menjadi sumber pendanaan APBD.

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnya secara indikatif tersaji dalam Tabel 3.52.

Tabel 3.52 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Milyar Rp)

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp. Milyar)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	901,08	965,83	997,75	1.023,14	1.074,03	1.128,61
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	12,00	-
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	28,128	-	-	-	-	-
	Total Kapasitas Kemampuan Keuda (Rp. Milyar)	929,212	965,83	997,75	1.023,14	1.086,03	1.128,61

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Gambar 3.3 Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Milyar Rp)

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil-Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga serta

untuk mendanai pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyertaan modal pemerintah daerah. Pengalokasian Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam Tabel 3.53.

Tabel 3.53 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (dalam miliar rupiah)

No	Uraian	ALOKASI											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu
I	PRIORITAS I	45,60	423,76	44,02	425,18	45,14	450,39	46,63	477,14	47,28	513,52	47,10	531,62
	Belanja Tidak Langsung	41,12	382,13	39,03	376,99	40,04	399,46	41,37	423,27	41,30	448,52	42,11	475,28
	Belanja Langsung	4,48	41,63	4,58	44,20	4,70	46,94	4,87	49,87	4,88	53,00	4,99	56,35
	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0,41	4,00	0,40	4,00	0,39	4,00	0,00	-	0,00	
	Belanja Pilkada									1,10	12,00		
II	PRIORITAS II	51,21	475,87	52,67	508,69	51,46	513,49	49,85	510,08	49,20	534,38	49,31	556,19
	Belanja Tidak Langsung		4,86	1,26	12,15	1,23	12,24	1,21	12,33	1,14	12,42	1,11	12,51
	Belanja Langsung		471,02	51,41	496,54	50,24	501,25	48,65	497,75	48,06	521,95	48,20	543,96
III	PRIORITAS III	3,18	29,58	3,31	31,95	3,39	33,87	3,51	35,92	3,51	38,14	3,59	40,51
	Belanja Hibah	1,76	16,31	2,21	21,30	2,31	23,09	2,44	25,01	2,49	27,07	2,59	29,29
	Belanja Bantuan Sosial	0,30	2,77	0,29	2,84	0,30	2,97	0,30	3,11	0,30	3,27	0,30	3,43
	Belanja Tidak Terduga	0,42	3,9	0,31	3	0,30	3	0,29	3	0,28	3	0,27	3
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,71	6,6	0,50	4,8	0,48	4,8	0,47	4,8	0,44	4,8	0,43	4,8
	Total	100	929,21	100	965,83	100	997,75	100	1.023,14	100	1.086,03	100	1.128,60

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

Kerangka pendanaan RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 selama 5 (lima) tahun kedepan, secara rinci disajikan dengan Tabel 3.54.

Tabel 3.54 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Milyar Rp)

No.	Uraian	Proyeksi						Pertumbuhan (%)
		Tahun 2016 (Rp M)	Tahun 2017 (Rp M)	Tahun 2018 (Rp M)	Tahun 2019 (Rp M)	Tahun 2020 (Rp M)	Tahun 2021 (Rp M)	
A.	PENDAPATAN	901.084	965.825	997.753	1.023.143	1.074.029	1.128.605	4,61
B.	BELANJA	922.612	957.025	988.953	1.014.343	1.081.229	1.123.805	4,02
	PRIORITAS I	423.760	421.184	446.394	473.141	513.517	531.623	4,64
	Gaji dan Tunjangan	379.220	374.053	396.496	420.286	445.503	472.233	4,48
	Hibah Pilkada					12.000		
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.909	2.935	2.962	2.988	3.015	3.042	0,90
	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.543	5.931	6.346	6.790	7.265	7.774	7,00
	Belanja obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	3.598	3.616	3.634	3.652	3.671	3.689	0,50

No.	Uraian	Proyeksi						Pertumbuhan (%)
		Tahun 2016 (Rp M)	Tahun 2017 (Rp M)	Tahun 2018 (Rp M)	Tahun 2019 (Rp M)	Tahun 2020 (Rp M)	Tahun 2021 (Rp M)	
	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	12.706	13.341	14.008	14.709	15.444	16.216	5,00
	Belanja Jasa Kantor (Listrik Air, Telp dan kawat/faksimili/internet)	19.784	21.308	22.948	24.715	26.619	28.668	7,70
	PRIORITAS II	475.873	508.696	513.493	510.078	534.375	556.473	3,18
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.856	12.152	12.242	12.332	12.422	12.512	20,84
	BELANJA LANGSUNG	471.018	496.544	501.251	497.746	521.954	543.961	2,92
	PRIORITAS III	22.978	27.146	29.065	31.125	33.337	35.710	9,22
	Belanja Hibah	16.309	21.305	23.094	25.012	27.070	29.283	12,42
	Belanja Bantuan Sosial	2.769	2.841	2.971	3.113	3.267	3.427	4,36
	Belanja Tidak Terduga	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-5,11
	SURPLUS/(DEFISIT)= A-(B+C)	(21.528)	8.800	8.800	8.800	(7.200)	4.800	
C.	PEMBIAYAAN NETTO	21.528	(8.800)	(8.800)	(8.800)	7.200	(4.800)	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.600	8.800	8.800	8.800	4.800	4.800	
	PRIORITAS I	-	4.000	4.000	4.000	-	-	
	Pembentukan Dana Cadangan		4.000	4.000	4.000	-		
	PRIORITAS III	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.128	-	-	-	12.000	-	
	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	28.128	-	-	-	-	-	
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	12.000	-	
	SILPA	-	0	-	-	(0)	(0)	

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Di samping itu juga membantu pemerintah pusat dan provinsi dalam mempertahankan, memelihara, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kota Pekalongan selama empat tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Proses sedimentasi sungai dan saluran drainase yang relatif tinggi, baik pada saluran primer, sekunder, ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman;
2. Terjadi genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif lama
3. Beban berat pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman (seperti air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan lain-lain), khususnya di wilayah-wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.
4. Ketergantungan air baku untuk air bersih pada Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh PDAM ataupun oleh PAMSIMAS dan Swasta seperti hotel ataupun perusahaan menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung Program Pemerintah dalam memenuhi target akses air bersih hingga 100 % pada tahun 2019.
5. Pergeseran fungsi lahan dari tanah sawah menjadi tanah kering akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan. Luas tanah sawah setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan.
6. Kota Pekalongan memiliki 4 (empat) potensi bencana, yaitu bencana banjir rob, banjir limpasan air hujan, abrasi, dan pada periode akhir ini juga terjadi angin puting beliung.
7. Keterbatasan dalam mengurus pemenuhan kebutuhan Irigasi persawahan, karena sebagian besar kewenangan adalah milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Laju pertumbuhan penduduk telah menyebabkan meningkatkan kepadatan penduduk yang merupakan keniscayaan sebagai sebuah wilayah perkotaan yang terus tumbuh dan menjadi magnet bagi daerah *hinterland*-nya. Namun demikian, pertumbuhan penduduk ini juga diikuti dengan kenaikan kebutuhan seperti perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
9. Permasalahan industri batik yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga kain mori serta bahan baku pewarnaan yang tidak stabil menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin.
Permasalahan kedua, yang kemungkinan besar akan muncul adalah terkait dengan pemasaran. Persaingan dengan kota lain yang juga memiliki produk kerajinan batik serta rencana pembangunan jalan tol dan jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang (JALING PETANGLONG), akan sangat mempengaruhi pusat-pusat perdagangan batik di Kota Pekalongan.
10. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor Ekonomi kreatif belum digali dan dikembangkan secara optimal.
11. Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Secara riil, kendala tersebut adalah terkait dengan data penduduk miskin yang memiliki pandangan berbeda, baik dilihat dari kemutlakan dan relativitasnya, ataupun dilihat dari penyebab secara struktural dan secara kulturalnya. Oleh karena itu, data penduduk miskin memerlukan validasi secara rutin dengan melibatkan warga masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data, baik ditinjau dari jenisnya ataupun ditinjau dari penyebabnya. Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk.
12. Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kota Pekalongan harus mengatasi permasalahan : 1) Perkembangan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja; serta 2) *Tidak link and match* (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja (sifatnya prediksi) dengan calon tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
13. Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Pekalongan dihadapkan pada masalah pendidikan, baik rata-rata lama sekolah ataupun Harapan Melanjutkan Sekolah (*Expected Years of School*), masalah kesehatan yang akan mempengaruhi usia harapan hidup sebagai akibat masih fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu - bayi - balita, serta masalah pendapatan yang rendah bagi sebagian besar warga miskin.
14. Dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, khususnya dalam hal akses pendidikan tinggi di Kota Pekalongan, kondisi dan permasalahan yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi,

masih terbatasnya ketersediaan jumlah Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan, serta masih mahal biaya pendidikan tinggi.

Permasalahan lain yang muncul dalam hal meningkatkan derajat pendidikan masyarakat adalah :

- a. Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.
 - b. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin tinggi penduduk usia sekolah Masyarakat belum sepenuhnya menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun.
 - c. Kurangnya daya tampung bila diasumsikan semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah.
 - d. Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD sebagai akibat masih kurangnya Satuan Pendidikan PAUD dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya PAUD dalam tumbuh kembangnya anak.
 - e. Masih adanya guru dengan Kualifikasi Pendidikan belum mencapai minimal S1/D4, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI (17,77 %).
15. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibandingkan dengan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Faktor paling besar yang menyebabkan masih rendahnya IPG dan IDG Kota Pekalongan adalah masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga serta masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.
16. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih belum dapat ditekan untuk terus turun secara stabil adalah karena masih munculnya penyebab kesakitan pada Bayi seperti ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi/gizi buruk, serta kesiapan petugas kesehatan.
- Permasalahan lain yang muncul dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah :
- a. Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan.
 - b. Tren semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit menular dari tahun ke tahun.
17. Dalam penyediaan infrastruktur perkotaan dan juga pelayanan umum lainnya, beberapa permasalahan yang muncul adalah :
- a. Belum seluruh jalan kota dalam kondisi baik.
 - b. Masih perlu upaya maksimal dalam upaya memenuhi target 100 % layanan air bersih, 0 % kawasan kumuh, serta 100 % akses layanan sanitasi.
 - c. Potensi terjadinya kecelakaan masih relatif tinggi sebagai akibat pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi baru mencapai 75,83%.
 - d. Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum optimal sebagai akibat kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk secara aktif memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan.
 - e. Belum optimalnya model pelayanan umum yang responsif gender, ramah anak dan *elderly* dan berkebutuhan khusus sehingga kelompok marginal masih rawan mendapatkan perlakuan yang berbeda.
 - f. Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai

pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi.

- g. Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan daerah baik dari sisi hulu yaitu berupa penggalian potensi-potensi yang ada, dari sisi proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan. Disamping itu, keterbatasan luasan wilayah dan lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk orientasi modal industri besar.
 - h. Tren ketersediaan pangan utama per tahun mengalami penurunan. Hal ini akan terus menjadi permasalahan di masa yang akan datang apabila tidak ada strategi yang tepat dalam upaya menanggulangi masalah keterbatasan lahan pertanian, menurunnya jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, serta masalah lain muncul seperti musim kemarau panjang, gangguan hama dan penyakit tanaman, subsidi pupuk, masih rendahnya penerapan teknologi pertanian dan lain-lain.
18. Dalam hal peningkatan daya saing, Kota Pekalongan harus menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu :
- a. Upaya peningkatan daya tarik wisata :
 - 1) Pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Kondisi Kota Pekalongan yang multi etnis, multi budaya, multi agama pada dasarnya memiliki potensi keunikan tersendiri yang apabila dikemas dan diintegrasikan dengan rutinitas keseharian hidup masyarakat, maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Even-even peribadatan dari berbagai agama, pada sisi ideal memang tidak selayaknya dipertontonkan kepada khalayak ramai. Tetapi, manakala hal ini dikemas dan dipertunjukkan dengan tanpa mengurangi hakikat kereligiusannya, pada akhirnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini kemudian akan menarik kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang juga akan memajukan ekonomi Kota Pekalongan.
 - 2) Permasalahan lain yang juga terkait dengan hal ini adalah belum siapnya masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang akan mampu menerima, mengajak perbincangan secara hangat atas berbagai informasi seputar Kota Pekalongan dan membuat nyaman wisatawan untuk singgah dan datang kembali ke Kota Pekalongan.
 - 3) Penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan.
 - 4) Destinasi wisata belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta.
 - 5) Masih rendahnya kualitas atraksi pada masing-masing destinasi wisata di Kota Pekalongan hal ini dipengaruhi salah satunya pengelolaan obyek wisata yang belum profesional dan sarana prasarana yang ada di obyek wisata masih belum memadai.
 - b. Dalam penyediaan infrastruktur
 - 1) Meningkatnya kemacetan lalu lintas sebagai akibat tidak imbangnya antara rasio penambahan ruas jalan dengan peningkatan jumlah kendaraan, belum adanya jalur jalan khusus yang melayani lalu lintas antar kota yang

masih menyatu dengan ruas jalan perkotaan yang melayani lalu lintas lokal dalam kota.

Disamping itu, operasionalisasi jalur ganda (*double track*) kereta api dengan jumlah perlintasan sebidang relatif banyak, semakin meningkatkan intensitas kemacetan di Kota Pekalongan.

- 2) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang air bakunya masih tergantung pada Kabupaten Pekalongan dan Batang dapat menyebabkan ketidaknyamanan tempat tinggal sehingga mempengaruhi penilaian negatif bagi para investor yang akan singgah atau menetap di Kota Pekalongan.

Sementara pemenuhan kebutuhan air yang sifatnya relatif besar untuk perusahaan, dalam penghitungan jangka panjang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

- 3) Dalam pembangunan perhubungan darat, khususnya terkait dengan pembagian arus penumpang di terminal masih belum optimal, sehingga penumpang lebih memilih menunggu di pinggir jalan daripada menunggu di terminal. Kendaraan luar kota lebih memilih menurunkan penumpang di pinggir jalan daripada di dalam terminal. Dampak jangka pendeknya adalah berupa penurunan PAD dari retribusi terminal sebagai akibat menurunnya jumlah penumpang di terminal. Dalam jangka panjang adalah ketidakteraturan dapat menurunkan image Pekalongan yang akhirnya tidak berkontribusi secara baik dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan.
- 4) Peningkatan volume penumpang Kereta Api belum secara optimal dikelola dalam satu sistem keterhubungan transportasi yang memberikan rasa nyaman bagi penumpang dan belum terintegrasinya antar moda angkutan umum berbasis rel dengan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum lainnya.

Ditambah lagi posisi pintu stasiun yang langsung terhubung dengan arus cepat jalur pantura semakin menambah peningkatan kemacetan di titik pintu masuk keluar stasiun. Dengan kata lain perlu strategi penanganan jalur masuk keluar baik orang maupun barang yang terpisah dengan jalur cepat pantura.

19. Dalam hal Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kota Pekalongan harus menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual.
- b. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat.
- c. Jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas.
- d. Alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada masih relatif kecil.
- e. Munculnya permasalahan kelembagaan dari organisasi bersama antar Daerah, khususnya dalam hal sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan.
- f. Basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klaster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini pengembangannya belum optimal.

4.2. ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran.

Pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang bagi pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan yang belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni 9 (sembilan) tahun, tercermin dari lamanya rata-rata anak sekolah di Kota Pekalongan yakni 8,75 tahun (2014).

Sebagai penyandang *smart city* yang berorientasi pada pembangunan pendidikan dan penguasaan teknologi informasi, Kota Pekalongan harus lebih bekerja keras dalam rangka memperkuat posisinya sebagai pusat-pusat pelayanan kegiatan wilayah regional 3 daerah. Kota Pekalongan juga menyandang sebagai segala pusat aktifitas warganya termasuk pendidikan dan kebudayaan.

Kota Pekalongan identik sebagai pusat kebudayaan terutama batik, terlebih setelah masuk sebagai anggota jejaring kota kreatif dunia UNESCO berbasis kerajinan dan kesenian rakyat. Sesuai amanat RPJMN dalam buku III Agenda Pembangunan Wilayah memberikan arahan untuk pembangunan industri kreatif Jawa Tengah khususnya Kota Pekalongan masuk dalam industri kreatif bidang desain, fashion dan kerajinan. Sehingga perlu mengembangkan diri dalam rangka menciptakan nilai lebih dari kebudayaan itu sendiri. Penciptaan nilai lebih ini terletak pada nilai tambah Kota Pekalongan yang tidak hanya sebagai penghasil batik namun sebagai penghasil produk-produk turunan dari batik itu sendiri.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan disertai dengan upaya penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat.
- 2). Mendorong tumbuhnya kerajinan dan seni rakyat.
- 3). Penyediaan tempat dan waktu pementasan kesenian secara berkala.
- 4). Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- 5). Penyediaan tempat dan waktu kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara berkala.
- 6). Optimalisasi akses penyelenggaraan pendidikan.
- 7). Penambahan Ruang Kelas Baru dan Sarpras Pendidikan lainnya, seperti Perpustakaan, Laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan proporsi jumlah murid pada wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan yang masih rendah angka partisipasi sekolahnya.

- 8). Peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Masyarakat untuk menambah ketersediaan sekolah, khususnya SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat.
- 9). Mendorong kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah melalui pemberian beasiswa.
- 10). Mendorong peningkatan jumlah Satuan Pendidikan PAUD, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Masyarakat.
- 11). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran PAUD dalam masa tumbuh dan kembangnya anak.
- 12). Peningkatan kualifikasi pendidikan guru, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI
- 13). Memperkuat pola pikir dan perilaku masyarakat dengan memfokuskan pada upaya membangun kerajinan dan kesenian rakyat sejalan dengan penetapan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO.
- 14). Meningkatkan sarana prasarana dan lembaga pendukung yang akan mendorong tumbuhnya kerajinan dan kesenian rakyat berbasis batik.
- 15). Mendorong pertumbuhan jenjang pendidikan tinggi dengan memberikan fasilitasi kepada masyarakat (khususnya dari keluarga kurang mampu) untuk dapat mengakses ke jenjang pendidikan tinggi.

Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong, Kota Pekalongan merupakan tempat berkembangnya industri kecil dan menengah yang terus berkembang. Kesadaran pemanfaatan kawasan lingkungan untuk industri batik di kawasan perumahan terus berkembang.

Oleh karena itu, perlunya pemeliharaan kawasan lingkungan agar kegiatan usaha kecil dan menengah tersebut tidak menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin turun. Salah satunya dengan tetap memperdulikan kesehatan lingkungan agar manusia yang hidup dapat lingkungan tersebut tetap sehat.

Melalui pengelolaan lingkungan di kawasan industri batik, kesehatan penduduk yang menaungi kawasan tersebut dapat terkontrol dengan baik melalui puskesmas maupun posyandu yang terdapat di lingkungan industri tersebut.

Isu Strategis berkaitan dengan Kesehatan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Menurunkan angka kesakitan pada bayi, balita, dan ibu baik bersifat promotif, preventif dan kuratif, baik dilakukan oleh petugas kesehatan maupun oleh masyarakat.
- 2). Peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan melalui stimulasi dana Jaminan Kesehatan bersumber dari APBD (JAMKESDA).
- 3). Peningkatan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penderita Penyakit Menular baik bersifat Promotif, Preventif maupun Kuratif.

Industri batik merupakan industri dengan karakteristik rumah tangga. Alur produksinya bergerak dari rumah ke rumah. Dalam struktur semacam ini, pada dasarnya arus perputaran modal dan pendapatan sangat dimungkinkan untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk para pekerja yang notabene sekarang ini tetap memiliki kesenjangan dalam hal pendapatan.

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir Pemerintah Kota Pekalongan pada dasarnya telah membangun sistem peningkatan kapasitas masyarakat dan juga keluarga dengan berbagai strategi kebijakan dan program. Dalam praktiknya, banyak pihak yang terlibat

secara langsung dalam proses peningkatan kapasitas masyarakat tersebut, mulai dari PD, kelembagaan masyarakat sampai dengan mendorong keterlibatan swasta dan juga perbankan.

Dengan modal pondasi yang telah dibangun tersebut, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam waktu lima tahun ke depan adalah menguatkan sinergitas berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktivitas industri batik. Bentuk-bentuk pelatihan produksi, diversifikasi bahan baku produksi, peningkatan inovasi dan kreativitas produk, teknik pengemasan dan penjualan produk disertai dengan kebijakan skema permodalan yang memadai akan sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk sebagai upaya antisipasi semakin tumbuhnya daerah-daerah penghasil batik di Indonesia. Disamping itu, dalam rangka menghadapi dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2016, maka produk-produk dengan standar internasional harus mulai dipersiapkan. Kemampuan untuk menangkap peluang ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak positif terhadap struktur sosial terkecil di masyarakat yaitu keluarga.

Dalam kondisi perekonomian Kota Pekalongan yang akan memasuki pasar global secara masif yang ditandai dengan berbagai pengakuan dari lembaga internasional serta berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean, maka perlu dilakukan beberapa pembenahan, khususnya dalam hal menyikapi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Pemerintah Kota Pekalongan bersama-sama dengan masyarakat harus melakukan perubahan mendasar terkait dengan proses produksi yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini perlu dilakukan mengingat branding Kota yang sudah masuk di jejaring internasional serta adanya kecenderungan konsumen internasional yang mengarah pada produk-produk kerajinan tangan (*hand made*).

Isu Strategis berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti serta peningkatan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kriminal dengan berbagai pendekatan (ekonomi, budaya, agama, ataupun teknologi informasi).
- 2). Arah Kebijakan pembangunan yang lebih pro terhadap keadilan dan kesetaraan gender.
- 3). Peningkatan peran dan perluasan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga politik dan pemerintahan.

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan selama hampir 10 tahun terakhir yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan hasil positif. Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Setidaknya terdapat 5 hal penting yang telah dilakukan, yaitu mendorong anak dari keluarga miskin bersekolah, mendorong agar warga miskin terlayani kebutuhan kesehatannya, memberikan fasilitas agar masyarakat miskin dapat melakukan kegiatan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan yang ada di masyarakat, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kelima hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui kelembagaan yang ada untuk berperan aktif mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan merumuskan solusi pemecahannya.

Dengan melihat keberhasilan dari implementasi program tersebut, khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan, serta masih dimungkinkannya penurunan angka kemiskinan tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis

masyarakat akan menjadi program yang cukup strategis untuk diimplementasikan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Namun demikian, sejalan dengan semakin diakuinya keunggulan komparative Kota Pekalongan, maka program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat harus diarahkan agar sejalan dengan upaya untuk terus membangkitkan potensi unggulan Kota Pekalongan tersebut. Langkah ini secara langsung ataupun tidak langsung juga akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran.

Isu Strategis berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- 2). Mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah untuk menciptakan pemerataan kepadatan penduduk.
- 3). Peningkatan kualitas tenaga kerja berpendidikan dan berkompotensi tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja yang terus meningkat.
- 4). Pengurangan beban biaya hidup masyarakat miskin.
- 5). Kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.
- 6). Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan disertai dengan upaya link and match antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat memahami pentingnya pendidikan.
- 7). Peningkatan kesadaran menabung sebagai penambahan modal pembangunan yang berkelanjutan.
- 8). Peningkatan kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja.
- 9). Menekan penyebaran NARKOBA melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, peningkatan partisipasi aktif masyarakat, serta perluasan wadah kegiatan kreatif pemuda.
- 10). Peningkatan angka ketercukupan pangan melalui peningkatan sarana produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan irigasi sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dimiliki, pengendalian pemanfaatan ruang, serta diversifikasi pangan.
- 11). Mendorong kebijakan pro job baik melalui penciptaan iklim investasi, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja (khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN), serta peningkatan *link and match* antara pendidikan dengan trend kebutuhan lapangan pekerjaan.

4.2.2. Tata Kelola Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan sekarang ini menghadapi satu agenda besar yang sama, khususnya untuk waktu lima tahun yang akan datang. Agenda besar tersebut terkait dengan, *Pertama*, posisi daya saing dan kemajuan yang telah dicapai selama ini. Beberapa hal yang kemudian harus terus diperkuat adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang selama ini sudah menunjukkan keberpihakan pada publik.

Kedua adalah terkait dengan upaya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan birokrasi dan tata kelola pelayanan publik, seperti penghapusan UPTD, penghapusan jabatan struktural

kepala TU Sekolah dan menempatkan pejabatnya di Kelurahan untuk mem-back up kinerja Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan, pembangunan BLUD-Puskesmas dalam satu holding di tingkat Kota, sampai dengan penggabungan kelurahan. Inti dari upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut adalah efisiensi sumber daya dalam rangka untuk memberikan porsi yang lebih banyak untuk belanja publik.

Penataan birokrasi tidak hanya berhenti pada efisiensi, namun juga dilanjutkan dengan pencapaian efektivitas dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Kota Pekalongan mengambil langkah penerapan kemajuan Teknologi Informasi dalam pengelolaan birokrasi. Pada akhir tahun 2014, Kota Pekalongan telah mencanangkan untuk mewujudkan *Smart City*.

Dalam tatanan birokrasi, langkah ini telah diaplikasikan dalam bentuk pembangunan aplikasi-aplikasi pelayanan, aplikasi administrasi surat-menyurat, aplikasi penatausahaan keuangan, aplikasi perencanaan pembangunan, dan aplikasi-aplikasi lain di PD. Isu ini semakin menguat pada waktu yang akan datang karena tuntutan kecepatan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.

Dengan melihat gambaran di atas, maka para pengambil kebijakan perlu secara konsisten mengawal model reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diterapkan selama ini dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak pada kesiapan masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan berupa isu global dengan mengandalkan potensi keunggulan lokal.

4.2.3. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Industri batik dan turunannya seperti ATBM, konfeksi, dan beberapa kerajinan berbasis batik telah menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga Kota Pekalongan. Berdasarkan data Disperindagkop Kota Pekalongan, pertumbuhan industri sejak tahun 2010 sampai 2012 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jika tahun 2010 pertumbuhan industri adalah 1,38%, tahun 2011 turun menjadi 0,87% dan kembali naik pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,25%. Sektor industri tetap menjadi tumpuan perekonomian Kota Pekalongan selain perdagangan dan jasa.

Salah satu indikasi yang berkembang saat ini ialah dengan semakin menggeliatnya perkembangan industri kreatif di Kota Pekalongan. Dengan ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai kota kreatif dunia oleh UNESCO pada tanggal 1 Desember 2014 untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat (*Craft and Folk Art*), Kota Pekalongan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang terdaftar sebagai anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Pengakuan UNESCO ini akan berdampak sangat baik bagi perkembangan investasi Kota Pekalongan, karena *city image* Kota Pekalongan akan terangkat pada level internasional. Dengan demikian iklim investasi dan pariwisata Kota Pekalongan akan sangat menjanjikan bagi calon investor.

Namun harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah Kota Pekalongan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (*creative center*), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kota Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.

Selain itu, sektor pariwisata terkait dengan ekonomi kreatif juga mulai tumbuh di Kota Pekalongan. Munculnya kawasan wisata belanja di sentra perdagangan seperti

Setono dan Gamer, kawasan wisata Kampoeng Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon telah menjadikan ikon batik di Kota Pekalongan semakin diakui oleh dunia. Tumbuhnya hotel berbintang dan *home stay* di kawasan kampung batik juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Pekalongan. Potensi *creative tourism* ini patut untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pekalongan demi terwujudnya cita-cita Kota Pekalongan sebagai kota jasa yang tangguh.

Isu Strategis berkaitan dengan Ekonomi Kreatif, Iklim Usaha, dan Pariwisata sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Peningkatan iklim investasi yang diikuti dengan fasilitas pendukung pelayanan perkotaan lainnya.
- 2). Peningkatan akses sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 3). Perluasan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan proses perijinan usaha.
- 4). Peningkatan jumlah wirausaha baru.
- 5). Mendorong dihidupkannya kembali Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kota Pekalongan.
- 6). Peningkatan kesiapan potensi dan kebijakan yang pro terhadap masuknya investasi di Kota Pekalongan.
- 7). Peningkatan promosi.
- 8). Membuka kerja sama dengan Kabupaten sekitar untuk peningkatan investasi.
- 9). Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif sesuai dengan arah pembangunan Kota Pekalongan.
- 10). Peningkatan infrastruktur kepariwisataan sebagai penunjang peningkatan jumlah hotel berbintang.
- 11). Mencari terobosan baru dalam perijinan untuk lebih menggairahkan iklim investasi di Kota Pekalongan.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan menunjukkan komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Pekalongan dalam bidang riset, teknologi dan inovasi yang tercermin dengan dibentuknya PD baru eselon III dengan nama Kantor Riset Teknologi dan Inovasi atau disingkat Ristekin.

Langkah ini merupakan lompatan terobosan Kota Pekalongan karena teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa *e-gov* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui *e-government*.

Penggunaan teknologi informasi juga akan berdampak kepada kualitas pelayanan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat juga dirasakan oleh birokrasi terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis FOSS telah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dalam birokrasi, diantaranya dalam proses perencanaan (*e-planning*), penganggaran, pelaporan, *paperless office*, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Pekalongan sebagai *smart city*. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan desiminasi penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Disisi lain, kegiatan riset telah banyak dilakukan di Kota Pekalongan. Dibangunnya Kantor Ristekin diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 070/7004/SJ tanggal 1 Desember 2014, bahwa ke depan proses perencanaan harus berpijak pada hasil penelitian dan pengembangan (litbang).

Kegiatan riset juga harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan bahan penolong batik dengan diversifikasi bahan penolong, memanfaatkan potensi batik untuk menangkap peluang pasar dunia yang mengarah pada produk hand made; serta mendorong penciptaan produk unggulan batik yang berdaya saing.

Isu Strategis berkaitan dengan Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Penguatan regulasi yang pro investasi didukung dengan percepatan proses perijinan berbasis Teknologi Informasi, penguatan kelembagaan SIDA, serta kecepatan penyediaan data dan informasi.
- 2). Penguatan dan perluasan kerja sama litbangyasa serta perluasan keterlibatan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pembangunan.

4.2.4. Peningkatan Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan

Keunggulan batik Pekalongan telah menjadi salah satu materi dalam penetapan sebagai salah satu Jejaring Kota Kreatif Dunia oleh UNESCO. Pada dasarnya, penetapan ini akan meningkatkan volume kunjungan wisatawan manca negara ataupun wisatawan dalam negeri ke Kota Pekalongan. Disamping itu, volume perdagangan dan jasa juga akan terkena dampak positif dari penetapan tersebut.

Dengan melihat kondisi ini, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang akan mampu mendukung dan menguatkan posisi Kota Pekalongan. Beberapa hal yang harus diperkuat, baik dalam aspek kebijakan ataupun dalam hal implementasi adalah regulasi tentang penataan ruang, pengaturan dan pemenuhan kebutuhan jasa transportasi untuk manusia dan barang yang meliputi pengaturan rute, moda transportasi, interkoneksi, penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang layak dan nyaman, serta kemudahan akses jalan dari dan menuju ke sentra-sentra industri batik. Disamping itu, infrastruktur perdagangan seperti halnya pasar kerajinan batik juga tidak kalah penting untuk dipenuhi.

Infrastruktur perdagangan dalam era globalisasi yang sangat erat keterkaitannya dengan kemajuan teknologi informasi juga telah disikapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan menanam pondasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan internet maupun intranet. Dalam skala yang lebih besar, Kota Pekalongan telah mencanangkan sebagai *Smart City*. Penguatan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi jaringan ini setidaknya diarahkan pada dua hal besar yaitu *Government to Government (G to G)* dan *Government to Bussiness (G to B)*. Jaringan *G to G* diarahkan pada penguatan

kapasitas birokrasi pemerintahan di semua level dan sektor. Harapannya akan mampu berkinerja efektif dan efisien, sehingga akan semakin optimal dalam pengalokasian sumber-sumber daya pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Jaringan *G to B* diarahkan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan menurunkan biaya pelayanan, khususnya perijinan usaha.

Posisi Kota Pekalongan yang dilalui lalu lintas perekonomian di Pantura Jawa di satu sisi memberikan keuntungan namun di sisi lain juga kurang mendukung kenyamanan mobilitas. Kemacetan arus lalu lintas semakin tinggi intensitasnya. Ditambah lagi adanya jalur rel ganda dengan tiga perlintasan sebidang. Oleh karena itu, rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara sudah harus segera direalisasikan.

Selain itu, meskipun berada di jalur strategis lalu lintas perekonomian di Pantura Jawa, namun jarak tempuh dari pintu masuk utama wisatawan manca negara, yaitu Jakarta dan Semarang, relatif jauh dan lama. Kondisi ini cukup mempengaruhi minimnya kunjungan wisatawan manca negara ke Kota Pekalongan.

Kebutuhan infrastruktur lain yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur pendidikan. Upaya pelestarian batik dari generasi ke generasi harus dilakukan, diantaranya melalui pendidikan. Disamping hal ini sudah diakui oleh UNESCO sebagaimana telah diberikan penghargaan Best Practices pelestarian batik melalui kerjasama Museum Batik dengan sekolah-sekolah, Kota Pekalongan juga sudah menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Batik dari jenjang pendidikan pra sekolah (TK) hingga pendidikan menengah (SMA/SMK). Selain itu, pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat dua perguruan tinggi yang telah menggeluti batik. Kondisi ini harus terus didukung dengan upaya-upaya riil dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukungnya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri batik juga harus disertai dengan penguatan daya dukung lingkungan sehingga semakin kondusif dan nyaman untuk kegiatan ekonomi masyarakatnya. Terkait hal ini, Kota Pekalongan memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu berupa penanganan limbah dan penanggulangan bencana air laut pasang (*rob*). Beberapa wilayah yang menjadi sentra industri batik menjadi titik-titik kumuh yang tidak nyaman untuk aktivitas masyarakat di dalamnya sebagai akibat besarnya volume limbah yang belum terolah dan juga akibat genangan *rob* dengan waktu genangan yang semakin lama.

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

- 1). Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman.
- 2). Memperkuat upaya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
- 3). Peningkatan kerja sama pengelolaan air bersih regional untuk percepatan pencapaian 100 % akses air bersih bagi penduduk Kota Pekalongan.
- 4). Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional dengan tetap mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal perkotaan.
- 5). Membangun kesiagaan bencana baik Pemerintah ataupun Masyarakat untuk meminimalisir dampak kerugian akibat bencana.

- 6). Membangun infrastruktur penanggulangan dan pencegahan dampak akibat bencana.
- 7). Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal perkotaan, penangangan bencana banjir dan rob, serta pencapaian target 100-0-100.
- 8). Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.
- 9). Penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 10). Peningkatan kualitas layanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan.
- 11). Penataan Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Kampung Pecinan, Kawasan Kampung Arab, Kawasan Sorogenen, Rencana pembangunan Jalan Lingkar, rencana pembangunan jalan interchange Jalan Tol, Pengembangan Teknopark Perikanan, Pengembangan Teknopolitan Batik, dan lain-lain, sehingga masyarakat merespon dengan menginvestasikan modalnya sesuai dengan arah pengembangan Kota tersebut.
- 12). Perlunya penyediaan angkutan publik yang memadai dengan disertai kebijakan yang mengarah pada pengurangan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.
- 13). Perlunya penambahan ruas jalan untuk menambah kapasitas jalan sekaligus mengurangi kepadatan. Implementasinya : Pembangunan Jalan Lingkar Petanglong untuk mengurangi kepadatan lalu lintas regional di jalur dalam kota.
- 14). Perlunya rekayasa jalur trayek angkutan, sehingga memaksa secara tidak langsung, baik kendaraan umum ataupun penumpang untuk masuk ke dalam terminal.
- 15). Peningkatan kualitas pelayanan angkutan yang terhubung dari stasiun ke berbagai titik tujuan dalam kota.
- 16). Perlunya pencermatan segmen penumpang untuk mendorong majunya ketersediaan angkutan umum, baik oleh Pemerintah Kota Pekalongan ataupun oleh swasta.
- 17). Mendorong terwujudnya pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut kewenangan penyelenggaraan layanan umum lintas Kabupaten / Kota.
- 18). Mendorong riset penemuan sumber air bersih terbarukan untuk mengurangi ketergantungan dengan air baku dari Kabupaten Pekalongan dan Batang.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup di kota pekalongan yang memiliki dampak cukup luas terhadap kehidupan masyarakat antara lain berkaitan dengan persampahan dan pencemaran lingkungan khususnya sungai sebagai akibat aktifitas industri yang belum memiliki sarana IPAL. Penyediaan air bersih khususnya pada kawasan kawasan yang berada pada titik-titik pencemaran seperti di wilayah sekitar sungai dan kawasan industri kerajinan berbasis tekstil, serta permasalahan intrusi air laut dan genangan banjir dan rob di kawasan pesisir.

Permasalahan persampahan selain terkait dengan pengolahan pada sisi hulu (sumber sampah) juga yang paling pokok adalah pengolahan pada sisi hilir (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah). Kondisi TPA yang sekarang ini berada di Kelurahan Degayu mengalami penurunan kapasitas daya tampung. Beberapa alternatif pemecahan perlu dimunculkan baik dalam kerangka perluasan, penggantian lokasi baru ataupun penerapan teknologi yang mampu memproses sampah secara optimal.

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri kerajinan batik menempati isu yang cukup penting yang harus diselesaikan. Selain akan mempengaruhi *image* pasar terhadap produksi batik sehingga bisa memberikan ancaman dalam pemasaran, juga secara langsung kondisi semacam ini sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh sulitnya mencari lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah batik dan juga belum disadarinya dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas industri batik.

Pencemaran sungai di Kota Pekalongan juga tidak terlepas dari aktifitas industri yang ada di sisi hulu dalam hal ini di wilayah Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu kekuatan kerjasama dan koordinasi yang meliputi berbagai pihak termasuk juga pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu untuk ditingkatkan. Tujuannya agar masing-masing pemilik otoritas mampu mengendalikan dampak aktifitas industri yang berpotensi bagi pencemaran lingkungan khususnya sungai.

Kota Pekalongan berada di kawasan pesisir pantai dengan ketinggian yang hanya 1 sampai 6 meter di atas permukaan air laut. Di beberapa kawasan khususnya di kecamatan pekalongan utara bahkan mengalami genangan rob dan juga intrusi air laut. Kondisi semacam ini sangat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya berakibat juga pada akses layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Sampai dengan tahun 2014 akses layanan air bersih dan sanitasi masing-masing baru mencapai 76,14% dan 90,57%.

Kondisi-kondisi di atas tidak terlepas dari dampak penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk mencapai visi RPJP Kota Pekalongan 2005-2024 “Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera” serta dengan mempertimbangkan permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1). Mendorong kerjasama dengan daerah sekitar dalam rangka pembangunan TPA regional.
- 2). Optimalisasi dan implementasi pelaksanaan Perda Lingkungan Hidup.
- 3). Mendorong keberpihakan pengambil kebijakan untuk peduli pada lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

5.1.1 Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.

Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal.

Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian. Di samping itu, secara langsung kehidupan ekonomi ini juga telah membentuk karakter budaya

masyarakat. Dalam perspektif seni dan budaya yang mewujud dalam bentuk karya, sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa dan karsa, sekarang ini terus berkembang seni-seni budaya yang menggambarkan ritme kehidupan batik di Kota Pekalongan. Sedangkan dalam perspektif masyarakat berbudaya, ritme kehidupan perdagangan (khususnya batik di Kota Pekalongan) yang cenderung egaliter akan dapat tertata dengan baik dengan didasari oleh nilai-nilai religiusitas.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

5.1.2 Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan **sejahtera**, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan **Kota Sejahtera** adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. **Kota sejahtera** menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Dengan melihat definisi Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi

Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

5.1.3 Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuhkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah "**brayan urip**" menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan **mandiri**, dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Rata-rata Lama Sekolah sebagai cerminan ketersediaan Sumber Daya yang berkualitas, Pertumbuhan Ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, Nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

5.1.4 Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai *keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar* (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang

memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

Karya Budaya pada zaman sekarang ataupun yang akan datang tidak dapat dibangun dalam perspektif eksklusif. Karya budaya yang kemudian akan mencerminkan karakteristik suatu masyarakat sehingga dihargai dan dihormati pada saat sekarang ini merupakan karya bersama dari banyak pihak yang akan terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam melahirkan, membangun, dan membesarkannya. Dikenalnya karya budaya tidak akan terlepas dari dukungan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan melalui media pendidikan baik jalur pendidikan formal sekolah/madrasah ataupun jalur pendidikan informal yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, indikator Kota Pekalongan berbudaya adalah pengakuan dunia terhadap seni dan budaya Kota Pekalongan.

Saat ini terdapat dua pengakuan dunia terhadap budaya Kota Pekalongan, yaitu : Pengakuan UNESCO atas Pelestarian Budaya Batik melalui kerja sama antara Museum Batik dengan Dunia Pendidikan serta Pengakuan UNESCO terhadap Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia untuk bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Target selama lima tahun adalah mempertahankan kedua pengakuan tersebut melalui berbagai upaya pengembangan dan promosi melalui berbagai upaya pemenuhan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan budaya.

5.1.5 Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

5.2 MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

5.2.1 Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yakni sampai minimal SMP/MTs atau setara paket B. Peningkatan akses pendidikan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia maupun rata-rata lama sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005. Adapun standar yang dimaksud yaitu standar isi (ruang lingkup materi dan kompetensi), standar proses (terkait proses pembelajaran), standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidik. Dengan mutu pendidikan yang lebih terjamin maka dapat lebih menjamin terhadap upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendidik anak usia sekolah maupun memanfaatkan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah terutama anak usia sekolah di wilayah pinggiran perkotaan.

5.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Misi ini ditempuh dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi yang sedang berkembang sehingga mampu menciptakan daya saing regional yang berbasiskan profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipatif serta menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, mudah, murah, tepat waktu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kepastian pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik ini mencakup kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan terutama menyangkut kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik maka akan dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2.3 Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan ekonomi harus dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan. Karena lingkungan yang menurun kualitasnya akan berimplikasi terhadap penurunan kualitas dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Peningkatan ekonomi juga harus bisa dinikmati secara bersama-sama seluruh masyarakat secara inklusif. Peningkatan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati beberapa kelompok masyarakat tetapi harus secara bersama-sama dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

5.2.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan non fisik, melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan sehingga menciptakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dinamis dan humanis. Dengan tersedianya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang memadai maka dapat mendukung peran Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan peran strategis Kota Pekalongan di jalur pantai Utara Pulau Jawa.

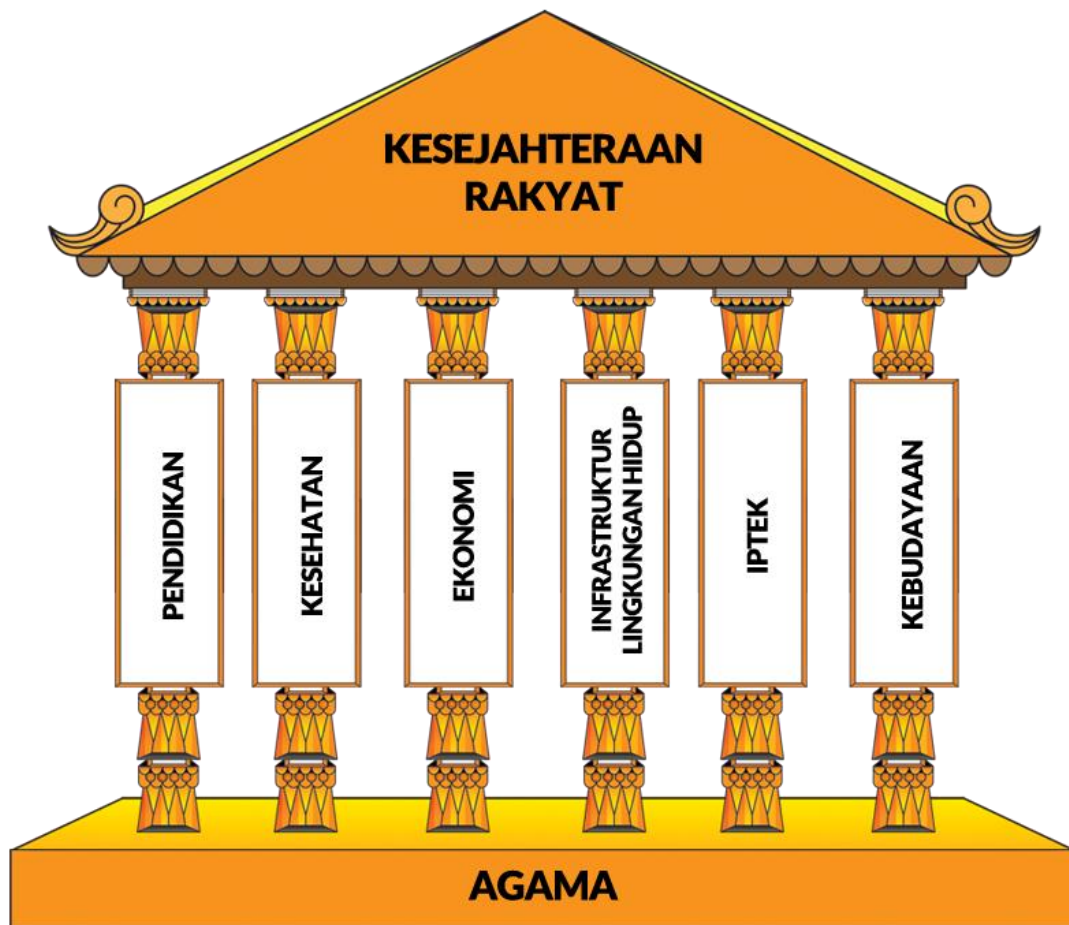
5.2.5 Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya teknologi informasi yang memadai maka memungkinkan dapat menumbuhkan inovasi daerah, bagi peningkatan ekonomi daerah maupun pelayanan publik.

5.2.6 Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Misi ini dilakukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan dalam arti luas yang bertujuan membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat lokal sehingga terciptanya suasana tertib, aman, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas melalui keenam misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Keenam misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang.

Kondisi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera akan dilihat dari : 1) indikator angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan, 2) indikator Indeks Gini yang akan menggambarkan semakin meratanya pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat, 3) indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun sehingga akan ikut mendorong kenaikan income per kapita, serta 4) Indeks Pembangunan Manusia dengan komposit Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan PDRB per kapita. Kondisi ini akan diwujudkan melalui Misi 1, yaitu "Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan" Misi 2, yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat".

Pada saat sekarang ini, angka kemiskinan Kota Pekalongan menunjukkan penurunan secara konsisten. Dan pada tahun 2014 sudah berada pada angka 8,02, jauh di bawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dengan melihat trend positif pembangunan yang sekarang dan akan datang, angka ini diharapkan terus turun sehingga pada tahun 2021 diprediksikan akan mencapai sekitar 5,79 %.

Penurunan angka kemiskinan ini diprediksikan dapat terwujud sejalan dengan trend Gini Ratio. Prediksi ini didasarkan pada asumsi bonus demografi dimana Kota Pekalongan sebagaimana juga dialami secara nasional, mendapatkan bonus demografi berupa penduduk muda yang diharapkan pada 5 – 20 tahun yang akan datang sangat mempengaruhi kemajuan Kota Pekalongan. Angkatan kerja yang tumbuh sejalan dengan diperolehnya bonus demografi tersebut akan mendorong pemerataan pendapatan. Sehingga, akan menekan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Gini Ratio Kota Pekalongan yang sekarang pada angka 0,34 diprediksikan stabil pada tahun 2021.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tentang sektor penopang utama Pertumbuhan Ekonomi serta semakin tingginya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Pekalongan, kondisi ini akan semakin membuka peluang usaha dan kesempatan kerja di Kota Pekalongan. Dengan demikian akan ikut menekan angka pengangguran. Diprediksikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 akan berada pada angka 3,5 %.

Dengan melihat uraian di atas, maka upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dijalankan selama lima tahun yang akan datang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama lima tahun ke belakang, IPM menunjukkan kenaikan secara konsisten. Diharapkan pada tahun 2021 IPM Kota Pekalongan akan mencapai 76,89 dengan capaian masing-masing komposit berupa : Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,08 tahun; Angka Harapan Sekolah (Expected Years of Schooling) sebesar 13,21 tahun; Usia Harapan Hidup 74,41 tahun; serta Tingkat Pengeluaran Per Kapita 18.897.489 per tahun.

Kemudian, kondisi Kota Pekalongan yang lebih mandiri akan dilihat dari : 1) indikator Pertumbuhan ekonomi yang akan menggambarkan semakin majunya kondisi ekonomi masyarakat, dan 2) indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan APBD yang akan menggambarkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan Pembangunan. Kondisi ini akan diwujudkan melalui implementasi Misi 3, yaitu “Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan”, Misi 4, yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan”, serta Misi 5, yaitu “Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas”.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun ke belakang (2010-2014) berada pada kisaran 5,5 % sampai dengan 5,9 %. Meskipun sempat mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,9 %, namun belum sempat menyentuh angka 6 %. Bahkan pada tahun 2014 cenderung turun menjadi 5,48 %. Dengan melihat bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini ditopang oleh tiga sektor, yaitu 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2) Industri Pengolahan, dan 3) Konstruksi, maka diperkirakan pada akhir periode tahun 2021, cenderung stabil pada kisaran 5,7 %. Rencana pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG dan Interchange Jalan Tol diperkirakan akan berpengaruh pada tahun 2018-2019. Selebihnya hanya akan ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan. Hal ini disebabkan karena Kota Pekalongan tidak memiliki potensi wilayah yang mencukupi untuk investasi industri dalam skala besar.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil sebagai akibat tidak adanya lahan yang mencukupi untuk investasi industri dalam skala besar, diharapkan tidak berpengaruh secara negative terhadap kemandirian Kota Pekalongan. Hal ini karena kesiapan SDM Kota Pekalongan yang relative baik di masa yang akan datang. Semakin tumbuhnya Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan akan menjadi

pendorong terhadap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Pekalongan. Diharapkan pada akhir periode tahun 2021, RLS Kota Pekalongan dapat mencapai 9,08. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk Kota Pekalongan sudah berada di jenjang Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pola pikir terhadap kemajuan dan kompetisi bagi kemajuan Kota akan menjadi lebih baik.

Selain itu, kemandirian Kota Pekalongan juga akan dilihat dari persentase PAD terhadap APBD. Pada dasarnya, apabila dilihat dari capaian angka ini, Kota Pekalongan termasuk dalam kondisi baik. Dengan semakin tinggi PAD berarti Kota Pekalongan akan semakin dapat menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, karena sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD diserahkan sepenuhnya kepada Daerah dalam penggunaannya. Dari capaian pada tahun 2015 sebesar 16,94 % diprediksikan akan terus naik dan mencapai 22,76 % pada tahun 2021.

Sedangkan kondisi Kota Pekalongan yang Berbudaya, akan dilihat dari : 1) indikator persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian, 2) penyelenggaraan festival (pentas) seni dan budaya, 3) kunjungan wisata per tahun. Visi ini akan diwujudkan melalui Misi 6 yaitu “Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah”.

Pengembangan Budaya Kota Pekalongan sampai dengan saat ini menunjukkan upaya yang sangat massif dan sistematis. Berbagai komponen, mulai dari Pemerintah melalui berbagai event sampai dengan komunitas-komunitas dari banyak kalangan dan juga etnis terlihat sangat antusias dalam menyajikan hasil karya seni dan budayanya. Kondisi ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok seni dan budaya yang ada di Kota Pekalongan. Dari kondisi awal RPJMD sebanyak 2,15 % diharapkan akan meningkat menjadi 2,69 %. Kenaikan ini terlihat tidak terlalu besar, tetapi hal ini lebih dipengaruhi oleh keterbatasan lahan perkotaan.

Kenaikan sarana dan prasarana yang tidak terlalu besar tersebut, tidak serta merta mempengaruhi kerja keras untuk menghasilkan karya budaya masyarakat Kota Pekalongan. Rencana pementasan ataupun penyelenggaraan event yang sekarang ini hanya sebanyak 16 event setiap tahun, ditargetkan pada tahun 2021 akan mencapai 24 event dalam 1 tahun atau naik 50 %. Dengan upaya dan kerja keras ini, maka diharapkan kunjungan wisata ke Kota Pekalongan yang sebelumnya sebanyak 450.000 pengunjung akan naik menjadi 550.000 pengunjung pada tahun 2021.

Kondisi terakhir yang akan diwujudkan adalah semakin kuatnya basic nilai religiusitas masyarakat Kota Pekalongan. Kondisi ini akan dilihat dari : 1) indikator persentase kenaikan pendaftar ibadah haji yang akan menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran untuk menunaikan ibadah, dan 2) persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Untuk mewujudkan visi ini, maka Misi 6, yaitu “Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah”.

Upaya peningkatan religiusitas masyarakat pada dasarnya merupakan upaya yang memakan waktu panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan keagamaan yang terus dioptimalkan melalui pendidikan Baca Tulis Al Qur'an di setiap lembaga pendidikan, serta lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di masyarakat seperti TPQ dan MADIN akan menjadi pondasi dalam pengamalan nilai keagamaan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengukur pengamalan nilai religiusitas masyarakat tersebut, maka akan dilihat antara lain dari jumlah pendaftar haji. Dari kondisi awal RPJMD sebanyak 823 orang menjadi 1.000 pendaftar pada tahun 2021 atau naik 21,5 %.

Untuk mewujudkan ketercapaian kedua indikator tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan akan menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan keagamaan di semua lembaga pendidikan atau tetap terwujud 100 % sampai dengan tahun 2021.

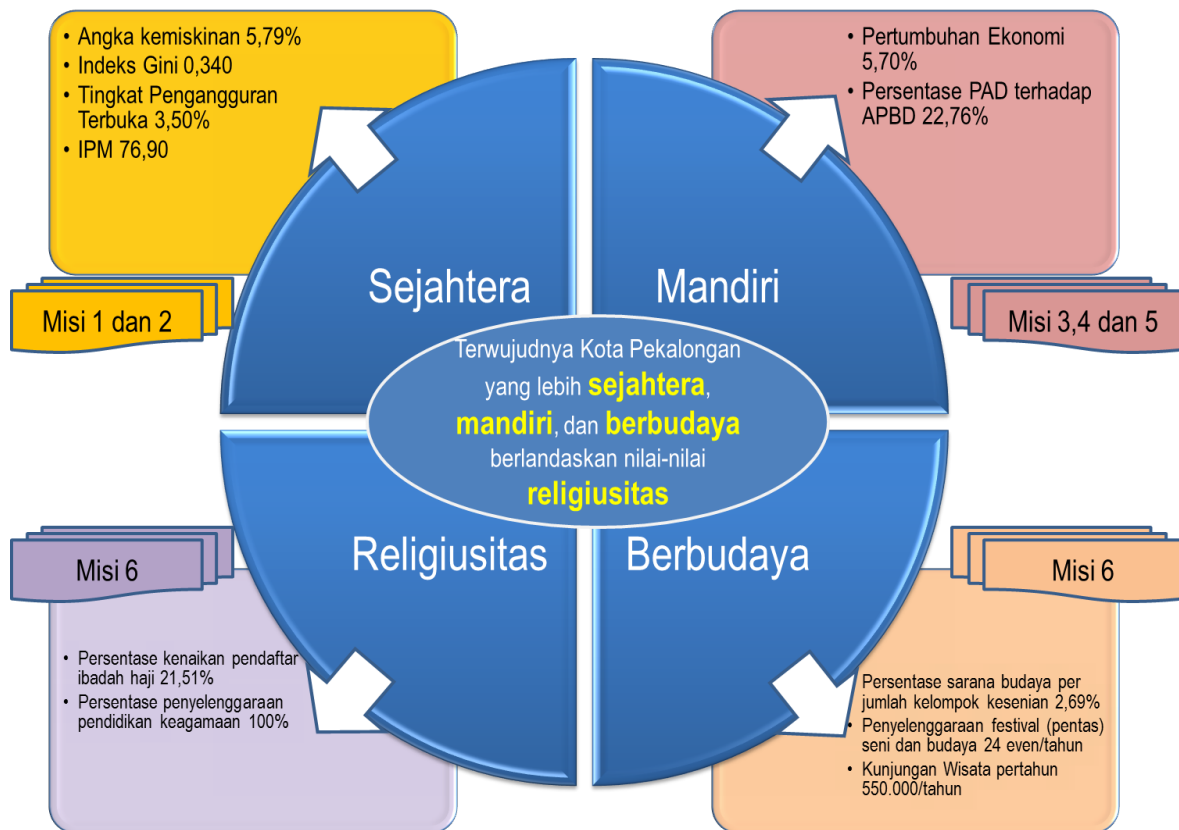
Untuk mengetahui secara detail, keterkaitan antara visi, indikator visi, dan target capaian pada tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Target Pencapaian Indikator Visi
Kota Pekalongan Tahun 2021**

VISI	KOMPONEN VISI	INDIKATOR	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas	Sejahtera	Angka Kemiskinan	8,02%	5,79%
		Indeks Gini	0,340	0,340
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42%	3,50%
		IPM	71,53	76,90
	Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,48%	5,70%
		Persentase PAD terhadap APBD	16,94%	22,76%
	Berbudaya	Persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian	2,15%	2,69%
		Penyelenggaraan festival (pentas) seni dan budaya	16	24
		Kunjungan Wisata pertahun	450.000	550.000
	Religiusitas	Persentase kenaikan pendaftar ibadah haji	3,28%	21,51%
		Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan	100%	100%

Sumber : Data diolah

Secara lengkap hubungan visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 5.2 berikut.



Gambar 5.2 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021

5.3 FALSAFAH “BRAYAN URIP”

Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumah tangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumah tangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama

Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (*public engangement*) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif.

Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Di dalam falsafat “**Brayan Urip**” terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

5.3.1 Nilai

1) Kebersamaan

Dalam mewujudkan visi dan misi, Pemerintah ataupun masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami atas kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk selanjutnya bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemahaman “**Brayan Urip**” menuntun semua pihak, semua pemegang kepentingan, untuk saling memberikan kesempatan dalam mewujudkan visi dan juga saling berbagi atas semua suka dan duka yang diperoleh, baik pada saat terwujudnya visi ataupun pada saat mewujudkannya. Sehingga keberhasilan yang diraih adalah keberhasilan bersama. Demikian juga apabila menemukan kegagalan, semua pihak dapat saling mengoreksi kelemahan masing-masing, memperbaikinya, dan kembali bersinergi untuk mewujudkan keberhasilan tersebut.

2) Keadilan

Nilai keadilan dalam falsafah “**Brayan Urip**” tidak diartikan sebagai sama rata dan sama rasa. Tetapi, lebih mendorong kesadaran kepada individu untuk memberikan penghargaan kepada orang lain sesuai dengan perannya dalam sebuah usaha bersama. Di sisi lain, falsafah “**Brayan Urip**” sangat menutup peluang bagi setiap individu untuk mengukur jasa dan perannya dalam sebuah usaha bersama. Dengan demikian, tatanan masyarakat yang terbangun adalah tatanan masyarakat yang memiliki individu dengan karakter yang lebih mementingkan orang lain dan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongannya.

3) Proporsional

Falsafah “**Brayan Urip**” tidak hanya merujuk pada kebersamaan dalam menikmati sebuah usaha, tetapi juga kebersamaan berbagi peran dalam meraih keberhasilan visi. Falsafah “**Brayan Urip**” memandang setiap pemegang kepentingan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi terkait dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, dalam perspektif kelembagaan, upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi akan didistribusikan secara proporsional, sesuai dengan peran dan fungsi yang dimiliki.

5.3.2 Asas

Untuk dapat mengimplementasikan falsafah “**Brayan Urip**”, maka terdapat tiga asas yang menjadi pegangan, yaitu partisipatif, kolaboratif, dan integratif.

1) Partisipatif

Falsafah “**Brayan Urip**” tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Dalam perspektif ini, pembangunan dilaksanakan dengan didasari oleh adanya kesadaran bersama untuk ikut serta, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta kekayaan yang dimiliki. Keinginan untuk saling memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan

pembangunan menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Kolaboratif

Bentuk implementasi atas asas partisipatif kemudian lebih terarah sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan kolaboratif ini, partisipan telah mengidentifikasi adanya kesamaan karakter dalam melaksanakan ritme dan dinamika pembangunan. Sehingga sinergitas menjadi lebih mudah terbangun dan diharapkan akan lebih efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

3) Integratif

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam falsafah “**Brayan Urip**”, partisipasi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri meskipun dalam rentang waktu yang bersamaan. Tetapi sebaliknya, kolaborasi berbagai sumber daya pembangunan menyatu dalam satu kesatuan sistem. Sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

5.3.3 Semangat

Selain nilai, asas yang dijadikan pegangan, falsafah “**Brayan Urip**” juga diimplementasikan dengan disertai semangat transparansi, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong.

1) Transparan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah akan dapat diwujudkan apabila tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, keterbukaan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan.

2) Akuntabel

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari teknis penghitungan secara ilmiah atas pengerahan berbagai sumber daya. Baik semangat **transparansi** ataupun **akuntabel** pada dasarnya merupakan semangat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga diharapkan, falsafah “**Brayan Urip**” akan dapat dilaksanakan, baik dalam tataran perencanaan ataupun dalam tataran pelaksanaan.

3) Kesetaraan

Falsafah “**Brayan Urip**” didorong juga oleh semangat kesetaraan. Artinya tidak ada perbedaan status sosial, tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak menempatkan Pemerintah dan Masyarakat dalam derajat sosial yang berbeda, tidak membedakan kepangkatan dan golongan, tidak membedakan antara karyawan dengan pengusaha, tidak membedakan juga antara juragan dengan kulinya. Perbedaan hanya pada peran dan fungsi dalam mengemban pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Sehingga, baik hubungan Pemerintah dengan masyarakat ataupun hubungan internal Pemerintah dan Masyarakat, akan terbangun menjadi satu kesatuan tim dalam mewujudkan tujuan visi yang telah ditetapkan.

4) Gotong royong

Semangat gotong royong adalah semangat yang telah melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gotong royong mempunyai makna “berat sama dipikul,

ringan sama dijinjing". Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan dalam memikul beban tanggung jawab. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah maka semangat Gotong Royong dalam falsafah "**Brayan Urip**" ini menempatkan Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam posisi yang sama dalam hal memikul beban tanggung jawab dalam mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021.

Dari pemahaman dan pengamalan terhadap nilai, asas, dan semangat yang menjiwai falsafah "**Brayan Urip**" di atas maka diharapkan akan dapat mewujudkan suatu tatanan sistem Pemerintahan dan juga hubungan Pemerintah dan Masyarakat yang :

1. mampu meminimalisir terjadinya korupsi
2. mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA).
3. memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

5.3.4 Indikator Pelaksanaan Brayan Urip

Penanaman falsafah "**Brayan Urip**" memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan "**Brayan Urip**" yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

5.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2016-2021, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

5.4.1 Misi 1 : Meningkatkan akses dan mutu pendidikan

TUJUAN

- a. Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.

SASARAN

- a. Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.
- b. Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan.
- d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan.
- e. Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.
- f. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.
- g. Meningkatnya prestasi olahraga.
- h. Menurunnya penyalahgunaan narkoba.

5.4.2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

TUJUAN

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- d. Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

SASARAN

- a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan.
- b. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana.
- c. Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- d. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.
- e. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender.
- f. Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- g. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah difable.
- h. Menurunnya Angka Pengangguran.
- i. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- j. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan.
- k. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- l. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.
- m. Meningkatnya profesionalisme ASN.

- n. Meningkatnya pendapatan asli daerah.
- o. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.
- p. meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.
- q. meningkatnya penegakan perda.

5.4.3 Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

TUJUAN

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

SASARAN

- a. Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan.
- b. Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan.
- c. Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM.
- d. Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.
- e. Meningkatnya nilai ekspor perdagangan.
- f. Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi.
- g. Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan.
- h. Meningkatnya sarpras ekonomi.

5.4.4 Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

TUJUAN

- a. Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya.
- b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi.
- d. Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan.
- e. meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman.
- f. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.
- g. Meningkatkan infrastruktur perhubungan dan transportasi.

SASARAN

- a. Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob.
- b. Meningkatnya penanganan bencana.
- c. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
- d. Meningkatnya cakupan layanan irigasi.

- e. Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia).
- f. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan.
- g. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang aman.
- h. Menurunnya luas kawasan kumuh.
- i. Menurunnya tingkat pencemaran sungai.
- j. Menurunnya tingkat kemacetan.

5.4.5 Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

TUJUAN

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

SASARAN

- a. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

5.4.6 Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

TUJUAN

- a. Melestarikan budaya serta menggali potensi seni dan budaya.
- b. Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah.

SASARAN

- a. Meningkatnya pelestarian budaya.
- b. Meningkatnya kunjungan wisata.
- c. Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021**

Visi : “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.	Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Rata-rata partisipasi sekolah	88,74%	88,25%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%
			Harapan melanjutkan pendidikan (Expected Years of Schooling)	11,9	12,13	12,34	12,55	12,77	12,99	13,21	13,21
		Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal	Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14
	Meningkatkan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar berakreditasi A	48,12%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
		Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG	70%	70%	70%	70%	70%	72%	75%	75%
		Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.	Jumlah siswa berprestasi di tingkat Provinsi dan nasional	12	13	14	15	16	17	18	18
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.	Tingkat partisipasi pemuda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
		Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah siswa berprestasi di bidang olah raga tingkat Provinsi dan Nasional	54	55	56	57	58	59	60	60
		Menurunnya penyalahgunaan narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba	25 kasus	20,00%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	60% (menjadi 10 kasus)
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan.	Usia Harapan Hidup	74,09	74,18	74,23	74,27	74,32	74,36	74,41	74,41
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	118	118	115	110	105	102	102	102
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,80	9,80	9,75	9,70	9,65	9,60	9,55	9,55
			Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,5	12,5	12,45	12,4	12,35	12,3	12,25	12,25
			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS	81,5	81,5	82	82	82	82,5	82,5	82,5
			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM	81,5	81,5	82	82	82	82,5	82,5	82,5
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase penurunan angka fertilitas penduduk	2,32	0,86%	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	3,06% (2,25)
			persentase kehamilan pada usia < 19 tahun	2,82%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	1,80%	1,60%	1,60%
	Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	6,95%	13,89%	20,84%	27,79%	34,74%	41,68%	41,68%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
	Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,65	94,68	94,69	94,71	94,72	94,74	94,75	94,75
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,88	64,08	64,18	64,28	64,38	64,48	64,58	64,58
		Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,093%	0,087%	0,081%	0,075%	0,069%	0,064%	0,059%	0,059%
		Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah <i>diffable</i> .	Persentase sarana prasarana pelayanan publik ramah <i>diffable</i> yang dibangun	0	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%	100,00 %	100,00%
	Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,50%
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian kinerja pembangunan	-	85%	90%	93%	94%	95%	96%	96%
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	84,61%	86,50%	87,00%	87,50%	90,00%	92,50%	95,00%	95,00%
		Meningkatnya berbasis teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi SIM dalam tata kelola administrasi perkantoran.	43,33%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
			pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)								
		meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	25%	38%	39%	34%	35%	39%	44%	44%
			persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	C	C	CC	B	B	B	B	B
			Opini BPK terhadap LKD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat maturitas SPIP	Level 0	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
			Level kapabilitas APIP	Level 0	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya profesionalisme ASN	Persentase capaian target peningkatan jumlah penghargaan ASN sebanyak 72 oran	6 orang	14%	28%	44%	61%	81%	100%	100%
			Rasio ASN yang melanggar disiplin tiap 10.000 ASN	33,65	17,74	15,56	13,34	10,93	8,51	5,83	5,83
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	persentase peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 152 Milyar	5,29%	9,70%	9,76%	9,87%	9,96%	10,00%	54,58%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	persentase arsip PD terkelola secara baku	64,71%	67,65%	70,59%	73,53%	76,47%	79,41%	82,35%	82,35%
		meningkatnya penegakan perda	persentase penegakan perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan	Pertumbuhan IKM Batik	861 IKM	1,16%	1,15%	1,14%	1,12%	1,11%	1,10%	6,77%
			Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	0	0	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00 %	100,00%
			Persentase IKM dalam LIK	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan	Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial	0%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	48,72%	57,26%	65,81%	74,36%	82,91%	91,45%	100,00 %	100,00%
		Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)	7,9	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,7
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	17,38	17,73	18,09	18,45	18,82	19,19	19,58	19,58

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
		Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi	Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun	67,37%	72,93%	78,49%	84,05%	89,61%	95,16%	100,00 %	100,00%
		Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan	Rp. 210 Milyar	2%	2%	2%	2%	2%	2%	12%
			Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar	76,36%	89,09%	90,91%	92,73%	94,55%	96,36%	100,00 %	100,00%
		Meningkatnya sarpras ekonomi	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%
			Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	0%	86%	86%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.	Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya	Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	42,43%	41,33%	39,78%	37,57%	36,46%	32,04%	32,04%	32,04%
		Meningkatnya penanganan bencana	Cakupan pelayanan bencana	81,23%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%
	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	79,47%	85,90%	86,10%	86,30%	86,50%	86,70%	86,90%	86,90%
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,98%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%
	Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi	Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Persentase sawah terlayani jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
	Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan.	Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	0,00%	14,29%	42,86%	57,14%	85,71%	100,00%	100,00 %	100,00%
			Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus).	0,00%	7,00%	29,00%	43,00%	71,00%	86,00%	100,00 %	100,00%
	meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Persentase cakupan pelayanan sampah	80,40%	80,40%	80,43%	86,27%	86,28%	93,42%	93,43%	93,43%
		Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang aman	Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk	82,14%	85,12%	88,10%	91,07%	94,05%	97,02%	100,00 %	100,00%
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7,03%	5,28%	4,40%	3,53%	2,65%	1,77%	0,90%	0,90%
	meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Persentase limbah cair industri terolah.	42,59%	43,11%	44,46%	57,23%	60,66%	64,73%	70,06%	70,06%
	Meningkatkan infrastruktur perhubungan dan transportasi	Menurunnya tingkat kemacetan	Volume-Demand-to-Capacity Ratio (VC Rasio)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,52	0,52	0,52
	Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.	cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.	0	10	10	10	10	10	10	60

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR
		Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan	Jumlah pemanfaat aplikasi pasar on-line hasil inisiasi bersama komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan	0	20	20	20	20	20	20	120
Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah	Melestarikan budaya serta menggali potensi seni dan budaya.	meningkatnya pelestarian budaya	Persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,69%	2,69%
			persentase peningkatan penyelenggaraan festival	16	12,50%	18,75%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%	50% (24 event)
		meningkatnya kunjungan wisata	Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun	80,39%	81,82%	86,36%	90,91%	95,45%	97,27%	100,00 %	100,00%
	Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah	Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.	Persentase kenaikan pendaftar ibadah haji	823	3,28%	8,02%	12,27%	16,65%	21,26%	21,51%	21,51%
			Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan program pembangunan, maka penyusunan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 berpedoman dan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional, provinsi, maupun rencana pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan.

6.1 SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN

6.1.1 RPJPD Kota Pekalongan

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah **“Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”**. Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada, profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi dan Teknologi Informasi.
- c. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
- d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- e. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan ketiga (Tahun 2015-2020), diarahkan pada :

1. **Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, melalui:**
 - a). Pengembangan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disertai pembinaan pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama.
 - b). Pengembangan pola toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka peningkatan harmonisasi kehidupan beragama bermasyarakat.
 - c). Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan

budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.

- d). Penguatan Peran kelembagaan seni dan budaya lokal serta penerapannya di masyarakat guna memperkuat identitas karakter masyarakat dan menjaga kelestarian kebudayaan khas pekalongan.
- e). Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.
- f). Pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan hukum daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum di daerah.
- g). Pengembangan pemasyarakatan dan pendidikan HAM serta kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM.
- h). Pengembangan peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait.
- i). Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan baik dan benar melalui pendidikan politik dalam rangka memberikan kontribusi bagi terciptanya proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum dengan memberdayakan lembaga-lembaga politik yang ada.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, dan Partisipatif, melalui:

- a). Pengembangan upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan latihan sehingga aparatur pemerintah dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b). Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
- c). Pengembangan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa didukung penguasaan teknologi dengan memperbaiki *software*, *hardware* dan *brainware*.
- d). Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e). Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung penanganan permasalahan publik.
- f). Pengembangan kualitas proses dan prosedur pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa didukung pengembangan SIM Pengawasan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data umum hasil pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pengawasan pembangunan.

3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, melalui:

- a). Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi didukung peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar internasional.
- b). Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui pengembangan kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan yang lebih baik dan sehat.
- c). Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat pertumbuhan penduduk, serta pengembangan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan.
- d). pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada yang mampu mendukung pengembangan industri dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
- e). Pengembangan aplikasi teknologi telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan transparansi publik.
- f). Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap SWP.
- g). Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat.
- h). Pengembangan pola upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana.
- i). Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam
- j). Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan dan kualitas pelayanan listrik bagi seluruh masyarakat.
- k). Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan.
- l). Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.
- m). Pengembangan masyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi lahan kritis.

4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:

- a). Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang lebih luas serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.
- b). Pengembangan kualitas perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran masyarakat.
- c). Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi kesehatan serta mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- d). Pengembangan kuantitas dan kualitas *surveillance* epidemiologi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
- e). Pengembangan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui pengembangan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- f). Pengembangan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- g). Pengembangan keterampilan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan.
- h). Pengembangan pola pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan partisipasi peserta KB Mandiri dalam penggunaan kontrasepsi.
- i). Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan peningkatan perlindungan anak sebagai aset penentu masa depan bangsa.
- j). Pengembangan kepribadian dan kreatifitas pemuda melalui penguatan kelembagaan kepemudaan yang ada .
- k). Pengembangan kemandirian dan tanggungjawab pemuda dan olah raga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas, melalui:

- a). Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas.
- b). Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam skala nasional maupun internasional.
- c). Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.

- d). Pengembangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan.
- e). Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi.
- f). Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar.
- g). Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
- h). Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat.
- i). Pengembangan promosi daerah pro investasi sehingga dapat menarik investor baik PMA maupun PMDN.
- j). Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah.
- k). Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan pelatihan.

6.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

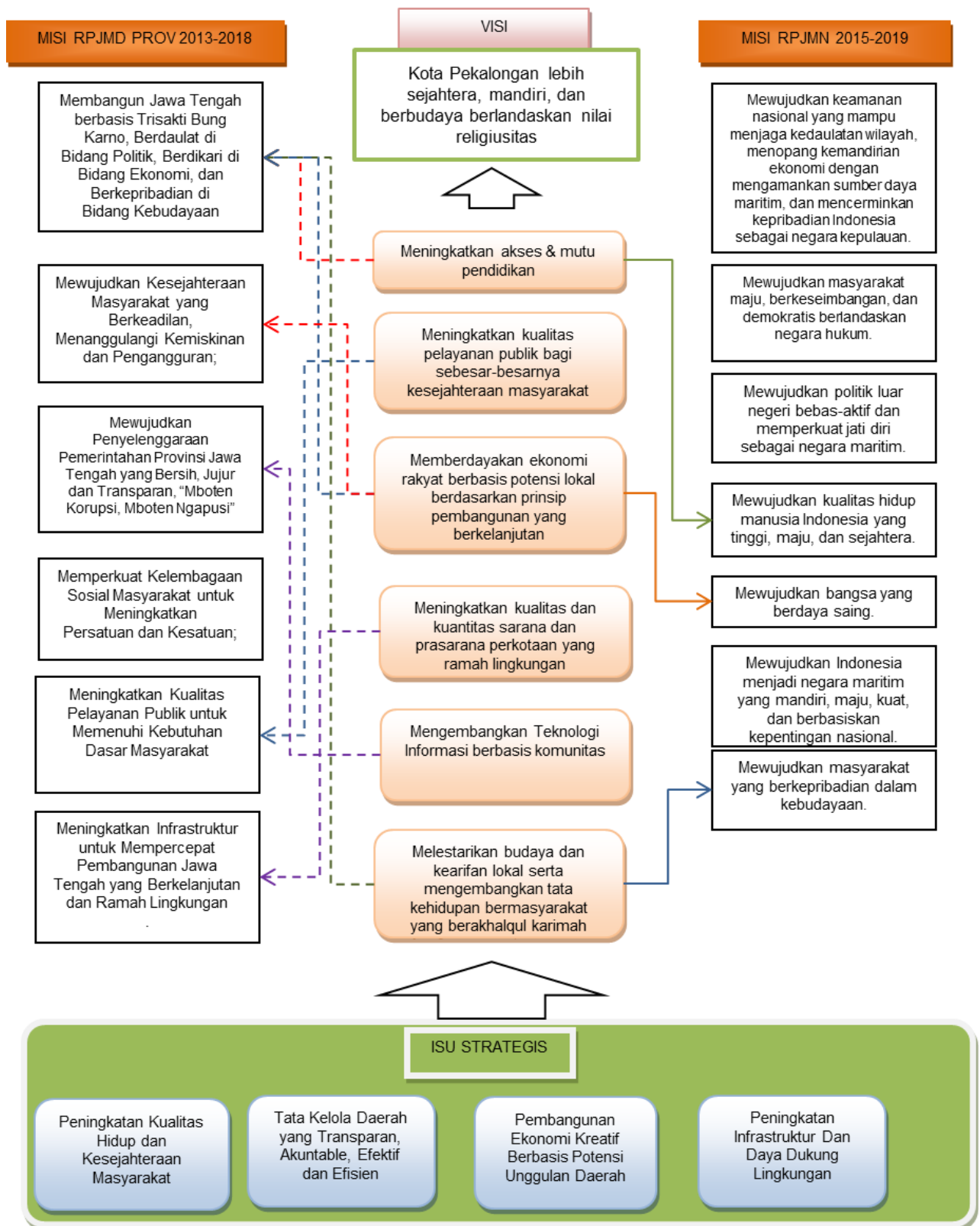
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Visi yang akan diwujudkan pada akhir periode RPJMN Tahun 2019 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dengan misi :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selain itu dalam Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat inventarisasi atas Potensi dan Keunggulan Wilayah dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu potensi sektor pariwisata dan ekonomi nasional berupa industri kreatif di bidang Desain, Fesyen, Kerajinan.

Di dalam RJMN juga telah diinventarisir profil kerawanan dan resiko untuk Kota Pekalongan berupa tanah longsor, kebakaran, banjir. Sedangkan dalam rencana program dan kegiatan strategis Jangka Menengah Nasional berupa : 1) Pembangunan Jalan

Lingkar Pekalongan dan 2) Pembangunan Jaringan Air Baku Petanglong (Tahap I dan Tahap II) Pekalongan. Selain itu, dalam rangka mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa pembangunan 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, Pemerintah Kota Pekalongan merupakan salah satu lokasi pembangunan *techno park* dimaksud, yaitu melalui rencana pembangunan Teknopark Perikanan dan pembangunan Pusat Inovasi Budaya Batik.



Gambar 6.1 Keterkaitan Visi Misi Kota Pekalongan dengan Visi Misi Gubernur Jawa Tengah dan Presiden Republik Indonesia

6.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Sekitar

1. RPJMD Kabupaten Pekalongan

Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016. Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 adalah ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat pada Kearifan Lokal***. Misinya meliputi : 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik; 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan; 3) Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal; 4) Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan; 5) Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah; 6) Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat; serta 7) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Isu strategis Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a). Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2010 mencapai 18,08% atau 151.630 jiwa. Kondisi ini berada diatas rata-rata Jawa Tengah sebesar 16,11%
- b). Derajat kesehatan masyarakat rendah, terlihat dari masih rendahnya rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Jawa Tengah. Usia Harapan Hidup masyarakat pada tahun 2010 adalah 70,28, sedangkan usia harapan hidup Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 71,1 tahun. Indikator lain dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2006 AKI sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2010 menjadi 162 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2006 sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup
- c). Rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan khususnya kondisi jalan dan jembatan. Sampai dengan tahun 2010 jalan rusak berat sebesar 48,45 km dan rusak ringan 162,50 km. Sedangkan jembatan yang rusak sebanyak 5 unit.
- d). Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk dan rendahnya pemerataan pendidikan di tingkat SMA/MA dan SMK. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 sebesar 6,50 tahun meningkat pada tahun 2009 menjadi 6,60 tahun. APK SMA/MA dan SMK pada tahun 2010 hanya sebesar 61,13%, APM SMA/MA dan SMK sebesar 40,95%.
- e). Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur dan responsibilitas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan terutama pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta administrasi kependudukan.
- f). Rendahnya capaian nilai investasi dan kurang optimalnya iklim investasi di Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan investasi dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 nilai investasi sebesar Rp. 1.455.899.022.000,00 menurun pada tahun 2010 sebesar Rp. 990.235.628.000,00

- g). Rendahnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2009 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pekalongan sebesar 56,49 (kategori menengah bawah) dan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2009 sebesar 54,27 (kategori menengah bawah).
- h). Terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat dari belum tertatanya pertambangan khususnya galian C sehingga mengakibatkan banjir pada Sungai Karanganyar pada musim penghujan, dan tingginya pencemaran lingkungan. Terdapat 6 (enam) sungai yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : S. Sragi Lama (Rembun), S. Kapidodo (Kangkung), S. Slempong, S. Mrican, S. Meduri, S. Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas baku mutu yang ditentukan.

Dari visi, misi dan isu strategis tersebut, terdapat kesamaan visi yaitu perwujudan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Untuk visi Kota Pekalongan tidak menggunakan kata bermartabat tetapi menggunakan kata berbudaya serta penambahan frasa berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Sehingga misi yang dipilih pun memiliki kesamaan, yaitu menyangkut peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (melalui pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan), pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan tata kelola daerah, serta pembangunan kebudayaan berbasis kearifan lokal.

Kesamaan visi dan misi tersebut disebabkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan relatif sama. Kesamaan permasalahan/tantangan pembangunan yang masih harus dihadapi tersebut antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lingkungan. Perbedaan permasalahannya secara umum adalah menyangkut kedalaman permasalahannya.

2. RPJMD Kabupaten Batang

Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017. Visi Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien dan Profesional untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Batang. Visinya meliputi 1) Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima; 2) Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat; serta 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Isu strategis Kabupaten Batang meliputi:

1. Perlunya pemerintahan yang bersih-profesional.
2. Penegakan hukum dan ketertiban sosial.
3. Peningkatan realisasi investasi
4. Penguatan pendidikan berkarakter.
5. Kesehatan.
6. Revitalisasi sektor pertanian dan kelautan.
7. Sektor pariwisata dan kebudayaan.
8. Pengembangan infrastruktur.

9. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Dari visi, misi dan isu strategis tersebut, terdapat kesamaan visi yaitu perwujudan masyarakat yang sejahtera. Namun, visi Kabupaten Batang lebih mengedepankan terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional sebagai prasyarat untuk mewujudkan penguatan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Visi Kabupaten Batang mengedepankan substansi tata kelola pemerintahan. Misi pun memiliki kesamaan yaitu menyangkut tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan sumberdaya manusia. Perbedaan misi, Kabupaten Batang memandang pentingnya penciptaan iklim investasi yang baik, sedangkan Kota Pekalongan lebih mengedepankan pengembangan ekonomi kreatif.

Kesamaan visi dan misi tersebut disebabkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan relatif sama, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan. Perbedaan permasalahannya terutama terletak pada isu revitalisasi pertanian dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Batang.

6.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

6.2.1 Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

1. Strategi

- (1). Meningkatkan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat tidak mampu dan anak *difable* baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.
- (2). Penyediaan alokasi anggaran dalam membantu penyelenggaraan pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan dari masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non formal.
- (3). Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan baik berupa gedung, koleksi buku, katalog dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4). Meningkatnya akses membaca.
- (5). Penyediaan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan kebutuhan penduduk usia sekolah.
- (6). Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan.
- (7). Mengembangkan kurikulum Mulok berbasis nilai dan potensi unggulan.
- (8). Peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 melalui pemberian ijin belajar, serta penguatan standar Rekrutmen tenaga pendidik minimal S1/D4.
- (9). Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi.

- (10). Fasilitasi tambahan kesejahteraan khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS sesuai kompetensi dan profesionalisme.
- (11). Mengembangkan pola pembinaan prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.
- (12). Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergitas dengan arah kebijakan pembangunan.
- (13). Meningkatkan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga.
- (14). Melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

2. Arah Kebijakan

- (1). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin.
- (2). Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal mulai dari usia dini disertai dengan perluasan akses sarana dan prasarana melalui peran aktif masyarakat dan komunitas serta kerja sama dengan berbagai pihak.
- (3). Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dengan mengutamakan pada wilayah-wilayah yang kurang sarana dan prasarana pendidikannya.
- (4). Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan.
- (5). Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai dan potensi unggulan dalam upaya membentuk kualitas SDM yang berkarakter dan berkinerja tinggi sebagai basis utama pembangunan Kota Pekalongan.
- (6). Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4.
- (7). Peningkatan kompetensi pendidik.
- (8). Peningkatan kesejahteraan pendidik.
- (9). Mendorong keikutsertaan siswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik di tingkat pusat maupun regional.
- (10). Peningkatan kesempatan kepada pemuda baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (11). Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadai non profesional.
- (12). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

6.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

1. Strategi

- (1). meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

- (2). Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (3). Pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan surveilans.
- (4). Meningkatkan promosi dan kampanye PHBS pada semua tatanan.
- (5). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
- (6). Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar.
- (7). Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN.
- (8). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Balita.
- (9). Menurunkan angka gizi buruk dan kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi dan balita.
- (10). Meningkatkan promosi dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat.
- (11). Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus.
- (12). Meningkatkan pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas.
- (13). Meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan.
- (14). Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan.
- (15). Peningkatan sosialisasi dan advokasi KKBPK.
- (16). Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok-kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja).
- (17). Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (18). Meningkatkan kesejahteraan bagi anak panti asuhan.
- (19). Peningkatan kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan.
- (20). Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- (21). Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
- (22). Peningkatan jumlah rintisan Kampung Layak Anak.
- (23). Peningkatan jumlah rintisan Sekolah Layak Anak.
- (24). Fasilitasi penunjang implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi.
- (25). Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat yang inovatif.
- (26). Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- (27). Peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (28). Meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan pembangunan.

- (29). Menyediakan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan.
- (30). Pelayanan penyediaan dokumen kependudukan secara prima dan tepat waktu.
- (31). Mendekatkan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan.
- (32). Penambahan jam pelayanan.
- (33). Penyediaan Akses pelayanan dokumen kependudukan secara on-line (e-dokument).
- (34). Pemberian sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- (35). Mendorong pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di PD-PD.
- (36). Penguatan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah dan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan saluran komunikasi publik.
- (37). Penguatan kesadaran, kelembagaan, tata kelola, kebijakan, SDM, sistem TIK dan sarana prasarana pendukung penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
- (38). Peningkatan kualitas pengelolaan situs resmi Pemerintah Kota Pekalongan sebagai media keterbukaan informasi publik.
- (39). Penguatan kemampuan perangkat daerah dan lurah, RT/RW dalam mendukung kehumasan dan publikasi kebijakan pembangunan daerah.
- (40). Penguatan aspek infrastruktur (jaringan, datacenter, server), infostruktur (SIM/Aplikasi) dan suprastruktur (regulasi, kelembagaan, kebijakan, SDM, *stakeholder*) pengembangan dan pengelolaan TIK.
- (41). Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi.
- (42). Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik dan kapasitas kelembagaan komunikasi publik LPPL.
- (43). Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (44). Meningkatkan peran kelembagaan LITBANG, baik pada jajaran Pemerintah Kota ataupun melalui kerja sama dengan Lembaga Litbang dan masyarakat
- (45). Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pelaksanaan evaluasi/ *review* di PD
- (46). Membangun e-evaluasi (e-LKjIP).
- (47). Meningkatkan kapasitas penyusun LkjIP.
- (48). Pendampingan dari Kementerian PAN dan RB dalam proses penyusunan LkjIP.
- (49). Menyusun peraturan perundang-perundangan (Perda, Perwal, SOP dan SPM).
- (50). Melaksanakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi secara terintegrasi antara keuangan, BMD dan pendapatan.
- (51). Melaksanakan bintek, sosialisasi secara berkesinambungan.
- (52). Melakukan monitoring dan evaluasi .
- (53). Melakukan *review* rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester.

- (54). Meningkatkan kemampuan dan keahlian APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan evaluasi/*review* akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (55). Penyelenggaraan bintek/diklat tentang *review* LKD secara berkesinambungan.
- (56). Mengoptimalkan sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN.
- (57). Optimalisasi penggunaan hasil uji kompetensi jabatan sebagai alat dalam menganalisis kebutuhan jabatan.
- (58). Memperketat pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- (59). Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (60). Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Pembinaan Infentarisasi dan Penyusunan Data Partisipasi tertib Arsip.
- (61). Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip.
- (62). Meningkatkan kapasitas SDM penegak Peraturan Daerah.

2. Arah Kebijakan

- (1). Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif.
- (2). Menguatkan advokasi KIE tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- (3). Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.
- (4). Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi , pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.
- (5). Meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (6). Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan.
- (7). Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadai bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (8). Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah.
- (9). Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (10). Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan hubungan industrial.

- (11). Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu.
- (12). Peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemohon/masyarakat.
- (13). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- (14). Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan.
- (15). Penguatan ekosistem yang kondusif dan terpadu dalam mendukung pengembangan, penerapan dan pengelolaan TIK.
- (16). Penguatan pengelolaan sistem komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat.
- (17). Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui berbagai saluran komunikasi publik.
- (18). Peningkatan peran lembaga LITBANG sebagai mitra pembangunan.
- (19). Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan.
- (20). Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
- (21). Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terkait dengan: pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah dan pendapatan (PAD).
- (22). Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi (keuangan, BMD dan PAD).
- (23). Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM (Keuangan, BMD dan Pendapatan).
- (24). Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan).
- (25). Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
- (26). Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN.
- (27). Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (28). Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan.
- (29). Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda.

6.2.3 Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

1. Strategi

- (1). Fasilitasi pembinaan Industri Kecil.
- (2). Mempromosikan hasil produksi UMKM Kota Pekalongan melalui event rutin Pekalongan Batik Night Market.
- (3). Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil.
- (4). Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Industri Kecil.

- (5). Peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif potensial.
- (6). Meningkatkan fasilitas akses permodalan bagi UMKM.
- (7). Meningkatkan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro.
- (8). Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha.
- (9). Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.
- (10). Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.
- (11). Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor.
- (12). Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor.
- (13). Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.
- (14). Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan.
- (15). Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan potensi perikanan.
- (16). Meningkatkan potensi perikanan.
- (17). Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standard.
- (18). Pengembangan kawasan industri perikanan, pusat pengembangan teknologi perikanan terpadu di sentra-sentra perikanan melalui klusterisasi usaha perikanan.
- (19). Optimalisasi potensi pendapatan daerah bersumber dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (20). Pemenuhan sarana prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI
- (21). Peningkatan penertiban PK5 melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan PK5 di kawasan-kawasan strategis ekonomi.

2. Arah Kebijakan

- (1). Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil.
- (2). Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
- (3). peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industri.
- (4). Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif.
- (5). Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- (6). Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin.
- (7). Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster.
- (8). Optimalisasi kinerja kelembagaan Koperasi.

- (9). Peningkatan produktivitas Koperasi.
- (10). Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- (11). Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah.
- (12). Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja.
- (13). Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap.
- (14). Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan.
- (15). Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (16). Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020).
- (17). Peningkatan kawasan tertib PK5.

6.2.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

1. Strategi

- (1). Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase.
- (2). Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai.
- (3). meningkatkan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana.
- (4). Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan.
- (5). Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan serta mengembangkan pedestrian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas bagi kaum difabel.
- (6). Penyediaan jaringan irigasi secara memadai bagi terpenuhinya kebutuhan pengairan sawah.
- (7). Membangun / mengembangkan/revitalisasi kawasan strategis dan kawasan bersejarah melalui pembangunan dan penataan fasilitas publiknya.
- (8). Revitalisasi taman - taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan serta pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, difable dan komunitas kreatif serta diupayakan penambahan taman-taman baru.
- (9). Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang.

- (10). Peningkatan ruang terbuka hijau melalui revitalisasi serta penambahan Taman kota dan taman di lingkungan RW.
- (11). Meningkatkan cakupan pelayanan sampah.
- (12). Mendorong penyediaan air baku melalui program SPAM Regional dan sumber-sumber air baku lainnya.
- (13). Mendorong pengelolaan, peningkatan layanan, dan akses masyarakat terhadap air minum.
- (14). meningkatkan pengolahan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi.
- (15). Meningkatkan kualitas RTLH khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- (16). Pemenuhan sarana prasarana sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (17). Meningkatkan kualitas lingkungan air sungai melalui pembangunan IPAL Terpadu dan IPAL skala rumah tangga serta peningkatan peran serta aktif pelaku industri dalam pengolahan limbah yang dihasilkan.
- (18). Penataan dan pemberdayaan Angkutan Umum melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang.
- (19). Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- (20). Mempersiapkan komitmen daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan jalan lingkar Petanglong, mendorong Pemerintah Pusat untuk merealisasi pembangunan fisik serta mendorong Pemerintah Provinsi Jateng untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah.
- (21). Mempersiapkan daerah dalam mengantisipasi pembangunan Jalan TOL Pemalang-Batang melalui pembangunan jalan akses ke jalan tol.(interchange) serta fasilitas pendukung lainnya.

2. Arah Kebijakan

- (1). Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob.
- (2). Peningkatan penanggulangan bencana sejak dini.
- (3). Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi.
- (5). Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah.
- (6). Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.
- (7). Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor.
- (8). Peningkatan ruang terbuka hijau.

- (9). Mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA.
- (10). Meningkatkan ketersediaan air baku dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih.
- (11). Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah.
- (12). Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- (13). Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuaikan kondisi setempat.
- (14). Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri.
- (15). Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik.
- (16). Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi.
- (17). Mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Petanglong.
- (18). Persiapan daerah dalam mengantisipasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang.

6.2.5 Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis Komunitas

1. Strategi

- (1). Pelibatan stakeholder / masyarakat dalam pengembangan SIM/ Aplikasi terkait urusan wajib pelayanan dasar.
- (2). Penguatan potensi-potensi kreatif-Inovatif berbasis TIK berbagai stakeholder/ komunitas.
- (3). Pemberdayaan para pengelola telecenter, LKK dan Karang Taruna untuk dapat memanfaatkan TIK bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat.
- (4). Meningkatkan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.
- (5). Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan TIK masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.

2. Arah Kebijakan

- (1). Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.
- (2). Fasilitasi Pengembangan Potensi Kreativitas dan Inovasi Berbasis TIK.
- (3). Optimalisasi kemampuan pemanfaatan TIK para pengelola telecenter, LKK dan karang taruna.
- (4). Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi untuk mendukung *smart - Creative city*.
- (5). Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk lebih mampu memanfaatkan TI guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.

6.2.6 Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

1. Strategi

- (1). Meningkatkan pengembangan Batik sebagai warisan budaya dalam konteks melestarikan maupun menggunakannya sebagai sumber industri kreatif melalui pembangunan dan pengelolaan PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik).
- (2). Meningkatkan pengembangan kesenian masyarakat melalui pengembangan komunitas/ kelompok, sanggar seni.
- (3). Meningkatkan kualitas event seni budaya bersama antar etnik tingkat lokal regional dan nasional.
- (4). Meningkatkan promosi Destinasi Pariwisata Daerah melalui pengembangan lembaga pariwisata.
- (5). Mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
- (6). Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
- (7). Menjalin kerjasama promosi pariwisata secara selektif untuk memaksimalkan dampak kunjungan.
- (8). Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mempromosikan potensi wisata Kota Pekalongan.
- (9). Meningkatkan kualitas konten promosi pariwisata dengan daya tarik terbaik untuk memaksimalkan dampak kunjungan.
- (10). Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Agama.
- (11). Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan pada anak usia sekolah.

2. Arah Kebijakan

- (1). Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.
- (2). Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat.
- (3). Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/ nasional.
- (4). Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah .
- (5). Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- (6). Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah.
- (7). Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (8). Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
- (9). Peningkatan pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an.
- (10). Peningkatan pembelajaran pendidikan agama.

6.2.7 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2016

Tahun 2016 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, serta dengan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan untuk mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan dan pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan. Pembangunan daerah Tahun 2016 ditujukan untuk **“Pembangunan berkualitas menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar.
- c. Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA).
- d. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Iptek.
- e. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah.
- f. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.
- g. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- h. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

2. Arah Kebijakan Tahun 2017

Pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah, maka pembangunan daerah pada Tahun 2017 ditujukan untuk **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan dan energi serta kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman.
- b. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana rob dan banjir.
- c. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas.
- d. Membuka ruang *check and balance* baik oleh media maupun masyarakat.
- e. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua *stake holder* dalam penyusunan rencana pembangunan, melalui Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kota kreatif dan pengembangan iklim ekonomi kreatif.

3. Arah Kebijakan Tahun 2018

Pembangunan daerah pada Tahun 2018 ditujukan untuk ***“Peningkatan infrastruktur, Kualitas SDM, dan Sistem Inovasi untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.”***, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana.
- b. Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas.
- c. Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal dengan menitikberatkan pada kerajinan, kesenian rakyat.
- d. Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan daerah pada Tahun 2019 ditujukan untuk ***“Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat, Penanaman Pondasi Dasar Kemandirian, Serta Pembangunan Karakter Masyarakat Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”***, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat.
- d. Penguatan kualitas SDM dan penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter dan berkinerja tinggi.
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

5. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan daerah pada Tahun 2020 ditujukan untuk ***“Pemantapan Tingkat Kesejahteraan, Kemandirian Dan Masyarakat Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas”***, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan kesehatan yang memadai.
- c. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- d. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan daya dukung sarana prasarana dasar yang memadai.
- e. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana.

- f. Penguatan kewirausahaan masyarakat disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotong-royongan serta dinamika kehidupan sosial harmonis menuju tatanan masyarakat sipil madani.
- g. Pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta peningkatan kualitas infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi sebagai pendukung utama kemapanan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.
- h. Pemantapan nilai-nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan berkinerja tinggi.

6. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan daerah pada Tahun 2021 ditujukan untuk “**Penguatan Pondasi Keberlanjutan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-Nilai Religiusitas.**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penyiapan tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga dinamika pembangunan berkelanjutan.
- b. Penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi.
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sertai perluasan layanan jaminan kesehatan.
- d. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai pondasi yang kuat pembangunan sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman.
- f. Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana.
- g. Pemantapan pertumbuhan ekonomi disertai dengan upaya pemerataan pendapatan secara memadai.
- h. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Keterkaitan antara Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan pada berikut.

Tabel 6.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan		
Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin	Meningkatkan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat tidak mampu dan anak <i>difable</i> baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.
		Penyediaan alokasi anggaran dalam membantu penyelenggaraan pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan dari masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non formal

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal mulai dari usia dini disertai dengan perluasan akses sarana dan prasarana melalui peran aktif masyarakat dan komunitas serta kerja sama dengan berbagai pihak.	Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan baik berupa gedung, koleksi buku, katalog dan fasilitas pendukung lainnya
		Meningkatnya akses membaca
Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dengan mengutamakan pada wilayah-wilayah yang kurang sarana dan prasarana pendidikannya.	Penyediaan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan kebutuhan penduduk usia sekolah
Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan	Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan.	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan
	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai dan potensi unggulan dalam upaya membentuk kualitas SDM yang berkarakter dan berkinerja tinggi sebagai basis utama pembangunan Kota Pekalongan.	Mengembangkan kurikulum Mulok berbasis nilai dan potensi unggulan
Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4	Peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 melalui pemberian ijin belajar, serta penguatan standar Rekrutmen tenaga pendidik minimal S1/D4
	Peningkatan kompetensi pendidik	Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi
	Peningkatan kesejahteraan pendidik	Fasilitasi tambahan kesejahteraan khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS sesuai kompetensi dan profesionalisme.
Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.	Mendorong keikutsertaan siswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik di tingkat pusat maupun regional	Mengembangkan pola pembinaan prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.	Peningkatan kesempatan kepada pemuda baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergitas dengan arah kebijakan pembangunan.
Meningkatnya prestasi olahraga	Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadai non profesional.	Meningkatkan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga.

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Menurunnya penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba	Melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.		
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif	meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
		Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
		Pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan surveilans
		Meningkatkan promosi dan kampanye PHBS pada semua tatanan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar
		Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Balita.
		Menurunkan angka gizi buruk dan kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi dan balita
		Meningkatkan promosi dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas
		Meningkatnya sistem informasi manajemen kesehatan
		Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Menguatkan advokasi KIE tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peningkatan sosialisasi dan advokasi KKBPK
	Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga	Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok-kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja)

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.	Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan bagi anak panti asuhan
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan	Peningkatan kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender		Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadai bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
		Peningkatan jumlah rintisan Kampung Layak Anak
		Peningkatan jumlah rintisan Sekolah Layak Anak
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah <i>difable</i> .	Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah;	Fasilitasi penunjang implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi
Menurunnya Angka Pengangguran	Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat yang inovatif
		Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan hubungan industrial	peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu	Meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan pembangunan
		Menyediakan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemohon/masyarakat	Pelayanan penyediaan dokumen kependudukan secara prima dan tepat waktu
		Mendekatkan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan
		Penambahan jam pelayanan
		Penyediaan Akses pelayanan dokumen kependudukan secara on-line (e-document).

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Pemberian sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan	Mendorong pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di PD-PD
		Penguatan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah dan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan saluran komunikasi publik.
		Penguatan kesadaran, kelembagaan, tata kelola, kebijakan, SDM, sistem TIK dan sarana prasarana pendukung penerapan Keterbukaan Informasi Publik.
		Peningkatan kualitas pengelolaan situs resmi Pemerintah Kota Pekalongan sebagai media keterbukaan informasi publik
		Penguatan kemampuan perangkat daerah dan lurah, RT/RW dalam mendukung kehumasan dan publikasi kebijakan pembangunan daerah.
	Penguatan ekosistem yang kondusif dan terpadu dalam mendukung pengembangan, penerapan dan pengelolaan TIK	Penguatan aspek infrastruktur (Jaringan, datacenter, server), infostruktur (SIM/Aplikasi) dan suprastruktur (regulasi, kelembagaan, kebijakan, SDM, Stakeholder) pengembangan dan pengelolaan TIK.
	Penguatan pengelolaan sistem komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi.
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui berbagai saluran komunikasi publik.	Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik dan kapasitas kelembagaan komunikasi publik LPPL
meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Peningkatan peran lembaga LITBANG sebagai mitra pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
	Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan	Meningkatkan peran kelembagaan LITBANG, baik pada jajaran Pemerintah Kota ataupun melalui kerja sama dengan Lembaga Litbang dan masyarakat
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pelaksanaan evaluasi/ review di PD
		Membangun e-evaluasi (e-LKjIP)
		Meningkatkan kapasitas penyusun LKjIP

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Pendampingan dari Kementerian PAN dan RB dalam proses penyusunan LKjIP
	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terkait dengan: pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah dan pendapatan (PAD)	Menyusun peraturan perundang-perundangan (Perda, Perwal, SOP dan SPM)
	Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi (keuangan, BMD dan PAD)	Melaksanakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi secara terintegrasi antara keuangan, BMD dan pendapatan
	Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM (Keuangan, BMD dan Pendapatan)	Melaksanakan bintek, sosialisasi secara berkesinambungan
	Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan)	Melakukan monitoring dan evaluasi
		Melakukan review rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester
		Meningkatkan kemampuan dan keahlian APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan evaluasi/review akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
		Penyelenggaraan bintek/diklat tentang review LKD secara berkesinambungan
Meningkatnya profesionalisme ASN	Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN	Mengoptimalkan sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN
		Optimalisasi penggunaan hasil uji kompetensi jabatan sebagai alat dalam menganalisis kebutuhan jabatan
		Memperketat pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan	Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Pembinaan Inventarisasi dan Penyusunan Data Partisipasi tertib Arsip
		Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip
meningkatnya penegakan perda	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda	Meningkatkan kapasitas SDM penegak Peraturan Daerah

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.		
Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil	Fasilitasi pembinaan Industri Kecil
	Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.	Mempromosikan hasil produksi UMKM Kota Pekalongan melalui event rutin Pekalongan Batik Night Market
	peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industri	Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Industri Kecil
Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan	Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif potensial
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM	Meningkatkan fasilitas akses permodalan bagi UMKM
	Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin	Meningkatkan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro
	Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster	Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha
Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi kinerja kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi
	Peningkatan produktivitas Koperasi	Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor
		Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor
Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi	Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah	Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global
	Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja	Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan
Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap	Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan potensi perikanan
		Meningkatkan potensi perikanan
		Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standard

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan	Pengembangan kawasan industri perikanan, pusat pengembangan teknologi perikanan terpadu di sentra-sentra perikanan melalui klusterisasi usaha perikanan
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Optimalisasi potensi pendapatan daerah bersumber dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Meningkatnya sarpras ekonomi	Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020)	Pemenuhan sarana prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI
	Peningkatan kawasan tertib PK5	Peningkatan penertiban PK5 melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan PK5 di kawasan-kawasan strategis ekonomi
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan		
Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob	Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase
Meningkatnya penanganan bencana	Peningkatan penanggulangan bencana sejak dini	Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai
		meningkatkan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan serta mengembangkan pedestrian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas bagi kaum difabel
Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi.	Penyediaan jaringan irigasi secara memadai bagi terpenuhinya kebutuhan pengairan sawah.

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)	Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Membangun / mengembangkan/revitalisasi kawasan strategis dan kawasan bersejarah melalui pembangunan dan penataan fasilitas publiknya.
	Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.	Revitalisasi taman - taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan serta pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, difable dan komunitas kreatif serta diupayakan penambahan taman-taman baru .
	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang
	Peningkatan ruang terbuka hijau	Peningkatan ruang terbuka hijau melalui revitalisasi serta penambahan Taman kota dan taman di lingkungan RW
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah.
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang aman	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Mendorong penyediaan air baku melauai program SPAM Regional dan sumber-sumber air baku lainnya.
		Mendorong pengelolaan, peningkatan layanan, dan akses masyarakat terhadap air minum
Menurunnya luas kawasan kumuh	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah	meningkatkan pengolahan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi.
	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan kualitas RTLH khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
	Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuaikan kondisi setempat.	Pemenuhan sarana prasarana sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri	Meningkatkan kualitas lingkungan air sungai melalui pembangunan IPAL Terpadu dan IPAL skala rumah tangga serta peningkatan peran serta aktif pelaku industri dalam pengolahan limbah yang dihasilkan
Menurunnya tingkat kemacetan	Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik	Penataan dan pemberdayaan Angkutan Umum melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi	Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
	Mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Petanglong	Mempersiapkan komitmen daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan jalan lingkar Petanglong, mendorong Pemerintah Pusat untuk merealisasi pembangunan fisik serta mendorong Pemerintah Provinsi Jateng untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah
	Persiapan daerah dalam mengantisipasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang	Mempersiapkan daerah dalam mengantisipasi pembangunan Jalan TOL Pemalang-Batang melalui pembangunan jalan akses ke jalan tol.(interchange) serta fasilitas pendukung lainnya.
Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.		
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.	Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.	Pelibatan stakeholder / masyarakat dalam pengembangan SIM/ Aplikasi terkait urusan wajib pelayanan dasar.
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Kreativitas dan Inovasi Berbasis TIK	Penguatan potensi-potensi kreatif-Inovatif berbasis TIK berbagai stakeholder/ komunitas.
	Optimalisasi kemampuan pemanfaatan TIK para pengelola telecenter, LKK dan kranang taruna.	Pemberdayaan para pengelola telecenter, LKK dan Karang Taruna untuk dapat memanfaatkan TIK bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat
	Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi untuk mendukung smart - Cretative city.	Meningkatkan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.
Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk lebih mampu memanfaatkan TI guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.	Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan TIK masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah		
meningkatnya pelestarian budaya	Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatkan pengembangan Batik sebagai warisan budaya dalam konteks melestarikan maupun menggunakannya sebagai sumber industri kreatif melalui pembangunan dan pengelolaan PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik)
	Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat	Meningkatkan pengembangan kesenian masyarakat melalui pengembangan komunitas/ kelompok,

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		sanggar seni
	Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/ nasional	Meningkatkan kualitas event seni budaya bersama antar etnik tingkat lokal regional dan nasional
meningkatnya kunjungan wisata	Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata daerah melalui pengembangan lembaga pariwisata
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah
	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah	Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya
	Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menjalin kerjasama promosi pariwisata secara selektif untuk memaksimalkan dampak kunjungan.
		Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mempromosikan potensi wisata Kota Pekalongan.
		Meningkatkan kualitas konten promosi pariwisata dengan daya tarik terbaik untuk memaksimalkan dampak kunjungan.
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Agama
	Peningkatan pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an	Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan pada anak usia sekolah
	Peningkatan pembelajaran pendidikan agama	

6.3 PENGEMBANGAN WILAYAH

6.3.1 Kondisi Pengembangan Wilayah

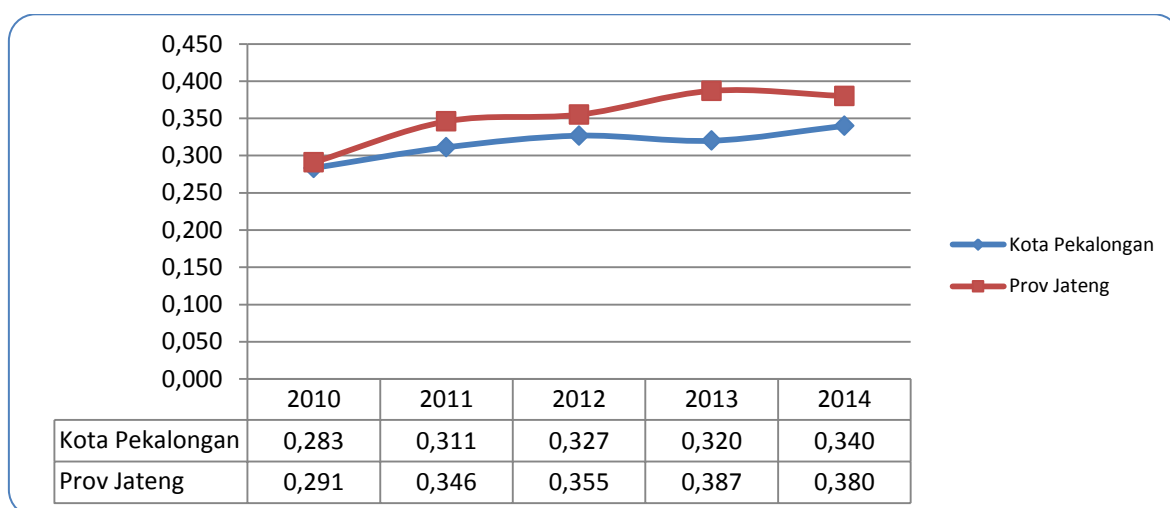
Pengembangan wilayah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Pengembangan wilayah di Kota Pekalongan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2024. Pengembangan wilayah didasarkan atas pusat-pusat pelayanan yang tersebar di wilayah Kota Pekalongan serta dengan mempertimbangkan administratif wilayah. Dengan pengembangan wilayah juga diharapkan dapat terwujud kebijakan, program dan kegiatan yang terpadu, konsisten,

lintas sektor, dengan mempertimbangkan tata ruang. Selain itu diharapkan akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam setiap proses pembangunan daerah.

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini adalah pembangunan sosial ekonomi yang belum memberikan manfaat yang signifikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dapat ditemukenali dengan masih terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat belum dapat meningkat kualitas kehidupan dan kesejahteraannya secara keseluruhan, merata dan berkeadilan.

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28, pada tahun 2011 indeks gini naik menjadi 0,31, kemudian tahun 2012 indeks gini kembali naik menjadi 0,33 serta pada tahun 2013 turun kembali menjadi 0,32. Meskipun pada tahun 2013 menunjukkan kecenderungan yang menurun tetapi secara umum kondisi indeks gini terkini tahun 2013 masih lebih tinggi dibandingkan indeks gini pada tahun 2010. Kondisi ini perlu diwaspadai karena menunjukkan gejala kenaikan indeks gini sehingga menunjukkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Kota Pekalongan.



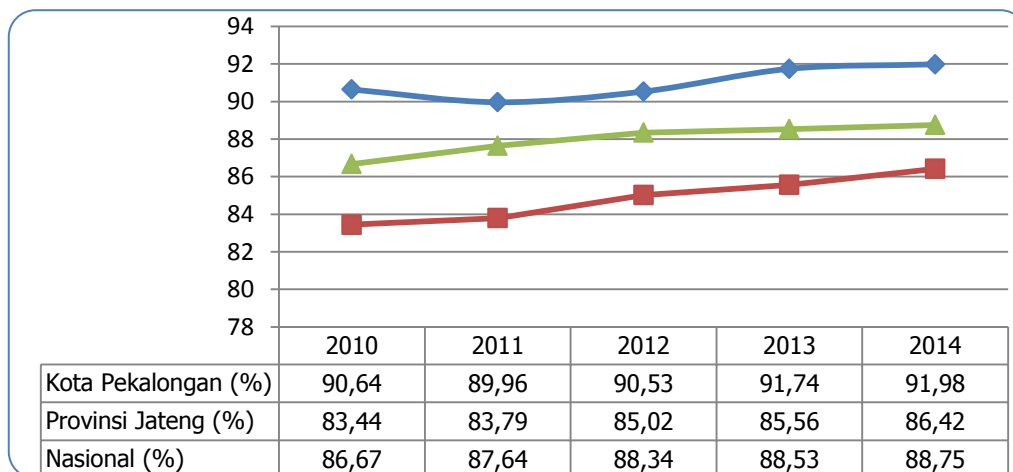
Sumber: BPS Kota Pekalongan

Gambar 6.2 Perkembangan Indkes Gini Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Gambar 6.2. menyajikan perkembangan indeks gini Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014. Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah maka permasalahan kesenjangan di Kota Pekalongan masih relatif lebih ringan karena kecenderungan indeks gini Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan distribusi indeks gini per kabupaten/kota, diketahui indeks gini kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,245 sampai 0,397. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Karanganyar (0,397), Kabupaten Boyolali (0,384) dan Kabupaten Blora (0,380). Sementara Kabupaten Pemalang, Pekalongan dan Pati memiliki Indeks Gini terendah. Jika dibandingkan dengan keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Pekalongan masih memiliki indeks gini yang relatif

baik, namun demikian Pemerintah Kota Pekalongan tetap harus mengelola permasalahan ini dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan pengembangan wilayah.

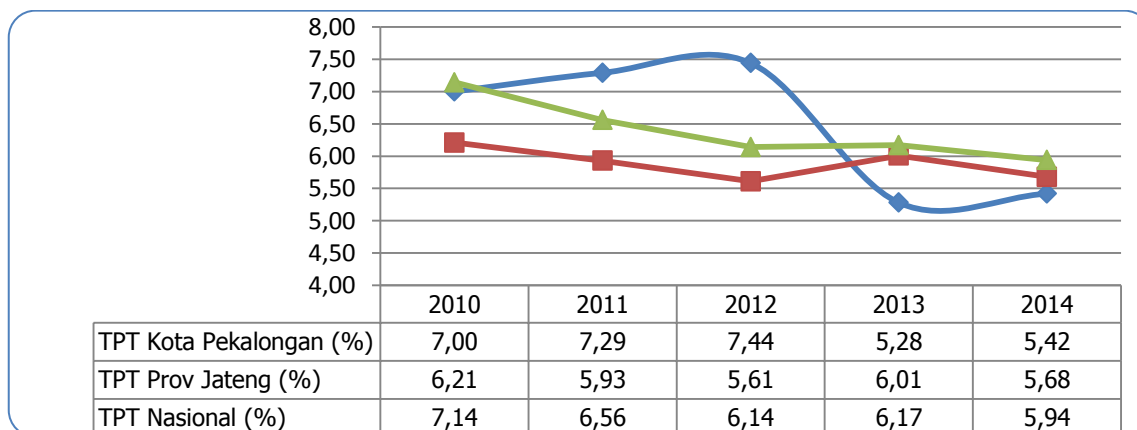
Angka kemiskinan di Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Jika pada tahun 2010 angka kemiskinan 9,36% maka pada tahun 2013 angka kemiskinan terus menurun menjadi 8,3%. Angka kemiskinan di Kota Pekalongan jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah meskipun angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kondisi ini menunjukkan Kota Pekalongan memiliki kondisi yang jauh lebih baik. Gambar 6.3 Indeks Gini Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kota Pekalongan

Gambar 6.3 Angka Kemiskinan Tahun 2010-2014

Sedikit berbeda dengan angka kemiskinan, Kota Pekalongan memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2010 sebesar 7,00% dan pada tahun 2014 sebesar 5,42%. TPT tahun 2014 cukup menurun jika dibandingkan TPT tahun 2010. Namun dengan menurunnya TPT dari tahun 2010 ke tahun 2011 tidak menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun karena sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 menunjukkan kecenderungan kenaikan TPT, meskipun sangat kecil. Kecenderungan kenaikan TPT ini harus dikelola dengan baik dalam kerangka pengembangan wilayah sehingga TPT tidak semakin naik.



Sumber: BPS Kota Pekalongan

Gambar 6.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2014

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2010-2014 menunjukkan angka yang relatif sama. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,51%, tahun 2011 sebesar 5,49%, tahun 2012 sebesar 5,61%, tahun 2013 sebesar 5,91% dan tahun 2014 sebesar 5,48%. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi tersebut dapat diidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pola yang yang tidak sama dengan angka kemiskinan maupun TPT. Kesimpulan yang sangat awal sekali bahwa angka pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang sangat lemah dengan angka kemiskinan maupun TPT.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2014 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah Jasa Perusahaan 11,98%, Informasi dan Komunikasi 10,98% dan Jasa Pendidikan 10,20%. Sedangkan kontribusi lapangan usaha PDRB 2014 terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 22,14%, Industri Pengolahan 21,67% dan Konstruksi 14,91%. Dengan gambaran pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut lapangan usaha tersebut, kita dapat menemukan fakta bahwa lapangan usaha yang memiliki angka pertumbuhan tertinggi tidak mampu mendorong angka pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang relatif kecil. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar memiliki angka pertumbuhan relatif kecil sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Karena sebagian besar tenaga kerja bekerja di lapangan usaha yang memiliki kontribusi PDRB terbesar, padahal lapangan usaha terbesar memiliki angka pertumbuhan yang relatif kecil sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dapat secara signifikan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Namun akibat keterbatasan data yang tersedia maka akan sulit dilakukan penghitungan indeks Williamson Kota Pekalongan. Hal ini disebabkan penyediaan data didasarkan atas unit analisis kabupaten/kota dan tidak tersedia data dengan unit analisis wilayah kecamatan, seperti PDRB per kecamatan. Sehingga data yang tersedia tidak dapat digunakan untuk menghitung indeks Williamson Kota Pekalongan.

Kondisi pembangunan kewilayahan Kota Pekalongan, ditambah dengan kondisi fisik-geografis wilayah Kota Pekalongan, yaitu keterbatasan lahan bagi pengembangan kegiatan budidaya, sebagian lahan yang sudah dipengaruhi rob dan intrusi laut maupun akibat pencemaran lingkungan, berimplikasi terhadap penggunaan lahan dalam bentuk kawasan-kawasan yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Secara geografis wilayah Kota Pekalongan memiliki sifat homogen tetapi akibat kesenjangan sosial-ekonomi (yang ditunjukkan dengan indeks gini) serta faktor fisik-geografis maka mengakibatkan masing-masing kawasan memiliki ciri-ciri atau kekhasan kawasan. Karena di kawasan Utara Kota Pekalongan yang sebagian besar merupakan kawasan terdampak rob/banjir serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian besar berpendapatan menengah ke bawah maka sebaran kawasan kumuh (*slum area*) Kota Pekalongan sebagian besar terdapat di kawasan Utara, yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Berdasarkan penetapan kawasan kumuh Kota Pekalongan tahun 2014 (yang terbaru), sebaran kawasan kumuh adalah:

Tabel 6.2 Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2014

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Pekalongan Barat	Pasir Kraton Kramat Tirto	22,46 3,70
2	Pekalongan Timur	Klego Poncol	2,89 9,21
3	Pekalongan Utara	Kandang Panjang Panjang Baru Bandengan Panjang Wetan Krapyak Padukuhan Kraton Degayu	28,22 40,85 23,92 13,85 11,90 30,84 0,17
4	Pekalongan Selatan	Banyurip Jenggot	6,78 0,80
Jumlah			195,39

Sumber : Perwal Pekalongan Nomor 601/215 Tahun 2014

Dari total keseluruhan kawasan kumuh Kota Pekalongan seluas 195,39 Ha maka sebagian besar kawasan kumuh terletak di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu seluas 149,75 Ha atau 76,56%. Kecamatan Pekalongan Barat memiliki kawasan kumuh seluas 26,16 Ha atau 13,37%, Kecamatan Pekalongan Timur memiliki kawasan kumuh seluas 12,10% atau 6,19% dan Kecamatan Pekalongan Selatan memiliki kawasan kumuh seluas 7,58% atau 3,88%. Kondisi sebaran kawasan kumuh tersebut dapat menggambarkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kota Pekalongan.

Di samping data-data sebaran kawasan kumuh tersebut, dengan melihat data-data sebaran prasarana dan sarana, kita dapat menemukan masih adanya kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kota Pekalongan. Dari data ketersediaan prasarana dan sarana, khususnya sebaran sarana kesehatan maka menunjukkan sebaran yang masih kurang merata di masing-masing kecamatan. Dari data tahun 2014, di wilayah Kota Pekalongan terdapat 9 (sembilan) rumah sakit, 14 (empat belas) Puskesmas, 27 Puskesmas Pembantu dan 14 Puskesmas Keliling. Dari 14 Puskesmas yang ada, 4 Puskesmas merupakan Puskesmas Rawat Inap. Sebaran Puskesmas relatif merata di seluruh wilayah kecamatan. Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur masing-masing terdapat 4 (empat) Puskesmas serta Kecamatan Pekalongan Selatan dan Pekalongan Utara masing-masing terdapat 3 (tiga) Puskesmas. Sebaran sarana kesehatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.3 Sebaran Sarana Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2014

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas
1	Pekalongan Barat	1. RSUD Bendan 2. RS Karomah Holistik 3. RSIA Anugerah	1. Bendan (Rawat Inap) 2. Medono 3. Kramatsari 4. Tirto
2	Pekalongan Timur	1. RS Siti Khadijah 2. RS Bhakti Waluyo 3. RS Aro	1. Sokorejo (Rawat Inap) 2. Noyontaan 3. Tondano 4. Klego

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas
3	Pekalongan Selatan	1. RS HA Djunaid	1. Pekalongan Selatan (Rawat Inap) 2. Jenggot 3. Buaran
4	Pekalongan Utara	1. RS Budi Rahayu 2. RSUD Kraton	1. Kusuma Bangsa (Rawat Inap) 2. Krapyak Kidul 3. Dukuh

Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2014

Sebaran rumah sakit menunjukkan belum merata di seluruh kecamatan karena sebaran rumah sakit cenderung berlokasi di kawasan pusat kota atau kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi yaitu di sekitar jalan pantai Utara Pulau Jawa sehingga sebagian besar rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya berlokasi di Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur. Berdasarkan sebaran tersebut, Kecamatan Pekalongan Utara memiliki luas wilayah yang paling luas dan memiliki jumlah penduduk yang tertinggi kedua setelah Kecamatan Barat, seharusnya masih membutuhkan sarana kesehatan untuk meningkatkan dan pemeratakan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana kesehatan.

Sejalan dengan sebaran sarana kesehatan, kecenderungan pengembangan kawasan budidaya juga berlokasi di kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi, terutama di sepanjang jalan pantai Utara Pulau Jawa. Hal ini pun juga tidak bertentangan dengan RTRW Kota Pekalongan karena kawasan strategis Kota Pekalongan untuk perdagangan dan jasa berlokasi di sepanjang jalan-jalan tersebut. Kondisi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan wilayah agar sebaran prasarana dan sarana tidak terkonsentrasi pada koridor tertentu tetapi dapat lebih terdistribusi merata sehingga masyarakat dapat memiliki aksesibilitas yang sama terhadap prasarana dan sarana kota tersebut.

Masih adanya permasalahan kesenjangan tersebut di atas, juga diikuti dengan kekhasan perkembangan sebaran jumlah penduduk. Kekhasan perkembangan sebaran penduduk di masing-masing kecamatan sangat terkait dengan sebaran ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan budidaya, terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman maupun perdagangan dan jasa. Lahan-lahan yang potensial dimanfaatkan sebagai pengembangan kawasan budidaya tersebut berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Lahan-lahan potensi tersebut merupakan sawah, yang sebagian merupakan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan atau sawah lestari). LP2B tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kota Pekalongan.

Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang sebagian besar merupakan kawasan terdampak rob dan banjir berimplikasi terhadap terciptanya lahan-lahan idle, dari semula lahan sawah kemudian terintrusi air laut sehingga sawah tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan dan kemudian dibiarkan. Bahkan pada kawasan tertentu, beberapa perumahan dan kawasan permukiman sudah ditinggalkan penghuninya akibat terendam rob sehingga rumah dikosongkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka akibat bencana, berdampak terhadap pengembangan kawasan budidaya di wilayah Kota Pekalongan.

Kondisi tersebut di atas tentunya berimplikasi terhadap kekhasan sebaran penduduk di wilayah Kota Pekalongan. Kecenderungan yang ada, tumbuhnya kegiatan budidaya, berupa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta

perdagangan dan jasa di luar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara berimplikasi terhadap pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi di luar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Dari data sebaran jumlah dan kepadatan penduduk, Kecamatan Pekalongan Barat memiliki angka yang tertinggi. Pada tahun 2014 Kecamatan Pekalongan Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 92.063 jiwa atau 31,35% dan juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 9.160 jiwa/Km², tentunya hal ini berbeda jauh dengan kecamatan lainnya.

Tabel 6.4 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Pekalongan Barat	10,05	92.063	9.160
2	Pekalongan Timur	9,52	64.277	6.752
3	Pekalongan Selatan	10,80	58.733	5.438
4	Pekalongan Utara	14,88	78.631	5.284
TOTAL		45,25	293.704	6.491
Tahun 2013		45,25	290.870	6.428
Tahun 2012		45,25	287.978	6.364
Tahun 2011		45,25	285.026	6.298
Tahun 2010		45,25	281.991	6.231

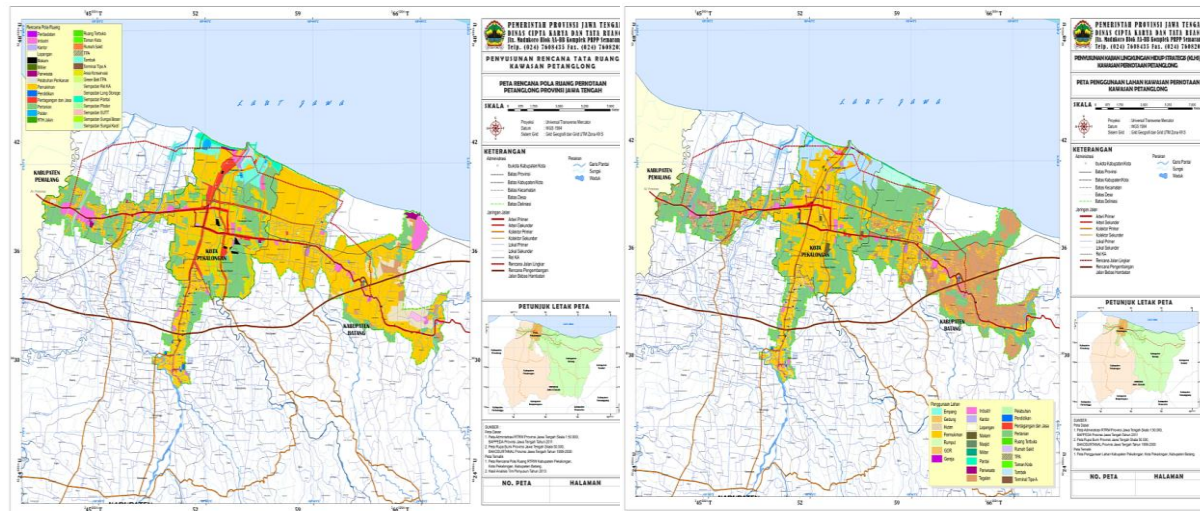
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2015

Kondisi perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta distribusinya di wilayah Kota Pekalongan merupakan gejala umum perkembangan kota yang ada yaitu kecenderungan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kegiatan budidaya lainnya yang saat ini terjadi terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Sehingga jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat akan terus meningkat. Pada sisi yang lain, kecenderungan tersebut tidak terjadi di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara karena wilayah Pekalongan Utara memiliki kondisi geografis yang rentan bencana. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara relatif sudah tidak memiliki daya tarik yang signifikan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman maupun kawasan terbangun lainnya. Selanjutnya, kecenderungan perkembangan kawasan terbangun juga tersebar di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan benang merah arah pengembangan kegiatan budidaya non pertanian berupa kawasan terbangun. Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya hubungan yang kuat antara Kota Pekalongan dengan Daerah sekitarnya dan diwujudkan dengan berkembangnya kawasan terbangun, terutama di sepanjang koridor yang menghubungkan Kota Pekalongan dengan Daerah sekitarnya. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang dan Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan).

Kecenderungan berkembangnya kawasan terbangun tersebut tidak terlepas dari alokasi rencana pola ruang bagi pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman serta perdagangan dan jasa di Kota Pekalongan sendiri maupun di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Bahkan bila lebih dicermati maka

rencana pola ruang LP2B di Kota Pekalongan telah dikelilingi oleh rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pesatnya perkembangan kawasan terbangun ini merupakan penanda perkembangan kota. Hal yang tetap harus diperhatikan adalah aspek keberlanjutan yaitu pertimbangan kelestarian lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung wilayah dapat tetap terjaga.



Sumber : Draft RDTR Kawasan Perkotaan Petanglong

Gambar 6.5 Rencana Pola Ruang dan Penggunaan Lahan Kawasan Petanglong

6.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan

Memperhatikan kondisi yang telah diuraikan di atas maka arah pengembangan wilayah Kota Pekalongan ditujukan terutama untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan maupun antar kecamatan. Konsep, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Pekalongan ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Konsep Pengembangan Wilayah

Guna mendorong pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan dan memperluas pembangunan wilayah maka perlu sebuah kerangka konsep pengembangan wilayah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kota Pekalongan. Selain itu, sangat penting juga untuk diperhatikan kondisi global dimana pembangunan ekonomi daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal seperti globalisasi. Termasuk juga yang menjadi pertimbangan adalah perkembangan serta kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menuntut setiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, namun tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu, seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan antar sektor, antar program, antar pelaku,

dan antar daerah. Konsep pengembangan yang ada di Kota Pekalongan harus menganut pada pilar strategi pengembangan dan pembangunan wilayah Kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2016-2021 serta tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan tahun 2011-2031 maka konsep pengembangan wilayah Kota Pekalongan adalah:

“Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang didukung tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”

Konsep pengembangan wilayah tersebut pada hakekatnya merupakan optimalisasi dari peran pilar-pilar pembangunan utama di wilayah Kota Pekalongan. Pilar-pilar dimaksud meliputi potensi sumberdaya manusia, potensi pengembangan ekonomi kreatif, serta lingkungan hidup.

2. Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah Kota Pekalongan merupakan upaya untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang didukung oleh pemerataan dan keadilan serta tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tujuan pengembangan wilayah meliputi:

- a. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
- b. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
- c. Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya
- d. Mewujudkan kerjasama antar Daerah dalam pengelolaan perkotaan

Sedangkan sasaran dari pengembangan wilayah Kota Pekalongan meliputi:

- a. Tersedianya prasarana dan sarana kota yang memadai dan berkualitas sesuai tingkatan pelayanannya.
- b. Masyarakat memiliki akses yang merata terhadap prasarana dan sarana kota
- c. Pengurangan kawasan terdampak rob dan banjir
- d. Pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga miskin
- e. Berkembangnya kegiatan yang diprakarsai dan dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- f. Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan
- g. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para pelaku kegiatan ekonomi, terutama bagi pekerja
- h. Pengembangan cluster-cluster kegiatan ekonomi
- i. Pengembangan kewirausahaan
- j. Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi
- k. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
- l. Terjaganya minimal 30% ruang sebagai kawasan berfungsi lindung
- m. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- n. Pengendalian pencemaran lingkungan
- o. Peningkatan kerjasama pembangunan prasarana dan sarana perkotaan
- p. Peningkatan kerjasama pengurangan risiko bencana
- q. Peningkatan kerjasama penataan ruang
- r. Peningkatan kerjasama pengendalian pencemaran lingkungan

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan wilayah tersebut maka diharapkan kesenjangan di Kota Pekalongan dapat semakin ditekan. Pengembangan wilayah diharapkan juga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta mendukung terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kota Pekalongan maka dilakukan strategi pengembangan wilayah sebagai berikut:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana kota yang memadai dan berkualitas sesuai tingkatan pelayanannya.
- b. Pemantapan peran dan fungsi pusat pelayanan kota
- c. Pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya di seluruh wilayah secara berimbang
- d. Revitalisasi kawasan Utara Kota Pekalongan
- e. Pengurangan risiko bencana
- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Pengembangan technopark
- h. Peningkatan posisi tawar para pekerja
- i. Dukungan penyediaan teknologi informasi berbasis komunitas
- j. Pengembangan kewirausahaan
- k. Link and match dunia pendidikan dan industri
- l. Pembangunan RTH publik
- m. Pengendalian pemanfaatan ruang
- n. Peningkatan peran masyarakat penataan ruang
- o. Pengendalian pencemaran lingkungan
- p. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- q. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa tengah serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- r. Harmonisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kota Pekalongan maka ditentukan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota
- b. Meningkatkan peran dan fungsi pusat pelayanan kota
- c. Merevitalisasi kawasan Utara Kota Pekalongan
- d. Mengurangi kawasan kumuh dan RTLH
- e. Meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan *idle*.
- f. Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana
- g. Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin
- h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- i. Mengembangkan *technopark*
- j. Meningkatkan jaminan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi pekerja
- k. Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kewirausahaan
- l. Meningkatkan dukungan penyediaan teknologi informasi berbasis komunitas
- m. Meningkatkan link and match dunia pendidikan dan industri
- n. Meningkatkan jumlah RTH publik
- o. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

- p. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang
- q. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- r. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
- s. Meningkatkan ketersediaan instalasi pengolahan limbah komunal
- t. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar Daerah, terutama dalam bidang prasarana dan sarana, penataan ruang, pengurangan risiko bencana serta lingkungan hidup
- u. Meningkatkan harmonisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Secara lebih tersistematis, uraian tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan pengembangan wilayah Kota Pekalongan disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.5 Konsep, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pekalongan

Konsep	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang didukung tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.	Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	1. Tersedianya prasarana dan sarana kota yang memadai dan berkualitas sesuai tingkatan pelayanannya. 2. Masyarakat memiliki akses yang merata terhadap prasarana dan sarana kota 3. Pengurangan kawasan terdampak rob dan banjir 4. Pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga miskin 5. Berkembangnya kegiatan yang diprakarsai dan dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Penyediaan prasarana dan sarana kota yang memadai dan berkualitas sesuai tingkatan pelayanannya. 2. Pemantapan peran dan fungsi pusat pelayanan kota 3. Pengembangan kegiatan budidaya dan non budidaya di seluruh wilayah secara berimbang 4. Revitalisasi kawasan Utara Kota Pekalongan 5. Pengurangan risiko bencana 6. Pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota 2. Meningkatkan peran dan fungsi pusat pelayanan kota 3. Merevitalisasi kawasan Utara Kota Pekalongan 4. Mengurangi kawasan kumuh dan RTLH 5. Meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan idle. 6. Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana 7. Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	1. Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan 2. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para pelaku kegiatan ekonomi, terutama bagi pekerja 3. Pengembangan cluster-cluster kegiatan ekonomi 4. Pengembangan	1. Pengembangan technopark 2. Peningkatan posisi tawar para pekerja 3. Dukungan penyediaan teknologi informasi berbasis komunitas 4. Pengembangan kewirausahaan 5. <i>Link and match</i> dunia pendidikan dan industri	1. Mengembangkan technopark 2. Meningkatkan jaminan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi pekerja 3. Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kewirausahaan 4. Meningkatkan dukungan penyediaan teknologi informasi

Konsep	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kewirausahaan 5. Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi		berbasis komunitas 5. Meningkatkan <i>link and match</i> dunia pendidikan dan industri
	Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya	1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 2. Terjaganya minimal 30% ruang sebagai kawasan berfungsi lindung 3. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Pengendalian pencemaran lingkungan	1. Pembangunan RTH publik 2. Pengendalian pemanfaatan ruang 3. Peningkatan peran masyarakat penataan ruang 4. Pengendalian pencemaran lingkungan 5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	1. Meningkatkan jumlah RTH publik 2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan 6. Meningkatkan ketersediaan instalasi pengolahan limbah komunal
	Mewujudkan kerjasama antar Daerah dalam pengelolaan perkotaan	1. Peningkatan kerjasama pembangunan prasarana dan sarana perkotaan 2. Peningkatan kerjasama pengurangan risiko bencana 3. Peningkatan kerjasama penataan ruang 4. Peningkatan kerjasama pengendalian pencemaran lingkungan	1. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang 2. Harmonisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang	1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, terutama dalam bidang prasarana dan sarana, penataan ruang, pengurangan risiko bencana serta lingkungan hidup 2. Meningkatkan harmonisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Sumber : Hasil Analisis

6.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan konsep, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Pekalongan tersebut, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan maka disusun prioritas atau tema pembangunan kewilayahan di masing-masing kecamatan. Prioritas atau tema pembangunan kewilayahan masing-masing kecamatan ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Uraian prioritas pembangunan kewilayahan masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 6.6 sebagai berikut :

Tabel 6.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kecamatan

No	Kecamatan	Aspek	Prioritas Pembangunan Kewilayahan
1	Pekalongan Barat	Ekonomi	▪ Penguatan industri batik ▪ Penguatan UMKM
		Fisik	▪ Pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ▪ Pengurangan risiko bencana ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang
		Sosial	▪ Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin
		Lingkungan Hidup	▪ Pengendalian pencemaran lingkungan
2	Pekalongan Selatan	Ekonomi	▪ Penguatan industri batik ▪ Penguatan UMKM
		Fisik	▪ Pembangunan interchange jalan toll Pemalang-Batang ▪ Pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang
		Sosial	▪ Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin
		Lingkungan Hidup	▪ Pengendalian pencemaran lingkungan
3	Pekalongan Timur	Ekonomi	▪ Penguatan industri batik ▪ Penguatan UMKM
		Fisik	▪ Pembangunan <i>interchange</i> jalan toll Pemalang-Batang ▪ Pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang
		Sosial	▪ Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin ▪ Pengembangan sarana kesehatan
		Lingkungan Hidup	▪ Pengendalian pencemaran lingkungan
4	Pekalongan Utara	Ekonomi	▪ Penguatan industri batik ▪ Penguatan UMKM ▪ Revitalisasi TPI ▪ Pemanfaatan lahan <i>idle</i>
		Fisik	▪ Pembangunan jalan lingkar Petanglong ▪ Pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ▪ Pengurangan risiko bencana ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang ▪ Pembangunan polder
		Sosial	▪ Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin ▪ Pengembangan sarana kesehatan
		Lingkungan Hidup	▪ Pengembangan mangrove ▪ Pengendalian pencemaran lingkungan

Sumber : Hasil Analisis

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 KEBIJAKAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dari BAB VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang di dalamnya telah diuraikan tentang penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi, maka sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah, diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan, sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan pada : Meningkatkan partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi; Meningkatkan prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik; Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan; Meningkatkan prestasi olahraga; Menurunnya penyalahgunaan narkoba; Meningkatkan Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan; Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender; Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender; Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan; Menurunnya Angka Pengangguran; Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan; Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha UMKM; Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi local; Meningkatkan nilai ekspor perdagangan; Meningkatkan nilai produksi produksi perikanan; Menurunnya luas kawasan terdampak rob; Meningkatkan penanganan bencana; Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; Meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang aman; Menurunnya luas kawasan kumuh; Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan; Meningkatkan pelestarian budaya; Meningkatkan kunjungan wisata; serta Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan pada : Meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan; Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; Meningkatkan profesionalisme ASN; Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan; serta Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan pada : Meningkatkan ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal; Meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan; Meningkatkan Pelayanan

Keluarga Berencana; Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah *difable*; Meningkatnya layanan administrasi kependudukan; Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi; Meningkatnya penegakan perda; Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan; Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi; Meningkatnya sarpras ekonomi; Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan; percepatan pembangunan jalur lingkut utara; Meningkatnya cakupan layanan irigasi; Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia); Meningkatnya cakupan layanan sanitasi; Menurunnya tingkat pencemaran sungai; serta Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.

- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, antara lain diarahkan pada : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan; dan Meningkatnya pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pemilahan 4 (empat) perspektif tersebut, kemudian disusun Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui penyediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penurunan beban biaya pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin.
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan cakupan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya, serta penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS bagi masyarakat PBI.
4. Meringankan beban biaya hidup keluarga miskin pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman dasar (pugar rumah tidak layak huni, akses air bersih, akses sanitasi, persampahan, jalan dan saluran lingkungan), dan juga akses wirausaha berupa pelatihan dan bantuan modal berdasarkan Basis Data Terpadu (*Single Data Based*)
5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta masyarakat *difable* melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan ramah terhadap masyarakat *difable*.
6. Mengurangi pengangguran secara bertahap melalui perluasan lapangan usaha sesuai dengan potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
8. Meningkatkan jumlah industri batik dan perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui pemberdayaan kelompok usaha UMKM, penguatan peran koperasi, pembangunan Lingkungan Industri Kecil,

peningkatan kualitas media promosi, serta peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar nasional.

9. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan akses pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan serta kawasan kumuh perkotaan mulai dari jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penanganan limbah, sampai dengan penyediaan rumah layak huni serta layanan irigasi sebagai pendukung penguatan ketahanan pangan secara nasional.
11. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peran serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
12. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya, peningkatan ragam seni dan budaya, serta pembangunan kawasan strategis perkotaan.
13. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam rangka membentuk perilaku yang baik (akhlaqul karimah) dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan umum tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, baik pada jajaran pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Kota, pelaku usaha, kelompok-kelompok masyarakat, partai politik, dan juga perguruan tinggi, dengan menerapkan nilai-nilai 1) kebersamaan, 2) keadilan, dan 3) proporsional berdasarkan : 1) partisipatif, 2) kolaboratif, dan 3) integratif serta dilandasi dengan semangat : 1) transparan, 2) akuntabel, 3) Kesetaraan, 4) Gotong Royong. Pada akhirnya, implementasi atas nilai, asas dan semangat tersebut, diharapkan akan mampu : 1) meminimalisir terjadinya korupsi; 2) mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA); serta 3) memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN

Mendasari pada strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka dirumuskan 14 (empat belas) Program Pembangunan sebagaijabaran operasional, yaitu :

1. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
2. Program Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
3. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus
6. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan.
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
8. Program Reformasi Birokrasi

9. Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah
10. Program Penanggulangan Bencana
11. Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan
12. Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya
14. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai religiusitas.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat Kota Pekalongan

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 2) Program Pendidikan Menengah
- 3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
- 6) Program Wajar Pendidikan Dasar sembilan tahun

- b. Program Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 3) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

2. Meningkatkan kualitas layanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 2). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3). Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 4). Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 5). Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 7). Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
- 8). Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 9). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- 10). Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 11). Program Keluarga Berencana
 - 12). Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :
- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - 2). Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
- c. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
- Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :
- 1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 3). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus
- Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :
- 1). Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 3). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
- Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :
- 1) Program Perencanaan Pembangunan daerah
 - 2) Program Pengembangan data/informasi/statistik
 - 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - 4) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 5) Program Pengembangan Infrastruktur TIK
 - 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 7) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 9) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 10) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - 11) Program Pengkajian dan Penelitian
 - 12) Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
 - 13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Reformasi Birokrasi
- Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :
- 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
 - 2) Program Pendidikan Kedinasan
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4) Program peningkatan pendapatan daerah
- 5) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 6) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- 7) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah **Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah**.

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- 2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 3) Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
- 4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 5) Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
- 7) Program Pengembangan Ekspor
- 8) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 9) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- 10) Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu
- 11) Program pengembangan perikanan tangkap
- 12) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah :

a. Program Penanggulangan Bencana

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program Pengendalian Banjir
- 2) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

b. Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 3) Program Pemanfaatan Ruang
- 4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 5) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 8) Program Pengembangan Perumahan
- 9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 10) Program peningkatan pelayanan angkutan
- 11) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5. Mengembangkan IT (*Information Technology*) berbasis komunitas

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah **Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas**.

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Program Pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3) Program pengembangan destinasi pariwisata
- 4) Program pengembangan pemasaran pariwisata

- b. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai religiusitas

Adapun program prioritas yang mendukung Program Pembangunan ini adalah :

- 1) Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya, untuk melihat keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kebijakan Umum, Program Pembangunan dan Program Prioritas Kota Pekalongan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan										
Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin	Meningkatkan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat tidak mampu dan anak diffable baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun	102,23%	100,00%	Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui penyediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penurunan beban biaya pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin.	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Program Wajar Pendidikan Dasar sembilan tahun	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	99,89%	100,00%			Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 18 Tahun	64,11%	64,80%			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Penyediaan alokasi anggaran dalam membantu penyelenggaraan pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan dari masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non formal	100%	100%			Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) pendidikan dasar disertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.	1.396	3.200			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan
			Fasilitasi Beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa dari keluarga tidak mampu	86.127	96.462 (naik 12%)					
	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal mulai dari usia dini disertai dengan perluasan akses sarana dan	Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan baik berupa gedung, koleksi buku, katalog dan fasilitas pendukung lainnya	persentase kenaikan kunjungan perpustakaan							

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	prasarana melalui peran aktif masyarakat dan komunitas serta kerja sama dengan berbagai pihak.	Meningkatnya akses membaca	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	0,29	0,33			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dengan mengutamakan pada wilayah-wilayah yang kurang sarana dan prasarana pendidikannya.	Penyediaan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan kebutuhan penduduk usia sekolah	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia sekolah	1,22	1,16			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun	1,12	1,12					
Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan	Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan.	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi A	47,59%	75,00%			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Persentase SMP/MTs berakreditasi A	48,65%	75%					
	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai dan potensi unggulan dalam upaya membentuk kualitas SDM yang berkarakter dan berkinerja tinggi sebagai basis utama pembangunan Kota Pekalongan.	Mengembangkan kurikulum Mulok berbasis nilai dan potensi unggulan	Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan	67%	100%			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualifikasi pendidik minimal S1/D4	Peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 melalui pemberian ijin belajar, serta penguatan	Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1/D4	61,46%	65,00%			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		standar Rekrutmen tenaga pendidik minimal S1/D4	Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal S1/D4	86,96%	90,00%					
			Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1/D4	91,32%	93,00%					
	Peningkatan kompetensi pendidik	Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi	Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	52,71%	57,39%					
	Peningkatan kesejahteraan pendidik	Fasilitasi tambahan kesejahteraan khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS sesuai kompetensi dan profesionalisme.	Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK	33,33%	40,00%					
Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik.	Mendorong keikutsertaan siswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik di tingkat pusat maupun regional	Mengembangkan pola pembinaan prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik	Nilai rata-rata Ujian sekolah SD/MI	6,70	7,00			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
			Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs	7,00	7,30					
			Persentase capaian SPM pendidikan dasar	51,85%	74,07%					
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.	Peningkatan kesempatan kepada pemuda baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergitas dengan arah kebijakan pembangunan.	Persentase organisasi pemuda yang dibina	100%	100%	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.	Program Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya prestasi olahraga	Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadahi non profesional.	Meningkatkan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga.	Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina	13	13			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
Menurunnya penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba	Melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba	Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki satgas pelajar anti narkoba	0%	100%			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase peningkatan peran satgas pelajar anti narkoba	0%	100%			Program upaya pencegahan penyalahgunaa n narkoba		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagikesejahteraan masyarakat.										
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kuallitas dan akses layanan kesehatan'	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif	meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	presentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat	52,00%	53,00%	Meningkatkan kualitas pelayanan dan cakupan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan,	Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Cakupan kelurahan Universal Child Immunication (UCI)	100%	100%			Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan surveilans	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	1,11	<2	peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya, serta penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS bagi masyarakat PBI.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) --> masuk outcome pengendalian penyakit	110,80%	100%					
		Meningkatkan promosi dan kampanye PHBS pada semua tatanan	Cakupan rumah tangga sehat	75,00%	76,00%			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan Posyandu strata mandiri	19,26%	20,25%			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar	Proporsi penduduk dengan akses jamban	92,25%	95,00%			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN	cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	62,81%	70,00%			Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Balita.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,02%	95,00%			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Menurunkan angka gizi buruk dan kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi dan balita	Prevalensi Gizi Buruk	0,13	<0.5			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatkan promosi dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri	7,40%	20,00%			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus	Jumlah Puskesmas layanan 24 jam	4	5			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	Terlaksannya akreditasi puskesmas	0	14			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatnya sistem informasi manajemen kesehatan	persentase jumlah puskesmas yang memanfaatkan aplikasi simkes	100%	100%			Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Presentase ketersediaan obat di puskesmas	97,22%	100%			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Menguatkan advokasi KIE tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peningkatan sosialisasi dan advokasi KKBPK	Angka rata-rata fertilitas penduduk	2,32	2,25			Program Keluarga Berencana	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	PD yang melaksanakan urusan penduduk dan keluarga berencana
	Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga	Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok-kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja)	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus	700 kasus	100%			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	PD yang melaksanakan urusan penduduk dan keluarga berencana
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.	Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	3.666	Meringankan beban biaya hidup keluarga miskin pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman dasar (pugar rumah tidak layak huni, akses air bersih, akses sanitasi, persampahan, jalan dan saluran lingkungan), dan juga akses wirausaha berupa pelatihan dan bantuan modal berdasarkan Basis Data Terpadu (Single Data Based)	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	PD yang melaksanakan urusan Sosial
	Meningkatkan peran serta masy, lembaga masy dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan bagi anak panti asuhan	Persentase panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan	47,92%	75,00%			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Sosial	PD yang melaksanakan urusan Sosial

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh	Peningkatan kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan	persentase pejabat struktural ASN perempuan minimal 30%	41,77%	40,00%	Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta masyarakat diffable melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan ramah terhadap masyarakat diffable.	Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak	PD yang melaksana kan urusan Pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan	Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok	18,52%	100,00%			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak		
Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadai bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100,00%			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
		Peningkatan jumlah rintisan Kampung Layak Anak	Persentase capaian target Rintisan Kampung Layak Anak pada 27 kelurahan	74,07%	100,00%			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak		
		Peningkatan jumlah rintisan Sekolah Layak Anak	Persentase capaian target Rintisan Sekolah Layak Anak sebanyak 57 sekolah	28,07%	100,00%					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik yang ramah diffable.	Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah;	Fasilitasi penunjang implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi	Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi	2,75	2,75			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan Pendidikan
Menurunnya Angka Pengangguran	Penurunan angka pengangguran melalui upaya peningkatan ketrampilan pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat yang inovatif	wirausaha yang mandiri dan produkti	50	350	Mengurangi pengangguran secara bertahap melalui perluasan lapangan usaha sesuai dengan potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.	Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	PD yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan
		Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,32%	69,64%			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	PD yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan
			pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan	937	3.375					
			pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri	86	630					
	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan hubungan industrial	peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50,00%	55,00%			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	PD yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu	Meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan pembangunan	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	68,05%	100%	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Perencanaan	PD yang melaksanakan fungsi perencanaan
		Menyediakan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan	persentase ketersediaan data	100,00%	100%			Program Pengembangan data/informasi/statistik	Statistik	PD yang melaksanakan fungsi statistik
Meningkatnya layanan	Peningkatan penerbitan dokumen	Pelayanan penyediaan dokumen	Cakupan penerbitan KTP	92,63%	100,00%			Program Penataan	Administrasi kependudukan	PD yang melaksanakan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
administrasi kependudukan	administrasi kependudukan dan Catatan Sipil kepada pemohon/masyarakat	kependudukan secara prima dan tepat waktu				kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.		Administrasi Kependudukan	n dan pencatatan sipil	n fungsi Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Mendekatkan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan KK	100,00%	100,00%					
		Penambahan jam pelayanan	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	100,00%	100,00%					
		Penyediaan Akses pelayanan dokumen kependudukan secara on-line (e-document).	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	45,82%	80,00%					
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Pemberian sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan	Mendorong pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di PD-PD	Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	20%	100%			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan informatika	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		Penguatan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah dan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan saluran komunikasi publik.								
		Penguatan kesadaran, kelembagaan, tata kelola, kebijakan, SDM, sistem TIK dan sarana prasarana								

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		pendukung penerapan Keterbukaan Informasi Publik.								
		Peningkatan kualitas pengelolaan situs resmi Pemerintah Kota Pekalongan sebagai media keterbukaan informasi publik								
		Penguatan kemampuan perangkat daerah dan lurah, Rt/RW dalam mendukung kehumasan dan publikasi kebijakan pembangunan daerah.								
	Penguatan ekosistem yang kondusif dan terpadu dalam mendukung pengembangan, penerapan dan pengelolaan TIK	Penguatan aspek infrastruktur (Jaringan, datacenter, server), infostruktur (SIM/Aplikasi) dan suprastruktur (regulasi, kelembagaan, kebijakan, SDM, Stakeholder) pengembangan dan pengelolaan TIK.	persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	58,60%	100,00%			Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Komunikasi dan informatika	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
	Penguatan pengelolaan sistem komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi.	Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL	50,00%	100,00%					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui berbagai saluran komunikasi publik.	Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik dan kapasitas kelembagaan komunikasi publik LPPL	Jumlah jam layanan siaran Televisi lokal per hari	8	10			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan informatika	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Peningkatan peran lembaga LITBANG sebagai mitra pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	1	38			Program Pengkajian dan Penelitian	Penelitian dan Pengembangan	PD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan
	Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan	Meningkatkan peran kelembagaan LITBANG, baik pada jajaran Pemerintah Kota ataupun melalui kerja sama dengan Lembaga Litbang dan masyarakat	Peningkatan jumlah teknopreneur	15	24			Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pelaksanaan evaluasi/ review di PD	Skor Nilai LKjIP	44,89	75,00			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fungsi Lain	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		Membangun e-evaluasi (e-LKjIP)								
		Meningkatkan kapasitas penyusun LKjIP								
		Pendampingan dari Kementerian PAN dan RB dalam proses penyusunan LkjiP								

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terkait dengan: pengelolaan keuangan daerah; barang milik daerah dan pendapatan (PAD)	Menyusun peraturan perundang-perundangan (Perda, Perwal, SOP dan SPM)	Persentase ketersediaan dokumen pendukung penyusunan APBD	100%	100%			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	PD yang melaksanakan fungsi keuangan
	Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi (keuangan, BMD dan PAD)	Melaksanakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi secara terintegrasi antara keuangan, BMD dan pendapatan	Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah	100%	100%			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika
	Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM (Keuangan, BMD dan Pendapatan)	Melaksanakan bintek, sosialisasi secara berkesinambungan	Persentase PD yang memiliki tenaga terampil pengelola SIM	100%	100%			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika
	Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan)	Melakukan monitoring dan evaluasi	Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan	100%	100%			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	PD yang melaksanakan fungsi keuangan
		Melakukan review rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	100%	100%					
	Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan	Meningkatkan kemampuan dan keahlian APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan	Skor Target Kinerja Implementasi SPIP	-	3,50			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Fungsi Lain	PD yang melaksanakan Fungsi Lain

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		evaluasi/review akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan						pelaksanaan kebijakan KDH		
		Penyelenggaraan bintek/diklat tentang review LKD secara berkesinambungan	Skor kapabilitas APIP	-	3,50					
Meningkatnya profesionalisme ASN	Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN	Mengoptimalkan sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN	Persentase ASN penerima penghargaan	0,14%	1,88%		Program Reformasi Birokrasi	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian dan Diklat	PD yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan diklat
			Persentase ASN mengikuti pendidikan kedinasan	0,29%	1,61%			Program Pendidikan Kedinasan		
		Optimalisasi penggunaan hasil uji kompetensi jabatan sebagai alat dalam menganalisis kebutuhan jabatan	persentase keterisian jabatan	87,80%	100,00%			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		
			Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	1.116	7.750			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		Memperketat pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Persentase target ASN tanpa pelanggaran disiplin dan kode etik	14 kasus	86% (2 kasus)			Program pembinaan dan pengembangan aparatur		

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatkan pendapatan asli daerah deng	Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	152,00	256,09			Program peningkatan pendapatan daerah	Keuangan	PD yang melaksanakan fungsi keuangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan	Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Pembinaan Infentarisasi dan Penyusunan Data Partisipasi tertib Arsip	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan	5%	30%			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip	Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan	5%	30%			Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		
meningkatnya penegakan perda	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda	Meningkatkan kapasitas SDM penegak Peraturan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	100%	100%			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Trantibum dan Linmas	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
			Tersedianya produk hukum daerah	13 Perda	108 perda			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fungsi Lain	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
								Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lain	PD yang melaksanakan Fungsi Lain

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.										
Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil	Fasilitasi pembinaan Industri Kecil	Peningkatan Jumlah IKM Batik	861 IKM	921	Meningkatkan jumlah industri batik dan perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui pemberdayaan kelompok usaha UMKM, penguatan peran koperasi, pembangunan Lingkungan Industri Kecil, peningkatan kualitas media promosi, serta peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar nasional.	Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	PD yang melaksanakan urusan Perindustrian
	Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.	Mempromosikan hasil produksi UMKM Kota Pekalongan melalui event rutin Pekalongan Batik Night Market	Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market	0	500			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
	peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana sektor industri	Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Industri Kecil	IKM dalam LIK	0	40			Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri	Perindustrian	PD yang melaksanakan urusan Perindustrian
Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan	Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif potensial	Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk	0	1			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Fungsi Lainnya	PD yang melaksanakan Fungsi Lainnya
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin	Meningkatkan fasilitas akses permodalan bagi UMKM Meningkatkan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro	Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	570	1.170					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB		
	Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan kluster	Penguatan kelembagaan sentra dan kluster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	0	255			Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri	Perindustrian	PD yang melaksanakan urusan Perindustrian		
Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi kinerja kelembagaan Koperasi	Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat	81,11%	100,00%			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UKM	PD yang melaksanakan urusan koperasi dan UKM		
	Peningkatan produktivitas Koperasi	Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM										
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor	Persentase peningkatan ekspor perdagangan	\$ 17,38 Juta	\$19,58 Juta (naik 12%)					Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan
		Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor										
Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi	Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah	Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global	jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)	795,00	1.188,53			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	PD yang melaksanakan urusan penanaman modal		

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Mempermudah perijinan usaha agar menyerap tenaga kerja	Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan								
Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap	Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan potensi perikanan	Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar)	210,00	236,49			Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Perikanan dan Kelautan	PD yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan
		Meningkatkan potensi perikanan								
		Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standard								
	Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki komoditas unggulan	Pengembangan kawasan industri perikanan, pusat pengembangan teknologi perikanan terpadu di sentra-sentra perikanan melalui klusterisasi usaha perikanan	Jumlah tenant hasil pembinaan teknopark perikanan	6	18			Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu	Perikanan dan Kelautan	PD yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Optimalisasi potensi pendapatan daerah bersumber dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. Milyar)	4,2	5,5			Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan	PD yang melaksanakan urusan perikanan dan kelautan
Meningkatnya sarpras ekonomi	Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar (Pasar Burung	Pemenuhan sarana prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	Jumlah pasar berstandar nasional	0	2			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	malam di Sorogenen, Pedagang Pasar Banjarsari, Pasar Terpadu Kuripan, dan Pasar Tiban) dilaksanakan secara bertahap dengan target Pasar Terpadu Kuripan pada tahun 2017, Pasar Banjarsari pada tahun 2018, Pasar burung malam di Sorogenen pada tahun 2019, dan Pasar Tiban pada tahun 2020)									
	Peningkatan kawasan tertib PK5	Peningkatan penertiban PK5 melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan PK5 di kawasan-kawasan strategis ekonomi	Kawasan Tertib Pedagang Kaki Lima	6	7			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Perdagangan	PD yang melaksanakan urusan perdagangan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB		
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.												
Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob	Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase	persentase panjang tebing sungai yang terlindungi	19,70%	29,70%	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan akses pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	Program Pengendalian Banjir	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang		
			Persentase Revetment dalam kondisi baik	98,66%	99,17%							
Meningkatnya penanganan bencana	Peningkatan penanggulangan bencana sejak dini	Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai	persentase korban bencana alam yang ditangani	100%	100%					Program pencegahan dini dan penanggulanga n korban bencana alam	Trantibum dan Linmas	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		meningkatkan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	62,45%	100%					Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Trantibum dan Linmas	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan										
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan baru,	persentase jalan rusak sedang/berat yang ditangani	13,58%	27,96%	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan serta kawasan kumuh	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang		
			persentase jembatan rusak yang ditangani	48,35%	60,30%							

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	melayani warga kota yang berkebutuhan khusus	peningkatan dan pemeliharaan serta mengembangkan pedestrian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas bagi kaum difabel				perkotaan mulai dari jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penanganan limbah, sampai dengan penyediaan rumah layak huni serta layanan irigasi sebagai pendukung penguatan ketahanan pangan secara nasional.				
Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi.	Penyediaan jaringan irigasi secara memadai bagi terpenuhinya kebutuhan pengairan sawah.	persentase irigasi yang dipelihara	100,0%	100,0%			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)	Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Membangun / mengembangkan/revitalisasi kawasan strategis dan kawasan bersejarah melalui pembangunan dan penataan fasilitas publiknya.	Persentase jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarannya	0,0%	100,0%			Program Pemanfaatan Ruang	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
	Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.	Revitalisasi taman - taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan serta pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, difable dan komunitas kreatif serta diupayakan penambahan taman-taman baru.								

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Persentase bangunan yang sesuai dengan peraturan tentang tata ruang	14,0%	20,0%			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
	Peningkatan ruang terbuka hijau	Peningkatan ruang terbuka hijau melalui revitalisasi serta penambahan Taman kota dan taman di lingkungan RW	persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	18,3%	18,9%			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah.	Persentase sampah terangkut ke TPA	69,05%	57%			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang aman	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Mendorong penyediaan air baku melalui program SPAM Regional dan sumber-sumber air baku lainnya.	Jumlah penduduk terlayani air minum yang aman	243.587	312.588			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
		Mendorong pengelolaan, peningkatan layanan, dan akses masyarakat terhadap air minum								

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Menurunnya luas kawasan kumuh	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah	meningkatkan pengolahan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi.	Persentase sampah terkelola di TPS3R	43%	0,43			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan kualitas RTLH khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.500	3.900					
	Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuaikan kondisi setempat.	Pemenuhan sarana prasarana sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase akses sanitasi	90,57%	100,00%			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri	Meningkatkan kualitas lingkungan air sungai melalui pembangunan IPAL Terpadu dan IPAL skala rumah tangga serta peningkatan peran serta aktif pelaku industri dalam pengolahan limbah yang dihasilkan	Persentase capaian target 780 industri mengolah limbahnya	40,43%	100,00%			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya tingkat kemacetan	Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik	Penataan dan pemberdayaan Angkutan Umum melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang	persentase pelayanan angkutan	76,71%	90,41%			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi	Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi	71%	100%			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	PD yang melaksanakan urusan perhubungan
	Mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Petanglong	Mempersiapkan komitmen daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan jalan lingkar Petanglong, mendorong Pemerintah Pusat untuk merealisasi pembangunan fisik serta mendorong Pemerintah Provinsi Jateng untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah	persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG	0,5%	100,0%			Program pembangunan jalan dan jembatan	PU dan Penataan Ruang	PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan ruang
	Persiapan daerah dalam mengantisipasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang	Mempersiapkan daerah dalam mengantisipasi pembangunan Jalan TOL Pemalang-Batang melalui pembangunan jalan akses ke jalan tol.(interchange) serta fasilitas pendukung lainnya.	persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	0,0%	100,0%					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas										
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.	Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.	Pelibatan stakeholder / masyarakat dalam pengembangan SIM/ Aplikasi terkait urusan wajib pelayanan dasar;	Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop	100%	100%	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peran serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.	Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Komunikasi dan informatika	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Kreativitas dan Inovasi Berbasis TIK	Penguatan potensi-potensi kreatif-Inovatif berbasis TIK berbagai stakeholder/ komunitas.								
	Optimalisasi kemampuan pemanfaatan TIK para pengelola telecenter, LKK dan karang taruna.	Pemberdayaan para pengelola telecenter, LKK dan Karang Taruna untuk dapat memanfaatkan TIK bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat								
	Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi untuk mendukung smart - Creative city.	Meningkatkan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.								
Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk lebih mampu memanfaatkan TI guna mendukung kegiatan sosial	Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan TI masyarakat guna mendukung kegiatan	Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk	0%	100%					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
dengan Pemerintah Kota Pekalongan	ekonomi.	sosial ekonomi.	mendukung kegiatan sosial ekonomi,							
Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah										
meningkatnya pelestarian budaya	Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatkan pengembangan Batik sebagai warisan budaya dalam konteks melestarikan maupun menggunakannya sebagai sumber industri kreatif melalui pembangunan dan pengelolaan PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik)	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	5	Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya, peningkatan ragam seni dan budaya, serta pembangunan kawasan strategis perkotaan.	Program Peningkatan dan Pengembangan an Potensi Pariwisata dan Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat	Mningkatkan pengembangan kesenian masyarakat melalui pegembangan komunitas/ kelompok, sanggar seni	Penyelenggaraan festival (pentas) seni dan budaya	16	24			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	PD yang melaksanakan urusan kebudayaan
	Peningkatan kualitas event bersama antar etnik baik dalam kota maupun luar kota/ nasional	Meningkatkan kualitas event seni budaya bersama antar etnik tingkat lokal regional dan nasional								
meningkatnya kunjungan wisata	Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah	Meiningkatkan promosi Destinasi Pariwisata Daerah melalui pengembangan lembaga pariwisata	persentase destinasi wisata yang dikembangkan	100%	100%			Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	PD yang melaksana kan urusan pariwisata
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;	Mengembangkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,								

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB		
		berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah										
	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah	Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya										
	Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menjalin kerjasama promosi pariwisata secara selektif untuk memaksimalkan dampak kunjungan.	Jumlah kunjungan wisata di Kota Pekalongan	442.153	550.000			Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	PD yang melaksanakan urusan pariwisata		
		Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mempromosikan potensi wisata Kota Pekalongan.										
		Meningkatkan kualitas konten promosi pariwisata dengan daya tarik terbaik untuk memaksimalkan dampak kunjungan.										

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN UMUM	PROG PRMBANGUNAN	PROG PRIORITAS	URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah pendaftar ibadah haji	823	1000	Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam rangka membentuk perilaku yang baik (akhlaqul karimah) dalam tata kehidupan bermasyarakat.	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai religiusitas.	Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan	Pendidikan	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
	Peningkatan pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an	Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan pada anak usia sekolah	Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang Berijazah BTQ	96,92%	97,00%					
	Peningkatan pembelajaran pendidikan agama		Persentase pembelajaran pendidikan agama	100%	100%					

Selain program-program yang secara langsung mendukung pencapaian Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 7.1 diatas, beberapa program prioritas yang menunjang pencapaian visi misi dijelaskan dalam Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2 Program Prioritas Menunjang Visi Misi

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan					
Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin	Meningkatkan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat tidak mampu dan anak diffable baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.	Pendidikan	Program pendidikan masyarakat/luar sekolah	
				Program Pendidikan Non Formal	
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	
Meningkatnya prestasi olahraga	Penguatan pola dan sistem pembinaan atlet sejak usia dini dengan melibatkan peran berbagai pihak, peningkatan kualitas sistem kompetisi, pemberian penghargaan yang mampu memacu prestasi, serta ketercukupan sarana dan prasarana olahraga yang memadai non profesional.	Meningkatkan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga.	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	
			Fungsi Lainnya	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.					
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan'	Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan'	Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan	Kesehatan	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	
		Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
		Menurunkan angka gizi buruk dan kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi dan balita		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
		Meningkatkan promosi dan kampanye PHBS pada semua tatanan		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
		Meningkatkan promosi dan kampanye PHBS pada semua tatanan		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Balita.		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas		Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga	Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok-kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program model operasional BKB Posyandu PADU
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.	Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Fungsi Lainnya	Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai serta memperoleh kesempatan mengakses berbagai sumber daya kehidupan	Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan	Meningkatkan kerja sama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, penyediaan fasilitas yang memadai bagi tumbuh kembangnya anak, pemberian advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Sosial	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
			Transmigrasi	Program transmigrasi regional
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu	Meningkatkan ketertiban administrasi perencanaan pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
				Program perencanaan pembangunan daerah
				Program perencanaan pembangunan ekonomi
				Program perencanaan sosial dan budaya

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
			Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				Program Pemberdayaan Masyarakat
		Menyediakan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan	Perencanaan Pembangunan	Program pengembangan data/informasi
				Program Kerjasama Pembangunan
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan	Mendorong pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di PD-PD	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	Peningkatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pelaksanaan evaluasi/ review di PD	Fungsi Lainnya	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
				Koordinasi Bidang Pemerintahan
	Tertib administrasi (Keuangan, BMD dan Pendapatan)	Melakukan monitoring dan evaluasi	Keuangan	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
			Fungsi Lainnya	Program Pemberdayaan jasa konstruksi
		Melakukan review rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	Pertanahan	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Meningkatnya profesionalisme ASN	Peningkatan produktifitas dan profesionalisme ASN	Mengoptimalkan sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN	Kepegawaian dan Diklat	Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
		Memperketat pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Fungsi Lainnya	Program Penataan tata laksana
				Program penataan kelembagaan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan Partisipasi aktif Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Kearsipan	Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip	Kearsipan	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
meningkatnya penegakan perda	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda	Meningkatkan kapasitas SDM penegak Peraturan Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				Program pengembangan wawasan kebangsaan
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
				Program pendidikan politik masyarakat
				Program pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)
			Fungsi Lainnya	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.				
Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil	Fasilitasi pembinaan Industri Kecil	Perindustrian	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
				Program Penataan Struktur Industri
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Mendorong kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM	Meningkatkan fasilitas akses permodalan bagi UMKM	Koperasi dan UKM	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Optimalisasi peningkatan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra dan klaster	Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha	Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
				Pertanian
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
				Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
			Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatnya layanan perijinan usaha atau meningkatnya investasi	Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah	Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global	Penanaman Modal Daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap	Mengembangkan industri pengolahan dengan sistem hulu hilir dengan pengoptimalan potensi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan
				Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
				Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
				Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
				Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
				Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya
				Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pengolahan
				Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan
				Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
				Program Pengembangan Kawasan Pesisir
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.				
Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob	Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir dan rob	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase	PU dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
				Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Mengembangkan dan meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus	PU dan Penataan Ruang	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
			Pertanahan	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)	Penataan kawasan strategis dan kawasan yang bernilai sejarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Membangun / mengembangkan/revitalisasi kawasan strategis dan kawasan bersejarah melalui pembangunan dan penataan fasilitas publiknya.	PU dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
				Program Perencanaan Tata Ruang
Menurunnya luas kawasan kumuh	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan kualitas RTLH khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	PU dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan
	Meningkatkan cakupan layanan pengolahan air limbah domestik dengan pemilihan sistem yang disesuaikan kondisi setempat.	Pemenuhan sarana prasarana sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri	Meningkatkan kualitas lingkungan air sungai melalui pembangunan IPAL Terpadu dan IPAL skala rumah tangga serta peningkatan peran serta aktif pelaku industri dalam pengolahan limbah yang dihasilkan	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Program peningkatan pengendalian polusi
Menurunnya tingkat kemacetan	Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi	Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
				Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perlindungan sebidang
	Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik	Penataan dan pemberdayaan Angkutan Umum melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang	Perhubungan	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.				
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.	Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.	Pelibatan stakeholder / masyarakat dalam pengembangan SIM/ Aplikasi terkait urusan wajib pelayanan dasar;	Komunikasi dan Informatika	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
	Penguatan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi untuk mendukung smart - Creative city.	Meningkatkan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.	Komunikasi dan Informatika	Program kerjasama informasi dengan mas media
Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah				
meningkatkan pelestarian budaya	Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian masyarakat	Meningkatkan pengembangan kesenian masyarakat melalui pengembangan komunitas/ kelompok, sanggar seni	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
				Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
meningkatkan kunjungan wisata	Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah	Meningkatkan promosi Destinasi Pariwisata Daerah melalui pengembangan lembaga pariwisata	Pariwisata	Program pengembangan Kemitraan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

8.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara, Angka Putus Sekolah SD/MI, Persentase lulusan SD/MI, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Angka lulusan SMP/MTs, Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI, Nilai Rata-Rata UN SMP/MTs, Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi, Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar, Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia sekolah, Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun, dan Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) pendidikan dasar disertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

(2). Program Pendidikan Menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 18 Tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Setara, Angka Kelulusan

SMA/SMK/MA, Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA, dan Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA dalam Keadaan Baik.

(3). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pendidik TK berijazah minimal S1/D4, Persentase Pendidik SD/MI berijazah minimal S1/D4, Persentase Pendidik SMP/MTs berijazah minimal S1/D4, Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK, dan Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi

(4). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase SD/MI berakreditasi A, persentase SMP/MTs berakreditasi A, Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi, dan Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan.

(5). Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang Berijazah BTQ, Jumlah pendaftar ibadah haji dan Persentase pembelajaran pendidikan agama.

(6). Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun, dan Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA.

(2). Program Pendidikan Non Formal

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A, Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B, dan Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C, dan Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakreditasi minimal B.

(3). Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase anak jalanan yang dilatih

2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase ketersediaan obat di puskesmas

(2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri, Cakupan penjangkauan siswa SD dan setingkat, dan Cakupan rumah tangga sehat

(3). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan, dan cakupan Posyandu strata mandiri

(4). Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Prevalensi kasus balita gizi buruk, presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Persentase anak SD / MI mendapat makanan tambahan, dan Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

(5). Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase TTU sehat, Proporsi penduduk yang akses jamban, Proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan, Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum, dan Proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan

(6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk, Angka kematian DBD, Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun, Cakupan penemuan pneumonia pada Balita, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+), Cakupan penemuan penderita diare, Prevalensi kasus HIV AIDS, dan Kelurahan UCI (Universal child Immunization)

(7). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM, Terlaksannya akreditasi puskesmas, dan presentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat

(8). Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan, dan Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.

(9). Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar, Jumlah PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus, dan Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam)

(10). Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah puskesmas yang memanfaatkan aplikasi simkes

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan temuan obat berbahaya, Persentase penurunan temuan makanan berbahaya, dan Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian

(2). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan jumlah produksi, dan Persentase peningkatan jumlah varian produk

(3). Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase prasarana pelayanan kesehatan RS

(4). Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan pelayanan kesehatan anak balita, dan Cakupan Kunjungan Bayi

(5). Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pelayanan kesehatan lansia

(6). Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH, Cakupan kunjungan ibu hamil K4, dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

(7). Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator yang akan dicapai yaitu Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit, Tingkat kematian kurang dari 48 jam, Gross death Rate, ALOS (Rata2 lama pasien dirawat), Hasil Survey IKM di RSUD Bendan, Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM, dan Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar)

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pembangunan jalan dan jembatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jalan berkualitas baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik, Persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG, persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol, dan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)

(2). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jaringan irigasi yang dipelihara

(3). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase akses sanitasi, dan Persentase akses air bersih.

(4). Program Pengendalian Banjir

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase panjang tebing sungai yang terlindungi, persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik, dan persentase luas wilayah genangan banjir

(5). Program Pemanfaatan Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB, Jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarannya, dan Persentase lokasi kawasan strategis yang tertata.

(6). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase bangunan yang sesuai dengan peraturan tentang tata ruang

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

(2). Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Indikator yang akan dicapai yaitu panjang tebing sungai yang terlindungi

(3). Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang), dan Persentase jembatan dalam kondisi baik

(4). Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang), dan Persentase jembatan dalam kondisi baik

(5). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase titik lampu yang telah bermeterisasi, dan Persentase pembangunan infrastruktur bersumber dari swadaya swasta/masyarakat

(6). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan sarpras lingkungan permukiman

(7). Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase luas wilayah genangan banjir

(8). Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Persentase pengajuan ijin lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang

(9). Program Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan

Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengembangan Perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan persentase kawasan permukiman kumuh

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan angka kriminalitas (kasus), dan Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan

(2). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM, dan Anggota damkar yang terlatih (bertambahnya anggota damkar)

(3). Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana alam yang ditangani, Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana, Peningkatan layanan sistem informasi kebencanaan, Cakupan pelayanan kejadian bencana, dan Jumlah KK korban bencana yang belum tertangani

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton inti linmas kec dan kel)

(2). Program pengembangan wawasan kebangsaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan kerawanan sosial

(3). Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan kerawanan sosial

(4). Program pendidikan politik masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik

(5). Program pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka kemiskinan, dan Persentase penanganan PMKS

(2). Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan.

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan PMKS

(2). Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PMKS tertangani

(3). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan kesejahteraan sosial, dan Terlaksananya peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam peny kesejahteraan sosial.

(4). Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengangguran yang dilatih

8.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu angka pengangguran, Tenaga siap pakai, dan wirausaha yang mandiri dan produktif

(2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu angka pengangguran, Pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan, Pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri, dan Lowongan kerja yang tersedia

(3). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, Jumlah tenan yang mendapatkan fasilitas, Peningkatan penerapan pengupahan dan tenaga kerja, dan Sarana-sarana industrial yang terbentuk

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan, Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok, Jumlah kasus KDRT yang tertangani, Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak, dan Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak

(2). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender

(3). Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Persentase perempuan anggota DPRD, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%), dan Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengetahuan anak tentang hak anak

(2). Program model operasional BKB Posyandu PADU

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah kader posyandu terampil

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase lokasi urban farming yang aktif, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, Penanganan Daerah rawan pangan (%/tahun), Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi, Indeks capaian konsumsi energi, Indeks capaian Konsumsi protein, dan Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan

4. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah Pemkot

(2). Program penyelesaian konflik-konflik pertanian

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah konflik pertanian yang terselesaikan, dan Persentase jumlah bidang tanah yang bersertifikat

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengangkutan sampah.

(2). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, Persentase pemantauan kualitas air sumur, dan Persentase jumlah limbah cair industri yang terolah

(3). Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH), dan Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa)

(2). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah biopori terbangun

(3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(4). Program peningkatan pengendalian polusi

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sarana dan prasarana pengendalian polusi

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan penerbitan KTP, Cakupan penerbitan KK, Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, dan Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kinerja kelembagaan masyarakat

(2). Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

(3). Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah karang taruna terbina

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Keluarga Berencana

Indikator yang akan dicapai yaitu angka rata-rata fertilitas penduduk

(2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Indikator yang akan dicapai yaitu angka kasus perkawinan dibawah umur 20 tahun, Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus, dan persentase kehamilan pada usia < 19 tahun

9. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi.

(2). Program peningkatan pelayanan angkutan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan angkutan

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi, dan Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

(2). Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi

(3). Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala

(4). Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perlindungan sebidang

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perlindungan sebidang yang lebih representatif

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah jam layanan siaran per hari

(2). Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo

(3). Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik, Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya, dan Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL

(4). Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah integrasi SIM database PD ke center batiknet, Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas, Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK, Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Persentase Perangkat Daerah yang tercakup dalam layanan kehumasan (publikasi, press release & dokumentasi) terkait program prioritas pembangunan, Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik, Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk

mendukung kegiatan sosial ekonomi, Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop, Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal, Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat, dan Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah hasil kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi

(2). Program kerjasama informasi dengan mas media

Indikator yang akan dicapai yaitu PD yang melakukan kerjasama informasi dengan mass media

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat serta Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah UMKM penerima Kredit Usaha Skala Mikro, dan Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan

(2). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu Kenaikan jumlah UMKM, dan Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM

12. Penanaman Modal Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)

(2). Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program peningkatan peran serta kepemudaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Satgas pelajar anti narkoba, dan cakupan pembinaan organisasi kepemudaan.

(2). Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan peran Satgas pelajar anti narkoba.

(3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional, dan Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga, dan Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan data

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya

16. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengembangan Nilai Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan

(2). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan, dan Jumlah pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara lokal/regional/nasional

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan

(2). Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu Lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan

17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan kunjungan perpustakaan, dan Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

18. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah arsip yang diselamatkan, Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan, dan persentase arsip PD terkelola secara baku.

(2). Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah dokumen arsip yang dilestarikan, dan persentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang dilestarikan.

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks kepuasan masyarakat

8.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat pesisir yang dilatih, dan Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar)

(2). Program pengembangan perikanan tangkap

Indikator yang akan dicapai yaitu Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Milyar), dan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. Milyar).

(3). Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah tenant hasil pembinaan teknopark perikanan

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program pengembangan budidaya perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan nilai produksi perikanan budidaya

(2). Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina

(3). Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan angka ikan konsumsi (kg/kpt/tahun), dan Persentase kenaikan hasil olahan ikan

(4). Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan

(5). Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan nilai produksi perikanan tangkap

(6). Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina

(7). Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan

(8). Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan

Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina

(9). Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi

(10). Program Pengembangan Kawasan Pesisir

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan lahan konservasi pantai

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan

(2). Program pengembangan destinasi pariwisata

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase destinasi wisata yang berkembang

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program pengembangan Kemitraan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah wisatawan

3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan pembinaan petani

(2). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah even promosi pertanian/perkebunan yang diikuti

(3). Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan jumlah teknologi yang digunakan

(4). Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan produksi komoditi pertanian, Persentase penggunaan benih unggul dan bermutu, dan terkendalinya serangan hama Organisme pengganggu tanaman (OPT)

(5). Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

(6). Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase hewan kebal terhadap penyakit

(7). Program peningkatan produksi hasil peternakan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan hasil produksi peternakan

(8). Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan nilai produksi peternakan

(9). Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan

4. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pasar berstandar nasional (SNI), Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market serta Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran

(2). Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Indikator yang akan dicapai yaitu Penataan kawasan tertib PK5

(3). Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang, Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar, dan Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK

5. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program pengembangan industri kecil dan menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu pertumbuhan Jumlah IKM Batik

(2). Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah Lingkungan Industri kecil (LIK) yang dibangun, dan Peningkatan IKM difasilitasi dalam LIK

(3). Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah IKM menggunakan Teknologi Tepat Guna

(2). Program Penataan Struktur Industri

Indikator yang akan dicapai yaitu Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah

6. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program transmigrasi regional

Indikator yang akan dicapai yaitu besaran transmigran yang ditempatkan

8.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program perencanaan pembangunan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD, dan Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program pengembangan data/informasi

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan data, dan Single database daerah

(2). Program Kerjasama Pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan

(3). Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah

(4). Program perencanaan pembangunan ekonomi

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi

(5). Program perencanaan sosial dan budaya

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya

(6). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

(7). Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS

2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu, Opini BPK terhadap LKD, Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan, dan Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester

(2). Program peningkatan pendapatan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pendidikan Kedinasan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan

(2). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya, Jumlah ASN mengikuti pembekalan kewirausahaan social, dan Persentase PD yang memiliki tenaga terampil pengelola SIM

(3). Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keterisian jabatan, Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi, dan Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar disiplin dan kode etik

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi

4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program Pengkajian dan Penelitian

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan, dan Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan

(2). Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif, dan Peningkatan jumlah teknopreneur

5. Fungsi Lain

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Mendukung Visi Misi

(1). Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator yang akan dicapai yaitu nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Opini BPK terhadap LKD, dan skor target kinerja implementasi SPIP.

(2). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya produk hukum daerah

(3). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk.

(4). Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya produk hukum daerah

b. Program Prioritas Penunjang Visi Misi

(1). Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.

(2). Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan keluarga

(3). Program Penataan tata laksana

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu

(4). Program penataan kelembagaan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan

(5). Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai

(6). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kerjasama terfasilitasi

(7). Koordinasi Bidang Pemerintahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan yang tertib administrasinya

(8). Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5%

(9). Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan kasus narkoba

(10). Program Pemberdayaan jasa konstruksi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kehadiran aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja.

e. Program Jasa Pelayanan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya untuk komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Hibah (BOS dan Hibah lainnya), Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

**Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pekalongan**

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	PRIORITAS I			423.760		425.184		450.394		477.141		513.517		531.623		2.821.618		
A.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			382.129		380.988		403.458		427.274		460.518		475.275		2.529.642		
	Belanja Pegawai				379.220		374.053		396.496		420.286		445.503		472.233		2.487.789	
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				2.909		2.935		2.962		2.988		3.015		3.042		17.853	
	Pembentukan dana cadangan				0		4.000		4.000		4.000		0		0			
	Belanja Pilkada				0		0		0		0		12.000		0			
A.2.	BELANJA LANGSUNG			41.631		44.196		46.937		49.866		52.999		56.347		291.976		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran			19.784		21.308		22.948		24.715		26.619		28.668		144.043		
	Belanja Jasa Kantor (Listrik Air, Telp dan kawat/faksimili/ internet				19.784		21.308		22.948		24.715		26.619		28.668		144.043	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.543		5.931		6.346		6.790		7.265		7.774		39.648		
	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap				5.543		5.931		6.346		6.790		7.265		7.774		39.648	
	Program LAIN			16.304		16.957		17.642		18.361		19.115		19.905		108.285		
	Belanja obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan				3.598		3.616		3.634		3.652		3.671		3.689		21.860	
	Belanja Premi				12.706		13.341		14.008		14.709		15.444		16.216		86.425	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Asuransi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)																	
B.	PRIORITAS II				475.873		508.696		513.493		510.078		534.375		556.473		3.098.988	
B.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.856		12.152		12.242		12.332		12.422		12.512		66.513	
	1 Bantuan Operasional Penyelenggaraa n PAUD						3.456		3.456		3.456		3.456		3.456		17.280	
	2 FOP SD/MI Swasta				1.419		1.479		1.539		1.599		1.659		1.719			
	3 FOP SMP/MTs Swasta				3.437		3.467		3.497		3.527		3.557		3.587			
	4 Bansos RTLH						3.750		3.750		3.750		3.750		3.750			
B.2.	BELANJA LANGSUNG				471.018		496.544		501.251		497.746		521.954		543.961		3.032.475	
B.2.1	PRIORITAS II Mendukung Visi Misi				272.987		262.637		280.580		238.920		251.926		235.478		1.507.960	
B.2.1.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				163.049		167.143		182.260		139.529		153.837		135.802		941.619	
B.2.1.1.1.	URUSAN PENDIDIKAN				49.433		45.258		48.705		50.684		56.913		56.340		307.332	
	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				19.955		15.701		18.023		19.173		24.843		23.575		121.270	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Setara	107,40	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		b . Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara	88,65	88,70		88,75		88,80		88,85		88,90		89,00		89,00		
		c . Angka Putus Sekolah	0,15	0,14		0,13		0,12		0,11		0,10		0,10		0,10		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SD/MI																
		d . Persentase lulusan SD/MI	100%	100%		100%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		e . Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	102,13%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		f . Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	102,23%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		g . Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	99,89%	99,95%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		h . Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Set ara	104,87	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		i . Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Set ara	74,10	74,25		74,30		74,35		74,40		74,45		74,50		74,50		
		j . Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,35	0,34		0,33		0,32		0,31		0,30		0,30		0,30		
		k . Angka lulusan SMP/MTs	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		l . Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,47	98,47		98,48		98,48		98,49		98,49		98,50		98,50		
		m . Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI	6,70	6,75		6,80		6,85		6,90		6,95		7,00		7,00		
		n . Nilai Rata-Rata UN	7,00	7,05		7,10		7,15		7,20		7,25		7,30		7,30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SMP/MTS o Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi p Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar r Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usia sekolah q Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 Tahun r Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) pendidikan dasar disertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.	5 51,85% 1,22 1,12 100%	5 55,56% 1,21 1,11 100%		5 59,26 % 1,20 1,10 100%		5 62,96 % 1,19 1,11 100%		5 66,67 % 1,18 1,12 100%		5 70,37 % 1,17 1,13 100%		5 74,07 % 1,16 1,12 100%	5 74,07% 1,16 1,12 100%			
	2 Program Pendidikan Menengah				3.688		0		0		0		0		0		3.688	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a Angka Partisipasi Sekolah	64,11%	64,80%														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(APS) 16 - 18 Tahun a . Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /Setara b . Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Setara c . Angka Kelulusan SMA/SMK/MA d . Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA e . Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA dalam Keadaan Baik	92,11% 61,36% 99,93% 1,22% 87,73%	93,00% 61,50% 99,95% 1,00% 88,00%														
	3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				15.936		18.289		19.248		19.770		20.308		20.686		114.234	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1/D4 b . Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal S1/D4 c . Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah	61,46% 86,96% 91,32%	61,46% 86,96% 91,32%		61,46 % 86,96 % 91,32 %		61,46 % 86,96 % 91,32 %		62,00 % 87,96 % 92,00 %		62,00 % 87,96 % 92,00 %		65,00 % 90,00 % 93,00 %		65,00% 90,00% 93,00%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		d . minimal S1/D4 e . Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulan terhadap UMK e . Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi	33,33%	33,33%		33,33 %		33,33 %		40,00 %		40,00 %		40,00 %		40,00%		
			52,71%	53,49%		54,27 %		55,05 %		55,83 %		56,61 %		57,39 %		57,39%		
	4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.565		1.567		1.717		1.717		1.717		1.717		10.000	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . persentase SD/MI berakreditasi A b . persentase SMP/MTs berakreditasi A c . Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi d . Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan e . Persentase informasi pendidikan tersampaikan kepada pengguna layanan	47,59%	50,00%		55,00 %		60,00 %		65,00 %		70,00 %		75,00 %		75,00%		
			48,65%	50,00%		55,00 %		60,00 %		65,00 %		70,00 %		75,00 %		75,00%		
			0	8		16		24		32		40		48		48		
			66,67%	66,67%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan				8.005		9.696		9.708		10.014		10.036		10.352		57.810	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . Persentase Siswa Kelas VI SD/MI yang Berijazah BTQ	96,92%	97,00%		97,00 %		97,00 %		97,00 %		97,00 %		97,00 %		97,00%		
		b . Jumlah pendaftar ibadah haji	823 org	850 org		889 org		924 org		960 org		998 org		1000 org		1000 org		
		c . Persentase pembelajaran pendidikan agama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	6 Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan				284		6		10		10		10		10		330	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	1.396	1.096		3.200		3.200		3.200		3.200		3.200		3.200		
B.2.1.1.2.	URUSAN KESEHATAN				21.169		20.450		23.512		24.616		26.297		27.996		144.040	
	1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				4.080		3.051		4.100		4.500		5.000		5.500		26.231	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Presentase ketersediaan obat di puskesmas	97,22%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat				9.411		8.686		3.953		4.002		4.060		4.094		34.205	PD yang melaksanakan urusan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		kesehatan
		a . Cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri	7,40%	10%		12%		14%		16%		18%		20%		20%		
		b . Cakupan penjangkauan siswa SD dan setingkat	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . Cakupan rumah tangga sehat	75,00%	75,00%		75,20 %		75,40 %		75,60 %		75,80 %		76,00 %		76,00%		
	3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.037		1.642		972		979		979		1.861		7.469	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk proram kesehatan	-	-		-		-		1		1		1		3		
		b . Cakupan Posyandu strata mandiri	19,26%	19,26%		19,50 %		19,50 %		20,00 %		20,00 %		20,25 %		20,25%		
	4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat				3.082		3.175		2.880		2.880		2.880		2.995		17.891	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Prevalensi kasus balita gizi buruk	0,13	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		
		b . presentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	22,30%	25,00%		50,00 %		65,00 %		80,00 %		85,00 %		95,00 %		95,00%		
		c . Persentase anak SD / MI mendapat makanan	belum ada data	5,00%		5,00%		6,00%		6,00%		7,00%		7,00%		7,00%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		d . tambahan Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	-	40,00%		44,00 %		47,00 %		48,00 %		49,00 %		50,00 %		50,00%		
	5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat				146		200		279		306		337		370		1.637	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . persentase TTU sehat	99,63%	99,65%		99,67 %		99,67 %		99,75 %		99,80 %		99,85 %		99,85%		
		b . Proporsi penduduk dengan akses jamban	92,25%	92,50%		93,00 %		93,50 %		94,00 %		94,50 %		95,00 %		95,00%		
		c . Proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan	88,00%	89,00%		90,00 %		91,00 %		92,00 %		93,00 %		94,00 %		94,00%		
		d . Persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum	71,43%	73,00%		75,00 %		77,00 %		79,00 %		81,00 %		84,00 %		84,00%		
		e . Proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan	10,00%	15,00%		18,00 %		22,00 %		26,00 %		30,00 %		36,00 %		36,00%		
	6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				1.181		1.576		1.425		1.135		1.220		1.331		7.868	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	1,11	<2		<2		<2		<2		<2		<2		<2		
		b . Angka	12,12	<2		<2		<2		<2		<2		<2		<2		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. kematian DBD																
		c Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun	1,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
		d Cakupan penemuan pneumonia pada Balita	68,09	<60		<60		<60		<60		<60		<60		<60		
		e Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	110,80	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		f. Cakupan penemuan penderita diare	74,98	<80		<80		<80		<80		<80		<80		<80		
		g Prevalensi kasus HIV AIDS	0,00011	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		
		h Kelurahan UCI (Universal child Immunization)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				502		365		370		370		372		441		2.420	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		b Terlaksannya akreditasi puskesmas	-	5		10		14		14		14		14		14		
	8 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				55		100		110		120		130		140		655	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a . Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	62,81%	64,00%		65,00 %		67,00 %		68,00 %		69,00 %		70,00 %		70,00%		
		c . Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	102.187	113.743		114.763		121.324		121.324		123.364		123.364		123.364		
	9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya				1.630		1.610		9.380		10.200		11.320		11.090		45.230	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Persentase sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Jumlah PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus	1	1		1		2		3		4		5		5		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		c . Jumlah Puskesmas rawat inap (layanan 24 jam)	4	4		4		4		5		5		5		5		
	10 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan				45		45		45		125		0		175		435	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . persentase jumlah puskesmas yang memanfaatkan aplikasi simkes	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.2.1.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				86.189		95.737		103.994		57.418		62.377		42.872		448.587	
	1 Program pembangunan jalan dan jembatan				62.247		44.487		54.184		38.023		46.013		22.570		267.524	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG	0,50%	4,00%		14,00 %		42,00 %		70,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	0,00%	10,00%		40,00 %		80,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . persentase jalan rusak sedang/berat yang ditangani	13,58%	35,11%		39,72 %		1,22%		5,75%		29,18 %		27,96 %		27,96%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		d . persentase jembatan rusak yang ditangani	48,35%	100,00 %		82,16 %		87,49 %		60,62 %		69,08 %		60,30 %		60,30%		
	2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				6.255		7.697		3.300		3.700		1.700		0		22.653	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . persentase jaringan irigasi yang dipelihara	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				5.010		5.118		6.300		7.100		7.100		7.119		37.747	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . Jumlah penduduk terlayani air minum yang aman	243.587	254.690		265.953		276.969		288.828		300.588		312.588		312.588		
	4 Program Pengendalian Banjir				9.352		35.260		37.620		5.095		3.000		10.353		100.678	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . persentase panjang tebing sungai yang terlindungi	19,70%	21,70%		23,70 %		25,70 %		27,70 %		29,70 %		29,70 %		29,70%		
		b . persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi	76,44%	78,44%		80,44 %		82,44 %		84,44 %		86,44 %		86,44 %		86,44%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		baik																
	5 Program Pemanfaatan Ruang				3.325		3.175		2.540		3.440		4.505		2.760		19.745	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB	98,50%	98,50%		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00%		
		b . Jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	0,00%	5,71%		25,71 %		40,00 %		68,57 %		82,86 %		100,00 %		100%		
	6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				0		0		50		60		60		70		240	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase bangunan yang sesuai dengan peraturan tentang tata ruang	14,0%	15,0%		16,0%		17,0%		18,0%		19,0%		20,0%		20,0%		
B.2.2.1.4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.200		50		150		650		1.200		1.200		4.450	
	1 Program Pengembangan Perumahan				1.200		50		150		650		1.200		1.200		4.450	PD yang melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
		a . Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.500	6.400		5.900		5.400		4.900		4.400		3.900		3.900		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b (RTLH) Persentase luasan kawasan kumuh	7,03%	5,28%		4,40%		3,53%		2,65%		1,77%		0,90%		0,90%		
B.2.2.1.5.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.394		4.686		5.037		5.264		6.115		6.420		31.916	
	1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				3.608		3.696		3.727		3.914		4.640		4.845		24.431	PD yang melaksanak an urusan Trantibum dan Linmas
		a persentase penurunan angka kriminalitas (kasus)	241 kasus	229		218		207		196		186		177		177 kasus		
		b Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				486		590		635		700		775		850		4.036	PD yang melaksanak an urusan Trantibum dan Linmas
		a cakupan pelayanan bencana kebakaran	62,45	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		b Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	21,05%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c Anggota damkar yang terlatih (bertambahya anggota	16,67%	12,90%		25,00 %		50,00 %		75,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		damkar)																
	3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				300		400		675		650		700		725		3.450	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . persentase korban bencana alam yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		b . peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana	5	5		6		7		8		9		10		10		
		c . Peningkatan layanan sistem informasi kebencanaan	0	1		1		1		1		1		1		1		
		d . cakupan pelayanan kejadian bencana	belm ada data	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		e . Jumlah KK korban bencana yang belum tertangani	8.250 KK	8.000 KK		7.750 KK		7.500 KK		7.250 KK		7.000 KK		6.750 KK		6.750 KK		
B.2.2.1.5.	URUSAN SOSIAL				664		962		862		897		934		974		5.293	
	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah				156		263		134		141		147		155		996	PD yang melaksanakan urusan sosial

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																		
		b . PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	611		1.222		1.833		2.444		3.055		3.666		3.666			
	2 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				508		700		728		757		787		819		4.298	PD yang melaksanakan an Fungsi Lain	
		a . Persentase panti asuhan yang mendapat bantuan peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan	47,92%	52,08%		50,00 %		55,00 %		60,00 %		70,00 %		75,00 %		75,00%			
B.2.1.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.510	24.357	27.374	28.769	26.745	27.839	154.346								
B.2.1.2.1.	URUSAN KETENAGAKERJAAN				1.516	2.662	2.686	3.531	3.199	3.710	17.302								
	1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				628	1.425	1.827	2.666	2.327	2.827	11.700								PD yang melaksanakan urusan Ketenagake rjaan
		a . Tenaga siap pakai	500	512		528	544	560	576	592	3.312								
		b . wirausaha yang mandiri dan produkti	50	50		50	50	50	50	50	300,00								
	2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja				358	706	430	430	430	435	2.789								PD yang melaksanakan urusan Ketenagake rjaan
		a . pencari kerja dalam negeri yang di	937	450		475	500	600	650	700	3.375								

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b . tempatkan pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri	86	70		80		100		120		125		135		630		
		c . lowongan kerja yang tersedia	1.200	1.200		1.250		1.300		1.400		1.450		1.500		8.100		
		d . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,32%	67,76%		68,17 %		68,53 %		68,89 %		69,26 %		69,64 %		69,64%		
	3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				530		532		429		435		442		448		2.814	PD yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan
		a . persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50,00%	51,00%		52,00 %		53,00 %		54,00 %		54,00 %		55,00 %		55,00%		
		b . jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi	5	5		10		15		20		25		30		105		
		c . peningkatan penerapan pengupahan dan tenaga kerja	122,00	122,00		122,00		122,00		122,00		122,00		122,00		122,00		
		d . sarana-sarana industrial yang terbentuk	7	7		7		7		7		7		7		7		
B.2.1.2.2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				299		1.291		1.350		1.374		1.399		1.005		6.716	
	1 Program				250		250		270		280		290		0		1.340	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																	melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		a . Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	1 keg	1 keg		1 keg		2 keg		2 keg		3 keg		3 keg		3 keg		
		b . Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan sebanyak 27 kelompok	19%	19%		37%		56%		74%		93%		100%		100,00 %		
		c . Persentase kasus KDRT yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		d . Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak	20	24		25		26		27		27		27		27		
		e . Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak	16	17		20		24		35		46		57		57		
	2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				49		80		90		95		100		105		517	PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		a . Persentase penanganan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak																
	3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				0		961		990		999		1.009		900		4.859	PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		a . persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3,55%	3,55%		3,55%		3,55%		3,55%		3,55%		3,55%		3,55%		
		b . persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	0,06%	0,07%		0,80%		1,50%		2,35%		3,00%		3,75%		3,75%		
B.2.1.2.3.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				8.312		6.999		7.735		7.361		4.204		7.618		42.228	
	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				5.633		5.981		5.761		5.702		3.518		6.863		33.457	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		a . Persentase sampah terangkut ke TPA	69%	67%		65%		63%		61%		59%		57%		57%		
		b . Persentase sampah terkelola di TPS3R	31%	33%		35%		37%		39%		41%		43%		43%		
	2 Program Pengendalian Pencemaran				1.280		810		1.771		1.436		453		499		6.249	PD yang melaksanakan urusan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	dan Perusakan Lingkungan Hidup																	Lingkungan Hidup
		a . Persentase kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	40%	40,00%		42,00 %		47,00 %		51,00 %		51,00 %		52,00 %		52,00%		
		b . Persentase pemantauan kualitas air sumur	25%	12,50%		25,00 %		40,00 %		60,00 %		80,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . Persentase capaian target 780 industri mengolah limbahnya	40%	41%		48%		65%		75%		87%		100%		100%		
	3 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				1.399		208		204		224		232		256		2.523	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		a . persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	1,00%	0,10%		0,10%		0,10%		0,10%		0,10%		0,10%		0,60%		
		b . persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	18,30%	18,40%		18,50 %		18,60 %		18,70 %		18,80 %		18,90 %		18,90%		
B.2.1.2.4.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.399		1.053		1.244		1.340		1.495		1.562		8.093	
	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.399		1.053		1.244		1.340		1.495		1.562		8.093	PD yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudu

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		kan dan Pencatatan Sipil
		a . Cakupan penerbitan KTP	92,63%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Cakupan penerbitan KK	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		d . Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	45,82%	46,00%		48,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00%		
B.2.1.2.5.	URUSAN PERHUBUNGAN				465		2.018		3.244		3.317		4.277		894		14.215	
	1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				465		1.840		2.961		3.007		3.959		567		12.798	PD yang melaksanakan urusan Perhubungan
		a . persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi	70,88%	79,05%		83,24 %		87,43 %		91,62 %		95,81 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Pogram peningkatan pelayanan angkutan				0		178		284		310		319		328		1.417	PD yang melaksanakan urusan Perhubungan
		a . persentase pelayanan angkutan	76,71%	76,71%		79,45 %		82,19 %		84,93 %		87,67 %		90,41 %		90,41%		
B.2.1.2.6.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.880		4.865		5.579		5.328		5.203		5.129		30.983	
	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				2.413		2.402		2.920		2.919		2.944		2.920		16.518	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		Informatika
		a . Jumlah jam layanan siaran per hari	Target dalam 5 tahun	8 jam		8 jam		9 jam		9 jam		10 jam		10 jam		10 jam		
	2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				100		100		100		100		100		100		600	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		a . Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo	1.000	200		200		200		200		200		200		2.200		
	3 Program Pengembangan Infrastruktur TIK				645		615		688		688		688		688		4.012	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		a . persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik	58,60%	62,50%		65,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksi-nya.	50,00%	62,50%		65,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan	50,00%	62,50%		65,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL																
	4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				1.721		1.748		1.871		1.621		1.471		1.421		9.852	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		a . Jumlah integrasi SIM database PD ke center batiknet	12	14		16		18		20		22		24		24		
		b . Jumlah aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas	-	2		4		6		8		10		12		12		
		c . Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK	0,00	2		3		4		5		6		7		7		
		d . Persentase Perangkat Daerah yang	0,00	30,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		tercakup dalam layanan kehumasan (publikasi, press release & dokumentasi) terkait program priotas pembangunan ..																
		e . Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik.	0,00	30,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		f. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.	0,00	20,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		g , Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha	0,00	0,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00 %		
		h . Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Wor kshop	0%	0%		60%		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		i. Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal	19,64%	23,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		j. Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		k . Persentase ketersediaan																

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah																
B.2.1.2.7.	URUSAN KOPERASI DAN UKM				211		224		254		271		281		301		1.542	
	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM				211		224		254		271		281		301		1.542	PD yang melaksanakan urusan Koperasi dan UKM
		a . Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat	81%	83,33%		86,67 %		90,00 %		93,33 %		96,67 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.1.2.8.	URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH				146		211		228		245		258		289		1.376	
	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				146		211		228		245		258		289		1.376	PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		a . jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)	795,00	860,59		926,18		991,76		1.057,35		1.122,94		1.188,53		1.188,53		
B.2.1.2.9.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				1.359		1.440		1.133		1.173		1.213		1.253		7.571	
	1 Program peningkatan peran serta kepemudaan				613		626		291		303		315		327		2.474	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan olah raga
		a . Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b . satgas pelajar anti narkoba Persentase organisasi pemuda yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				30		30		31		32		33		34		190	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan olah raga
		a . Persentase peningkatan peran satgas pelajar anti narkoba	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Program Pembinaan dan Pemasarakatn Olah Raga				717		784		811		838		865		892		4.907	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan olah raga
		a . Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	40	41		41		42		42		43		43		252		
		b . Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional	3	3		3		3		4		4		4		21		
		c . Jumlah cabang olah raga pelajar yang terbina	13	13		13		13		13		13		13		13		
B.2.1.2.10.	URUSAN STATISTIK				155		205		205		400		400		400		1.765	
	1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				155		205		205		400		400		400		1.765	PD yang melaksanakan urusan Statistik

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a . persentase ketersediaan data	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.1.2.1 1.	URUSAN KEBUDAYAAN				1.944		2.173		2.386		2.979		3.225		3.943		16.650	
	1 Program Pengembangan Nilai Budaya				505		611		660		725		800		900		4.202	PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan
		a . Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan	4	4		4		4		4		4		5		5		
	2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				1.439		1.562		1.726		2.254		2.425		3.043		12.449	PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan
		a . Lestarnya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan	66,67%	75,00%		79,17 %		83,33 %		87,50 %		91,67 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Jumlah pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara lokal/regional/nasional	16	18		19		20		21		22		24		24		
B.2.1.2.1 2.	URUSAN PERPUSTAKAAN				566		864		954		1.053		1.172		1.295		5.904	
	1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				566		864		954		1.053		1.172		1.295		5.904	PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan
		a persentase		2%		2%		2%		2%		2%		2%		96.462		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. kenaikan kunjungan perpustakaan b Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	86.127 0,29													(naik 12%) 0,33		
B.2.1.2.1 3.	URUSAN KEARSIPAN				260		353		376		400		420		441		2.249	
	1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				251		340		361		384		403		423		2.162	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		a Jumlah arsip yang diselamatkan . b Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan	48.759	51.197 5,00%		53.757 5,00%		56.445 5,00%		59.267 5,00%		62.230 5,00%		65.342 5,00%		65.342 30,00%		
	2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan sarana kearsipan				9		13		14		16		17		17		86	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		a Jumlah dokumen / arsip daerah yang dilestarikan . b Persentase peningkatan arsip yang dilestarikan	77.487	81.361 5,00%		85.429 5,00%		89.701 5,00%		94.186 5,00%		98.895 5,00%		103.840 5,00%		103.840 30,00%		
B.2.1.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.031		15.826		13.904		14.453		14.859		13.852		89.925		
B.2.1.3.1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.450		2.245		4.916		2.395		3.150		2.365		18.521	
	1 Program pemberdayaan ekonomi masvarakat				60		65		60		75		75		75		410	PD yang melaksanakan urusan Kelautan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pesisir																	dan Perikanan
		a . persentase masyarakat pesisir yang dilatih b . Kenaikan nilai produksi perikanan (Rp. Milyar)	jml masy terlatih : 660 orang 210,00	7,58% 214,20		15,15 % 218,48		7,58% 222,85		30,30 % 227,31		37,88 % 231,86		45,45 % 236,49		960 orang Rp. 236,49		
	2 Program pengembangan perikanan tangkap				2.840		2.180		2.356		2.320		3.075		2.290		15.061	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Milyar) b . Pendapatan Daerah bersumber dari TPI (Rp. Milyar)	Rp. 187 Milyar 4,20	190,74 4,90		194,55 5,00		198,45 5,10		202,41 5,20		206,46 5,30		210,59 5,50		210,59 5,50		
	3 Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu				550		0		2.500		0		0		0		3.050	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Jumlah tenant hasil pembinaan teknopark perikanan	6 tenant	10 tenant		10 tenant		18 tenant		18 tenant		18 tenant		18 tenant		18 tenant		
B.2.1.3.2.	URUSAN PARIWISATA				938		1.387		1.389		1.663		1.787		2.911		10.075	
	1 Program pengembangan pemasaran pariwisata				167		170		214		238		262		286		1.337	PD yang melaksanakan urusan Pariwisata

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a . Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan	442.153	450.000		475.000		500.000		525.000		535.000		550.000		550.000		
	2 Program pengembangan destinasi pariwisata				771		1.217		1.175		1.425		1.525		2.625		8.738	PD yang melaksanakan urusan Pariwisata
		a . persentase destinasi wisata yang berkembang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
B.2.1.3.4.	URUSAN PERDAGANGAN				12.147		3.789		6.720		9.280		9.030		7.615		48.580	
	1 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				12.031		3.634		6.365		8.925		8.880		7.460		47.294	PD yang melaksanakan urusan Perdagangan
		a . Jumlah pasar berstandar nasional (SNI)	0	0		0		0		1		2		2		2		
		b . Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market	0	0		100		100		100		100		100		500		
		c . Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	10 UMKM	12		11		11		11		11		11		67		
	2 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				65		65		300		300		95		100		925	PD yang melaksanakan urusan Perdagangan
		a . Kawasan tertib PK5	6	6		6		7		7		7		7		7		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 Program Pengembangan Ekspor				51		90		55		55		55		55		361	PD yang melaksanakan urusan Perdagangan an
	a .	Persentase peningkatan ekspor perdagangan	\$ 17,38 Juta	2%		2%		2%		2%		2%		2%		\$19,58 Juta (naik 12%)		
B.2.1.3.5.	URUSAN PERINDUSTRIAN				497		8.406		879		1.115		892		961		12.748	
	1 Program pengembangan industri kecil dan menengah				74		241		165		274		195		219		1.167	PD yang melaksanakan urusan Perindustria n
		a .	Peningkatan Jumlah IKM Batik	861 IKM	871		881		891		901		911		921		921	
	2 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri				319		8.000		602		729		585		630		10.865	PD yang melaksanakan urusan Perindustria n
		a .	Jumlah Lingkungan Industri kecil (LIK) yang dibangun	0,00	0		0		1		0		0		0		1	
		b .	IKM dalam LIK	0,00	0		0		40		40		40		40		40	
	3 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri				104		165		112		112		112		112		717	PD yang melaksanakan urusan Perindustria n
		a .	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	0	30		35		40		45		50		55		255	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2.1.4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			27.610	28.515	26.344	27.339	28.126	29.375	134.990								
B.2.1.4.1.	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				2.419		1.956		1.720		1.640		1.865		2.165		11.765	
	1 Program perencanaan pembangunan daerah				2.419		1.956		1.720		1.640		1.865		2.165		11.765	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	10	10		9		8		8		9		10		54		
		b . Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan	31	58		31		31		31		31		58		240		
		c . Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	68,05%	100,00 %		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		d . Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	tidak ada data	90,00%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.1.4.2.	URUSAN KEUANGAN				5.244		5.610		5.360		5.440		5.515		5.153		32.320	
	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.985		3.324		2.863		2.821		2.909		2.885		17.787	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang keuangan
		a Ketersediaan																

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. dokumen APBD yang tepat waktu c. Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan d. Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	6 100% 100%	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	6 100% 100%	 	
	2 Program peningkatan pendapatan daerah				2.259		2.286		2.497		2.619		2.606		2.268		14.533	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang keuangan
		a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	152,00	160,04		175,56		192,70		211,72		232,81		256,09		Rp. 256 Milyar		
B.2.1.4.3.	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.584		2.942		3.343		3.568		3.449		3.968		20.854	
	1 Program Pendidikan Kedinasan				76		165		172		179		186		193		971	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
		a. Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan	12 org	15 org		8 org		8 org		8 org		8 org		8 org		67 org		
	2 Program Peningkatan Kapasitas				1.679		1.024		1.512		2.001		1.636		2.146		9.999	PD yang melaksanakan Fungsi

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sumber Daya Aparatur																	Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
		a. Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	1.116	1.150		1.200		1.255		1.315		1.380		1.450		7.750		
		b. Jumlah ASN mengikuti pembekalan kewirausahaan sosial	-	35		46		42		46		58		35		262		
		c. Persentase PD yang memiliki tenaga terampil pengelola SIM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Program pembinaan dan pengembangan aparatur				1.829		1.752		1.659		1.389		1.627		1.628		9.884	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
		a. persentase keterisian jabatan	87,80%	94,20%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi	6 org	10 org		-		10 org		10 org		10 org		10 org		50 org		
		c. Jumlah sanksi yang diberikan	14 orang	7		56		43		29		14		10		159		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		kepada ASN yang melanggar disiplin dan kode etik																
B.2.1.4.4.	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.202		1.278		1.635		1.778		1.881		1.963		9.736	
	1 Program Pengkajian dan Penelitian				574		574		876		961		1.014		1.038		5.036	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan
		a . Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	1	3		4		4		6		9		11		38		
	2 Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah				628		704		759		817		867		925		4.700	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan
		a . Peningkatan jumlah teknopreuner	15 teknopreuner	16		18		19		21		22		24		24 teknopreuner		
B.2.1.4.5.	FUNGSI LAINNYA				15.161		16.731		14.287		14.913		15.416		16.127		92.635	
	PENGAWASAN				2.056		1.968		2.105		2.072		2.089		2.107		12.397	
	1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				2.056		1.968		2.105		2.072		2.089		2.107		12.397	PD yang melaksanakan Fungsi Lain

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a . Skor Target Kinerja Implementasi SPIP	0,00	1,50		1,75		2,25		2,75		3,00		3,50		3,50		
		b . Skor kapabilitas APIP	0,00	1,50		1,75		2,25		2,75		3,00		3,50		3,50		
	KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				2.624		2.698		512		512		523		523		7.391	
	1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.624		2.698		512		512		523		523		7.391	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Tersedianya produk hukum daerah	13 Perda	18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		108 perda		
	KOORDINASI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESRA				145		1.118		265		400		321		412			
	1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				145		1.118		265		400		321		412		2.661	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	570	670		770		870		970		1.070		1.170		1.170 UMKM		
		a . Lembaga Ekonomi Kreatif yang terbentuk	-	-		1		-		-		-		-		1		
	PENDAMPINGAN LEGISLATIF				10.336		10.947		11.405		11.929		12.484		13.086		70.186	
	1 Program peningkatan kapasitas				10.336		10.947		11.405		11.929		12.484		13.086		70.186	PD yang melaksanakan Fungsi

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	lembaga perwakilan rakyat daerah																	Lain
		a Tersedianya produk hukum daerah	13 Perda	18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		18 Perda		108 perda		
B.2.1.5.	PENUNJANG PROGRAM PEMERINTAHAN				43.786		26.797		30.697		28.829		28.361		28.610		187.080	
	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.870		24.213		28.114		26.246		25.778		26.027		171.249	Semua Organisasi PD
	2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.916		2.583		2.583		2.583		2.583		2.583		15.831	Semua Organisasi PD
B.2.2	PRIORITAS II PENUNJANG VISI MISI				198.031		233.907		220.672		258.826		270.027		308.483		1.489.947	
B.2.2.1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				135.217		169.267		163.991		199.171		216.784		254.741		1.139.171	
B.2.2.1.1.	URUSAN PENDIDIKAN				2.126		2.234		1.415		1.456		1.515		1.417		10.164	
	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.492		1.775		829		864		917		959		6.834	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun	49,32%	49,50%		50,00 %		50,50 %		51,00 %		51,50 %		52,00 %		52,00%		
		b Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA	86,16%	86,25%		86,35 %		86,45 %		86,55 %		86,65 %		86,75 %		86,75%		
	2 Program Pendidikan Non Formal				609		459		587		593		599		459		3.305	PD yang melaksanakan urusan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		pendidikan
		a . Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	89,19%	90,25%		91,10 %		92,00 %		92,80 %		93,50 %		94,00 %		94,00%		
		b . Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	81,40%	82,40%		83,50 %		83,80 %		84,00 %		84,50 %		85,00 %		85,00%		
		c . Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C	95,16%	96,25%		96,70 %		97,35 %		97,65 %		97,80 %		98,00 %		98,00%		
		d . Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakreditasi minimal B	16,67%	16,67%		23,33 %		30,00 %		36,67 %		40,00 %		43,33 %		43,33%		
	3 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah				25		0		0		0		0		0		25	PD yang melaksanakan urusan pendidikan
		a . persentase anak jalanan yang dilatih	5,91%	5,91%		pindah prog		pindah prog		pindah prog		pindah prog		pindah prog		pindah prog		
B.2.2.1.2.	URUSAN KESEHATAN				94.742		130.278		120.336		146.144		155.454		187.789		834.743	
	1 Program Pengawasan Obat dan Makanan				246		236		277		295		315		332		1.701	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . persentase penurunan temuan obat berbahaya	belum ada data	< 50%		< 45		< 40		< 35		< 30		< 30		< 30		
		b . persentase	belum ada	< 50%		< 45		< 40		< 35		< 30		< 30		< 30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. penurunan temuan makanan berbahaya c. Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian	data	88,00%		90,00 %		92,00 %		94,00 %		96,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia				554		689		575		585		595		610		3.608	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a. persentase peningkatan jumlah produksi b. persentase peningkatan jumlah varian produk	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%		10,00 % 10,00 %		12,00 % 12,00 %		14,00 % 14,00 %		16,00 % 16,00 %		18,00 % 18,00 %		18,00% 18,00%		
	3 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				5.333		18.060		13.370		30.000		29.000		50.516		146.278	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a. persentase prasarana pelayanan kesehatan RS	66,00%	82,00%		85,00 %		90,00 %		95,00 %		98,00 %		100,00 %		100,00 %		
	4 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				199		326		61		65		245		75		971	PD yang melaksanakan urusan kesehatan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		c . Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	86,38%	80,00%		81,00 %		82,00 %		83,00 %		84,00 %		85,00 %		85,00%		
		d . Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	90,40%	90,50%		90,60 %		90,70 %		90,80 %		90,90 %		90,91 %		90,91%		
		e . Cakupan Kunjungan Bayi	95,08%	97,00%		97,00 %		97,50 %		97,50 %		98,00 %		98,00 %		98,00%		
	5 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				54		54		54		80		85		90		417	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Cakupan pelayanan kesehatan lansia	65,00%	65,00%		65,50 %		66,00 %		66,00 %		67,00 %		67,00 %		67,00%		
	6 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				177		2.014		2.019		2.029		2.039		2.049		10.325	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		b . Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,02%	95,00%		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00%		
		c . Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	99,97%	99,00%		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00 %		99,00%		
	7 Program Peningkatan Pelayanan BLUD				88.180		108.900		103.980		113.090		123.175		134.118		671.443	PD yang melaksanakan urusan kesehatan
		a . Bed Occupancy Rate (BOR) /	68,30%	70%		72%		74%		76%		78%		80%		80%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Tingkat hunian rumah sakit																
		b . Tingkat kematian kurang dari 48 jam	≤ 25 /1000 pasien	≤ 25 /1000 pasien		≤ 24 /1000 pasien		≤ 23 /1000 pasien		≤ 22 /1000 pasien		≤ 21 /1000 pasien		≤ 20 /1000 pasien		≤ 20 /1000 pasien		
		c . Gross death Rate	≤ 45 /1000 pasien	≤ 45 /1000 pasien		≤ 44 /1000 pasien		≤ 43 /1000 pasien		≤ 42 /1000 pasien		≤ 41 /1000 pasien		≤ 40 /1000 pasien		≤ 40 /1000 pasien		
		d . ALOS (Rata2 lama pasien dirawat)	6-9 hari	6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		
		e . Hasil Survey IKM di RSUD Bendan	74,17%	75,00%		76,00 %		77,50 %		79,00 %		80,50 %		82,00 %		82,00%		
		f . Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM	81,50	81,50		82,00		82,50		83,00		83,50		83,50		83,50		
		g . Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar)	Rp. 12,26 Milyar	12,87		13,52		14,19		14,90		15,65		16,43		16,43		
		h . presentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat	52,00%	52,00%		52,02 %		52,05 %		52,08 %		52,13 %		53,00 %		53,00%		
B.2.2.1.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				30.385		31.302		35.606		43.520		56.194		59.769		256.775	
	1 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				1.200		2.100		1.000		1.000		1.057		3.000		9.357	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	69,63%	73,69%		77,75 %		81,81 %		85,87 %		89,93 %		93,99 %		93,99%		
	2 Program Pembangunan				905		1.515		0		0		0		0		2.420	PD yang melaksanakan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Turap/Talud/ Bronjong																	an urusan PU dan Tata Ruang
		a . persentase panjang tebing sungai yang terlindungi	19,70%	21,70%		23,70 %		25,70 %		27,70 %		29,70 %		29,70 %		29,70%		
	3 Program rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan				5.316		3.455		4.500		2.074		2.000		6.100		23.445	PD yang melaksanak an urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	90,25%	85,90%		86,10 %		86,30 %		86,50 %		86,70 %		86,90 %		86,90%		
		b . Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,98%	95,86%		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86%		
	4 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				321		95		205		110		115		120		966	PD yang melaksanak an urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	90,25%	85,90%		86,10 %		86,30 %		86,50 %		86,70 %		86,90 %		86,90%		
		b . Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,98%	95,86%		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86 %		95,86%		
	5 Program Pengembangan Wilayah				5.995		3.050		4.000		4.000		4.845		3.110		25.000	PD yang melaksanak an urusan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Strategis dan Cepat Tumbuh																	PU dan Tata Ruang
		a . persentase titik lampu yang telah bermeterisasi	50,00%	55,00%		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . persentase pembangunan infrastruktur bersumber dari swadaya swasta/masya rakat	0,00%	0,00%		25,00 %		50,00 %		75,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	6 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				15.005		8.640		5.750		5.750		5.750		5.750		46.645	PD yang melaksanak an urusan PU dan Tata Ruang
		a . persentase kenaikan sarpras lingkungan permukiman	50,00%	55,00%		59,00 %		63,00 %		67,00 %		71,00 %		75,00 %		75,00%		
	7 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir				1.643		3.036		1.750		2.750		2.850		0		12.028	PD yang melaksanak an urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase luas wilayah genangan banjir	42,43%	41,33%		39,78 %		37,57 %		36,46 %		32,04 %		32,04 %		32,04%		
	8 Program Perencanaan Tata Ruang				0		0		0		0		0		0		0	PD yang melaksanak an urusan PU dan Tata Ruang
		a . Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai	20,00%	20,00%		60,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b . UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Persentase pengajuan ijin lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang	80,00%	90,00%		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00%		
	9 Program Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan				0		9.412		18.401		27.836		39.577		41.689		136.914	PD yang melaksanakan urusan PU dan Tata Ruang
		a . peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	0 kelrhn	27 kelrhn		27 kelrhn		27 kelrhn		27 kelrhn		27 kelrhn		27 kelrhn		27 kelrhn		
B.2.2.1.4.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				958		876		1.002		2.441		1.131		2.873		9.281	
	1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				572		378		397		1.667		438		2.160		5.612	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton inti linmas kec dan kel)	58,50	58,50		59,60		60,70		61,70		62,70		63,70		63,70		
	2 Program pengembangan wawasan kebangsaan				98		127		133		140		147		154		799	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . persentase penanganan kerawanan	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		sosial																
	3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				190		140		237		244		252		190		1.253	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . persentase penanganan kerawanan sosial	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	4 Program pendidikan politik masyarakat				99		81		85		239		144		218		866	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik	5.000	1.500		1.500		2.000		1.500		1.500		2.000		15.000		
	5 Program pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)				0		150		150		150		150		150		750	PD yang melaksanakan urusan Trantibum dan Linmas
		a . Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun	1.300	1.050		800		550		300		50		0		0		
B.2.2.1.5.	URUSAN SOSIAL				7.006		4.576		5.631		5.611		2.490		2.893		28.208	
	1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				395		339		2.334		2.350		366		384		6.167	PD yang melaksanakan urusan sosial
		a . PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	611		1.222		1.833		2.444		3.055		3.666		3.666		
	2 Program				118		142		89		93		97		102		640	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																	melaksanak an urusan sosial
		a . PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	611		1.222		1.833		2.444		3.055		3.666		3.666		
	3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				1.127		1.242		1.054		1.008		1.018		1.235		6.684	PD yang melaksanak an urusan sosial
		a . persentase pelayanan kesejahteraan sosial	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Terlaksananya a peran serta masy, lembaga masy dan dunia usaha dlm peny kesej sosial.	-	5		10		20		30		40		50		50		
	4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)				5.367		2.853		2.155		2.161		1.010		1.173		14.717	PD yang melaksanak an urusan sosial
		a . Persentase penganggura n yang dilatih		6,24%		12,67 %		19,29 %		26,11 %		33,13 %		40,34 %		40,34%		
B.2.2.2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.518		18.048		20.495		23.408		22.376		23.899		130.744	
B.2.2.2.1.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				58		83		126		124		127		133		650	
	1 Program				33		33		36		37		39		41		218	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan																	melaksanak an urusan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak
		a . persentase pengetahuan anak tentang hak anak	1,00%	1,00%		1,00%		1,50%		2,00%		2,50%		3,00%		3,00%		
	2 Program model operasional BKB Posyandu PADU				25		50		90		87		88		92		432	PD yang melaksanak an urusan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak
		a . persentase jumlah kader posyandu terampil	3,33%	3,33%		18,67 %		20,00 %		20,00 %		20,00 %		20,00 %		20,00%		
B.2.2.2.2.	URUSAN PANGAN				453		860		1.019		1.128		1.253		1.274		5.988	
	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				453		860		1.019		1.128		1.253		1.274		5.988	PD yang melaksanak an urusan Pangan
		a . Persentase lokasi urban farming yang aktif	7,50%	10,00%		13,00 %		16,00 %		19,00 %		22,00 %		25,00 %		25,00%		
		b . Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	≥ 78 %	≥ 79 %		≥ 79,5 %		≥ 80 %		≥ 80,5 %		≥ 81 %		≥ 81,5 %		≥ 81,5 %		
		c . Penanganan Daerah rawan	5,00	7,40		11,10		14,80		18,30		22,20		25,90		25,90		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		d . pangan (%/tahun)	87,88	89,00		89,70		90,40		91,10		91,80		92,50		92,50		
		e . Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi energi	1.932	1.979		2.013		2.047		2.081		2.115		2.150		2.150		
		f . Indeks capaian Konsumsi protein	52,10	53,40		53,72		54,06		54,40		54,74		55,00		55,00		
		g . Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	88,00	89,01		89,90		90,60		91,30		92,00		93,00		93,00		
B.2.2.2.3.	URUSAN PERTANAHAN				11.088		2.768		3.032		3.057		2.032		2.032		24.009	
	1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				10.803		2.483		3.032		3.057		2.032		2.032		23.439	PD yang melaksanakan urusan Pertanahan
		a . persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	55,22%	58,12%		60,95 %		63,85 %		66,74 %		69,64 %		72,54 %		72,54%		
	2 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				285		285		0		0		0		0		570	PD yang melaksanakan urusan Pertanahan
		a . Jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan	100,00%	100,00 %		100,00 %										100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b . Persentase jumlah bidang tanah yang bersertifikat	55,22%	58,12%		60,95 %										60,95%		
B.2.2.2.4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				646		1.680		2.664		4.247		3.797		4.695		17.729	
	1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				270		84		342		342		349		366		1.752	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		a . persentase luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa)	20,00%	30,00%		45,00 %		60,00 %		75,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				53		0		58		64		0		0		174	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		a . Persentase jumlah biopori terbangun	50,00%	58,33%		66,67 %		75,00 %		83,33 %		91,67 %		100,00 %		100,00 %		
	3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan				59		142		130		143		158		173		805	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Lingkungan Hidup																	
		a . persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	25,00%	25,00%		30,00 %		35,00 %		40,00 %		45,00 %		50,00 %		50,00%		
	4 Program peningkatan pengendalian polusi				265		1.454		2.135		3.698		3.291		4.155		14.997	PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		a . Persentase sarana dan prasarana pengendalian polusi	44,00%	44,10%		48,00 %		50,00 %		55,00 %		60,00 %		63,20 %		63,20%		
B.2.2.5.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.302		5.033		5.686		5.891		6.106		6.328		33.345	
	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				3.379		3.443		3.760		3.912		4.073		4.240		22.808	PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		a . persentase kinerja kelembagaan masyarakat	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				139		848		1.025		1.044		1.055		1.067		5.178	PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		a . Tingkat partisipasi masyarakat	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		dalam pembangunan																
	3 Program Pemberdayaan Masyarakat				784		742		900		935		977		1.021		5.359	PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		a . Jumlah karang taruna terbina	51	31		31		31		31		31		31		31		
B.2.2.2.6.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.371		1.274		1.359		1.409		1.429		1.464		8.306	
	1 Program Keluarga Berencana				1.355		1.244		1.329		1.379		1.399		1.434		8.140	PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		a . Angka rata-rata fertilitas penduduk	2,32	2,30		2,29		2,28		2,27		2,26		2,25		2,25		
	2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja				16		30		30		30		30		30		166	PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		b . Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan di bawah umur 20 tahun menjadi 250 kasus	700 kasus	44,44%		55,56 %		66,67 %		77,78 %		88,89 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.2.2.7.	URUSAN PERHUBUNGAN				1.510		2.711		2.594		3.427		3.196		3.459		16.896	
	1 Program				0		818		726		775		847		867		4.031	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																	melaksanak an urusan Perhubung an
		a . Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				1.435		1.543		1.514		2.294		2.237		2.475		11.498	PD yang melaksanak an urusan Perhubung an
		a . meningkatnya jumlah Traffic Light yang terkoordinasi	10	11		12		13		14		15		16		16		
	3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				75		100		104		108		113		117		617	PD yang melaksanak an urusan Perhubung an
		a . persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala	83,75%	83,75%		86,74 %		89,74 %		92,73 %		95,72 %		98,72 %		98,72%		
	4 Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perlintasan sebidang				0		250		250		250		0		0		750	PD yang melaksanak an urusan Perhubung an
		a . Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perlintasan sebidang	0,00%	0,00%		40,00 %		20,00 %		10,00 %		20,00 %		10,00 %		10,00%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		yang lebih representatif																
B.2.2.2.8.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				659		659		474		474		474		474		3.211	
	1 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				53		53		53		53		53		53		315	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		a . Jumlah hasil kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	1		1		1		1		1		1		7		
	2 Program kerjasama informasi dengan mas media				606		606		421		421		421		421		2.896	PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		a . PD yang melakukan kerjasama informasi dengan mass media	50,00%	50,00%	-	60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.2.2.9.	URUSAN KOPERASI DAN UKM				1.195		1.339		1.353		1.416		1.477		1.512		8.291	
	1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif				951		966		1.040		1.090		1.128		1.130		6.304	PD yang melaksanakan urusan Koperasi dan UKM
		a . Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	570	100		100		100		100		100		100		1.170		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		b . Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	115	140		140		140		140		140		140		955		
	2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				245		374		313		326		349		382		1.987	PD yang melaksanakan urusan Koperasi dan UKM
		a . Kenaikan jumlah UMKM c . Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM	22.934 0	23.049 2		23.164 2		23.280 2		23.396 2		23.513 2		23.631 2		23.631 12		
B.2.2.2.10.	URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH				553		517		771		829		945		953		4.567	
	1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				513		477		727		784		897		903		4.300	PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		a . jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)	795,00	860,59		926,18		991,76		1.057,35		1.122,94		1.188,53		1.188,53		
	2 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah				40		40		44		45		49		50		267	PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		a . Ketersediaan informasi potensi dan peluang	3	3		3		3		3		3		3		3		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		investasi																
B.2.2.2.1 1.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				283		800		824		849		875		902		4.533	
	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				283		800		824		849		875		902		4.533	PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan olah raga
		a . Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	67,59%	69,66%		71,72 %		73,79 %		75,86 %		77,93 %		80,00 %		80,00%		
		b . Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	72,97%	75,68%		78,38 %		81,08 %		83,78 %		86,49 %		89,19 %		89,19%		
B.2.2.2.1 2.	URUSAN PERSANDIAN				39		40		44		44		44		44		255	
	1 Program Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan daerah				39		40		44		44		44		44		255	PD yang melaksanakan urusan Persandian
		a . Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaann ya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
B.2.2.2.1 3.	URUSAN KEBUDAYAAN				315		217		425		455		535		565		2.512	
	1 Program				176		176		200		225		250		275		1.302	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya																	melaksanak an urusan Kebudayaan
		a . Lestarnya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan	66,67%	75,00%		79,17 %		83,33 %		87,50 %		91,67 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya				139		41		225		230		285		290		1.210	PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan
		a . Lestarnya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan	66,67%	75,00%		79,17 %		83,33 %		87,50 %		91,67 %		100,00 %		100,00 %		
B.2.2.2.1 4.	URUSAN KEARSIPAN				47		69		126		59		87		65		453	
	1 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				47		69		126		59		87		65		453	PD yang melaksanakan urusan kearsipan
		a . Indeks kepuasan masyarakat	belum ada data	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
B.2.2.3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.998		15.968		6.683		8.105		4.950		5.950		49.653	
B.2.2.3.1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.691		2.627		1.963		3.307		1.667		1.622		12.877	
	1 Program pengembangan budidaya perikanan				1.004		1.745		851		1.750		850		850		7.050	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase kenaikan nilai produksi	Rp. 22,7 M	7,68%		7,68%		8,42%		9,56%		7,42%		7,38%		Rp. 33,6 Milyar		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		perikanan budidaya																
	2 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan				50		25		0		25		0		25		125	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina	230 orang dari 1.512 orang	15,80%		20,00 %		25,00 %		50,00 %		75,00 %		100,00 %		1.512 orang		
	3 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				295		415		330		330		330		415		2.115	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Peningkatan angka ikan konsumsi (kg/kpt/tahun)	22,3 kg/kpt/th	22,75		23,20		23,66		24,14		24,62		26,84		26,84 kg/kpt/h		
		b . persentase kenaikan hasil olahan ikan	Rp. 595 Milyar	2,73%		2,73%		28,60 %		30,10 %		31,60 %		33,20 %		Rp. 791 Milyar		
	4 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan				45		45		0		95		95		0		280	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan	Rp. 595 Milyar	2,73%		2,73%		28,60 %		30,10 %		31,60 %		33,20 %		Rp. 791 Milyar		
	5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan				0		0		50		50		55		55		210	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase	Rp. 187,3 M	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		Rp.		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. kenaikan nilai produksi perikanan tangkap														210 Milyar		
	6 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya				50		0		0		50		50		0		150	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		b . Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina	1.512 orang	15,80%		20,00 %		25,00 %		50,00 %		75,00 %		100,00 %		3.000 orang		
	7 Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan				0		0		500		750		0		0		1.250	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan	Rp. 595 Milyar	2,73%		2,73%		28,60 %		30,10 %		31,60 %		33,20 %		Rp. 791 Milyar		
	8 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan				32		32		32		32		32		32		192	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina	1.512 orang	15,80%		20,00 %		25,00 %		50,00 %		75,00 %		100,00 %		3.000 orang		
	9 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan				185		335		170		170		190		190		1.240	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . Persentase luas lahan pesisir yang	325 Hektar dari 615 Hektar	20,00%		21,00 %		22,00 %		23,00 %		24,00 %		25,00 %		390 Hektar dari		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		terehabilitasi														615 Hektar		
	10 Program Pengembangan Kawasan Pesisir				30		30		30		55		65		55		265	PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		a . persentase kenaikan lahan konservasi pantai	18,70%	19,00%		20,00 %		21,00 %		22,00 %		23,00 %		24,00 %		24,00%		
B.2.2.3.2.	URUSAN PARIWISATA				215		215		395		490		585		630		2.530	
	1 Program pengembangan Kemitraan				215		215		395		490		585		630		2.530	PD yang melaksanakan urusan Pariwisata
		a . Jumlah wisatawan	442.153	450.000		475.000		500.000		525.000		535.000		550.000		550.000		
B.2.2.3.3.	URUSAN PERTANIAN				5.204		4.515		3.469		3.590		2.115		3.094		21.986	
	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				0		25		50		50		70		70		265	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . cakupan pembinaan petani	25 kelompok	25 klp		25 klp		25 klp		25 klp		25 klp		25 klp		25 klp		
	2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				0		38		0		50		0		50		138	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . jumlah even promosi pertanian/perkebunan yang diikuti	1 even	0		2		0		2		0		2		2		
	3 Program peningkatan				30		35		100		100		100		85		450	PD yang melaksanakan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	penerapan teknologi pertanian/perkebunan																	an urusan Pertanian
		a . Persentase peningkatan jumlah teknologi yang digunakan	20,00%	40,00%		60,00 %		80,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				4.559		2.366		2.174		2.175		840		2.124		14.238	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . persentase peningkatan produksi komoditi pertanian	44,18 kwintal/hektar	5,00%		5,00%		5,00%		10,00 %		10,00 %		10,00 %		63,8 kwintal/hektar		
		b . Persentase penggunaan benih unggul dan bermutu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		c . terkendalinya serangan hama Organisme pengganggu tanaman (OPT)	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				55		55		65		65		75		75		390	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . persentase kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	264 kali kunjungan	11,00%		15,00 %		15,00 %		15,00 %		15,00 %		20,00 %		317 kunjungan		
	6 Program				115		125		125		155		170		170		860	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak																	melaksanak an urusan Pertanian
		a . persentase hewan kebal terhadap penyakit	8.118 ekor kebal dari total populasi 276.843 ekor	5,06%		5,42%		5,78%		6,14%		7,22%		25,29 %		70.000 ekor dari total populasi 280.000 ekor		
	7 Program peningkatan produksi hasil peternakan				25		196		155		155		160		160		851	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . Persentase kenaikan hasil produksi peternakan	6.318.647 Kg	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		8.214.241 Kg		
	8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				35		105		40		115		40		235		570	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . persentase kenaikan nilai produksi peternakan	6.318.647 Kg	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		8.214.241 Kg		
	9 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan				385		1.570		760		725		660		125		4.225	PD yang melaksanakan urusan Pertanian
		a . persentase kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan	15 sarpras	13,00%		20,00 %		20,00 %		20,00 %		20,00 %		33,00 %		20 sarpras		
B.2.2.3.4.	URUSAN PERDAGANGAN				758		8.536		540		605		460		470		11.368	
	1 Program				758		8.536		540		605		460		470		11.368	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan																	melaksanak an urusan Perdagang an
		a . Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang b . Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar c . Persentase penyelesaian pengaduan kasus merugikan konsumen ke BPSK	5.000 UTTP 70 obyek (50 produk dan 20 SNI) Jml Pengaduan 22, Penyelesaia n 13 (59%)	5.250 74 60,0%	 77 61,0%	 81 62,0%	 85 63,0%	5.788 81 62,0%	 85 63,0%	6.078 85 63,0%	 89 64,0%	6.381 89 64,0%	 94 65,0%	6.700 94 65,0%	 94 65,00%	6.700 94 65,00%	 94 65,00%	
B.2.2.3.5.	URUSAN PERINDUSTRIAN				0		0		235		27		33		40		335	
	1 Program peningkatan kemampuan teknologi industri				0		0		25		27		33		40		125	PD yang melaksanak an urusan Perindustria n
		a . Jumlah IKM menggunakan Teknologi Tepat Guna	0	0		0		25		25		25		25		100		
	2 Program Penataan Struktur Industri				0		0		210		0		0		0		210	PD yang melaksanak an urusan Perindustria n
		a . Produk Hukum Rencana Induk Pembanguna n Industri Daerah	0	0		0		1		0		0		0		1		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2.2.3.6.	URUSAN TRANSMIGRASI				131		76		81		86		90		94		557	
	1 Program transmigrasi regional				131		76		81		86		90		94		557	PD yang melaksanakan urusan Transmigrasi
		a . Besaran transmigran yang ditempatkan	62 KK	5 KK		5 KK		5 KK		5 KK		5 KK		5 KK		30 KK		
B.2.2.4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.194		4.971		5.492		5.898		5.576		5.601		31.732	
B.2.2.4.1.	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				1.052		1.522		1.805		2.100		1.725		1.735		9.941	
	1 Program pengembangan data/informasi				32		35		35		35		35		35		209	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . persentase ketersediaan data	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		b . Single database daerah	0,00%	0,00%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	2 Program Kerjasama Pembangunan				111		310		360		370		370		380		1.901	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan	7	7		7		7		7		7		7		7		
	3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				120		113		140		100		100		100		673	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a . Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah	2	3		2		2		2		2		3		14		
	4 Program perencanaan pembangunan ekonomi				0		195		250		300		200		200		1.145	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1	0		1		1		1		1		1		5		
	5 Program perencanaan sosial dan budaya				100		90		200		415		200		200		1.205	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	1	1		1		1		1		1		1		6		
	6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				450		484		450		450		500		500		2.834	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan	2	4		2		1		1		1		2		11		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		bidang prasarana wilayah																
	7 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat				239		295		370		430		320		320		1.974	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang perencanaan
		a . Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS	2	3		3		3		3		3		4		19		
B.2.2.4.2.	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				321		442		456		469		483		498		2.669	
	1 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi				321		442		456		469		483		498		2.669	PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
		a . Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard kompetensi	583	245		295		295		295		295		295		1.720		
B.2.2.4.3.	FUNGSI LAINNYA				2.821		3.007		3.231		3.329		3.368		3.368		19.123	
	KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.792		1.973		1.947		2.004		1.996		1.949		11.660	
	1 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				473		552		527		527		527		527		3.133	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a persentase	70,00%	70,00%		72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		. pengaduan masyarakat yang tertangani				%		%		%		%		%				
	2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				12		13		14		15		16		17		87	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan keluarga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Program Penataan tata laksana				311		367		317		347		317		347		2.006	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu	5,36%	1,79%		1,79%		1,79%		1,79%		1,79%		1,79%		16,07%		
	3 Program penataan kelembagaan				521		446		496		446		496		446		2.852	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Persentase PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan	0,00%	18,52%		18,52 %		18,52 %		14,81 %		14,81 %		14,81 %		100,00 %		
	4 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)				250		250		250		250		250		250		1.500	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a Jumlah																

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai	1.200	750		750		750		750		750		750		5.700		
	5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				76		75		75		75		75		75		451	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Persentase kerjasama terfasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	6 Koordinasi Bidang Pemerintahan				149		270		267		344		315		287		1.632	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Persentase kelurahan yang tertib administrasinya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	KOORDINASI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESRA				1.029		1.033		1.285		1.325		1.371		1.419		7.462	
	1 Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat				718		745		842		852		864		876		4.896	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5%	3,46%	<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		
	2 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga				212		234		243		253		263		273		1.476	PD yang melaksanakan Fungsi Lain
		a . Penurunan kasus narkoba	2014 : 25 kasus 2015 : 20	20,00		18		16		14		12		10		10		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		PD PENANGGUNG JAWAB
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			kasus															
	3 Program Pemberdayaan jasa konstruksi				100		55		200		220		245		270		1.090	PD yang melaksanakan an Fungsi Lain
		a . Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
B.2.3.	PENUNJANG PROGRAM PEMERINTAHAN				28.103		25.653		24.012		22.245		20.342		18.292		138.647	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				24.909		24.568		22.927		21.160		19.257		17.207		130.027	Semua Organisasi PD
	2 Program peningkatan disiplin aparatur				1.084		706		706		706		706		706		4.616	Semua Organisasi PD
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.110		379		379		379		379		379		4.003	Semua Organisasi PD
C.	PRIORITAS III			29.578	31.946		33.865		35.925		38.137		40.510		209.961			
	Belanja Hibah				16.309		21.305		23.094		25.012		27.070		29.283		142.073	PPKD
	Belanja Bantuan Sosial				2.769		2.841		2.971		3.113		3.267		3.427		18.388	PPKD
	Belanja Tidak Terduga				3.900		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		18.900	PPKD
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				6.600		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		30.600	PPKD
JUMLAH P1 + P2 + P3				929.212	965.825		997.753		1.023.143		1.086.029		1.128.605		6.130.567			

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Daerah pada dasarnya adalah sebuah alat untuk mengukur suatu kondisi tertentu. Pelaksanaan pembangunan mempunyai dampak yang sangat kompleks, baik dampak tersebut secara langsung oleh suatu upaya pembangunan, ataupun dampak tersebut muncul dalam sebuah hubungan sistem yang saling terkait dan bersinergi.

Indikator kinerja daerah dapat berupa indikator kinerja sasaran. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan. Secara lengkap indikator tersebut tertuang pada Tabel 9.1 sebagai berikut

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
<i>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</i>								
- Pertumbuhan Ekonomi	5,48%	5,50%	5,50%	5,60%	5,60%	5,70%	5,70%	5,70%
- IPM	71,53	71,79	72,77	73,78	74,81	75,85	76,90	76,90
- Indeks Gini	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
- Pengeluaran Perkapita (Rp.)	11.748.000	12.081.643	12.424.762	12.777.625	13.140.510	13.513.700	13.897.489	13.897.489
- Angka Kemiskinan	8,02%	7,65%	7,28%	6,90%	6,53%	6,16%	5,79%	5,79%
<i>FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</i>								
- Usia Harapan Hidup (UHH)	74,09	74,18	74,23	74,27	74,32	74,36	74,41	74,41
- Angka Harapan Sekolah (Expected Years Of Schooling)	12,59	12,13	12,34	12,55	12,77	12,99	13,21	13,21
- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,28	8,30	8,44	8,60	8,76	8,92	9,08	9,08
- Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,50%
- Persentase PAD terhadap APBD	16,94%	17,28%	18,23%	19,37%	20,76%	21,50%	22,76%	22,76%
B ASPEK PELAYANAN UMUM								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
<i>URUSAN KETENAGAKERJAAN</i>								
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,50%
<i>URUSAN PENDIDIKAN</i>								
- Rata-rata partisipasi sekolah	88,74%	88,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
- Rata-rata rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar berakreditasi A	48,12%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
- Persentase guru yang memenuhi standar minimal nilai UKG	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	72,00%	75,00%	75,00%
<i>URUSAN KESEHATAN</i>								
- Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	118	118	115	110	105	102	102	102
- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10	10	10	10	10	10	10	10
- Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	13	13	12	12	12	12	12	12
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD RSUD dan PUSKESMAS	82	82	82	82	82	83	83	83
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di BLUD BKPM	82	82	82	82	82	83	83	83
- Persentase sarana prasarana pelayanan publik ramah difable yang dibangun	0,00%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
- Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	42,43%	41,33%	39,78%	37,57%	36,46%	32,04%	32,04%	32,04%
- Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	79,47%	85,90%	86,10%	86,30%	86,50%	86,70%	86,90%	86,90%
- Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,98%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%	95,86%
- Persentase sawah terlayani jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	0,00%	14,29%	42,86%	57,14%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%
- Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus).	0,00%	7,00%	29,00%	43,00%	71,00%	86,00%	100,00%	100,00%
- Persentase akses air minum yang aman dibagi jumlah penduduk	82,14%	85,12%	88,10%	91,07%	94,05%	97,02%	100,00%	100,00%
- Persentase luasan kawasan kumuh	7,03%	5,28%	4,40%	3,53%	2,65%	1,77%	0,90%	0,90%
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS								
- Cakupan pelayanan bencana	81,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
- persentase penegakan perda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
URUSAN SOSIAL								
- Persentase PMKS tertangani	Jumlah PMKS non fakir miskin sebanyak 8.795	6,95%	13,89%	20,84%	27,79%	34,74%	41,68%	41,68%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95	95	95	95	95	95	95	95
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64	64	64	64	64	64	65	65
- Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,093%	0,087%	0,081%	0,075%	0,069%	0,064%	0,059%	0,059%
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
- Persentase cakupan pelayanan sampah	80,40%	80,40%	80,43%	86,27%	86,28%	93,42%	93,43%	93,43%

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>								
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	84,61%	86,50%	87,00%	87,50%	90,00%	92,50%	95,00%	95,00%
<i>URUSAN PERHUBUNGAN</i>								
Volume-Demand-to-Capacity Ratio (VC Rasio)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,52	0,52	0,52
<i>URUSAN KOPERASI DAN UKM</i>								
- Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	48,72%	57,26%	65,81%	74,36%	82,91%	91,45%	100,00%	100,00%
- Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)	7,90	8,14	8,38	8,63	8,89	9,16	9,43	9,72
<i>URUSAN KEARSIPAN</i>								
- persentase arsip PD terkelola secara baku	64,71%	67,65%	70,59%	73,53%	76,47%	79,41%	82,35%	82,35%
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
<i>FUNGSI PERENCANAAN</i>								
- Tingkat capaian kinerja pembangunan	-	85,00%	90,00%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	96,00%
<i>FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>								
- Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	25,00%	38,00%	39,00%	34,00%	35,00%	39,00%	44,00%	44,00%
- persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C ASPEK DAYA SAING								
<i>FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH</i>								
- Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun	67,37%	72,93%	78,49%	84,05%	89,61%	95,16%	100,00%	100,00%
- Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar	76,36%	89,09%	90,91%	92,73%	94,55%	96,36%	100,00%	100,00%
- Persentase peningkatan nilai produksi perikanan	Rp. 210 Milyar	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	12,00%
- persentase peningkatan pendapatan asli daerah	Rp. 152 Milyar	5,29%	9,70%	9,76%	9,87%	9,96%	10,00%	54,58%
- nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	17,38	17,73	18,09	18,45	18,82	19,19	19,58	19,58
<i>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</i>								
Persentase limbah cair industri terolah.	42,59%	43,11%	44,46%	57,23%	60,66%	64,73%	70,06%	70,06%
cakupan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.	-	10	10	10	10	10	10	60
- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi SIM dalam tata kelola administrasi perkantoran.	43,33%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
- Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah pemanfaat aplikasi pasar on-line hasil inisiasi bersama komunitas	-	20	20	20	20	20	20	120

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dengan Pemerintah Kota Pekalongan								
Persentase sarana budaya per jumlah kelompok kesenian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
persentase peningkatan penyelenggaraan festival	16	12,50%	18,75%	25,00%	31,25%	37,50%	50,00%	50% (24 event)
- Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
- Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	0,00%	85,71%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun	80,39%	81,82%	86,36%	90,91%	95,45%	97,27%	100,00%	100,00%
- Pertumbuhan IKM Batik	861 IKM	1,16%	1,15%	1,14%	1,12%	1,11%	1,10%	6,77%
- Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
- Persentase IKM dalam LIK	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	C	C	CC	B	B	B	B	B
- Opini BPK terhadap LKD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
- Tingkat maturitas SPIP	Level 0	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
- Level kapabilitas APIP	Level 0	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
- Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif potensial	0,00%	16,60%	33,20%	50,00%	67,00%	83,00%	100,00%	100,00%
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA								
- Jumlah siswa berprestasi di tingkat Provinsi dan nasional	12	13	14	15	16	17	18	18
- Persentase kenaikan pendaftar ibadah haji	823	3,28%	8,02%	12,27%	16,65%	21,26%	21,51%	21,51%
- Tingkat partisipasi pemuda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Jumlah siswa berprestasi di bidang olah raga tingkat Provinsi dan Nasional	54	55	56	57	58	59	60	60
- Persentase penurunan angka fertilitas penduduk	2,32	0,86%	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	3,06% (2,25)
- persentase kehamilan pada usia < 19 tahun	2,82%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	1,80%	1,60%	1,60%
- Persentase penurunan kasus narkoba	25 kasus	20,00%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	60% (menjadi 10 kasus)
- Persentase capaian target peningkatan jumlah penghargaan ASN sebanyak 72 orang	6 orang	13,89%	27,78%	44,44%	61,11%	80,56%	100,00%	100,00%
- Rasio ASN yang melanggar disiplin tiap 10.000 ASN	33,65	17,74	15,56	13,34	10,93	8,51	5,83	5,83

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah Pelaksanaan

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pekalongan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kota Pekalongan.

BAB XI. PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pekalongan disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan ke dalam system pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Walikota dan Wakil juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2015). Kota Pekalongan Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2015). Jawa Tengah Dalam Angka.
- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. (2016). Profil Kesehatan Kota Pekalongan.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2016). Profil Pendidikan Kota Pekalongan.
- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan (2016)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;